



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR LAPORAN KEUANGAN AUDITED TAHUN ANGGARAN 2023



KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2024



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	xii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	xiii
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	xiv
NERACA	xv
LAPORAN OPERASIONAL	xvii
LAPORAN ARUS KAS	xviii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	4
BAB II ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH, EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	7
2.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	7
2.2 Ekonomi Makro	7
2.2.1 Tingkat Kemiskinan	7
2.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka	9
2.2.3 Indeks Gini (Gini Ratio).....	10
2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	12
2.2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	13
2.2.6 Inflasi.....	14
2.2.7 Pertumbuhan PDRB	15
2.2.8 Struktur Perekonomian.....	25
2.2.9 PDRB Perkapita	27
2.3 Kebijakan Keuangan.....	29
2.3.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah.....	29
2.3.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah.....	32

2.3.3	Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah	33
2.4	Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	34
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....		37
3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	37
3.1.1	Pendapatan Daerah.....	37
3.1.2	Belanja Daerah	38
3.1.3	Pembiayaan Daerah.....	39
3.2	Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	40
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....		42
4.1	Basis Akuntansi yang Mendasari Laporan Keuangan	42
4.2	Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	42
4.3	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	42
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....		52
5.1	PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	52
5.1.1	PENDAPATAN	52
5.1.2	BELANJA	67
5.1.3.1.	Penerimaan Pembiayaan.....	82
5.1.3.2.	Pengeluaran Pembiayaan.....	82
5.2	PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	84
5.3	PENJELASAN POS-POS NERACA	87
5.4	PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	158
5.5	PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS	189
5.6	PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	196
BAB VI PENUTUP		203

DAFTAR TABEL

Tabel 2 . 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjar.....	8
Tabel 2 . 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Banjar	8
Tabel 2 . 3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Banjar	9
Tabel 2 . 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjar	9
Tabel 2 . 5 Gini Ratio	10
Tabel 2 . 6 Indeks Pembangunan Manusia.....	12
Tabel 2 . 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar.....	14
Tabel 2 . 8 Tingkat Inflasi Kabupaten Banjar Menggunakan Pendekatan Inflasi Kota Banjarmasin	15
Tabel 2 . 9 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar, 2018-2023 atas dasar Harga Konstan (Tahun Dasar 2010).....	24
Tabel 2 . 10 PDRB Kabupaten Banjar atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2018-2023	25
Tabel 2 . 11 Distribusi PDRB Kabupaten Banjar Atas Dasar Harga Berlaku, 2018-2023 (Persen)	27
Tabel 2 . 12 PDRB Perkapita Kabupaten Banjar, 2018-2023 (Ribu Rupiah)	29
Tabel 4 . 1 Masa Manfaat Aset Tetap	47
Tabel 5 . 1 Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	52
Tabel 5 . 2 Pendapatan	53
Tabel 5 . 3 Pajak Daerah	53
Tabel 5 . 4 Rincian Pajak Daerah.....	53
Tabel 5 . 5 Dasar hukum atas pemungutan pajak daerah Kabupaten Banjar	54
Tabel 5 . 6 Retribusi Daerah.....	55
Tabel 5 . 7 Rincian Retribusi Daerah	55
Tabel 5 . 8 Dasar hukum atas pemungutan retribusi daerah Kabupaten Banjar.....	56
Tabel 5 . 9 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disisahkan	57
Tabel 5 . 10 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Lembaga Keuangan).....	57
Tabel 5 . 11 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Aneka Usaha)	58
Tabel 5 . 12 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	58
Tabel 5 . 13 Dasar Hukum atas pemungutan bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD	59
Tabel 5 . 14 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	59
Tabel 5 . 15 Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	59
Tabel 5 . 16 Pendapatan Transfer.....	61
Tabel 5 . 17 Dana Perimbangan	61
Tabel 5 . 18 Dana Bagi Hasil Pajak	61

Tabel 5 . 19 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak	61
Tabel 5 . 20 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam).....	62
Tabel 5 . 21 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam).....	62
Tabel 5 . 22 Dana Alokasi Umum.....	63
Tabel 5 . 23 Dana Alokasi Khusus	63
Tabel 5 . 24 Rincian Dana Alokasi Khusus.....	63
Tabel 5 . 25 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	65
Tabel 5 . 26 Dana Insentif Daerah.....	65
Tabel 5 . 27 Dana Desa	65
Tabel 5 . 28 Transfer Pemerintah Provinsi.....	66
Tabel 5 . 29 Bagi Hasil Pajak.....	66
Tabel 5 . 30 Rincian Bagi Hasil Pajak.....	66
Tabel 5 . 31 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	67
Tabel 5 . 32 Belanja.....	67
Tabel 5 . 33 Belanja Operasi	67
Tabel 5 . 34 Belanja Pegawai	67
Tabel 5 . 35 Rincian Belanja Pegawai.....	68
Tabel 5 . 36 Belanja Barang dan Jasa.....	68
Tabel 5 . 37 Belanja Barang	68
Tabel 5 . 38 Rincian Belanja Barang.....	68
Tabel 5 . 39 Belanja Jasa	69
Tabel 5 . 40 Rincian Belanja Jasa.....	69
Tabel 5 . 41 Belanja Pemeliharaan.....	70
Tabel 5 . 42 Rincian Belanja Pemeliharaan	70
Tabel 5 . 43 Belanja Perjalanan Dinas	70
Tabel 5 . 44 Rincian Belanja Perjalanan Dinas	71
Tabel 5 . 45 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	71
Tabel 5 . 46 Belanja Barang dan Jasa BOS.....	71
Tabel 5 . 47 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS	71
Tabel 5 . 48 Belanja Barang dan Jasa BLUD.....	71
Tabel 5 . 49 Belanja Barang dan Jasa BLUD.....	71
Tabel 5 . 50 Belanja Hibah.....	72
Tabel 5 . 51 Rincian Belanja Hibah	72
Tabel 5 . 52 Belanja Bantuan Sosial.....	73
Tabel 5 . 53 Rincian Belanja Bantuan Sosial	73
Tabel 5 . 54 Belanja Modal	74
Tabel 5 . 55 Belanja Modal Tanah	74
Tabel 5 . 56 Rincian Belanja Modal Tanah.....	74
Tabel 5 . 57 Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	75

Tabel 5 . 58 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75
Tabel 5 . 59 Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	76
Tabel 5 . 60 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76
Tabel 5 . 61 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	77
Tabel 5 . 62 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	77
Tabel 5 . 63 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.....	78
Tabel 5 . 64 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	78
Tabel 5 . 65 Belanja Modal Aset Lainnya.....	78
Tabel 5 . 66 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya	78
Tabel 5 . 67 Belanja Tidak Terduga	79
Tabel 5 . 68 Belanja Transfer	79
Tabel 5 . 69 Belanja Bagi Hasil.....	80
Tabel 5 . 70 Belanja Bantuan Keuangan	80
Tabel 5 . 71 Transfer Bantuan Keuangan Umum Antar Kabupaten/Kota ke Desa.....	81
Tabel 5 . 72 Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	81
Tabel 5 . 73 Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa.....	81
Tabel 5 . 74 Pembiayaan	82
Tabel 5 . 75 Penerimaan Pembiayaan	82
Tabel 5 . 76 Rincian Penerimaan Pembiayaan	82
Tabel 5 . 77 Pengeluaran Pembiayaan.....	82
Tabel 5 . 78 Rincian Pengeluaran Pembiayaan	83
Tabel 5 . 79 SiLPA.....	83
Tabel 5 . 80 SiLPA yang dibatasi Penggunaannya	83
Tabel 5 . 81 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	84
Tabel 5 . 82 Saldo Anggaran Lebih Awal	85
Tabel 5 . 83 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	86
Tabel 5 . 84 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir	86
Tabel 5 . 85 Pos-Pos Neraca.....	87
Tabel 5 . 86 Aset	88
Tabel 5 . 87 Kas.....	88
Tabel 5 . 88 Kas di Kas Daerah.....	89
Tabel 5 . 89 Kas di Badan Layanan Umum Daerah.....	90
Tabel 5 . 90 Kas di Bendahara Dana Kapitasi/JKN	91
Tabel 5 . 91 Kas di Bendahara Dana Kapitasi/JKN - Dana BOK	92
Tabel 5 . 92 Kas di Bendahara Dana BOS	92
Tabel 5 . 93 Piutang.....	93
Tabel 5 . 94 Piutang Pajak.....	94
Tabel 5 . 95 Rincian Piutang Pajak	94
Tabel 5 . 96 Piutang PBB-P2 dan PPJU	94

Tabel 5 . 97 Penyisihan Piutang Pajak	96
Tabel 5 . 98 Piutang Pajak Neto	96
Tabel 5 . 99 Piutang Retribusi	97
Tabel 5 . 100 Penyisihan Piutang Retribusi	97
Tabel 5 . 101 Piutang Retribusi Neto	97
Tabel 5 . 102 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	98
Tabel 5 . 103 Piutang atas Klaim BPJS	99
Tabel 5 . 104 Dana Perkuatan Modal Kerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	99
Tabel 5 . 105 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	100
Tabel 5 . 106 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	100
Tabel 5 . 107 Piutang Transfer - Pemerintah Daerah Lainnya	101
Tabel 5 . 108 Rincian Piutang Transfer - Pemerintah Daerah Lainnya	101
Tabel 5 . 109 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	101
Tabel 5 . 110 Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	102
Tabel 5 . 111 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	102
Tabel 5 . 112 Persediaan	103
Tabel 5 . 113 Investasi Jangka Panjang	104
Tabel 5 . 114 Investasi Permanen	104
Tabel 5 . 115 Perhitungan nilai investasi pada PT Bank Kalsel	105
Tabel 5 . 116 Penyertaan Modal pada PT. Air Minum Intan Banjar	106
Tabel 5 . 117 Penyertaan Modal pada PT. Baramarta	107
Tabel 5 . 118 Penyertaan Modal pada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera	108
Tabel 5 . 119 Penyertaan Modal pada PD Pasar Bauntung Batuah	109
Tabel 5 . 120 Aset Tetap	111
Tabel 5 . 121 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah	112
Tabel 5 . 122 Mutasi antar SKPD - Aset Tetap Tanah	113
Tabel 5 . 123 Aset Belum Tercatat/Catat Baru - Aset Tetap Tanah	113
Tabel 5 . 124 Penambahan karena Hibah - Aset Tetap Tanah	113
Tabel 5 . 125 Belanja Modal Aset Tetap Tanah tidak masuk kategori Aset - Aset Tetap Tanah	114
Tabel 5 . 126 Pengurangan karena Penghapusan - Aset Tetap Tanah	114
Tabel 5 . 127 Pengurangan karena Reklasifikasi ke Properti Investasi - Aset Tetap Tanah	114
Tabel 5 . 128 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	114
Tabel 5 . 129 Mutasi antar SKPD - Aset Tetap Peralatan dan Mesin	116
Tabel 5 . 130 Penambahan karena Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi - Aset Tetap Peralatan dan Mesin	117
Tabel 5 . 131 Penambahan karena Hibah - Aset Tetap Peralatan dan Mesin	117
Tabel 5 . 132 Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan - Aset Tetap Peralatan dan Mesin	118
Tabel 5 . 133 Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan - Aset Tetap Peralatan dan Mesin	118
Tabel 5 . 134 Penambahan karena Belanja Barang dan Jasa berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin ..	118

Tabel 5 . 135 Pengurangan karena Belanja Modal bukan kategori Aset Tetap Peralatan dan Mesin	119
Tabel 5 . 136 Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya	120
Tabel 5 . 137 Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Ekstrakomtable.....	120
Tabel 5 . 138 Pengurangan Peralatan dan Mesin karena Hibah	121
Tabel 5 . 139 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	122
Tabel 5 . 140 Mutasi Antar SKPD - Aset Tetap Gedung dan Bangunan	123
Tabel 5 . 141 Penambahan karena Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	123
Tabel 5 . 142 Penambahan karena Hibah.....	124
Tabel 5 . 143 Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan .	124
Tabel 5 . 144 Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	124
Tabel 5 . 145 Penambahan karena Belanja Barang dan Jasa berupa Aset Tetap Gedung dan Bangunan	125
Tabel 5 . 146 Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	126
Tabel 5 . 147 Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	126
Tabel 5 . 148 Reklasifikasi ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	126
Tabel 5 . 149 Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya.....	126
Tabel 5 . 150 Reklasifikasi ke Aset Lainnya.....	126
Tabel 5 . 151 Pengurangan karena Reklasifikasi ke Properti Investasi - Aset Tetap Gedung dan Bangunan	127
Tabel 5 . 152 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	127
Tabel 5 . 153 Penambahan karena Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	129
Tabel 5 . 154 Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	129
Tabel 5 . 155 Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	129
Tabel 5 . 156 Penambahan karena Belanja Barang dan Jasa berupa Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	129
Tabel 5 . 157 Pengurangan karena Belanja Modal bukan kategori Aset Tetap.....	129
Tabel 5 . 158 Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	130
Tabel 5 . 159 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya.....	130
Tabel 5 . 160 Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Aset Tetap Lainnya	131
Tabel 5 . 161 Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud.....	132
Tabel 5 . 162 Reklasifikasi ke Ekstrakomtable	132
Tabel 5 . 163 Pengurangan karena Belanja Modal bukan kategori Aset Tetap Lainnya	132
Tabel 5 . 164 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	133
Tabel 5 . 165 Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Konstruksi Dalam Pengerjaan....	134
Tabel 5 . 166 Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	134
Tabel 5 . 167 Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	134
Tabel 5 . 168 Akumulasi Penyusutan.....	135
Tabel 5 . 169 Akumulasi Penyusutan per KIB - per SKPD	135

Tabel 5 . 170 Aset Lainnya	137
Tabel 5 . 171 Tagihan Penjualan Angsuran	138
Tabel 5 . 172 Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	139
Tabel 5 . 173 Penyisihan Tuntutan Perbendaharaan	140
Tabel 5 . 174 Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	140
Tabel 5 . 175 Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	141
Tabel 5 . 176 Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi Neto	143
Tabel 5 . 177 Aset Tak Berwujud.....	144
Tabel 5 . 178 Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	145
Tabel 5 . 179 Penambahan karena Belanja Barang dan Jasa berupa Aset Tak Berwujud.....	145
Tabel 5 . 180 Aset Tak Berwujud per SKPD	145
Tabel 5 . 181 Amortisasi Aset Tak Berwujud	146
Tabel 5 . 182 Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain	149
Tabel 5 . 183 Mutasi Antar SKPD - Aset Lain-Lain.....	149
Tabel 5 . 184 Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin - Aset Lain-Lain.....	149
Tabel 5 . 185 Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan - Aset Lain-Lain.....	150
Tabel 5 . 186 Pengurangan karena Penghapusan	150
Tabel 5 . 187 Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan - Aset Lain-Lain	151
Tabel 5 . 188 Dana <i>Transfer Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	151
Tabel 5 . 189 Properti Investasi Tanah.....	152
Tabel 5 . 190 Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah	152
Tabel 5 . 191 Properti Investasi Gedung dan Bangunan	153
Tabel 5 . 192 Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	153
Tabel 5 . 193 Kewajiban Jangka Pendek.....	154
Tabel 5 . 194 Pendapatan Diterima di Muka.....	154
Tabel 5 . 195 Utang Belanja.....	155
Tabel 5 . 196 Rincian Utang Belanja	156
Tabel 5 . 197 Utang Jangka Pendek Lainnya	157
Tabel 5 . 198 Ekuitas.....	157
Tabel 5 . 199 Kewajiban dan Ekuitas	158
Tabel 5 . 200 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	158
Tabel 5 . 201 Pendapatan - LO.....	159
Tabel 5 . 202 Pendapatan Asli Daerah - LO.....	159
Tabel 5 . 203 Pendapatan Asli Daerah - LO per SKPD	159
Tabel 5 . 204 Pajak Daerah - LO.....	160
Tabel 5 . 205 Penjelasan Pajak Daerah - LO.....	161
Tabel 5 . 206 Retribusi - LO	161
Tabel 5 . 207 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO.....	163
Tabel 5 . 208 Penjelasan atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO .	163

Tabel 5 . 209 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	164
Tabel 5 . 210 Penjelasan atas Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	168
Tabel 5 . 211 Pendapatan Transfer - LO	168
Tabel 5 . 212 Dana Perimbangan - LO.....	169
Tabel 5 . 213 Dana Bagi Hasil Pajak - LO.....	169
Tabel 5 . 214 Penjelasan atas Dana Bagi Hasil Pajak - LO.....	169
Tabel 5 . 215 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO	170
Tabel 5 . 216 Penjelasan atas Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)-LO.....	170
Tabel 5 . 217 Dana Alokasi Khusus	171
Tabel 5 . 218 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO	173
Tabel 5 . 219 Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	173
Tabel 5 . 220 Penjelasan atas Bagi Hasil Pajak-LO	173
Tabel 5 . 221 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO.....	174
Tabel 5 . 222 Penjelasan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO.....	174
<i>Tabel 5 . 223 Beban.....</i>	<i>175</i>
Tabel 5 . 224 Beban Pegawai	175
Tabel 5 . 225 Penjelasan Beban Pegawai – LO.....	176
Tabel 5 . 226 Beban Persediaan	176
Tabel 5 . 227 Penjelasan Beban Persediaan	176
Tabel 5 . 228 Beban Jasa.....	177
Tabel 5 . 229 Penjelasan Beban Jasa.....	177
Tabel 5 . 230 Beban Pemeliharaan.....	178
Tabel 5 . 231 Penjelasan Beban Pemeliharaan.....	178
Tabel 5 . 232 Beban Perjalanan Dinas	179
Tabel 5 . 233 Penjelasan Beban Perjalanan Dinas	179
Tabel 5 . 234 Beban Hibah.....	179
Tabel 5 . 235 Penjelasan Beban Hibah.....	180
Tabel 5 . 236 Beban Subsidi.....	181
Tabel 5 . 237 Penjelasan Beban Subsidi.....	181
Tabel 5 . 238 Beban Bantuan Sosial.....	181
Tabel 5 . 239 Penjelasan Beban Bantuan Sosial	182
Tabel 5 . 240 Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	182
Tabel 5 . 241 Beban Penyisihan Piutang.....	182
Tabel 5 . 242 Beban Lain-lain.....	183
Tabel 5 . 243 beban lain-lain yang merupakan Aset Ekstrakomtable per SKPD.....	183
Tabel 5 . 244 Beban Bagi Hasil.....	185
Tabel 5 . 245 Beban Bantuan Keuangan	185
Tabel 5 . 246 Penjelasan Beban Bantuan Keuangan	185
Tabel 5 . 247 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	186

Tabel 5 . 248 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO.....	186
Tabel 5 . 249 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO.....	187
Tabel 5 . 250 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	187
Tabel 5 . 251 Defisit Non-Operasional Lainnya-LO.....	188
Tabel 5 . 252 Surplus/Defisit – LO	188
Tabel 5 . 253 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas.....	189
Tabel 5 . 254 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	190
Tabel 5 . 255 Arus masuk kas dari aktivitas operasi	190
Tabel 5 . 256 Arus keluar kas dari aktivitas operasi	191
Tabel 5 . 257 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan.....	191
Tabel 5 . 258 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan	192
Tabel 5 . 259 Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan	192
Tabel 5 . 260 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan.....	193
Tabel 5 . 261 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran.....	193
Tabel 5 . 262 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	194
Tabel 5 . 263 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	195
Tabel 5 . 264 Saldo awal kas di BUD, BLUD dan Dana Kapitasi/JKN dan Dana BOS.....	195
Tabel 5 . 265 Saldo Akhir Kas	196
Tabel 5 . 266 Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	196
Tabel 5 . 267 Surplus/Defisit – LO	197
Tabel 5 . 268 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	198
Tabel 5 . 269 Koreksi Ekuitas – Aset Tetap.....	199
Tabel 5 . 270 Koreksi Ekuitas - Lainnya.....	200



BUPATI BANJAR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.



Martapura, 30 April 2024

BUPATI BANJAR,

H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom

Laporan Realisasi Anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	CaLK	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.a	96.196.000.000,00	109.824.795.009,00	114,17	93.731.388.091,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	8.263.062.975,00	8.367.069.839,00	101,26	6.599.136.034,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.c	11.083.090.240,00	8.916.250.334,00	80,45	7.167.770.066,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.d	134.757.846.785,00	150.833.459.844,04	111,93	94.011.058.809,77
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		250.300.000.000,00	277.941.575.026,04	111,04	201.509.353.000,77
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.1				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	33.740.312.000,00	36.971.401.241,00	109,58	30.260.339.373,00
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.1.2.1.2	520.181.800.000,00	564.917.111.162,00	108,60	544.605.075.302,00
12	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	720.930.446.000,00	720.866.934.775,00	99,99	672.370.620.442,00
13	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	358.265.891.000,00	341.356.453.666,00	95,28	302.021.213.716,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.633.118.449.000,00	1.664.111.900.844,00	101,90	1.549.257.248.833,00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.2				
16	Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.2.1	0,00	5.672.424.000,00		0,00
17	Dana Desa	5.1.1.2.2.2	222.580.763.000,00	222.580.763.000,00	100,00	213.931.343.800,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		222.580.763.000,00	228.253.187.000,00	102,55	213.931.343.800,00
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.1.2.3				
20	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.3.1	123.230.277.838,00	188.402.649.001,00	152,89	172.130.565.844,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		123.230.277.838,00	188.402.649.001,00	152,89	172.130.565.844,00
22	Total Pendapatan Transfer		1.978.929.489.838,00	2.080.767.736.845,00	105,15	1.935.319.158.477,00
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3				
24	Pendapatan Hibah		3.036.000.000,00	2.444.000.000,00	80,50	1.284.000.000,00
25	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		3.036.000.000,00	2.444.000.000,00	80,50	1.284.000.000,00
26	JUMLAH PENDAPATAN		2.232.265.489.838,00	2.361.153.311.871,04	105,77	2.138.112.511.477,77
27	BELANJA	5.1.2				
28	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
29	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	1.006.647.534.561,00	806.633.031.475,00	80,13	764.955.869.085,00
30	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	658.359.359.216,00	604.259.697.529,02	91,78	486.586.621.120,00
31	Belanja Hibah	5.1.2.1.c	90.250.288.544,00	88.112.346.572,00	97,63	47.840.575.664,00
32	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.d	5.090.693.550,00	5.016.009.329,00	98,53	10.667.986.500,00
33	Jumlah Belanja Operasi		1.760.347.875.871,00	1.504.021.084.905,02	85,44	1.310.051.052.369,00
34	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
35	Belanja Tanah	5.1.2.2.a	8.720.000.000,00	5.332.333.880,00	61,15	1.561.416.000,00
36	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	105.589.831.537,00	92.930.369.497,00	88,01	55.895.634.639,00
37	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	84.364.027.489,00	78.000.133.887,96	92,46	39.452.963.723,00
38	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.d	214.563.157.164,00	198.503.513.797,00	92,52	98.293.080.931,57
39	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	1.301.481.640,00	1.287.834.008,00	98,95	2.274.395.769,00
40	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.f	315.000.000,00	314.900.000,00	99,97	0,00
41	Jumlah Belanja Modal		414.853.497.830,00	376.369.085.069,96	90,72	197.477.491.062,57
42	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3				
43	Belanja Tidak Terduga		8.000.000.000,00	5.889.091.877,00	73,61	5.724.660.447,00
44	Jumlah Belanja Tidak Terduga		8.000.000.000,00	5.889.091.877,00	73,61	5.724.660.447,00
45	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
46	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.a	8.916.525.800,00	8.508.135.897,00	95,42	12.138.437.549,00
47	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.b	367.517.231.620,00	367.089.196.864,00	99,88	327.990.432.612,00
48	Jumlah Belanja Transfer		376.433.757.420,00	375.597.332.761,00	99,78	340.128.870.161,00
49	JUMLAH BELANJA		2.559.635.131.121,00	2.261.876.594.612,98	88,37	1.853.382.074.039,57
50	SURPLUS(DEFISIT)		(327.369.641.283,00)	99.276.717.258,06	(30,33)	284.730.437.438,20
51	PEMBIAYAAN	5.1.3				
52	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1				
53	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya		363.419.641.283,00	363.419.641.282,83	100,00	97.389.203.844,63
54	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	2.473.976.000,00		0,00
55	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		363.419.641.283,00	365.893.617.282,83	100,68	97.389.203.844,63
56	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2				
57	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		36.050.000.000,00	36.050.000.000,00	100,00	16.700.000.000,00
58	Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00		2.000.000.000,00
59	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		36.050.000.000,00	36.050.000.000,00	100,00	18.700.000.000,00
60	PEMBIAYAAN NETO		327.369.641.283,00	329.843.617.282,83	100,76	78.689.203.844,63
61	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	5.1.4	0,00	429.120.334.540,89		363.419.641.282,83

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Martapura, 30 April 2024
BUPATI BANJAR

H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	CaLK	2023	2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	363.419.641.282,83	97.389.203.844,63
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	363.419.641.282,83	97.389.203.844,63
3	Sub Total		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	429.120.334.540,89	363.419.641.282,83
5	Sub Total		429.120.334.540,89	363.419.641.282,83
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	0,00	0,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	Sub Total		0,00	0,00
9	Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.5	429.120.334.540,89	363.419.641.282,83

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Martapura, 30 April 2024

BUPATI BANJAR

H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom

Neraca



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
NERACA

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	CaLK	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	ASET	5.3.1		
2	ASET LANCAR	5.3.1.1		
3	Kas	5.3.1.1.1	429.120.334.540,89	363.419.641.282,83
4	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.a	357.294.953.214,47	314.258.119.368,11
5	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.b	0,00	0,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.c	0,00	6.628.878,00
7	Kas BLUD	5.3.1.1.1.d	67.791.212.262,42	48.951.658.480,72
8	Kas di Bendahara Dana Kapitasi/JKN	5.3.1.1.1.e	4.025.982.449,00	115.141.842,00
9	Kas di Bendahara Dana BOS	5.3.1.1.1.f	8.186.615,00	88.092.714,00
10	Kas Lainnya	5.3.1.1.1.g	0,00	0,00
11	Investasi Jangka Pendek	5.3.1.1.2	0,00	0,00
12	Piutang	5.3.1.1.3	103.738.456.739,23	121.906.683.067,49
13	Piutang Pajak	5.3.1.1.3.a	81.810.616.065,00	74.168.733.331,00
14	Penyisihan Piutang Pajak	5.3.1.1.3.a.1	(53.062.981.517,81)	(49.163.006.257,58)
15	Piutang Pajak Netto		28.747.634.547,19	25.005.727.073,42
16	Piutang Retribusi	5.3.1.1.3.b	30.160.200,00	30.160.200,00
17	Penyisihan Piutang Retribusi	5.3.1.1.3.b.1	(30.160.200,00)	(30.160.200,00)
18	Piutang Retribusi Netto		0,00	0,00
19	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	5.3.1.1.3.c	10.006.549.342,00	12.434.410.086,42
20	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	5.3.1.1.3.c.1	(594.739.481,96)	(635.268.939,35)
21	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Netto		9.411.809.860,04	11.799.141.147,07
22	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.3.1.1.3.d	14.032.962.404,00	33.584.588.226,00
23	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.1.3.e	51.540.079.928,00	51.511.256.621,00
24	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.1.3.f	6.000.000,00	6.000.000,00
25	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.1.3.f.1	(30.000,00)	(30.000,00)
26	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto		5.970.000,00	5.970.000,00
27	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.1.3.g	83.799.989,00	83.799.989,00
28	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.1.3.g.1	(83.799.989,00)	(83.799.989,00)
29	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Netto		0,00	0,00
30	Persediaan	5.3.1.1.4	22.014.988.791,75	18.315.794.136,94
31	Jumlah Aset Lancar		554.873.780.071,87	503.642.118.487,26
32	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
33	Investasi Permanen	5.3.1.2.1		
34	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.1	1.210.195.747.454,91	1.122.723.084.012,38
35	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	5.3.1.2.1	0,00	0,00
36	Jumlah Investasi Permanen		1.210.195.747.454,91	1.122.723.084.012,38
37	Investasi Non Permanen	5.3.1.2.2		
38	Dana Bergulir	5.3.1.2.2	26.024.000,00	2.500.000.000,00
39	Jumlah Investasi Non Permanen		26.024.000,00	2.500.000.000,00
40	Jumlah Investasi Jangka Panjang		1.210.221.771.454,91	1.125.223.084.012,38
41	ASET TETAP	5.3.1.3		
42	Tanah	5.3.1.3.1	638.373.372.999,47	639.739.327.990,92
43	Peralatan Dan Mesin	5.3.1.3.2	872.516.788.071,01	797.291.885.002,11
44	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.199.334.535.324,35	1.147.206.923.443,10
45	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.979.211.943.293,42	1.792.215.738.120,42
46	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	82.704.483.562,87	80.347.699.930,87
47	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	18.610.383.715,00	2.377.604.679,00
48	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(2.605.769.238.798,89)	(2.381.583.101.443,09)

Nomor Urut	Uraian	CaLK	31 Desember 2023	31 Desember 2022
49	Jumlah Aset Tetap		2.184.982.268.167,23	2.077.596.077.723,33
50	DANA CADANGAN	5.3.1.4		
51	Dana Cadangan		0,00	0,00
52	Jumlah Dana Cadangan		0,00	0,00
53	ASET LAINNYA	5.3.1.5		
54	Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.5.1	60.000.000,00	60.000.000,00
55	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	5.3.1.5.1.a	(60.000.000,00)	(60.000.000,00)
56	Tagihan Penjualan Angsuran Netto		0,00	0,00
57	Tuntutan Perbendaharaan	5.3.1.5.2	5.849.877.797,00	5.849.877.797,00
58	Penyisihan Tuntutan Perbendaharaan	5.3.1.5.2.a	(5.849.877.797,00)	(5.849.877.797,00)
59	Tuntutan Perbendaharaan Netto		0,00	0,00
60	Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.5.3	296.228.250,00	429.978.250,00
61	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.5.3.a	(185.085.750,00)	(185.115.750,00)
62	Tuntutan Ganti Rugi Netto		111.142.500,00	244.862.500,00
63	Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.4	12.168.432.105,00	11.322.656.732,00
64	Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.4.a	(10.317.608.656,00)	(9.213.523.312,00)
65	Aset Tak Berwujud Netto		1.850.823.449,00	2.109.133.420,00
66	Aset Lain-lain	5.3.1.5.5	176.868.535.949,56	232.687.669.784,34
67	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	5.3.1.5.6	(64.944.526.422,77)	(176.194.591.473,46)
68	Aset Lain-Lain Netto		111.924.009.526,79	56.493.078.310,88
69	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.5.7	318.839.919.000,00	40.943.910.403,00
70	Jumlah Aset Lainnya		432.725.894.475,79	99.790.984.633,88
71	PROPERTI INVESTASI	5.3.1.6		
72	Properti Investasi Tanah	5.3.1.6.1	1.638.397.500,00	0,00
73	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.1.6.2	43.880.535.554,00	0,00
74	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.6.2.a	(16.384.086.050,00)	0,00
75	Jumlah Properti Investasi		29.134.847.004,00	0,00
76	JUMLAH ASET		4.411.938.561.173,80	3.806.252.264.856,85
77	KEWAJIBAN	5.3.2		
78	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1		
79	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	0,00	0,00
80	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	1.414.428.553,00	2.763.041.629,00
81	Utang Belanja	5.3.2.1.3	13.325.853.712,53	10.066.254.344,00
82	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	68.702.831.393,00	100.169.418.412,00
83	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		83.443.113.658,53	112.998.714.385,00
84	JUMLAH KEWAJIBAN		83.443.113.658,53	112.998.714.385,00
85	EKUITAS	5.3.3		
86	JUMLAH EKUITAS		4.328.495.447.515,27	3.693.253.550.471,85
87	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.3.4	4.411.938.561.173,80	3.806.252.264.856,85

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Martapura, 30 April 2024
 **BUPATI BANJAR**
H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom

Laporan Operasional



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	CaLK	2023	2022	Kenalkan/ (Penurunan)	(%)
1	KEGIATAN OPERASIONAL					
2	PENDAPATAN - LO	5.4.1				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO	5.4.1.1				
4	Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	118.499.920.519,00	99.120.716.169,00	19.379.204.350,00	19,55
5	Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	8.367.069.839,00	6.607.584.388,00	1.759.485.451,00	26,63
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	14.053.326.440,40	7.788.706.778,27	6.264.619.662,13	80,43
7	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	5.4.1.1.4	148.396.083.155,62	100.608.291.237,19	47.787.791.918,43	47,50
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO		289.316.399.954,02	214.125.298.572,46	75.191.101.381,56	35,12
9						
10	PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2				
11	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERimbangan - LO	5.4.1.2.1				
12	Dana Bagi Hasil Pajak - LO	5.4.1.2.1.a	40.392.200.118,00	33.491.445.859,00	6.900.754.259,00	20,60
13	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO	5.4.1.2.1.b	819.840.695.060,00	601.869.511.528,00	217.971.183.532,00	36,22
14	Dana Alokasi Umum - LO	5.4.1.2.1.c	720.866.934.775,00	672.370.620.442,00	48.496.314.333,00	7,21
15	Dana Alokasi Khusus - LO	5.4.1.2.1.d	341.356.453.666,00	302.021.213.716,00	39.335.239.950,00	13,02
16	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO		1.922.456.283.619,00	1.609.752.791.545,00	312.703.492.074,00	19,43
17						
18	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA - LO	5.4.1.2.2				
19	Dana Insentif Daerah	5.4.1.2.2	5.672.424.000,00	0,00	5.672.424.000,00	
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LO		5.672.424.000,00	0,00	5.672.424.000,00	
21						
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI - LO	5.4.1.2.3				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.4.1.2.3.a	188.431.472.308,00	172.364.208.122,63	16.067.264.185,37	9,32
24	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO		188.431.472.308,00	172.364.208.122,63	16.067.264.185,37	9,32
25	Jumlah Pendapatan Transfer		2.116.560.179.927,00	1.782.116.999.667,63	334.443.180.259,37	18,77
26						
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.3				
28	Pendapatan Hibah	5.4.1.3	21.262.375.992,00	38.610.376.082,00	(17.348.000.090,00)	(44,93)
29	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		21.262.375.992,00	38.610.376.082,00	(17.348.000.090,00)	(44,93)
30	JUMLAH PENDAPATAN		2.427.138.955.873,02	2.034.852.674.322,09	392.286.281.550,93	19,28
31						
32	BEBAN	5.4.2				
33	Beban Pegawai	5.4.2.1	806.394.151.209,00	764.735.189.475,00	41.658.961.734,00	5,45
34	Beban Persediaan	5.4.2.2.a	142.570.443.157,19	119.794.721.001,38	22.775.722.155,81	19,01
35	Beban Jasa	5.4.2.2.b	315.176.530.041,53	269.343.273.864,00	45.833.256.177,53	17,02
36	Beban Pemeliharaan	5.4.2.2.c	60.317.371.331,07	47.842.637.319,33	12.474.734.011,74	26,07
37	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.2.d	81.780.524.671,00	59.456.090.840,00	22.324.433.831,00	37,55
38	Beban Hibah	5.4.2.3	96.460.906.540,00	51.657.149.510,98	44.803.757.029,02	86,73
39	Beban Subsidi	5.4.2.4	52.300.000,00	0,00	52.300.000,00	
40	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.5	9.816.502.295,00	10.667.986.500,00	(851.484.205,00)	(7,98)
41	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.6	245.256.964.507,91	271.269.867.924,70	(26.012.903.416,79)	(9,59)
42	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.7	3.864.195.802,84	4.057.950.881,44	(193.755.078,60)	(4,77)
43	Beban Lain-lain	5.4.2.8	174.120.823.835,65	149.882.249.176,29	24.238.574.659,36	16,17
44	Beban Bagi Hasil	5.4.2.9	8.508.135.897,00	12.138.437.549,00	(3.630.301.652,00)	(29,91)
45	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.10	144.508.433.864,00	114.059.088.812,00	30.449.345.052,00	26,70
46	JUMLAH BEBAN		2.088.827.283.152,19	1.874.904.642.854,12	213.922.640.298,07	11,41
47						
48	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		338.311.672.720,83	159.948.031.467,97	178.363.641.252,86	111,51
49						
50	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3				
51	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.4.3.a	179.844.921,00	0,00	179.844.921,00	
52	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	5.4.3.b	0,00	0,00	0,00	
53	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.4.3.c	478.674.656,00	218.029.167,00	260.645.489,00	119,55
54	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	5.4.3.d	0,00	15.458.332,00	(15.458.332,00)	(100,00)
55	Defisit penghapusan Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	
56	Defisit non operasional Lainnya	5.4.3.e	60.573.294,00	0,00	60.573.294,00	
57	JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(359.403.029,00)	(233.487.499,00)	(125.915.530,00)	53,93
58	SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		337.952.269.691,83	159.714.543.968,97	178.237.725.722,86	111,60
59						
60	POS LUAR BIASA	5.4.4				
61	Beban Tak Terduga		0,00	5.724.660.447,00	(5.724.660.447,00)	(100,00)
62	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		0,00	(5.724.660.447,00)	5.724.660.447,00	(100,00)
63	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.5	337.952.269.691,83	153.989.883.521,97	183.962.386.169,86	119,46

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Martapura, 30 April 2024
BUPATI BANJAR

H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom

Laporan Arus Kas



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	CaLK	2023	2022
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		109.824.795.009,00	93.731.388.091,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		8.367.069.839,00	6.599.136.034,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		8.916.250.334,00	7.167.770.066,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		150.622.300.600,04	93.981.898.809,77
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		36.971.401.241,00	30.260.339.373,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)		564.917.111.162,00	544.605.075.302,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		720.866.934.775,00	672.370.620.442,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		341.356.453.666,00	302.021.213.716,00
11	Penerimaan Dana Insentif Daerah		5.672.424.000,00	0,00
12	Penerimaan Dana Desa		222.580.763.000,00	213.931.343.800,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil		188.402.649.001,00	172.130.565.844,00
14	Penerimaan Hibah		2.444.000.000,00	1.284.000.000,00
15	Jumlah Arus Masuk Kas		2.360.942.152.627,04	2.138.083.351.477,77
16	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
17	Pembayaran Pegawai		806.633.031.475,00	764.955.869.085,00
18	Pembayaran Barang		604.259.697.529,02	486.586.621.120,00
19	Pembayaran Hibah		88.112.346.572,00	47.840.575.664,00
20	Pembayaran Bantuan Sosial		5.016.009.329,00	10.667.986.500,00
21	Pembayaran Tak Terduga		5.889.091.877,00	5.724.660.447,00
22	Pembayaran Bagi Hasil		8.508.135.897,00	12.138.437.549,00
23	Pembayaran Bantuan Keuangan		367.089.196.864,00	327.990.432.612,00
24	Jumlah Arus Keluar Kas		1.885.507.509.543,02	1.655.904.582.977,00
25	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		475.434.643.084,02	482.178.768.500,77
26	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
27	Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
28	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		191.159.244,00	0,00
29	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		20.000.000,00	29.160.000,00
30	Jumlah Arus Masuk Kas		211.159.244,00	29.160.000,00
31	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
32	Perolehan Tanah		5.332.333.880,00	1.561.416.000,00
33	Perolehan Peralatan dan Mesin		92.930.369.497,00	55.895.634.639,00
34	Perolehan Gedung dan Bangunan		78.000.133.887,96	39.452.963.723,00
35	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		198.503.513.797,00	98.293.080.931,57
36	Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.287.834.008,00	2.274.395.769,00
37	Perolehan Aset Lainnya		314.900.000,00	0,00
38	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		36.050.000.000,00	16.700.000.000,00
39	Jumlah Arus Keluar Kas		412.419.085.069,96	214.177.491.062,57
40	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(412.207.925.825,96)	(214.148.331.062,57)
41	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
42	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
43	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
44	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
45	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		2.473.976.000,00	0,00
46	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
47	Jumlah Arus Masuk Kas		2.473.976.000,00	0,00
48	Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
49	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
50	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	2.000.000.000,00
51	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
52	Jumlah Arus Keluar Kas		0,00	2.000.000.000,00
53	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		2.473.976.000,00	(2.000.000.000,00)
54	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
55	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
56	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		116.450.387.472,83	92.810.589.231,13
57	Penerimaan UYHD Tahun Lalu dari Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
58	Jumlah Arus Masuk Kas		116.450.387.472,83	92.810.589.231,13

Nomor Urut	Uraian	CaLK	2023	2022
59	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
60	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		116.450.387.472,83	92.810.589.231,13
61	Pengeluaran SP2D UP/TU		0,00	0,00
62	Jumlah Arus Keluar Kas		116.450.387.472,83	92.810.589.231,13
63	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		0,00	0,00
64	Kenaikan/Penurunan Kas		65.700.693.258,06	266.030.437.438,20
65	Saldo Awal Kas di BUD, BLUD dan Dana Kapitasi/JKN dan Dana BOS	5.5.5	363.419.641.282,83	97.389.203.844,63
66	Koreksi SILPA	5.5.6	0,00	0,00
67	Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, Dana Kapitasi/JKN dan Dana BOS		429.120.334.540,89	363.419.641.282,83
68	Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, Dana Kapitasi/JKN			
69	Saldo Akhir Kas Lainnya		0,00	0,00
70	Saldo Akhir Kas	5.5.7	429.120.334.540,89	363.419.641.282,83

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.



Martapura, 30 April 2024

BUPATI BANJAR

H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom

Laporan Perubahan Ekuitas



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	CaLK	2023	2022
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	3.693.253.550.471,85	3.415.589.002.337,90
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	337.952.269.691,83	153.989.883.521,97
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :	5.6.3	297.289.627.351,59	123.674.664.611,98
4	Selisih Revaluasi Aset Tetap	5.6.3.a	0,00	0,00
5	Koreksi Ekuitas - Investasi	5.6.3.b	0,00	0,00
6	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	5.6.3.c	0,00	51.476.954.987,06
7	Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	5.6.3.d	0,00	0,00
8	Koreksi Ekuitas - Kewajiban	5.6.3.e	0,00	0,00
9	Koreksi Ekuitas - Lainnya	5.6.3.f	297.289.627.351,59	72.197.709.624,92
10	EKUITAS AKHIR	5.6.4	4.328.495.447.515,27	3.693.253.550.471,85

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.



Martapura, 30 April 2024

BUPATI BANJAR

H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom

Catatan atas Laporan Keuangan



BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Banjar dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dana program-program yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023, sedangkan dalam Pengelolaan Keuangan melaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada DPRD berupa Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini, entitas akuntansi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pemerintah Kabupaten Banjar. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan operasional kegiatan pemerintahan, Laporan Keuangan sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah menjadi tolak ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun



anggaran. Laporan keuangan tersebut harus merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Laporan Keuangan, catatan atas Laporan Keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.

Tujuan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan ini dimaksudkan agar Laporan Keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas akuntansi. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca Laporan Keuangan.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundangan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan.
2. Memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan APBD.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Untuk menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Daerah atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
2. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan



Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ini secara berurutan dimuat uraian dan penjelasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Yang menguraikan mengenai hal-hal yang bersifat umum sebagai pengantar Laporan Keuangan. Pada bagian ini juga dimuat mengenai:

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.

BAB II ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH, EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.

Akan dijelaskan mengenai kondisi dan perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Banjar, Kebijakan Keuangan Daerah dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

- 2.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.
- 2.2 Ekonomi Makro.
- 2.3 Kebijakan Keuangan.
- 2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.

Akan dijelaskan mengenai ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan dan hambatan/kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.

Pada bagian ini akan dijelaskan entitas akuntansi pada Kabupaten Banjar, basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan, basis pengukuran akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi pada SKPD di Kabupaten Banjar.

- 4.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
- 4.2 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.
- 4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.

Dengan materi inti yaitu mengenai rincian dan penjelasan masing-masing Laporan Keuangan, meliputi unsur-unsur pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana.



- 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.
 - 5.1.1 Pendapatan.
 - 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah.
 - 5.1.1.2 Pendapatan Transfer.
 - 5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
 - 5.1.2 Belanja.
 - 5.1.2.1 Belanja Operasi.
 - 5.1.2.2 Belanja Modal.
 - 5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga.
 - 5.1.2.4 Belanja Transfer.
 - 5.1.3 Pembiayaan
 - 5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan.
 - 5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan.
 - 5.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.
- 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
 - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal.
 - 5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan.
 - 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).
 - 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Berjalan.
 - 5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- 5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca.
 - 5.3.1 Aset.
 - 5.3.1.1 Aset Lancar.
 - 5.3.1.1.1 Kas.
 - 5.3.1.1.2 Investasi Jangka Pendek.
 - 5.3.1.1.3 Piutang.
 - 5.3.1.1.4 Persediaan.
 - 5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang
 - 5.3.1.2.1 Investasi Permanen.
 - 5.3.1.2.2 Investasi Non-Permanen.
 - 5.3.1.3 Aset Tetap.
 - 5.3.1.4 Dana Cadangan.
 - 5.3.1.5 Aset Lainnya.
 - 5.3.1.6 Properti Investasi.
 - 5.3.2 Kewajiban.
 - 5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek.



- 5.3.3 Jumlah Ekuitas.
- 5.3.4 Jumlah Kewajiban dan Ekuitas.
- 5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional.
 - 5.4.1 Pendapatan – LO.
 - 5.4.2 Beban.
 - 5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
 - 5.4.4 Pos Luar Biasa.
 - 5.4.5 Surplus/Defisit – LO.
- 5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas.
 - 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi.
 - 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi.
 - 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan.
 - 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.
 - 5.5.5 Saldo Awal Kas di BUD, BLUD dan Dana Kapitasi/JKN dan Dana BOS
 - 5.5.6 Koreksi SiLPA
 - 5.5.7 Saldo Akhir Kas.
- 5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.
 - 5.6.1 Ekuitas Awal.
 - 5.6.2 Surplus Defisit - LO.
 - 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.
 - 5.6.4 Ekuitas Akhir.

BAB VI PENUTUP.



BAB II

ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH, EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi yaitu unit Pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.

Entitas Akuntansi atau yang dikenal dengan istilah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Banjar sampai tahun 2023 terdapat 47 (Empat Puluh Tujuh).

Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan. Entitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

2.2 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemerintah Daerah) tahun 2023 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, yaitu :

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 2,44%.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,73%.
- c. Gini Ratio sebesar 0,297%.
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,01%.
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 3,21%
- f. Tingkat Inflasi sebesar 2,28% (inflasi rujukan Kota Banjarmasin)
- g. Produk Domestik Regional Bruto /*Gross Regional Domestic Product* sebesar Rp17.585,84.

2.2.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-



kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2 . 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjar

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (%)
1	Kabupaten Banjar (%)	2,79	2,44	Turun 0,35
2	Kabupaten Banjar (Ribu Orang)	16,711	14,773	Turun 1,938
3	Provinsi Kalimantan Selatan (%)	4,49	4,29	Turun 0,20
4	Nasional (%)	9,54	9,36	Turun 0,18
5	Peringkat Provinsi Kalimantan Selatan	1	1	Tetap
6	Peringkat Nasional	7	5	Naik

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Banjar

Persentase penduduk miskin Kabupaten Banjar pada tahun 2023 sebesar 2,44%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan tahun 2022 yaitu sebesar 0,35%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Banjar masih di bawah Provinsi dan Nasional, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang terus diupayakan untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2 . 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Banjar

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (Poin)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Banjar	0,33	0,38	Naik 0,05
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan	0,63	0,61	Turun 0,02
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,59	1,53	Turun 0,06
4	Peringkat Provinsi Kalimantan Selatan	3	3	Tetap
5	Peringkat Nasional	10	23	Turun

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Banjar

Tabel 2 . 3 Tingkat Keparahen Kemiskinan Kabupaten Banjar

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (Poin)
1	Tingkat Keparahen Kemiskinan Kabupaten Banjar	0,04	0,09	Naik 0,05
2	Tingkat Keparahen Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan	0,13	0,16	Naik 0,03
3	Tingkat Keparahen Kemiskinan Nasional	0,39	0,38	Turun 0,01
4	Peringkat Provinsi Kalimantan Selatan	2	6	Turun
5	Peringkat Nasional	4	34	Turun

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Banjar

2.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjar tahun 2023 adalah sebesar 2,73%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2 . 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjar

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (Poin)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjar (%)	2,72	2,73	Naik 0,01
2	Tingkat Pengangguran Provinsi Kalimantan Selatan (%)	4,74	4,31	Turun 0,43
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,86	5,32	Turun 0,54
4	Peringkat Provinsi Kalimantan Selatan	2	3	Turun

Sumber Dokumen: Diolah dari data Sakernas Agustus BPS Kabupaten Banjar

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Banjar tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,73%, mengalami kenaikan dibanding TPT pada tahun 2022 adalah sebesar 2,72%. Namun TPT Kabupaten Banjar masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional yang sebesar 5,86% (tahun 2022) dan sebesar 5,32% (tahun 2023).

2.2.3 Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Di tahun 2022 terjadi penurunan pengeluaran atau daya beli pada kelompok penduduk, terutama yang menengah ke atas. BPS juga melihat potensi penurunan tingkat pengeluaran oleh kelompok penduduk menengah ke bawah. Namun, penurunannya tidak akan secepat pada kelompok menengah atas. Pasalnya, kelompok ini juga terbantu oleh adanya berbagai program bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Mengukur ketimpangan dengan *Gini Ratio* berarti mengasumsikan bahwa pendapatan masyarakat diproksi dengan variabel pengeluaran. Selain *Gini Ratio*, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar, Angka *Gini Ratio* Kabupaten Banjar tahun 2023 mengalami penurunan dari semula 0,300 di tahun 2022 menjadi 0,297.

Tabel 2 . 5 Gini Ratio

No	Gini Ratio	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (Poin)
1	Tingkat Kabupaten Banjar	0,30	0,297	Turun 0,003
2	Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	0,317	0,313	Turun 0,004
3	Tingkat Nasional	0,381	0,388	Naik 0,007

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Banjar

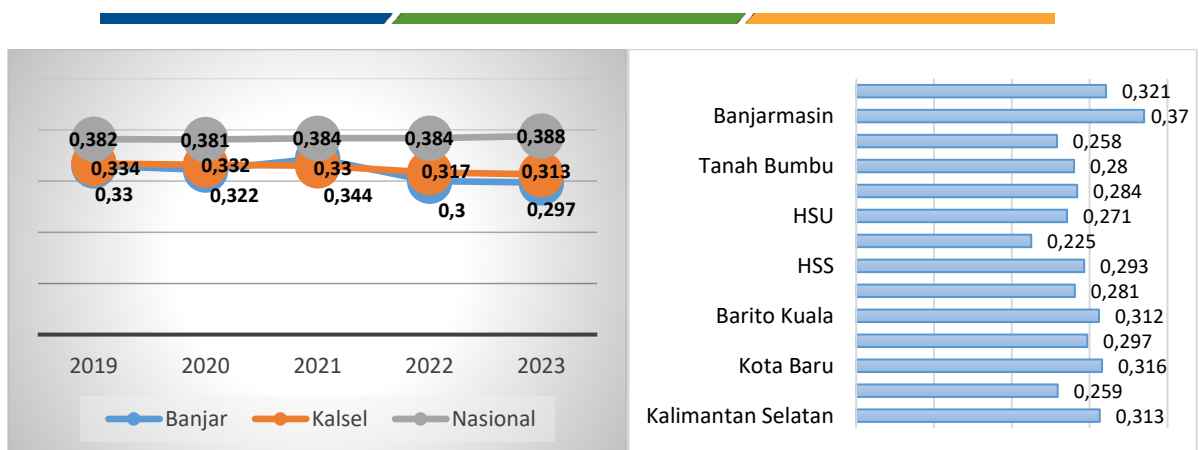
Selama beberapa tahun ini, ekonomi Kabupaten Banjar tumbuh relatif cukup baik. Dari tahun 2018-2022, data *Gini Ratio* Kabupaten Banjar menunjukkan tren yang cukup stabil dan dapat dikategorikan ketimpangan sedang yang ditunjukkan oleh angka *Gini Ratio* yang berada pada kisaran 0,33 sampai dengan 0,35. Artinya distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Banjar belum merata sempurna tetapi masih pada klasifikasi ketimpangan sedang.

Pada 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Selatan yang diukur dengan *Gini Ratio* sebesar 0,313. Angka ini turun 0,004 poin jika dibandingkan dengan kondisi 2022 yang sebesar 0,317.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Selatan termasuk dalam kategori rendah. Hal ini ditunjukkan oleh persentase distribusi pengeluaran penduduk kelompok 40 persen terbawah yang sebesar 19,26 persen.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dengan rasio gini (*Gini Ratio*) per Maret 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Maret 2022. pada Maret berada di angka 0,388 atau turun 0,004 poin dibandingkan dengan posisi per September 2022 yang berada di angka 0,385. Meski demikian, rasio gini pada Maret 2023 masih lebih tinggi dibandingkan dengan September 2022 yang sebesar 0,381. Rasio gini di perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,409, naik dibandingkan dengan rasio gini September 2022 yang sebesar 0,402 dan rasio gini Maret 2022 yang sebesar 0,403. Sementara itu, rasio gini di perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,314, lebih tinggi dibandingkan dengan posisi per September 2022 yang sebesar 0,313. Dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar Grafik Capaian indeks Gini Ratio



Sumber : Data Diolah dari Data Susenas 2019-2023, BPS Prov. Kalsel

Upaya Yang Dilakukan pemerintah daerah guna mengurangi ketimpangan pendapatan, antara lain:

- Pemerintah menyiapkan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi bagi masyarakat, Jaring Pengaman Sosial diberikan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi untuk masyarakat

yang pendapatannya terdampak selama pandemi. Tujuannya agar masyarakat masih tetap bisa menjaga konsumsi pada masa pandemi. Dengan memberikan bantuan baik dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai maupun Bantuan Kebutuhan Pokok yang diberikan kepada pekerja informal.

- b. Program Padat Karya Tunai (PKT) atau *cash for work* yang dipercayakan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Kementerian PUPR.
- c. Program Vaksinasi Nasional untuk meningkatkan kekebalan terhadap Covid-19, baik terhadap Usia produktif, Manula bahkan kepada anak-anak di atas 6 tahun.

2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh Pendapatan, Kesehatan, dan Pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu Harapan Hidup/Umur Panjang dan Sehat (*A Long And Healthy Life*), Pengetahuan (*Knowledge*), dan Standar Hidup Layak (*Decent Standard Of Living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Mulai tahun 2023, BPS melakukan *updating* pada sumber data Umur Harapan Hidup (UHH) yang sebelumnya bersumber dari **hasil Sensus Penduduk 2010 kemudian diganti** dengan **hasil Pendataan Long Form (LF) Sensus Penduduk 2020 yang lebih terkini** dan berdasarkan **jumlah sampel yang lebih besar**. Dampak dari perubahan sumber data ini menyebabkan terjadi peningkatan signifikan pada nilai IPM dan peringkat IPM Kabupaten Banjar secara khusus dan Provinsi Kalimantan Selatan secara umumnya. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Banjar tahun 2023 adalah sebesar 74,01 poin mengalami kenaikan dibanding tahun 2022 sebesar 73,25 poin (naik 0,76 poin) dan berada di peringkat ke 4 se Kalimantan Selatan. Dengan nilai tersebut level IPM Kabupaten Banjar berada pada kategori tinggi, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2 . 6 Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (Poin)
1	Kabupaten Banjar	73,25	74,01	Naik 0,76
2	Provinsi Kalimantan Selatan	74,0	74,66	Naik 0,66

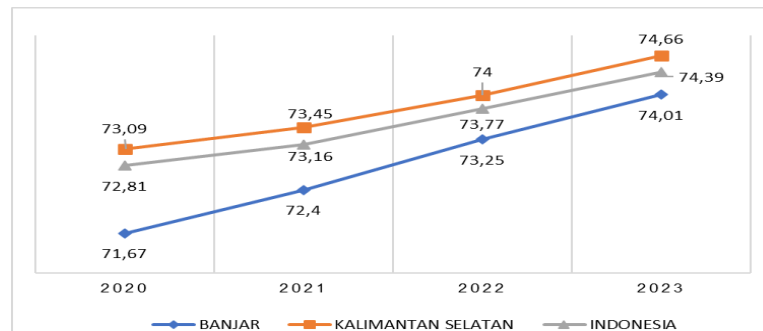


PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun (Poin)
3	Indonesia/Nasional	73,77	74,39	Naik 0,62
4	Peringkat Provinsi Kalimantan Selatan	6	4	Naik
5	Peringkat Nasional	-	-	-

Sumber Dokumen BPS Kabupaten Banjar

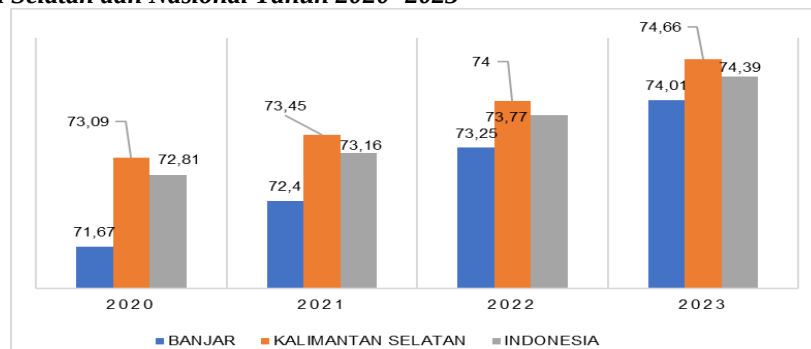
Kenaikan IPM juga terjadi pada tingkat Provinsi dan nasional seperti terlihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Banjar, Data diolah

Dari Gambar di atas dapat dilihat IPM Kabupaten Banjar dari tahun ke tahun kondisinya selalu mengalami peningkatan. IPM Kabupaten Banjar tercatat sebesar 71,67 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi sebesar 74,01 pada tahun 2023. Namun nilai IPM Kabupaten Banjar masih berada dibawah angka IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan IPM Nasional. Senada dengan peningkatan IPM pada Kabupaten Banjar, pada level Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti terlihat pada gambar berikut :

Gambar Grafik Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020 -2023



Sumber : BPS Kab.Banjar, BPS Provinsi Kalsel dan BPS RI, Data diolah

2.2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian

merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2 . 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2023
1	PDRB (harga konstan 2010) (Miliar Rp)	12.109,23	12.651,28	13.201,49	149.230,96	12.301.393,60
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,21	4,48	4,35	4,84	5,05
3	Peringkat Provinsi Kalimantan Selatan	11	9	9	-	-

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Banjar

Selama kurun waktu tahun 2020 - tahun 2023 perekonomian Kabupaten Banjar sempat mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi -1,96% akibat pandemi covid 19, kemudian berhasil mengalami kenaikan di tahun 2022 menjadi 4,48% dan tahun 2023 4,35. Pada tahun 2023, dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Banjar menempati urutan ke 9 dari laju pertumbuhan kota atau Kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

2.2.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Banjar dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi:

- Inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
- Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
- Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
- Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Namun penghitungan inflasi belum dilakukan secara menyeluruh di semua kabupaten/kota di Indonesia termasuk Kabupaten Banjar, sehingga untuk melihat perkembangan inflasi Kabupaten Banjar digunakan metode *sister city* yaitu dengan merujuk kepada inflasi Kota Banjarmasin yang dianggap memiliki kemiripan karakteristik dengan wilayah Kabupaten Banjar. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik, tingkat inflasi Kota Banjarmasin tahun kalender 2023 aalah sebesar 2,28% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam table di bawah ini.

Tabel 2 . 8 Tingkat Inflasi Kabupaten Banjar Menggunakan Pendekatan Inflasi Kota Banjarmasin

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kota Banjarmasin (%)	6,98	2,28	Turun 4,70
2	Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan (%)	6,99	2,43	Turun 4,56
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	5,51	2,61	Turun 2,90

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Banjar

Tingkat inflasi di Kota Banjarmasin tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan penurunan sebesar 4,70%.

2.2.7 Pertumbuhan PDRB

PDRB Kabupaten Banjar menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha. Sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori atau sub lapangan usaha ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap kategori lapangan usaha akan diuraikan pada penjelasan di bawah ini.

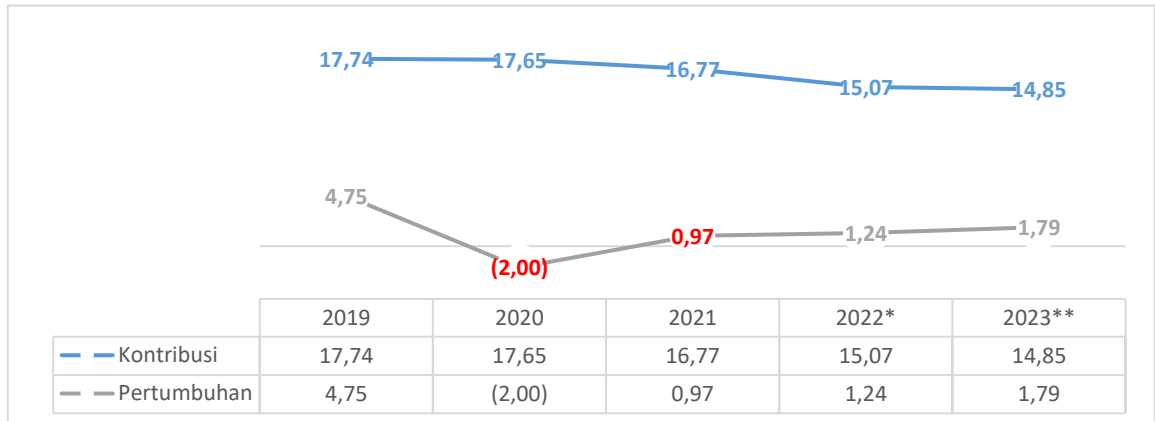
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Pada tahun 2023 kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 3,36 triliun rupiah atau sebesar 14,85 persen. Selama 5 tahun terakhir kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan secara perlahan mengalami kecenderungan menurun.

Jika dilihat dari pertumbuhannya, Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan juga mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pertumbuhan menurun hingga mencapai negatif -2 persen sempat terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Banjar masih sangat tergantung dengan iklim/kondisi alam. Selain itu terjadi penurunan luas lahan yang dipanen khususnya pada komoditi padi yang merupakan komoditi utama pertanian di Kabupaten Banjar. Hal tersebut juga masih tergambar pada kondisi di sepanjang tahun 2022 dan 2023, dimana beberapa wilayah di Kabupaten Banjar dilanda badai

el nino sehingga lahan pertaniannya dilanda kekeringan. Namun kondisi pertanian secara umum masih tumbuh positif meski dengan nilai yang cukup kecil yaitu hanya 1,24 persen pada tahun 2022 dan 1,79 persen di tahun 2023.

Gambar Grafik Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan Dan Jasa Pertanian Kabupaten Banjar, 2019-2023 (Persen)



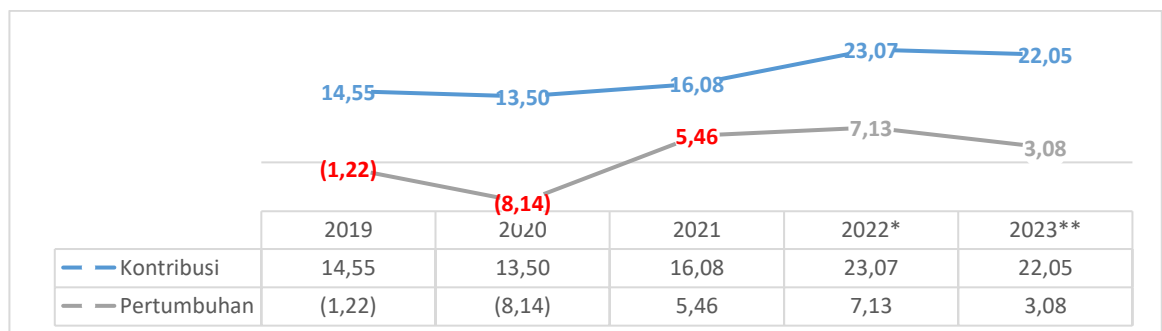
* Angka sementara/Preliminary Figures

**Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

2. Pertambangan dan Penggalian

Kategori Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2023 masih memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 22,05 persen. Pada tahun 2020 sumbangan dari kategori ini sempat menurun kemudian di tahun 2022 dan 2023 kembali meningkat. Meningkatnya kontribusi pertambangan pada tahun 2022-2023 disebabkan kenaikan harga yang sangat signifikan pada harga batubara acuan (HBA) di tingkat global dan nasional. Setelah sempat mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020 akibat pandemi, kategori pertambangan dapat kembali tumbuh positif dan mampu mengangkat perekonomian Kabupaten Banjar secara total.

Gambar Grafik Peranan Lapangan Usaha terhadap PDRB Kategori Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Banjar Tahun 2019-2023 (Persen)



* Angka sementara/Preliminary Figures

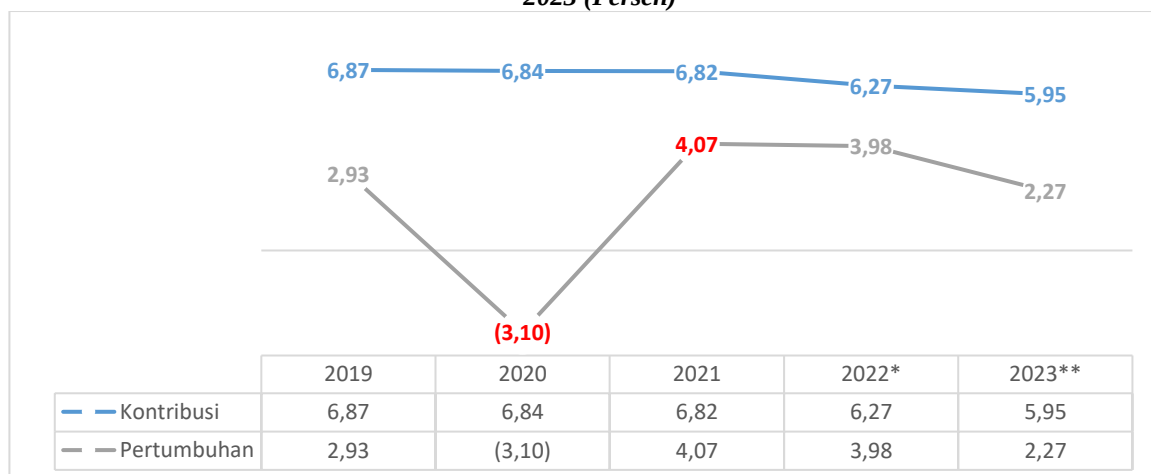
**Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Sumber: BPS Kabupaten Banjar

3. Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan pada tahun 2023 memberikan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 1,35 triliun rupiah atau sebesar 5,95 persen. Sejak tahun 2019 sumbangan kategori industri terhadap PDRB Kabupaten Banjar cenderung mengalami penurunan kontribusi. Penurunan kontribusi yang terjadi disebabkan adanya penurunan nilai produksi dan kemudian diperparah dengan akibat dampak Covid-19 diantaranya banyak usaha industri kecil dan mikro yang terpaksa harus gulung tikar atau sementara tutup usaha dan merumahkan tenaga kerjanya. Namun kondisi pada tahun 2021-2023 perlahan mulai bangkit terlihat dari adanya peningkatan di kategori industri, yaitu berbagai usaha dari pemerintah pusat diantaranya memberikan dana insentif untuk membantu pelaku usaha industri mikro. Hal ini terlihat dari grafik berikut dari sisi pertumbuhannya, pada tahun 2020 pertumbuhan kategori industri pengolahan tumbuh negatif sebesar -3,10 persen, dan pada tahun 2023 menjadi 2,27 persen.

Gambar Grafik Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kategori Industri Pengolahan , 2019-2023 (Persen)



* Angka sementara/Preliminary Figures

**Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

4. Pengadaan Listrik dan Gas

Penyediaan listrik dan gas merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk pembangunan infrastruktur di berbagai lini terutama bagi dunia usaha. Dari sisi pangsa produksi, pangsa produksi kategori ini memang cukup kecil, meskipun begitu keberadaannya sangat dibutuhkan bagi perekonomian. Selama terjadinya Covid pada tahun 2020 dan 2021, kategori ini merupakan salah satu lapangan usaha yang masih dapat bertahan dengan pertumbuhan positif. Pada tahun 2023 kategori ini tumbuh sebesar 8,47 persen dan menyumbang 0,14 persen dari total PDRB Kabupaten Banjar. Meskipun kontribusi kategori listrik ini sangat kecil, namun hal ini tidak bisa diabaikan dalam perekonomian. Hal ini karena listrik merupakan salah satu kebutuhan primer yang belum tergantikan dengan sumber energi paling populer dibanding sumber energi alternatif lain.

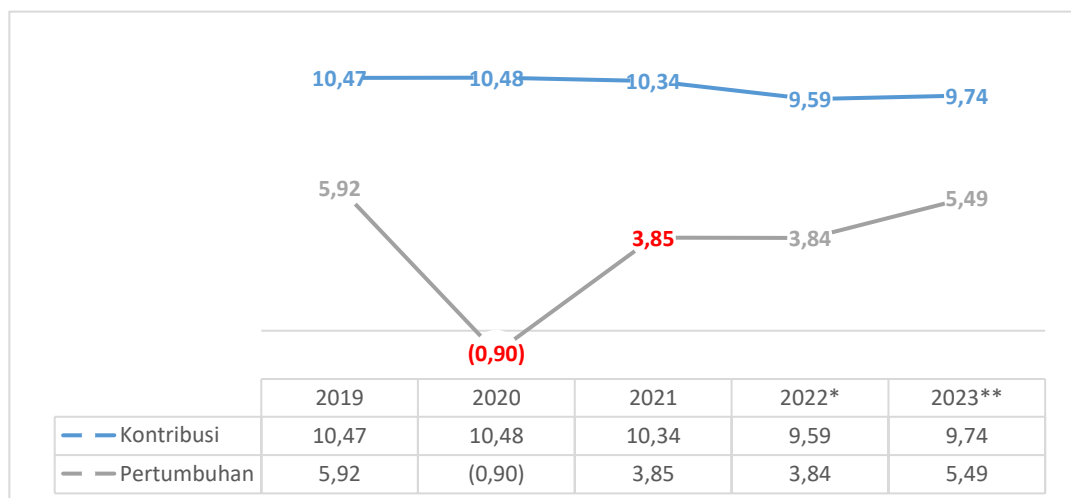
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dll. Selama pandemi Covid terjadi di tahun 2020 dan 2021, kategori ini merupakan lapangan usaha yang juga masih dapat bertahan dengan pertumbuhan positif. Dapat dikatakan kinerja pada lapangan usaha ini sangat bergantung pada kinerja PDAM sebagai satu-satunya perusahaan pengadaan air bersih yang ada di Kabupaten Banjar. Kategori pengadaan air tumbuh sebesar 4,77 persen di tahun 2023 dan menyumbang cukup kecil yaitu 0,23 persen dari total PDRB Kabupaten Banjar. Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya peningkatan pelayanan pengadaan air bersih melalui kerjasama dengan *stakeholder* lain untuk meningkatkan suplai air bersih kepada penduduk seperti usaha rumah tangga dan PAMSIMAS di desa-desa.

6. Konstruksi

Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, pembangunan pasar, hotel, gedung perkantoran adalah salah satu kegiatan yang dicakup pada sektor konstruksi. Kinerja Kategori konstruksi pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan bila dibandingkan tahun sebelumnya yang sempat terdampak akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 terjadi penurunan nilai PDRB baik pada harga berlaku maupun harga konstan karena pengalihan anggaran pembangunan yang ditujukan untuk dana penanganan Covid-19 di seluruh daerah. Pada tahun 2023 kategori ini mampu menyumbang sekitar 2,2 triliun rupiah atau sekitar 9,74 percent terhadap perekonomian dan tumbuh sebesar 5,49 persen.

Gambar Grafik Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Kategori Konstruksi Kabupaten Banjar, 2019-2023 (Persen)

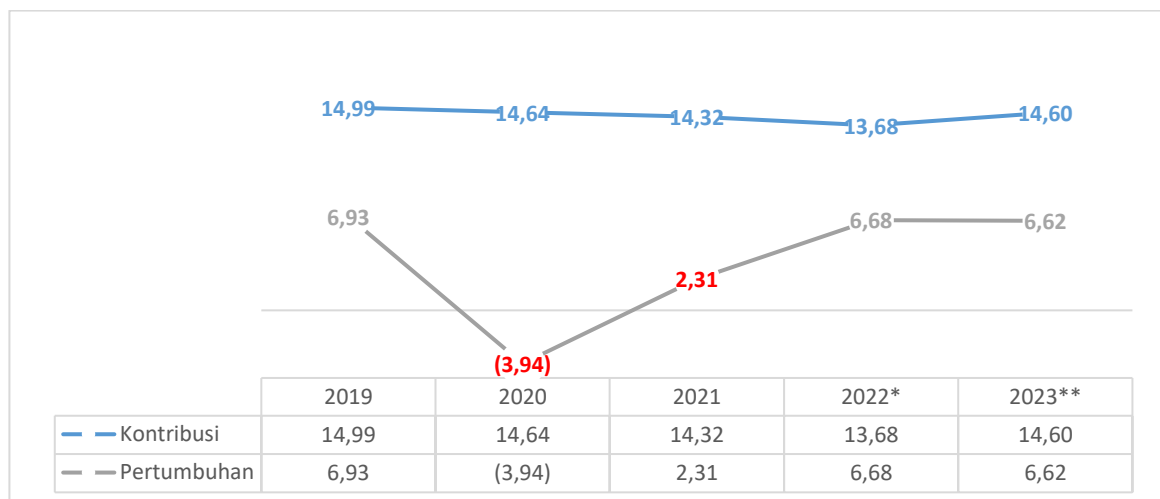


Sumber : BPS Kabupaten Banjar

7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kategori perdagangan memegang peranan yang sangat penting terhadap struktur perekonomian Kabupaten Banjar. Hal ini ditunjukkan dari besarnya kategori lapangan usaha perdagangan yang memiliki pangsa terbesar ketiga di tahun 2023 setelah kategori pertambangan dan pertanian dengan total kontribusi sebesar 14,60 persen dan tumbuh 6,62 persen di tahun 2023. Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran ini sebelumnya di tahun 2020 sempat berada di posisi kedua menggantikan posisi kategori Pertambangan. Peningkatan kinerja pada kategori ini juga disebabkan karena peningkatan kinerja yang terjadi pada sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan.

Gambar Grafik Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 2019-2023 (Persen)



* Angka sementara/Preliminary Figures

**Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

8. Transportasi dan Pergudangan

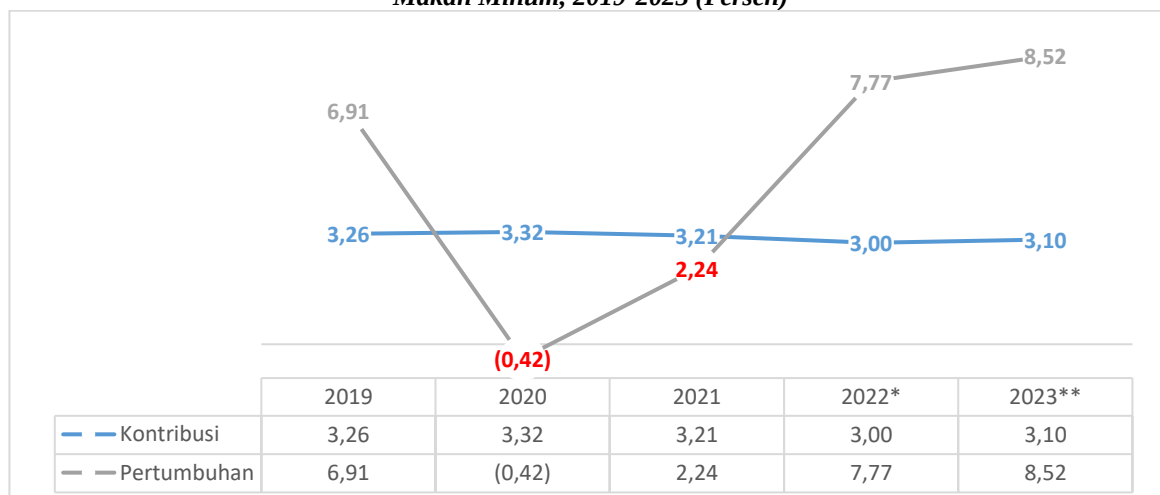
Dalam struktur perekonomian Kabupaten Banjar, kategori transportasi dan pergudangan secara total menyumbang sebesar 4,63 persen di tahun 2023 terhadap pembentukan PDRB kabupaten Banjar. Bila dibandingkan dengan tahun 2020, terjadi peningkatan kinerja perekonomian di tahun 2022 dan 2023 pada lapangan usaha transportasi baik dilihat dari nominal PDRB atas harga berlaku maupun harga konstan. Peningkatan kinerja ini karena adanya pencabutan kebijakan PPKM dari pemerintah yang sebelumnya tumbuh negatif yaitu -3,23 persen pada tahun 2020 akibat dampak pandemi Covid. Di sisi lain, terjadi peningkatan harga BBM dan harga tiket angkutan baik darat, laut dan udara memicu peningkatan nilai tambah pada kinerja kategori angkutan.

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kategori lapangan usaha penyedia akomodasi dan makan minum mempunyai kontribusi sebesar tiga persen terhadap total PDRB Kabupaten Banjar dan tumbuh positif 8,52 persen di tahun 2023 dan menyumbang sebesar 3,10 persen terhadap perekonomian di Kabupaten Banjar. Kegiatan ekonomi yang termasuk dalam kategori ini antara lain warung makan, rumah makan, restoran, dan hotel. Menjamurnya rumah makan, cafe-cafe, dan tingginya hunian kamar hotel turut meningkatkan pertumbuhan kategori ini.

Selama terjadinya pandemi Covid pada tahun 2020, kategori ini pun tidak luput dari dampak yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya penyedia makan minum (warung, rumah makan, dan restoran) dan penginapan yang harus tutup sementara dan mengurangi pengeluaran operasional usaha serta merumahkan sebagian pekerjanya karena turunnya pendapatan usaha akibat terbatasnya mobilitas masyarakat selama pandemi Covid-19 di tahun 2020.

Gambar Grafik Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum, 2019-2023 (Persen)



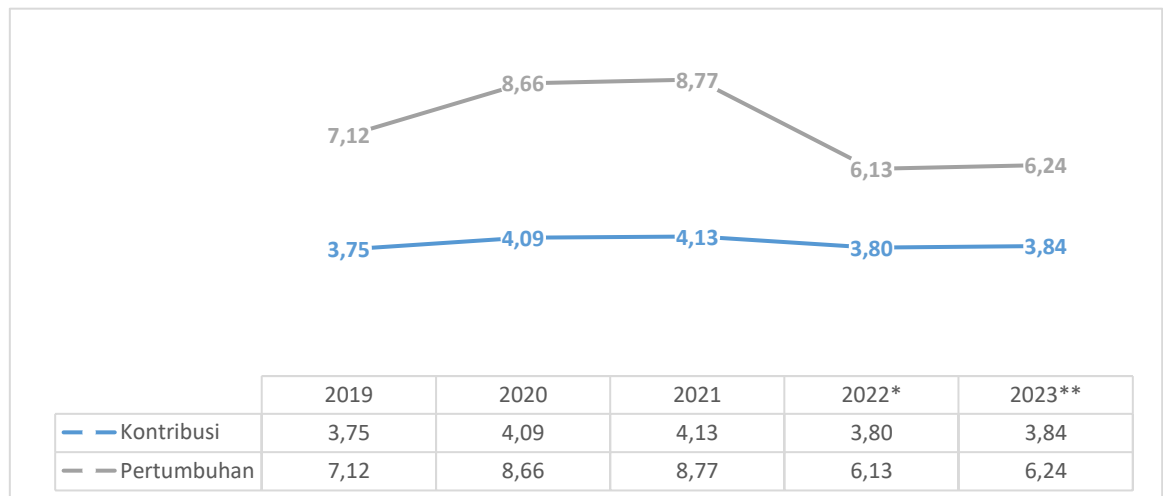
* Angka sementara/Preliminary Figures

**Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

10. Informasi dan Komunikasi

Kategori informasi dan komunikasi menjadi salah satu lapangan usaha yang sangat signifikan peningkatan kinerja ekonomi bahkan tumbuh lebih cepat selama pandemi Covid-19 di tahun 2020. Kontribusi kategori informasi dan komunikasi terhadap PDRB Kabupaten Banjar di tahun 2023 sebesar 3,84 persen dengan pertumbuhannya mencapai 6,24 persen. Tingginya penggunaan internet dan komunikasi melalui gadget dalam metode pembelajaran secara *online* maupun kebijakan *work from home* (WFH) selama pandemi mampu mendongkrak naik pertumbuhan kategori lapangan usaha informasi dan komunikasi.

Gambar Grafik Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Kategori Informasi dan Komunikasi Kabupaten Banjar, 2019-2023 (Persen)



*Angka sementara/Preliminary Figures

**Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

11. Jasa Keuangan dan Asuransi

Dalam struktur perekonomian PDRB Kabupaten Banjar tahun 2023, peranan kategori jasa keuangan mencapai 1,96 persen dan tingkat pertumbuhan sebesar 5,33 persen. Kategori ini sempat tumbuh negatif di tahun 2022 sebesar -0,87 persen karena nilai pinjaman tumbuh lebih kecil dibanding nilai simpanan yang ada di masyarakat. Guna meningkatkan kembali aktivitas kegiatan di lapangan usaha ini salah satunya adalah kebijakan kemudahan administrasi dan persyaratan yang dikeluarkan untuk masyarakat melakukan kredit perbankan mampu mempertahankan kinerja perbankan dalam perekonomian.

12. Real Estate

Kategori real estat memberikan kontribusi yang relatif stabil dan masih tumbuh positif terhadap perekonomian di Kabupaten Banjar selama masa pandemi Covid-19 hingga saat ini, dengan peranan sebesar 3,24 persen dan pertumbuhan mencapai 4,74 persen di tahun 2023. Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh lapangan usaha ini adalah persewaan dan penjualan rumah/ruko.

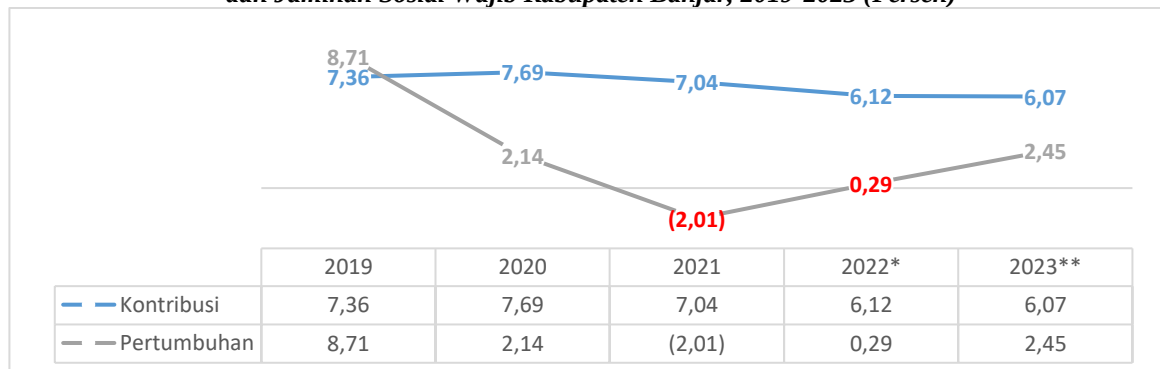
13. Jasa Perusahaan

Salah satu kegiatan ekonomi yang paling terdampak pandemi Covid-19 pada kategori Jasa perusahaan adalah agen perjalanan. Hal ini tampak dari pertumbuhan negatif -1,22 persen di tahun 2020 meskipun porsi PDRB jasa perusahaan sangat kecil dalam menyumbang total PDRB Kabupaten Banjar yaitu 0,36 persen. Namun di tahun 2023, kinerja kategori ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dengan tumbuh positif sebesar 7,84 persen. Hal ini karena telah dibukanya pemberangkatan ibadah umroh dan haji oleh pemerintah Arab Saudi pasca pandemi Covid-19 tahun 2020.

14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Aktivitas ekonomi yang terjadi pada pemerintahan di Kabupaten Banjar tercermin dalam PDRB kategori lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Peranannya dalam pembentukan PDRB di tahun 2023 cukup tinggi yaitu sebesar 6,07 persen dan tumbuh 2,45 persen. Kinerja administrasi pemerintahan sempat mengalami penurunan di tahun 2021 karena anggaran belanja pegawai pada postur realisasi APBD Kabupaten Banjar mengalami penurunan. Secara lebih lanjut dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

Gambar Grafik Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Kabupaten Banjar, 2019-2023 (Persen)



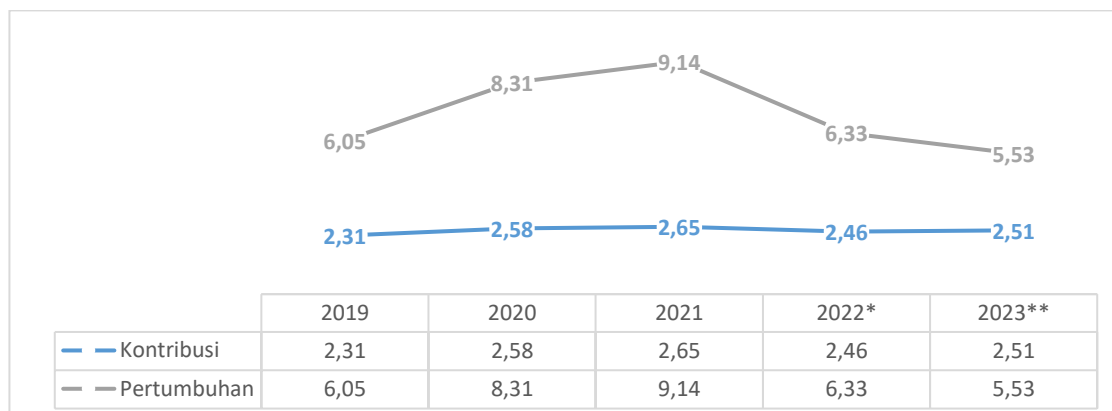
15. Jasa Pendidikan

Aktivitas ekonomi pada kegiatan jasa pendidikan di Kabupaten Banjar tercermin dari nilai PDRB kategori jasa pendidikan. Besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh kategori ini dalam menciptakan nilai tambah pada PDRB Kabupaten Banjar tahun 2023 adalah sebesar 5,14 persen dengan tingkat pertumbuhannya sebesar 4,40 persen. Pertumbuhan kategori lapangan usaha jasa pendidikan sempat mengalami perlambatan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 bila dibandingkan dengan kinerja ketika pandemi Covid belum terjadi di tahun 2019. Hal ini disebabkan kebijakan proses pembelajaran jarak jauh dari rumah/*online*.

16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Jasa kesehatan adalah kategori yang memiliki kinerja yang tumbuh tinggi di tengah pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan tingginya permintaan pada aktivitas jasa kesehatan dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 misalnya tes rapid dan PCR, vaksinasi yang gencar dilakukan selama tahun 2021 dan 2022 yang juga berdampak pada peningkatan pendapatan yang diterima terutama di sektor kesehatan swasta dalam penanganan Covid-19. Pada tahun 2023 perekonomian Kabupaten Banjar sektor jasa kesehatan dapat tumbuh sebesar 5,53 persen dengan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Banjar sebesar 2,51 persen. Secara lebih lanjut dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

Gambar Grafik Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Kabupaten Banjar, 2019-2023 (Persen)



17. Jasa Lainnya

Beberapa aktivitas ekonomi yang masuk kedalam kategori jasa lainnya antara lain jasa hiburan, rekreasi, dan jasa perorangan yang melayani rumah tangga. Dengan adanya pelanggaran kebijakan PPKM dan seiring semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan vaksin, pertumbuhan dari kategori jasa lainnya mengalami peningkatan dengan tumbuh positif 4,53 persen dengan kontribusi yang relatif kecil terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Banjar yaitu mencapai 1,59 persen di tahun 2023. Beberapa kegiatan jasa hiburan dan jasa lainnya untuk rumah tangga yang ada di Kabupaten Banjar turut menggerakkan kinerja sektor ini.

18. Pertumbuhan Ekonomi Sektoral

Secara umum dapat dikatakan bahwa perekonomian Kabupaten Banjar sepanjang tahun 2019 hingga 2023 cukup fluktuatif dengan kecenderungan semakin membaik pasca pandemi covid 19. Setelah terjadi kontraksi pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar yang tumbuh negatif tahun 2020, akibat pandemi Covid-19 yang terjadi di hampir seluruh negara di dunia namun kondisi itu mulai membaik di tahun 2021-2023. Hal ini ditunjukkan melalui kinerja hampir seluruh kategori yang pertumbuhannya negatif di tahun 2020 mengalami pertumbuhan positif di tahun 2021- 2023. Secara total perekonomian Kabupaten Banjar pada tahun 2023 tumbuh positif namun lebih lambat bila dibandingkan tahun 2022, yaitu dari 4,48 persen di tahun 2022 menjadi 4,35 persen di tahun 2023.

Perlambatan yang terjadi ditahun 2023 ini disebabkan oleh melambatnya kategori pertambangan dari yang sebelumnya 7,63 persen di tahun 2022 menjadi 3,13 persen di tahun 2023. Kategori yang tumbuh cukup tinggi pada tahun 2023 (diatas 5 persen) diantaranya adalah Kategori Perdagangan, Listrik, Penyedia Makan Minum, Angkutan, Informasi dan Komunikasi, dan Jasa-jasa. Sedangkan kategori pertanian adalah yang mengalami pertumbuhan paling kecil dibanding kategori yang lain yaitu 1,79 persen. Hal ini karena perlambatan yang terjadi pada subsektor tanaman pangan dimana komoditi padi mengalami penurunan produksi akibat serangan penyakit,



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

hama dan kekeringan pada tahun 2023. Secara lebih lanjut, pertumbuhan pada masing-masing kategori dapat terlihat pada tabel berikut:

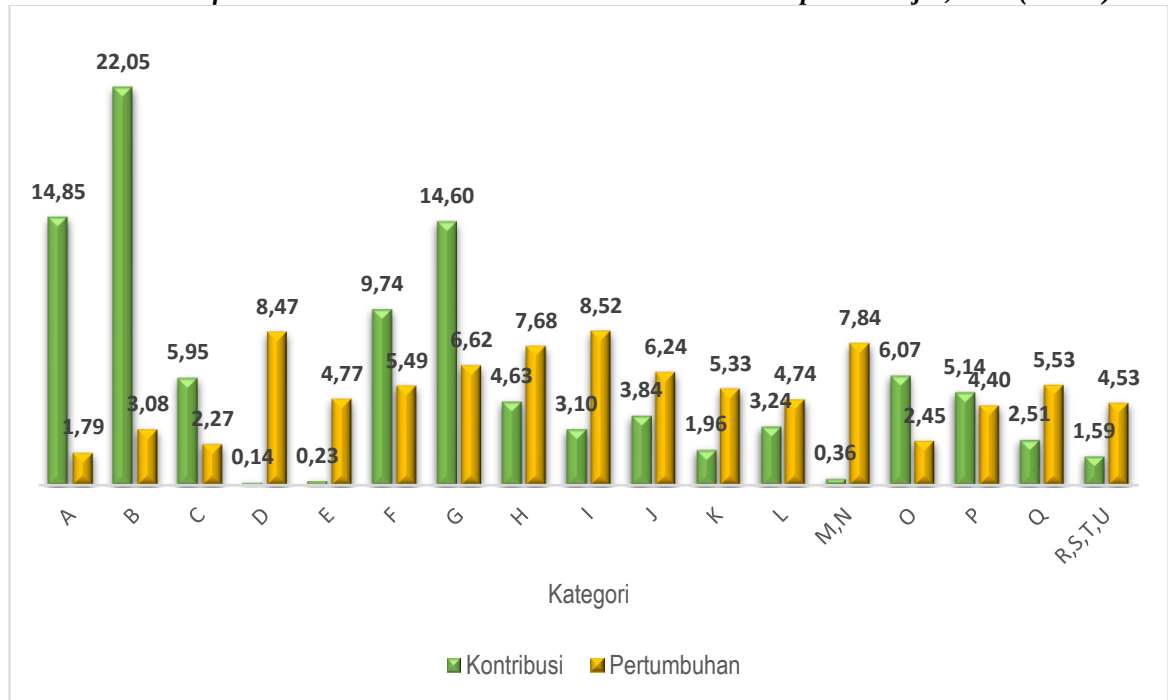
Tabel 2 . 9 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar, 2019-2023 atas dasar Harga Konstan (Tahun Dasar 2010)

	Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021*	2022**	2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	4,75	-2,00	0,97	1,24	1,79
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	-1,22	-8,14	5,46	7,13	3,08
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	2,93	-3,10	4,07	3,98	2,27
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	4,25	4,64	4,63	7,75	8,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	5,72	3,97	4,41	5,86	4,77
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	5,92	-0,9	3,85	3,84	5,49
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	6,93	-3,94	2,31	6,68	6,62
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	7,27	-3,23	2,23	5,06	7,68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	6,91	-0,42	2,24	7,77	8,52
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	7,12	8,66	8,77	6,13	6,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	1,78	2,83	2,09	-0,87	5,33
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	5,42	3,77	5,65	4,69	4,74
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	7,13	-1,22	2,98	6,16	7,84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	8,71	2,14	-2,01	0,29	2,45
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	7,41	1,77	2,55	3,11	4,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	6,05	8,31	9,14	6,33	5,53
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	6,88	-0,31	2,07	6,08	4,53
	Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>	4,51	-1,96	3,21	4,48	1,24

* Angka sementara/*Preliminary Figures*

**Angka sangat sementara/*Very Preliminary Figures*

Gambar Grafik Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi PDRB Kabupaten Banjar, 2023 (Persen)



2.2.8 Struktur Perekonomian

3. Struktur perekonomian Kabupaten Banjar dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 . 10 PDRB Kabupaten Banjar atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2019-2023

Lapangan Usaha/Industry		2019	2020	2021*	2022**	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	2 949 755	2 917 826	3 008 172	3 176 231	3 360 998
B	Pertambangan dan Penggalan/ <i>Mining and Quarrying</i>	2 419 567	2 231 369	2 883 487	4 860 825	4 990 448
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	1 143 037	1 130 199	1 223 631	1 321 488	1 347 081
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	23 456	25 249	27 108	29 450	32 298
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	37 864	39 735	42 116	47 703	51 790
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	1 741 056	1 732 038	1 855 067	2 020 987	2 205 430
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	2 493 033	2 419 903	2 568 427	2 882 375	3 304 951



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

	Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2019	2020	2021*	2022**	2023**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	806 153	792 296	819 427	903 636	1 047 653
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	542 692	549 306	576 055	632 348	701 356
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	623 647	676 074	740 447	800 483	870 060
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	366 630	376 801	403 646	414 065	442 929
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	567 613	596 428	643 280	683 458	733 850
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	61 728	62 257	65 029	71 455	81 058
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	1 224 168	1 270 844	1 261 898	1 290 261	1 374 075
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	952 530	988 688	1 039 071	1 086 670	1 163 983
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	383 237	426 494	475 236	519 104	567 301
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	289 910	291 869	302 187	330 686	359 243
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		16 626 076	16 527 375	17 934 282	21 071 725	21 071 225

Pada tahun 2022-2023 terjadi perubahan struktur perekonomian Kabupaten Banjar yang sebelumnya menunjukkan tipe agraris atau berbasis sektor pertanian menjadi berbasis sektor pertambangan. Hal ini juga pernah terjadi di tahun 2010-2014 dimana sebelumnya sektor pertambangan sempat menduduki posisi pertama kemudian di tahun 2015-2021 berganti posisi dengan sektor pertanian karena terus menurunnya harga batubara saat itu.

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, kenaikan harga batubara di tingkat global membuat sektor pertambangan kembali menduduki tingkat pertama Hal ini terlihat dari besarnya dominasi kategori lapangan usaha pertambangan yang menyumbang 22,05 persen dari total PDRB Kabupaten Banjar pada tahun 2023. Sebaliknya pada sektor pertanian, sejak tahun 2016 persentase sektor ini terus mengalami pengurangan menjadi 14,85 persen di tahun 2023 akibat penurunan yang terjadi secara simultan pada produksi-produksi komoditi yang ada di sektor pertanian. Adapun lapangan usaha lainnya yang memberi sumbangan terbesar (lebih dari 10 persen) setelah kategori pertambangan dan pertanian terhadap perekonomian kabupaten Banjar adalah Sektor Perdagangan. Sektor ini terus mengalami peningkatan kinerja dari tahun ke tahun dan pada tahun 2023 kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kabupaten Banjar berada di peringkat ketiga sebesar 14,60 persen.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Pada dasarnya, struktur ekonomi suatu wilayah tidak akan berubah dalam waktu yang relatif singkat. Terlebih lagi pada beberapa wilayah yang sudah mapan, perubahan struktur ekonomi hanya terjadi bila ada suatu perubahan yang drastis dari kegiatan ekonomi, misalnya penanaman modal secara besar-besaran pada suatu sektor tertentu atau perubahan dalam mengimplementasikan teknologi baru.

Besarnya kontribusi sektor pertambangan pada tahun 2022-2023 sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perekonomian di Kabupaten Banjar secara keseluruhan. Tingginya permintaan dan produksi kegiatan tambang terutama batubara cukup berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi selama pandemi Covid19. Di sisi lain, kenaikan permintaan produksi batubara membuat harga komoditas batubara semakin tinggi. Meskipun demikian, kenaikan harga batubara pada tahun 2023 ini tidak sebesar kenaikan yang terjadi tahun 2022. Peranan untuk masing-masing lapangan usaha, secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2 . 11 Distribusi PDRB Kabupaten Banjar Atas Dasar Harga Berlaku, 2019-2023 (Persen)

	Lapangan Usaha/Industry	2019	2020	2021*	2022**	2023**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	17,74	17,65	16,77	15,07	14,85
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	14,55	13,50	16,08	23,07	22,05
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	6,87	6,84	6,82	6,27	5,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,14	0,15	0,15	0,14	0,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,23	0,24	0,23	0,23	0,23
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	10,47	10,48	10,34	9,59	9,74
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	14,99	14,64	14,32	13,68	14,60
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	4,85	4,79	4,57	4,29	4,63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	3,26	3,32	3,21	3,00	3,10
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	3,75	4,09	4,13	3,80	3,84
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	2,21	2,28	2,25	1,97	1,96
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	3,41	3,61	3,59	3,24	3,24
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,37	0,38	0,36	0,34	0,36
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	7,36	7,69	7,04	6,12	6,07
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	5,73	5,98	5,79	5,16	5,14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	2,31	2,58	2,65	2,46	2,51
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	1,74	1,77	1,68	1,57	1,59
	Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka sementara/*Preliminary Figures*

**Angka sangat sementara/*Very Preliminary Figures*



2.2.9 PDRB Perkapita

Salah satu tujuan utama pembangunan adalah mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi seyogyanya bukanlah tujuan akhir melainkan adalah alat untuk mencapai kesejahteraan, atau dengan kata lain hanya menjadi sasaran antara (syarat perlu) bagi tercapainya kesejahteraan. Di sisi lain pemerataan adalah prasyarat mutlak tercapainya pertumbuhan yang berkualitas. Ukuran kesejahteraan memang sulit dicakup dalam satu indikator yang komprehensif, karena masalah aspek multidimensi yang melatar belakanginya. Namun demikian, banyak literatur dan kajian akademik untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu daerah dengan menggunakan berbagai alternatif, diantaranya adalah dengan pendekatan variabel PDRB perkapita.

PDRB per kapita dapat dilihat dari dua sisi, yaitu PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya produktivitas perorangan yang masih dipengaruhi oleh perubahan harga dari komoditi yang diproduksi. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita.

PDRB perkapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada waktu tertentu. Negara yang sudah maju rata-rata memiliki PDRB perkapita yang lebih besar dibandingkan dengan negara yang sedang berkembang. Menurut klasifikasi world bank, negara yang berpendapatan perkapita kurang dari \$1.005 dikategorikan sebagai negara berpendapatan rendah. sementara negara yang berpendapatan perkapita antara \$1.006 - \$3.955 termasuk negara berpendapatan menengah bawah, negara yang memiliki pendapatan perkapita antara \$3.956-\$12.235 dikategorikan sebagai negara yang berpendapatan menengah tinggi. Sedangkan negara yang memiliki pendapatan perkapita lebih dari \$12.235 termasuk negara berpendapatan perkapita tinggi.

Perkembangan PDRB perkapita di Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini. Selama tahun 2019-2023, PDRB per kapita di Kabupaten Banjar baik atas dasar harga berlaku maupun atas harga konstan terus mengalami peningkatan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku tahun 2023 tercatat mengalami kenaikan sebesar 5,31 persen atau dari yang sebelumnya 36,33 juta rupiah di tahun 2022 menjadi 38,65 juta rupiah di tahun 2023. Tingginya Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku ini disebabkan peningkatan harga pada komoditi batubara di tingkat global. Disinilah terlihat kelemahan dari PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) yang belum mampu mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat yang sesungguhnya karena nilai tersebut dipengaruhi adanya kenaikan/perubahan harga yang terjadi serta adanya pengaruh tingkat pertumbuhan penduduk. Selain itu, angka PDRB Per Kapita masih belum dapat mendeteksi kesenjangan yang terjadi antara penguasaan aset dengan penerima balas



jasa dari faktor produksi sehingga kenaikan harga batubara pada sektor pertambangan tidak otomatis dinikmati oleh seluruh penduduk di Kabupaten Banjar. Namun angka ini masih bisa digunakan untuk menunjukkan rata-rata pendapatan per kapita suatu wilayah.

Disisi lain, PDRB per Kapita atas dasar harga konstan tahun 2023 juga mengalami kenaikan menjadi 22,32 juta rupiah atau naik sebesar 2,71 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dikukur dengan klasifikasi dari World Bank (asumsi 1 US dolar=14.000 rupiah) maka PDRB per kapita Kabupaten Banjar atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 senilai \$1.594 berada pada kategori menengah bawah. Secara lebih rinci nilai PDRB Perkapita Kabupaten Banjar dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2 . 12 PDRB Perkapita Kabupaten Banjar, 2019-2023 (Ribu Rupiah)

PDRB	2019	2020	2021*	2022**	2023**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku(ADHB)	28 532	29 293	31 348	36 336	38 266
PDRB perkapita Atas Dasar harga Konstan (ADHK)	20 536	20 795	21 166	21 816	22 318
<i>Pertumbuhan/Growth (%)</i>					
PDRB perkapita (ADHB)	6,30	2,67	4,93	15,91	5,74
PDRB perkapita (ADHK)	4,03	1,26	1,79	3,07	2,71

* Angka sementara/Preliminary Figures

**Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

2.3 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Kabupaten Banjar Tahun 2023 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjar dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banjar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

2.3.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan umum pendapatan daerah yaitu dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah, meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui arah kebijakan pendapatan antara lain:



- a. Penataan sistem dan prosedur pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- b. meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah melalui sosialisasi dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan;
- c. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
- d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PAD;
- e. Identifikasi dan optimalisasi sumber-sumber PAD potensial berbasis sektor unggulan daerah;
- f. Meningkatkan hasil pendapatan dari retribusi dan pajak daerah melalui identifikasi potensi retribusi dan pajak daerah disertai peningkatan kualitas pelayanan objek retribusi/pajak daerah;
- g. Meningkatkan PAD dengan percepatan investasi;
- h. Pelaksanaan penyesuaian tarif pajak berdasarkan pertimbangan kepentingan umum daerah;
- i. Melakukan koordinasi secara intensif antar instansi vertikal maupun horizontal;
- j. Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan OPD penghasil beserta Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) seperti BUMD, BLUD, dan sebagainya;
- k. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, PPh Pasal 21 dan BPHTB;
- l. Dana transfer masih menjadi penganggaran yang strategis dan penting bagi Kabupaten banjar, sehingga strategi yang dijalankan terutama melalui peningkatan koordinasi vertikal dan peningkatan penerimaan dari dana bagi hasil pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:
 - Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
 - Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar kabupaten/kota dalam pengelolaan dana transfer;
 - Upaya peningkatan jumlah DAU ketika terjadi penurunan DBH melalui koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu;
 - Identifikasi kebutuhan daerah untuk disesuaikan dengan peruntukkan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lain, terutama dalam rangka bagi hasil pajak/ retribusi serta alokasi bantuan keuangan; dan
 - Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal transfer dana penyesuaian.



- m. Percepatan penyusunan perda pajak dan retribusi berdasarkan undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah; dan
- n. Optimalisasi penerapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

Arah kebijakan tersebut merupakan upaya peningkatan PAD Kabupaten Banjar sebagai wujud representasi dari kemandirian daerah. Adapun sumber pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen yaitu PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Adapun pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya peningkatan perolehan pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) sudah tentu pula semakin dipacu. Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama dari PAD dilakukan dengan berbagai upaya baik yang bersifat ekstensifikasi maupun intensifikasi. Namun demikian dalam pelaksanaannya tentu saja selalu memperhitungkan kondisi ekonomi lokal nasional. Hal ini dimaksudkan agar upaya peningkatan perolehan PAD tidak akan memicu tingkat inflasi serta tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi di masyarakat sehingga diharapkan peningkatan perolehan PAD merupakan dampak dari semakin berkembangnya kegiatan perekonomian di masyarakat dan merupakan suatu sinergitas dengan peningkatan ekonomi lokal dan nasional. Peningkatan PAD terutama yang berasal dari pajak dibarengi dengan upaya untuk semakin memproteksi lingkungan dan penciptaan keadilan di dalam masyarakat. Peningkatan retribusi daerah dibarengi dengan upaya peningkatan mutu pelayanan yang diberikan.

Dalam konteks perkembangan daerah, pajak daerah menjadi indikator keberhasilan investasi di daerah tersebut. Selain itu pajak daerah juga menjadi ukuran kinerja pemerintahan dalam aspek pengembangan wilayah memfasilitasi masuknya investor di dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Banjar setiap tahunnya berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi daerah sebagai komponen utama PAD.

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini masih menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Banjar. Kondisi ini merupakan tantangan sekaligus peluang yang perlu disikapi dengan usaha keras agar komposisi peran PAD dan pendapatan dari pemerintah pusat mencapai titik keseimbangan (*equilibrium*).



Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banjar wajib berupaya menggali segala potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru untuk dikembangkan. Upaya peningkatan yang dimaksud adalah melalui kebijakan revitalisasi pemungutan sumber/potensi pendapatan yang sudah ada, penciptaan sumber/potensi baru, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah termasuk juga peningkatan kinerja/penyehatan Badan Usaha Milik Daerah, seperti PT. Air Minum, PT. BPR Martapura, PD Pasar Bauntung Batuah dan PD Baramarta.

2.3.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan pendapatan prioritas alokasi anggaran. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Kebijakan belanja untuk setiap jenis belanja memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan belanja operasi lebih diarahkan untuk penganggaran gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14 beserta tunjangannya, kenaikan pangkat dan berkala sebagaimana dialokasikan pada Tahun 2023.
2. Perhitungan akses serta penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan ASN melalui PPPK dan formasi umum sesuai formasi pegawai Tahun 2023.
3. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.
4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017.



5. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah.
7. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
9. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
11. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi Hal. 48 Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kab. Banjar Tahun 2023 banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Penganggaran perjalanan dinas di tempatkan di belanja rutin Sekretariat Perangkat Daerah.
12. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek Pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum.

2.3.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya, adapun pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan



surplus APBD, komponen pengeluaran daerah meliputi penyertaan modal pada BUMD, pembayaran hutang pokok dan pemberian pinjaman daerah.

Adapun kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan meliputi:

1. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi tahun anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
3. SiLPA tahun 2022-2027 diproyeksikan penurunan per tahunnya, dalam artian proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penyerapan anggaran sesuai dengan yang direncanakan.
4. Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD, komponen Pengeluaran Daerah meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pada BUMD, pembayaran hutang pokok dan pemberian pinjaman daerah.

2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2023, namun juga melihat *trend* pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target RPJMD.

Berikut hasil pengukuran indikator kinerja dari setiap tujuan/sasaran yang telah tercapai target kinerjanya:

- Hasil pencapaian kinerja utama meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan indikator Angka Kriminalitas menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama meningkatnya kesehatan reproduksi dengan indikator Tingkat Pertumbuhan Penduduk menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama menurunnya tingkat pengangguran dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Berhasil**.



- Hasil pencapaian kinerja utama meningkatnya derajat kesejahteraan sosial dengan indikator Persentase penduduk miskin / tingkat kemiskinan menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama menurunnya risiko bencana dengan indikator Indeks Risiko Bencana menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama Meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Cukup Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah dengan indikator kinerja Laju Inflasi menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Indeks kualitas lingkungan hidup menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Cukup Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indikator Persentase konektivitas menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama meningkatnya kelayakhunian dengan indikator Persentase pemukiman layak huni menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Berhasil**.

Ada beberapa sasaran indikator kinerja yang tren pencapaiannya belum memenuhi target kinerjanya, yaitu :

- Hasil pencapaian kinerja utama meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Cukup Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Cukup Berhasil**.
- Hasil pencapaian kinerja utama meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Indeks kualitas lingkungan hidup menunjukkan capaian kinerja dengan kategori **Cukup Berhasil**.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian tujuan dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab 3 dan terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD 2023, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya serta pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan. Begitu juga pengembangan sistem pengendalian berbasis teknologi informasi melalui aplikasi SIMONDALEV untuk pelaporan kinerja bulanan yang bisa diakses publik adalah bagian dari menjadikan penilaian kinerja dan transparansi serta akuntabilitas publik sebagai satu paket kebijakan daerah.



Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan penurunan ketimpangan (baik antar wilayah maupun pendapatan), kualitas lingkungan dan penegakan tata ruang. Peran Pemerintah Kabupaten Banjar diperlukan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap warga negara, dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan. Ini juga mencakup pentingnya perlindungan dan peningkatan inklusi sosial bagi kelompok-kelompok marjinal yang masih menghadapi ketimpangan akses dan manfaat pembangunan.

Kedua, hal ini juga bisa diartikan, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Banjar dengan berbagai unsur baik instansi/organisasi pemerintah lainnya di wilayah Kabupaten Banjar, daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Beberapa sasaran seperti terwujudnya keluarga berencana yang mandiri dan sejahtera, peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, terciptanya tata kelola perekonomian daerah yang responsif, adaptif dan iklim investasi yang kondusif, perlindungan, pemanfaatan dan rehabilitasi sumber daya lahan dan hutan dan terciptanya ketahanan masyarakat terhadap bencana. Tanpa adanya koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKiJP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKiJP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.232.265.489.838,00 dan Realisasi Pendapatan sebesar Rp2.361.153.311.871,04 yang berarti tingkat capaian secara kumulatif sebesar 105,77%. Adapun mengenai pos-pos yang mengalami perubahan dari target Pendapatan Tahun Anggaran 2023, berasal dari masing-masing sumber:

Pendapatan Asli Daerah, meliputi:

a. Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi untuk pendapatan pajak daerah sebesar Rp109.824.795.009,00 dari target Anggaran Perubahan Rp96.196.000.000,00 dengan capaian sebesar 114,17%.

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi untuk pendapatan retribusi daerah sebesar Rp8.367.069.839,00 dari target Anggaran Perubahan Rp8.263.062.975,00 dengan capaian sebesar 101,26%.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi untuk pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp8.916.250.334,00 dari target Anggaran Perubahan Rp11.083.090.240,00 dengan capaian sebesar 80,45%.

d. Lain-Lain PAD yang Sah

Realisasi untuk pos Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp150.833.459.844,04 dari target Anggaran Perubahan Rp134.757.846.785,00 dengan capaian sebesar 111,93%.

Total anggaran setelah perubahan penerimaan pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar Rp250.300.000.000,00 dengan realisasinya sebesar Rp277.941.575.026,04 dengan capaian sebesar 111,04%.

Pendapatan Transfer, meliputi:

1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi untuk pos bagi hasil pajak sebesar Rp36.971.401.241,00 dari target Anggaran Perubahan Rp33.740.312.000,00 atau capaian di atas target sebesar 109,58%.

b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Realisasi untuk pos bagi hasil bukan pajak sebesar Rp564.917.111.162,00 dari target Anggaran Perubahan Rp520.181.800.000,00 atau mengalami kenaikan capaian sebesar 108,60%.

c. Dana Alokasi Umum

Pos Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi 99,99% dari Anggaran Perubahan Rp720.930.446.000,00 dan realisasi sebesar Rp720.866.934.775,00.

d. Dana Alokasi Khusus

Realisasi penerimaan pendapatan untuk pos Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi 95,28% dari Anggaran Perubahan Rp358.265.891.000,00 dan realisasi sebesar Rp341.356.453.666,00.

2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya:

a. Dana Desa

Realisasi penerimaan Dana Desa dari transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp222.580.763.000,00 dari Anggaran Perubahan Rp222.580.763.000,00 atau terealisasi sebesar 100%.

b. Dana Insentif Daerah/Fiskal

Realisasi penerimaan Dana Insentif Daerah/Fiskal dari transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp5.672.424.000,00 dari Anggaran Perubahan Rp0,00.

3. Transfer Pemerintah Provinsi

a. Realisasi untuk Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp188.402.649.001,00 dari target Anggaran Perubahan Rp123.230.277.838,00 atau mengalami kenaikan capaian sebesar 152,89%.

Total Realisasi penerimaan Pendapatan Transfer adalah sebesar Rp2.080.767.736.845,00 dari target Anggaran Perubahan sebesar Rp1.978.929.489.838,00 atau di atas target sebesar 105,15%.

Lain – Lain Pendapatan Yang Sah:

1. Pendapatan Hibah

Realisasi pendapatan hibah sebesar Rp2.444.000.000,00 dari target Anggaran setelah perubahan Rp3.036.000.000,00 atau terealisasi sebesar 80,50% yang merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah pusat.

3.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.559.635.131.121,00 dengan Realisasi sebesar Rp2.261.876.594.612,98 yang berarti tingkat capaian secara kumulatif sebesar 88,37% dengan perincian penggunaan Belanja Daerah sebagai berikut:



- a. Belanja Operasi, dengan jumlah anggaran setelah perubahan Rp1.760.286.975.871,00 dan terealisasi sebesar Rp1.504.021.084.905,02 atau sebesar 85,44%. Pendistribusian dana tersebut digunakan untuk Belanja Pegawai dianggarkan Rp1.006.647.534.561,00 dengan realisasi sebesar Rp806.633.031.475,00 atau sebesar 80,13%, Belanja Barang dan Jasa dianggarkan Rp658.298.459.216,00 dengan realisasi sebesar Rp604.259.697.529,02 atau sebesar 91,78%, Belanja Hibah dianggarkan Rp90.250.288.544,00 dengan realisasi sebesar Rp88.112.346.572,00 atau sebesar 97,63%, Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp5.090.693.550,00 dengan realisasi sebesar Rp5.016.009.329,00 atau sebesar 98,53%.
- b. Belanja Modal, dengan jumlah anggaran setelah perubahan Rp414.914.397.830,00 dan terealisasi sebesar Rp376.369.085.069,96 atau 90,72%. Pendistribusian dana tersebut digunakan untuk Belanja Tanah dengan realisasi sebesar Rp5.332.333.880,00 atau sebesar 61,15% dari anggaran sebesar Rp8.720.000.000,00, Belanja Peralatan dan Mesin dengan realisasi sebesar Rp92.930.369.497,00 atau 88,01% dari anggaran sebesar Rp105.589.831.537,00, Belanja Gedung dan Bangunan dengan realisasi sebesar Rp78.000.133.887,96 atau 92,46% dari anggaran sebesar Rp214.563.157.164,00, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan realisasi sebesar Rp198.503.513.797,00 atau 92,52% dari anggaran sebesar Rp214.563.157.164,00, Belanja Aset Tetap Lainnya dengan realisasi sebesar Rp1.287.834.008,00 atau 98,95% dari anggaran sebesar Rp1.301.481.640,00, Belanja Aset Lainnya dengan realisasi sebesar Rp314.900.000,00 atau 99,97% dari anggaran Rp315.000.000,00.
- c. Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp8.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.889.091.877,00 atau 73,61%.
- d. Belanja Transfer dengan jumlah anggaran setelah perubahan Rp376.433.757.420,00 dan terealisasi sebesar Rp375.597.332.761,00 atau 99,78%. Pendistribusian dana tersebut digunakan untuk Belanja Bagi Hasil dengan realisasi sebesar Rp8.508.135.897,00 atau 95,42% dari anggaran sebesar Rp8.916.525.800,00 dan Belanja Transfer Bantuan Keuangan dengan realisasi sebesar Rp367.089.196.864,00 atau 99,88% dari anggaran sebesar Rp367.517.231.620,00.

3.1.3 Pembiayaan Daerah

- a. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran tahun Sebelumnya dianggarkan sebesar Rp363.419.641.283,00 dengan realisasi sebesar Rp363.419.641.283,00 atau 100%.
- b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp2.473.976.000,00.
- c. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp36.050.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp36.050.000.000,00 atau 100%.
- d. Pemberian Pinjaman Daerah dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00.



- e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp429.120.334.540,89.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara simultan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Banjar dapat berjalan dengan baik dengan didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dapat dipenuhi secara bertahap. Sumber daya alam yang cukup besar seperti potensi ekonomi pertanian, pertambangan dan sumber daya lainnya menjadi faktor pendukung dan sekaligus menjadi modal dalam penyelenggaraan aktivitas perekonomian masyarakat. Suasana ketertiban dan keamanan daerah yang didukung oleh suasana kondusif masyarakat sangat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum di Kabupaten Banjar. Meski harus diakui bahwa masih banyaknya usulan dari berbagai pihak (masyarakat) dalam pemenuhan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan belum dapat terpenuhi secara keseluruhan, mengingat ketersediaan dana yang terbatas. Penyebaran penduduk yang tidak merata dan kondisi wilayah di Kabupaten Banjar, memerlukan upaya khusus dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Banjar.

Manajemen pengelolaan pajak maupun retribusi daerah semakin meningkat diantaranya penggunaan teknologi dalam hal pemungutan pajak, pengerahan Sumber Daya Manusia yang tersebar di beberapa lokasi, dan didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Namun, dengan adanya kegiatan tersebut masih ada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan sehingga masih perlu dilakukan pembinaan. Disamping itu juga landasan hukum yang menjadi akar pijakan bagi penyelenggaraan pemungutan memerlukan penyesuaian dengan waktu yang cukup cepat, mengingat tingkat perkembangan aktivitas masyarakat dan pembangunan yang sangat cepat.

Secara proporsional, Kabupaten Banjar masih mengandalkan pendapatan pada pos dana transfer, yang tercermin pada proporsional yang masih dominan pada pendapatan dari sumber transfer. Dana Transfer Kabupaten Banjar mengalami kenaikan pada anggaran perubahan APBD, dengan adanya penambahan tersebut maka yang diakomodir di perubahan mengakibatkan kurang efektifnya perencanaan sehingga ada beberapa pekerjaan fisik dan non fisik yang tidak terealisasi sepenuhnya. Sehingga proses perencanaan BMD di beberapa SKPD tidak sesuai dengan perencanaan awal dan memerlukan waktu yang lama dalam mengidentifikasi belanja modal yang termasuk aset tetap, ekstrakomptabel dan belanja pemeliharaan.

Pada aspek Belanja, manajemen waktu penyelenggaraan APBD sangat mempengaruhi dalam pencapaian target kinerja Fiskal dan Moneter. Hal ini sangat beralasan mengingat jika penetapan APBD belum dapat dicapai pada akhir tahun sebelumnya karena beberapa kendala teknis pada tahapan Pembahasan di DPRD, ini berarti jadwal waktu pelaksanaan akan memakan waktu guna persiapan pembentukan Tim Pelaksana. Jika Penetapan APBD dilaksanakan akhir tahun maka proses persiapan pengadaan akan mengalami kendala keterlambatan sehingga pelaksanaan belanja



tidak bisa langsung digunakan pada awal tahun. Dalam kaitan ini termasuk pula ketersediaan tenaga atau personil yang memiliki sertifikasi guna menjadi Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa lainnya sangat terbatas sehingga berpengaruh dalam proses pelaksanaan kegiatan terutama kegiatan berupa fisik. Demikian beberapa kendala secara umum yang dapat disampaikan, lebih rincinya diuraikan lebih lanjut dalam laporan ini secara keseluruhan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Basis Akuntansi yang Mendasari Laporan Keuangan

Dalam hal penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar, basis akuntansi yang digunakan yaitu basis kas untuk pos-pos laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan laporan arus kas serta menerapkan basis akrual untuk penyusunan neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis kas untuk pos-pos laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan/penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas/setara kas diterima oleh kas daerah, dan belanja/pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas/setara kas dikeluarkan dari kas daerah. Sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis akrual untuk pendapatan dan beban dalam laporan operasional serta neraca untuk perkiraan-perkiraan aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.2 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Sebagai komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),



Pemerintah Kabupaten Banjar telah menetapkan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 85 tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 55 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Akuntansi

a. Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasikan ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), kas telah diterima oleh SKPD/SKPKD atau diterima entitas lain di luar Pemerintah Daerah atas nama BUD dengan memperhatikan sumber, sifat, dan prosedur penerimaan pendapatan.
- Akuntansi Pendapatan-LO diukur dan dicatat sebesar nilai kas/*non* kas yang diterima atau akan diterima dan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Akuntansi pendapatan-LRA diukur dan dicatat sebesar nominal uang yang masuk ke kas daerah berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

b. Beban dan Belanja

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.



- Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban ketika terjadi peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Kemudian terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dan adanya pengesahan dari BUD untuk pengeluaran yang dibiayai dari Pendapatan Non APBD.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari RKUD untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD/PPK-SKPD.
- Dalam hal BLUD, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi.

c. Transfer

- Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- Pengakuan atas transfer masuk diakui pada saat diterimanya kas pada ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan/atau diterimanya Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden/Peraturan Gubernur terkait dengan kurang salur.
- Pengakuan atas transfer keluar diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD untuk transaksi transfer di SKPD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD.
- Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada LO sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).
- Transfer disajikan menurut klasifikasi sumber dan entitas penerima.

d. Pembiayaan

- Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam



penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran

- Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah
- Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah
- Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- Penerimaan pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima
- Pengeluaran pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs Tengah Bank Indonesia) pada tanggal pembiayaan.

e. Kas dan Setara Kas

- Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.
- Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas dan setara kas pada pemerintah daerah serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- Kas dan Setara Kas diakui pada saat memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada BUD, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan/atau bendahara BLUD.

f. Piutang

- Piutang adalah hak Pemerintah Kabupaten Banjar untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib retribusi/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- Penyisihan Piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas.
- Piutang diukur sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), berdasarkan Surat Ketetapan Kurang Bayar yang diterbitkan, berdasarkan tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan



Pajak untuk WP yang mengajukan banding dan sebesar surat tagihan yang tercantum dalam tagihan.

g. Persediaan

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- Persediaan diakui dengan pendekatan beban, yaitu setiap pembelian persediaan langsung dicatat sebagai beban persediaan.
- Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
- Sistem pencatatan yang digunakan yaitu metode perpetual dengan menggunakan metode *First In First Out (FIFO)* dan harga pembelian terakhir.

h. Investasi

- Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, Dividen dan royalty atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).
- Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu metode biaya, metode ekuitas dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penggunaan metode-metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut: Kepemilikan sampai dengan 50% menggunakan metode biaya, Kepemilikan lebih dari 50 menggunakan metode ekuitas, Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

i. Aset Tetap

- Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut : pengeluaran untuk peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan yang nilainya sama dengan atau lebih dari



Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); pengeluaran untuk batas nilai kapitalisasi aset lainnya yang terdiri dari : hewan/ternak/tumbuhan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); pengeluaran untuk buku dan perpustakaan yang nilainya sama dengan atau lebih sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- Pengeluaran di bawah nilai minimal akan dimasukkan ke pencatatan barang ektrakomptabel dengan batasan nilai minimal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar (jika tidak dimungkinkan pada saat perolehan) dikurangi akumulasi penyusutan.
- Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah konstruksi dalam pengerjaan buku-buku perpustakaan, hewan ternak, tanaman, Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya dan Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dan tanpa memperhitungkan nilai residu.
- Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan masing-masing kelompok aset tetap secara umum adalah sebagai berikut :

Tabel 4 . 1 Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	5 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya	4 s.d 5 tahun

- Pada tahun 2023, untuk perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud menggunakan pendekatan bulanan (yang sebelumnya tahunan). Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banjar mengambil kebijakan bahwa perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud yang diperoleh sebelum tahun 2019, dicatat sesuai tahun perolehan per 31 Desember.



j. Kontruksi Dalam Pengerjaan

- Kontruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
- Kontruksi Dalam pengerjaan diakui jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset yang akan diperoleh, biaya perolehan dapat diukur secara andal dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan
- Kontruksi Dalam Pengerjaan diukur dengan biaya perolehan.

k. Dana Cadangan

- Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- Dana cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindahbukuan atau yang sejenisnya atas dana cadangan yang dikeluarkan oleh BUD atas persetujuan PPKD.
- Pencairan dana cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas dana cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.
- Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan.
- Dana Cadangan disajikan dalam Neraca, Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan dan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
- Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan dan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi

l. Aset Lainnya

- Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- Termasuk di dalam aset lainnya adalah tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, yang telah jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lain-lain.
- Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tak berwujud. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang



dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

- Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- Aset tak berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurang amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 5 (lima) tahun.

m. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- Kewajiban diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban jangka pendek meliputi utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.
- Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominalnya
- Apabila kewajiban dalam mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank sentral pada tanggal neraca.

n. Koreksi Kesalahan

- Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

o. Penyajian Kembali (*Restatement* Neraca)

- Penyajian Kembali merupakan perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada LPE dan diungkapkan dalam CaLK.
- Penyajian Kembali adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis kas menuju akrual menjadi akrual penuh.



p. Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

- Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada Masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
- Laporan Keuangan BLU adalah bentuk pertanggungjawaban BLU yang disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan

q. Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengingat antara pemberi konsesi dan mitra

- Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.
- Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.
- Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.
- Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa
- Pengakuan kewajiban pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi.

r. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

1. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
2. dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:



1. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan

2. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Komposisi Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 . 1 Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Uraian	Anggaran TA. 2023 (Rp)	Realisasi TA. 2023 (Rp)	%	Realisasi TA. 2022 (Rp)	% Naik/ Turun
PENDAPATAN	2.232.265.489.838,00	2.361.153.311.871,04	105,77	2.138.112.511.477,77	10,43
BELANJA & TRANSFER	2.559.635.131.121,00	2.261.876.594.612,98	88,37	1.853.382.074.039,57	22,04
SURPLUS/(DEFISIT)	(327.369.641.283,00)	99.276.717.258,06	(30,33)	284.730.437.438,20	(65,13)
PEMBIAYAAN NETO	327.369.641.283,00	329.843.617.282,83	100,76	78.689.203.844,63	319,17
SILPA	0,00	429.120.334.540,89		363.419.641.282,83	18,08

Jumlah Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.361.153.311.871,04 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp277.941.575.026,04, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.080.767.736.845,00 dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp2.444.000.000,00.

Jumlah Realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.261.876.594.612,98 terdiri dari Belanja sebesar Rp1.886.279.261.851,98, dan Transfer sebesar Rp375.597.332.761,00.

Jumlah Realisasi Surplus dari realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp99.276.717.258,06 merupakan hasil perhitungan dari realisasi Pendapatan sebesar Rp2.361.153.311.871,04 dikurangi realisasi Belanja dan Transfer Daerah sebesar Rp2.261.876.594.612,98.

Jumlah Pembiayaan Neto Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp329.843.617.282,83 merupakan hasil perhitungan dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp365.893.617.282,83 dikurangi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp36.050.000.000,00.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp429.120.334.540,89 merupakan hasil penjumlahan dari hasil surplus APBD sebesar Rp99.276.717.258,06 ditambah jumlah Neto Pembiayaan sebesar Rp329.843.617.282,83.

5.1.1 PENDAPATAN	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	2.232.265.489.838,00	2.361.153.311.871,04	2.138.112.511.477,77



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Realisasi Pendapatan terdiri dari:

Tabel 5 . 2 Pendapatan

Pendapatan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	% Naik/ Turun
Pendapatan Asli Daerah	250.300.000.000,00	277.941.575.026,04	111,04	201.509.353.000,77	37,93
Pendapatan Transfer	1.978.929.489.838,00	2.080.767.736.845,00	105,15	1.935.319.158.477,00	7,52
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	3.036.000.000,00	2.444.000.000,00	80,50	1.284.000.000,00	90,34
JUMLAH	2.232.265.489.838,00	2.361.153.311.871,04	105,77	2.138.112.511.477,77	10,43

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	250.300.000.000,00	277.941.575.026,04	201.509.353.000,77

Realisasi Pendapatan Asli Daerah berasal dari (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan (iv) Lain-Lain PAD Yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing adalah sebesar Rp277.941.575.026,04 dan Rp201.509.353.000,77 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

a. Pajak Daerah

Tabel 5 . 3 Pajak Daerah

Uraian	TA. 2023		%	TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Pajak Daerah	96.196.000.000,00	109.824.795.009,00	114,17	93.731.388.091,00	16.093.406.918,00	17,17

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah selama Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp109.824.795.009,00 dan sebesar Rp93.731.388.091,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 4 Rincian Pajak Daerah

Pajak Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Pajak Hotel	4.000.000.000,00	4.945.101.732,00	123,63	4.555.390.742,00	389.710.990,00	8,55
Pajak Restoran	9.000.000.000,00	11.246.976.546,00	124,97	10.528.599.068,00	718.377.478,00	6,82
Pajak Hiburan	350.000.000,00	661.216.680,00	188,92	355.025.050,00	306.191.630,00	86,25
Pajak Reklame	2.178.000.000,00	2.252.339.498,00	103,41	2.177.356.284,00	74.983.214,00	3,44
Pajak Penerangan Jalan	31.000.000.000,00	33.795.551.516,00	109,02	30.561.829.707,00	3.233.721.809,00	10,58
Pajak Parkir	850.000.000,00	1.057.715.272,00	124,44	786.142.865,00	271.572.407,00	34,54
Pajak AirTanah	256.000.000,00	268.613.069,00	104,93	256.925.021,00	11.688.048,00	4,55
Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	11.665.500,00	23,33	22.123.500,00	(10.458.000,00)	(47,27)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.512.000.000,00	6.008.193.465,00	239,18	2.481.824.230,00	3.526.369.235,00	142,09
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	9.800.000.000,00	8.986.638.042,00	91,70	7.826.334.084,00	1.160.303.958,00	14,83



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Pajak Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	36.200.000.000,00	40.590.783.689,00	112,13	34.179.837.540,00	6.410.946.149,00	18,76
Jumlah	96.196.000.000,00	109.824.795.009,00	114,17	93.731.388.091,00	16.093.406.918,00	17,17

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.093.406.918,00 atau sebesar 17,17%. Kenaikan Pendapatan Pajak Daerah tersebut secara signifikan terdapat pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang mengalami kenaikan sebesar Rp3.526.369.235,00 atau kenaikan sebesar 142,09%.

Dasar hukum atas pemungutan pajak daerah Kabupaten Banjar adalah:

Tabel 5 . 5 Dasar hukum atas pemungutan pajak daerah Kabupaten Banjar

Pajak Daerah	Nomor Perda	SKPD Pengelola
Pajak Hotel	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Pajak Restoran	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Pajak Hiburan	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Pajak Reklame	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Pajak Penerangan Jalan	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Pajak Parkir	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Pajak Air Tanah	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Pajak Sarang Burung Walet	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Pajak Daerah	Nomor Perda	SKPD Pengelola
	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

b. Retribusi Daerah

Tabel 5 . 6 Retribusi Daerah

Uraian	TA. 2023		%	TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Retribusi Daerah	8.263.062.975,00	8.367.069.839,00	101,26	6.599.136.034,00	1.767.933.805,00	26,79

Merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Banjar dipungut oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah, dengan realisasi selama tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebesar Rp8.367.069.839,00 dan Rp6.599.136.034,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 7 Rincian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Retribusi Pelayanan Kesehatan	700.000.000,00	1.506.000.550,00	215,14	922.007.850,00	583.992.700,00	63,34
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	686.900.000,00	629.120.000,00	91,59	756.849.000,00	(127.729.000,00)	(16,88)
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	90.000.000,00	92.767.500,00	103,08	94.721.000,00	(1.953.500,00)	(2,06)
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	450.000.000,00	223.560.000,00	49,68	410.670.000,00	(187.110.000,00)	(45,56)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	571.843.375,00	593.817.426,00	103,08	475.763.478,00	118.053.948,00	24,81
Retribusi Terminal	60.000.000,00	29.806.000,00	49,68	36.806.000,00	(7.000.000,00)	(19,02)
Retribusi Tempat Khusus Parkir	88.050.000,00	120.900.000,00	137,31	112.250.000,00	8.650.000,00	7,71
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	295.000.000,00	236.250.000,00	80,08	204.200.000,00	32.050.000,00	15,70
Retribusi Rumah Potong Hewan	190.000.000,00	138.435.000,00	72,86	122.055.000,00	16.380.000,00	13,42
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	1.550.000,00	2.400.000,00	154,84	2.400.000,00	0,00	0,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	10.320.000,00	10.230.000,00	99,13	10.615.000,00	(385.000,00)	(3,63)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	177.114.000,00	158.870.000,00	89,70	173.002.000,00	(14.132.000,00)	(8,17)
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	4.887.500.000,00	3.926.976.171,00	80,35	3.258.146.706,00	668.829.465,00	20,53
Retribusi Izin Trayek	18.500.000,00	19.256.000,00	104,09	19.650.000,00	(394.000,00)	(2,01)
Retribusi IMTA	36.285.600,00	678.681.192,00	1.870,39	0,00	678.681.192,00	100,00
Jumlah	8.263.062.975,00	8.367.069.839,00	101,26	6.599.136.034,00	1.767.933.805,00	26,79

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan dibandingkan



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

tahun sebelumnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.767.933.805,00 atau sebesar 26,79 %.

Kenaikan Pendapatan Retribusi Daerah tersebut secara signifikan terdapat pada Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing mengalami kenaikan sebesar Rp678.681.192,00 atau kenaikan sebesar 100%.

Dasar hukum atas pemungutan retribusi daerah Kabupaten Banjar adalah:

Tabel 5 . 8 Dasar hukum atas pemungutan retribusi daerah Kabupaten Banjar

Retribusi Daerah	Nomor Perda	SKPD Pengelola
Retribusi Pelayanan Kesehatan	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.5 Tahun 2019 tentang perubahan kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	Dinas Kesehatan
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No .5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum	Dinas Perhubungan
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.6 Tahun 2011 Tentang Jasa Umum	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Banjar	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.7 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.	Dinas Pertanian
	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Lampiran I: Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No .9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	Dinas Kesehatan
	Lampiran I, II, III: Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha	Dinas Perhubungan
Retribusi Terminal	Lampiran I, II, III: Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha	Dinas Perhubungan
Retribusi Tempat Khusus Parkir	Lampiran I, II, III: Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha	Dinas Perhubungan
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	Peraturan Bupati No.48 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No.11 Tahun 2015 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Retribusi Daerah	Nomor Perda	SKPD Pengelola
	Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa Berupa Wisma Sultan Sulaيمان Dan Tempat Penginapan Gedung Perwakilan/Guest House Di Jakarta	
	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Retribusi Rumah Potong Hewan	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	Lampiran IV: Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha.	Dinas Perhubungan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Peraturan Bupati Kabupaten Banjar No.53 Tahun 2017 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha	Dinas Pertanian
	Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2017 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No.11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Retribusi Izin Trayek		
Retribusi IMTA	Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disisahkan

Tabel 5 . 9 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disisahkan

Uraian	TA. 2023		%	TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disisahkan	11.083.090.240,00	8.916.250.334,00	80,45	7.167.770.066,00	1.748.480.268,00	24,39

Merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas pembagian Dividen dari Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang berasal dari kegiatan pembiayaan/investasi berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banjar pada Bank Kalsel, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan/Bank dengan realisasi selama Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebesar Rp8.916.250.334,00 dan Rp7.167.770.066,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 10 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Lembaga Keuangan)

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)	% Naik/ Turun
	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Lembaga Keuangan)						
1	Bank Kalsel	4.198.156.214,00	3.260.595.556,00	77,67	3.009.261.248,00	251.334.308,00	8,35
2	BPR Martapura Banjar Sejahtera	1.200.000.000,00	338.086.481,00	28,17	186.631.436,00	151.455.045,00	81,15



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)	% Naik/ Turun
	Jumlah	5.398.156.214,00	3.598.682.037,00	66,67	3.195.892.684,00	402.789.353,00	12,60

Tabel 5 . 11 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Aneka Usaha)

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)	% Naik/ Turun
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Aneka Usaha)							
1	PD. Baramarta	3.022.711.841,00	2.800.000.000,00	92,63	3.000.000.000,00	(200.000.000,00)	(6,67)
2	PD. Pasar Bauntung Batuah	800.000.000,00	655.346.112,00	81,92	231.245.549,00	424.100.563,00	183,40
2	PT. Banjar Intan Mandiri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	3.822.711.841,00	3.455.346.112,00	90,39	3.231.245.549,00	224.100.563,00	6,94

Tabel 5 . 12 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (%)	(%)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)							
1	PDAM Intan Banjar	1.862.222.185,00	1.862.222.185,00	100	740.631.833,00	1.121.590.352,00	151,44
	Jumlah	1.862.222.185,00	1.862.222.185,00	100	740.631.833,00	1.121.590.352,00	151,44

BUMD yang memberikan Dividen dan BUMD yang tidak memberikan Dividen dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dividen atas laba yang diterima oleh Bank Kalsel pada tahun 2023 sebesar Rp3.260.595.556,00
2. Dividen atas laba yang diterima dari BPR Martapura Banjar Sejahtera atas laba tahun 2023 sebesar Rp338.086.481,00
3. Bagian Laba yang diterima dari PD. Baramarta bagian laba tahun 2023 sebesar Rp2.800.000.000,00
4. Bagian Laba yang diterima dari PD. Pasar Bauntung Batuah bagian laba tahun 2023 sebesar Rp655.346.112,00
5. Bagian Laba yang diterima dari PDAM Intan Banjar bagian laba tahun 2023 sebesar Rp1.862.222.185,00

Selain itu terdapat BUMD yang tidak memberikan Dividen, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Tidak terdapat realisasi pendapatan Dividen atas bagian laba dari penyertaan modal dari PT Banjar Intan Mandiri (BIM) pada Tahun Anggaran 2023, BUMD tersebut mengalami pailit.
2. Tidak terdapat Dividen pada BPR Sungai Tabuk, BPR Simpang Empat dan BPR Astambul pada tahun 2023, karena BPR tersebut telah melakukan penggabungan Perseroan ke dalam BPR Martapura Banjar Sejahtera berdasarkan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 3 Juni tahun 2022.

Dasar Hukum atas pemungutan bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD adalah:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Tabel 5 . 13 Dasar Hukum atas pemungutan bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disisahkan	Nomor Perda/Dasar Hukum Lainnya	SKPD Pengelola
Bank Kalsel	SK Nomor 05 tentang RUPS Tahunan	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
BPR Martapura Banjar Sejahtera	Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2017	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
PD. Baramarta	Anggaran Rumah Tangga PT Perusahaan Daerah Baramarta	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
PD. Pasar Bauntung Batuah	Perda Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2023	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
PT. Banjar Intan Mandiri	Perda Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2008	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
PT. Air Minum Intan Banjar	Anggaran Rumah Tangga PT. Air Minum Intan Banjar	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Tabel 5 . 14 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Uraian	TA. 2023		%	TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	134.757.846.785,00	150.833.459.844,04	111,93	94.011.058.809,77	56.822.401.034.27	60,44

Merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap (tidak rutin), dengan realisasi selama Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebesar Rp150.833.459.844,04 dan Rp94.011.058.809,77 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 15 Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	211.159.244,00	0,00	29.160.000,00	181.999.244,00	624,14
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	127.124.783,00	120.500.000,00	94,79	366.608.000,00	(246.108.000,00)	(67,13)
Jasa Giro	6.959.595.963,00	9.531.289.295,20	136,95	4.332.280.358,68	5.199.008.936,52	120,01
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	4.750.000,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00
Pendapatan Bunga	6.000.000.000,00	8.086.301.369,88	134,77	0,00	8.086.301.369,88	0,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	48.500.000,00	133.750.000,00	275,77	7.000.000,00	126.750.000,00	1.810,71
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	21.851.894,00	362.368.852,12	1.658,29	472.084.092,99	(109.715.240,87)	(23,24)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Pendapatan Denda Pajak Daerah	292.789.080,00	502.610.347,00	171,66	558.459.334,00	(55.848.987,00)	(10,00)
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	1.374.115,00		80.000,00	1.294.115,00	1617,64
Pendapatan dari Pengembalian	1.697.849.789,00	2.086.713.972,14	122,90	1.639.324.846,75	447.389.125,39	27,29
Pendapatan BLUD	98.529.676.571,00	111.126.100.919,70	112,78	75.255.892.421,35	35.870.208.498,35	47,66
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	21.040.458.705,00	17.618.212.945,00	83,73	11.303.019.756,00	6.315.200.189,00	55,87
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	40.000.000,00	38.050.000,00	95,13	47.150.000,00	(9.100.000,00)	(19,30)
Remunerasi Dana Bagi Hasil TDF	0,00	1.010.278.784,00	0,00	0,00	1.010.278.784,00	0,00
Jumlah	134.757.846.785,00	150.833.459.844,04	111,93	94.011.058.809,77	56.822.401.034,27	60,44

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp56.822.401.034,27 atau sebesar 60,44%. Kenaikan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut secara signifikan terdapat pada Pendapatan Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah yang mengalami kenaikan sebesar Rp126.750.000,00 atau kenaikan sebesar 1.810,71 %.

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah terbesar berasal dari pendapatan BLUD dari RSUD Ratu Zalecha, Pendapatan dana Kapitasi JKN dari FKTP dan Pendapatan dari Pengembalian berupa pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pasal 21, jasa giro, dan pendapatan bunga.

5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	1.978.929.489.838,00	2.080.767.736.845,00	1.935.319.158.477,00

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer terdiri dari :



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Tabel 5 . 16 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.633.118.449.000,00	1.664.111.900.844,00	101,90	1.549.257.248.833,00	114.854.652.011,00	7,41
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	222.580.763.000,00	228.253.187.000,00	102,55	213.931.343.800,00	14.321.843.200,00	6,69
Transfer Pemerintah Provinsi	123.230.277.838,00	188.402.649.001,00	152,89	172.130.565.844,00	16.272.083.157,00	9,45
Jumlah	1.978.929.489.838,00	2.080.767.736.845,00	105,15	1.935.319.158.477,00	145.448.578.368,00	7,52

Rincian dari masing-masing Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

5.1.1.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	1.633.118.449.000,00	1.664.111.900.844,00	1.549.257.248.833,00

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan terdiri dari :

Tabel 5 . 17 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Dana Bagi Hasil Pajak	33.740.312.000,00	36.971.401.241,00	109,58	30.260.339.373,00	6.711.061.868,00	22,18
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	520.181.800.000,00	564.917.111.162,00	108,60	544.605.075.302,00	20.312.035.860,00	3,73
Dana Alokasi Umum	720.930.446.000,00	720.866.934.775,00	99,99	672.370.620.442,00	48.496.314.333,00	7,21
Dana Alokasi Khusus	358.265.891.000,00	341.356.453.666,00	95,28	302.021.213.716,00	39.335.239.950,00	13,02
Jumlah	1.633.118.449.000,00	1.664.111.900.844,00	101,90	1.549.257.248.833,00	114.854.652.011,00	7,41

Rincian dari masing-masing Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan adalah sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil Pajak

Tabel 5 . 18 Dana Bagi Hasil Pajak

Uraian	TA. 2023		%	TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Dana Bagi Hasil Pajak	33.740.312.000,00	36.971.401.241,00	109,58	30.260.339.373,00	6.711.061.868,00	22,18

Merupakan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang berupa Bagi Hasil Penerimaan Pajak dengan realisasi selama Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebesar Rp36.971.401.241,00 dan Rp30.260.339.373,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 19 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) %	% Naik/ Turun
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	23.504.118.000,00	25.456.509.680,00	108,31	19.923.558.373,00	5.532.951.307,00	27,77
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal	10.236.194.000,00	11.514.852.967,00	112,49	10.336.781.000,00	1.178.071.967,00	11,40



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) %	% Naik/ Turun
29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21						
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	38.594,00	0,00	0,00	38.594,00	0,00
Jumlah	33.740.312.000,00	36.971.401.241,00	109,58	30.260.339.373,00	6.711.061.868,00	22,18

Jumlah Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.711.061.868,00 atau kenaikan sebesar 22,18%. Kenaikan Bagi Hasil Pajak tersebut secara signifikan terdapat pada Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan yang mengalami kenaikan sebesar Rp5.532.951.307,00 atau kenaikan sebesar 27,77%.

2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Tabel 5 . 20 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Uraian	TA. 2023		% Naik/ Turun	TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	520.181.800.000,00	564.917.111.162,00	108,60	544.605.075.302,00	20.312.035.860,00	3,73

Merupakan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang berupa Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) dengan realisasi selama tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebesar Rp564.917.111.162,00 dan Rp544.605.075.302,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 21 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	171.366.000,00	180.114.300,00	105,11	80.905.000,00	99.209.300,00	122,62
Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)	2.898.076.000,00	676.028.000,00	23,33	5.643.996.754,00	(4.967.968.754,00)	(88,02)
Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara- Royalty	515.359.981.000,00	555.064.542.834,00	107,70	536.831.177.548,00	18.233.365.286,00	3,40
Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	454.538.000,00	464.343.817,00	102,16	90.685.000,00	373.658.817,00	412,04
Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.297.839.000,00	1.509.592.211,00	116,32	1.958.311.000,00	(448.718.789,00)	(22,91)
Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA)	0,00	7.022.490.000,00	0,00	0,00	7.022.490.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Perkebunan Sawit						
Jumlah	520.181.800.000,00	564.917.111.162,00	108,60	544.605.075.302,00	20.312.035.860,00	3,73

Jumlah Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.312.035.860,00 atau kenaikan sebesar 3,73%.

Kenaikan Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) tersebut secara signifikan terdapat pada Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty yang mengalami kenaikan sebesar Rp18.233.365.286,00 atau kenaikan sebesar 3,40%.

3. Dana Alokasi Umum

Tabel 5 . 22 Dana Alokasi Umum

Uraian	TA. 2023		%	TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Dana Alokasi Umum	720.930.446.000,00	720.866.934.775,00	99,99	672.370.620.442,00	48.496.314.333,00	7,21

Merupakan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang berupa Dana Alokasi Umum, dengan realisasi selama Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp720.866.934.775,00 dan Rp672.370.620.442,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp48.496.314.333,00 atau sebesar 7,21%.

4. Dana Alokasi Khusus

Tabel 5 . 23 Dana Alokasi Khusus

Uraian	TA. 2023		%	TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Dana Alokasi Khusus	358.265.891.000,00	341.356.453.666,00	95,28	302.021.213.716,00	39.335.239.950,00	13,02

Merupakan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang berupa Dana Alokasi Khusus, dengan realisasi selama Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp341.356.453.666,00 dan Rp302.021.213.716,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 . 24 Rincian Dana Alokasi Khusus

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
DAK Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	26.283.622.408,00	(26.283.622.408,00)	(100,00)
DAK Bidang Kesehatan - KB	0,00	0,00	0,00	25.822.062.563,00	(25.822.062.563,00)	(100,00)
DAK Fisik Bidang Pendidikan - Penugasan	25.515.100.000,00	23.497.816.449,00	92,09	0,00	23.497.816.449,00	0,00
DAK Fisik Bidang Kesehatan - Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting - Penugasan	4.469.555.000,00	4.335.109.000,00	96,99	0,00	4.335.109.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
DAK Fisik Bidang Kesehatan - Penguatan Sistem Kesehatan - Penugasan	54.375.009.000,00	48.422.198.327,00	89,05	0,00	48.422.198.327,00	0,00
DAK Bidang Pertanian - Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	7.158.435.041,00	(7.158.435.041,00)	(100,00)
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - Penugasan	0,00	0,00	0,00	618.258.650,00	(618.258.650,00)	(100,00)
DAK Bidang Jalan – Reguler - Jalan	0,00	0,00	0,00	28.682.274.858,00	(28.682.274.858,00)	(100,00)
DAK Fisik Bidang Jalan - Penugasan	20.259.554.000,00	19.501.473.000,00	96,26	0,00	19.501.473.000,00	0,00
DAK Bidang Air Minum - Penugasan	14.171.753.000,00	12.705.266.000,00	89,65	0,00	12.705.266.000,00	0,00
DAK Bidang Sanitasi - Penugasan	8.322.342.000,00	8.322.300.000,00	100,00	0,00	8.322.300.000,00	0,00
DAK Fisik Bidang Kesehatan - Keluarga Berencana - Penugasan	2.015.620.000,00	1.927.151.000,00	95,61	0,00	1.927.151.000,00	0,00
DAK Bidang Air Minum - Reguler	0,00	0,00	0,00	7.878.601.000,00	(7.878.601.000,00)	(100,00)
DAK Bidang Sanitasi - Reguler	0,00	0,00	0,00	3.811.750.000,00	(3.811.750.000,00)	(100,00)
DAK Bidang Irigasi – Penugasan	0,00	0,00	0,00	5.625.746.700,00	(5.625.746.700,00)	(100,00)
DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Penugasan – Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	1.308.450.000,00	(1.308.450.000,00)	(100,00)
DAK Non Fisik - BOS Reguler	53.888.990.000,00	53.198.636.547,00	98,72	53.385.441.355,00	(186.804.808,00)	(0,35)
DAK Non Fisik - BOS Kinerja	3.760.000.000,00	3.760.000.000,00	100,00	1.840.000.000,00	1.920.000.000,00	104,35
DAK Non Fisik -Tunjangan Profesi Guru	104.725.537.000,00	104.531.944.300,00	99,82	97.597.988.140,00	6.933.956.160,00	7,10
DAK Non Fisik -Tambahan Penghasilan Guru	2.344.750.000,00	2.344.750.000,00	100,00	2.083.500.000,00	261.250.000,00	12,54
DAK Non Fisik - Tunjangan Khusus Guru	3.166.784.000,00	3.166.784.000,00	100,00	2.917.543.200,00	249.240.800,00	8,54
DAK Non Fisik -Bantuan Operasional PAUD	9.367.590.000,00	9.325.422.000,00	99,55	8.553.780.000,00	771.642.000,00	9,02
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	8.706.500.000,00	8.706.500.000,00	100,00	5.597.950.000,00	3.108.550.000,00	55,53
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	8.470.153.000,00	3.755.273.260,00	44,34	2.530.291.898,00	1.224.981.362,00	48,41
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	524.596.000,00	0,00	0,00	311.454.000,00	(311.454.000,00)	(100,00)
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	24.646.259.000,00	24.646.259.000,00	100,00	13.780.371.440,00	10.865.887.560,00	78,85
DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0,00	0,00	0,00	343.907.500,00	(343.907.500,00)	(100,00)
DAK Nonfisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	0,00	0,00	0,00	355.924.000,00	(355.924.000,00)	(100,00)
DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik - Fasilitas Penanaman Modal	459.100.000,00	354.003.000,00	77,11	365.024.100,00	(11.021.100,00)	(3,02)
DAK Non Fisik - BOKB - KB	8.321.124.000,00	8.116.830.483,00	97,54	4.974.705.863,00	3.142.124.620,00	63,16
DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	755.575.000,00	738.737.300,00	97,77	194.131.000,00	544.606.300,00	280,54
Jumlah	358.265.891.000,00	341.356.453.666,00	95,28	302.021.213.716,00	39.335.239.950,00	13,02



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

5.1.1.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
		222.580.763.000,00	228.253.187.000,00	213.931.343.800,00

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya terdiri dari:

Tabel 5 . 25 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Dana Insentif Daerah/Fiskal	0,00	5.672.424.000,00	0,00	0,00	5.672.424.000,00	0,00
Dana Desa	222.580.763.000,00	222.580.763.000,00	100,00	213.931.343.800,00	8.649.419.200,00	4,04
Jumlah	222.580.763.000,00	228.253.187.000,00	102,55	213.931.343.800,00	14.321.843.200,00	6,69

1. Dana Insentif Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	0,00	5.672.424.000,00	0,00

Dana Insentif Daerah terdiri dari :

Tabel 5 . 26 Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Dana Insentif Daerah/Fiskal	0,00	5.672.424.000,00	0,00	0,00	5.672.424.000,00	0,00
Jumlah	0,00	5.672.424.000,00	0,00	0,00	5.672.424.000,00	0,00

Merupakan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang berupa Dana Insentif Daerah, dengan realisasi selama Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp5.672.424.000,00 dan Rp0,00.

2. Dana Desa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	222.580.763.000,00	222.580.763.000,00	213.931.343.800,00

Dana Desa terdiri dari :

Tabel 5 . 27 Dana Desa

Dana Desa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Dana Desa	222.580.763.000,00	222.580.763.000,00	100,00	213.931.343.800,00	8.649.419.200,00	4,04
Jumlah	222.580.763.000,00	222.580.763.000,00	100,00	213.931.343.800,00	8.649.419.200,00	4,04

Merupakan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat yang berupa Dana Desa, dengan realisasi selama tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp222.580.763.000,00 dan Rp213.931.343.800,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

5.1.1.2.3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
		123.230.277.838,00	188.402.649.001,00	172.130.565.844,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari :

Tabel 5 . 28 Transfer Pemerintah Provinsi

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Pendapatan Bagi Hasil	123.230.277.838,00	188.402.649.001,00	152,89	172.130.565.844,00	16.272.083.157,00	9,45
Jumlah	123.230.277.838,00	188.402.649.001,00	152,89	172.130.565.844,00	16.272.083.157,00	9,45

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Bagi Hasil Pajak

Tabel 5 . 29 Bagi Hasil Pajak

Uraian	TA. 2023		%	TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Bagi Hasil Pajak	123.230.277.838,00	188.402.649.001,00	152,89	172.130.565.844,00	16.272.083.157,00	9,45

Merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi yang berupa Bagi Hasil Pajak, dengan realisasi selama Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebesar Rp188.402.649.001,00 dan Rp172.130.565.844,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 30 Rincian Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	31.220.879.177,00	31.517.434.474,00	100,95	37.010.319.628,00	(5.492.885.154,00)	(14,84)
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	14.678.239.745,00	18.135.156.597,00	123,55	19.158.955.877,00	(1.023.799.280,00)	(5,34)
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	54.062.381.460,00	111.291.642.766,00	205,86	90.460.479.582,00	20.831.163.184,00	23,03
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	650.000.000,00	1.906.923.330,00	293,37	554.584.111,00	1.352.339.219,00	243,85
Bagi Hasil Pajak Rokok	22.618.777.456,00	25.551.491.834,00	112,97	24.946.226.646,00	605.265.188,00	2,43
Jumlah	123.230.277.838,00	188.402.649.001,00	152,89	172.130.565.844,00	16.272.083.157,00	9,45

5.1.1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
		3.036.000.000,00	2.444.000.000,00	1.284.000.000,00

Merupakan pendapatan hibah yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Banjar sebagai dana pengganti (reimburse) atas pelaksanaan kegiatan peningkatan akses penyediaan air minum dan pembangunan sistem pengelolaan air limbah, dengan realisasi selama Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebesar Rp2.444.000.000,00 dan Rp1.284.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Tabel 5 . 31 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	3.036.000.000,00	2.444.000.000,00	80,50	1.284.000.000,00	1.160.000.000,00	90,34
Jumlah	3.036.000.000,00	2.444.000.000,00	80,50	1.284.000.000,00	1.160.000.000,00	90,34

Rincian Pendapatan per-SKPD dijelaskan pada **Lampiran 1**.

5.1.2 BELANJA

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
2.559.635.131.121,00	2.261.876.594.612,98	1.853.382.074.039,57

Realisasi Belanja ini terdiri dari:

Tabel 5 . 32 Belanja

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Operasi	1.760.347.875.871,00	1.504.021.084.905,02	85,44	1.310.051.052.369,00	14,81
Belanja Modal	414.853.497.830,00	376.369.085.069,96	90,72	197.477.491.062,57	90,59
Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000,00	5.889.091.877,00	73,61	5.724.660.447,00	2,87
Belanja Transfer	376.433.757.420,00	375.597.332.761,00	99,78	340.128.870.161,00	10,43
Jumlah	2.559.635.131.121,00	2.261.876.594.612,98	88,37	1.853.382.074.039,57	22,04

5.1.2.1 Belanja Operasi

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
1.760.347.875.871,00	1.504.021.084.905,02	1.310.051.052.369,00

Belanja Operasi terdiri dari:

Tabel 5 . 33 Belanja Operasi

Belanja Operasi	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Pegawai	1.006.647.534.561,00	806.633.031.475,00	80,13	764.955.869.085,00	5,45
Belanja Barang dan Jasa	658.359.359.216,00	604.259.697.529,02	91,78	486.586.621.120,00	24,18
Belanja Hibah	90.250.288.544,00	88.112.346.572,00	97,63	47.840.575.664,00	84,18
Belanja Bantuan Sosial	5.090.693.550,00	5.016.009.329,00	98,53	10.667.986.500,00	(52,98)
Jumlah	1.760.347.875.871,00	1.504.021.084.905,02	85,44	1.310.051.052.369,00	14,81

Rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Tabel 5 . 34 Belanja Pegawai

Uraian	TA. 2023		%	TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Belanja Pegawai	1.006.647.534.561,00	806.633.031.475,00	80,13	764.955.869.085,00	41.677.162.390,00	5,45

Merupakan belanja yang berupa gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Aparatur Sipil Negara, DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, dengan rincian realisasi tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5 . 35 Rincian Belanja Pegawai

Belanja Pegawai	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Gaji dan Tunjangan ASN	618.252.216.646,00	465.271.336.903,00	75,26	438.701.419.506,00	26.569.917.397,00	6,06
Tambahan Penghasilan ASN	227.710.423.207,00	187.840.425.383,00	82,49	173.024.448.571,00	14.815.976.812,00	8,56
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	123.133.030.146,00	119.754.938.688,00	97,26	119.877.510.508,00	(122.571.820,00)	(0,10)
Gaji dan Tunjangan DPRD	29.089.798.505,00	26.690.704.239,00	91,75	26.258.775.854,00	431.928.385,00	1,64
Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.221.508.057,00	1.134.476.262,00	92,88	978.983.646,00	155.492.616,00	15,88
Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	852.000.000,00	100,00	852.000.000,00	0,00	0,00
Pegawai BLUD	6.388.558.000,00	5.089.150.000,00	79,66	5.262.731.000,00	(173.581.000,00)	(3,30)
Jumlah	1.006.647.534.561,00	806.633.031.475,00	80,13	764.955.869.085,00	41.677.162.390,00	5,45

Rincian Belanja Pegawai per-SKPD dijelaskan pada **Lampiran 2**.

b. Belanja Barang dan Jasa

Tabel 5 . 36 Belanja Barang dan Jasa

Uraian	TA. 2023		%	TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Belanja Barang dan Jasa	658.359.359.216,00	604.259.697.529,02	91,78	486.586.621.120,00	117.673.076.409,02	24,18

Merupakan belanja untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut:

1) Belanja Barang

Tabel 5 . 37 Belanja Barang

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Barang	91.031.247.419,00	81.647.277.048,00	89,69	58.039.797.824,00	23.607.479.224,00	40,67

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5 . 38 Rincian Belanja Barang

Belanja Barang	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Barang Pakai Habis	90.961.432.419,00	81.577.957.048,00	89,68	57.104.327.620,00	24.473.629.428,00	42,86
Belanja Barang Tak Pakai Habis	69.815.000,00	69.320.000,00	99,29	935.470.204,00	(866.150.204,00)	-92,59
Belanja Barang Bekas Di Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	91.031.247.419,00	81.647.277.048,00	89,69	58.039.797.824,00	23.607.479.224,00	40,67



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Belanja Barang Tak Pakai Habis, Belanja Bahan/Material, Belanja Cetak dan Penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman, Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Belanja Pakaian Kerja, Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu pada Tahun 2023 merupakan komponen rekening Belanja Barang Pakai Habis.

2) Belanja Jasa

Tabel 5 . 39 Belanja Jasa

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Jasa	263.155.556.197,00	237.720.443.661,00	90,33	204.300.053.610,00	33.420.390.051,00	16,36

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5 . 40 Rincian Belanja Jasa

Belanja Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Jasa Kantor	177.081.041.351,00	160.666.169.987,00	90,73	146.801.147.807,00	13.865.022.180,00	9,44
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	43.346.700.657,00	41.247.960.500,00	95,16	27.574.684.651,00	13.673.275.849,00	49,59
Belanja Sewa Tanah	47.865.000,00	44.190.000,00	92,32	6.600.000,00	37.590.000,00	569,55
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.699.752.810,00	3.094.960.320,00	83,65	1.262.227.802,00	1.832.732.518,00	145,20
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.199.307.832,00	2.012.191.000,00	91,49	4.555.162.400,00	(2.542.971.400,00)	(55,83)
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.000.000,00	3.000.000,00	100	45.500.000,00	(42.500.000,00)	(93,41)
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	43.520.000,00	43.520.000,00	100	40.870.000,00	2.650.000,00	6,48
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	14.871.502.542,00	13.407.523.561,00	90,16	8.705.497.849,00	4.702.025.712,00	54,01
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.374.426.294,00	3.834.353.712,00	87,65	3.836.393.829,00	(2.040.117,00)	(0,05)
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00	47.400.000,00	(47.400.000,00)	(100)
Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	265.000.000,00	(265.000.000,00)	(100)
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	17.488.439.711,00	13.366.574.581,00	76,43	11.159.569.272,00	2.207.005.309,00	19,78
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Belanja Jasa	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pengawasan Tahunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Fasilitas Penunjang Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa PAUD Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tugasan Profesi Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	263.155.556.197,00	237.720.443.661,00	90,33	204.300.053.610,00	33.420.390.051,00	16,36

3) Belanja Pemeliharaan

Tabel 5 . 41 Belanja Pemeliharaan

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	% Naik/ Turun	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Pemeliharaan	69.081.611.786,00	63.245.766.820,02	91,55	40.724.755.668,00	22.521.011.152,02	55,30

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebagai berikut :

Tabel 5 . 42 Rincian Belanja Pemeliharaan

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Pemeliharaan Tanah	577.000.000,00	574.369.000,00	99,54	66.419.000,00	507.950.000,00	764,77
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.469.012.511,00	18.404.374.233,00	94,53	15.504.532.324,00	2.899.841.909,00	18,70
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.669.514.660,00	10.777.693.232,82	92,36	15.610.005.520,00	(4.832.312.287,18)	(30,96)
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	37.356.084.515,00	33.479.479.104,00	89,62	9.534.847.162,00	23.944.631.942,00	251,13
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	9.851.250,00	98,51	8.951.662,00	899.588,00	10,05
Jumlah	69.081.611.786,00	63.245.766.820,02	91,55	40.724.755.668,00	22.521.011.152,02	55,30

4) Belanja Perjalanan Dinas

Tabel 5 . 43 Belanja Perjalanan Dinas

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Perjalanan Dinas	85.017.376.341,00	77.513.778.612,00	91,17	56.532.796.420,00	20.980.982.192,00	37,11

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Tabel 5 . 44 Rincian Belanja Perjalanan Dinas

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	85.017.376.341,00	77.513.778.612,00	91,17	56.532.796.420,00	20.980.982.192,00	37,11
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	85.017.376.341,00	77.513.778.612,00	91,17	56.532.796.420,00	20.980.982.192,00	37,11

5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Tabel 5 . 45 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.086.107.500,00	7.865.857.500,00	97,28	4.307.404.364,00	3.558.453.136,00	82,61

6) Belanja Barang dan Jasa BOS

Tabel 5 . 46 Belanja Barang dan Jasa BOS

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Barang dan Jasa BOS	46.675.139.925,00	46.095.286.378,00	98,76	44.442.464.677,00	1.652.821.701,00	3,72

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5 . 47 Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Barang dan Jasa BOS	46.675.139.925,00	46.095.286.378,00	98,76	44.442.464.677,00	1.652.821.701,00	3,72
Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	46.675.139.925,00	46.095.286.378,00	98,76	44.442.464.677,00	1.652.821.701,00	3,72

7) Belanja Barang dan Jasa BLUD

Tabel 5 . 48 Belanja Barang dan Jasa BLUD

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	% Naik/ Turun	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Barang dan Jasa BLUD	95.312.320.048,00	90.171.287.510,00	94,61	78.239.348.557,00	11.931.938.953,00	15,25

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5 . 49 Belanja Barang dan Jasa BLUD

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Barang dan Jasa BLUD	95.312.320.048,00	90.171.287.510,00	94,61	78.239.348.557,00	11.931.938.953,00	15,25



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	95.312.320.048,00	90.171.287.510,00	94,61	78.239.348.557,00	11.931.938.953,00	15,25

Rincian Belanja Barang dan Jasa per-SKPD dijelaskan pada **Lampiran 3**.

c. Belanja Hibah

Tabel 5 . 50 Belanja Hibah

Uraian	TA. 2023		%	TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Belanja Hibah	90.250.288.544,00	88.112.346.572,00	97,63	47.840.575.664,00	40.271.770.908,00	84,18

Merupakan Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, dan Partai Politik.

Rincian belanja hibah disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5 . 51 Rincian Belanja Hibah

Belanja Hibah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.264.500.000,00	2.240.800.000,00	98,95	0,00	2.240.800.000,00	0,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	55.427.000,00	55.140.000,00	99,48	0,00	55.140.000,00	0,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	50.720.508.950,00	50.495.229.741,00	99,56	25.735.744.306,00	24.759.485.435,00	96,21
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.245.760.894,00	1.244.889.000,00	99,93	0,00	1.244.889.000,00	0,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.138.490.400,00	4.923.551.340,00	95,82	0,00	4.923.551.340,00	0,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	24.543.536.300,00	23.036.986.399,00	93,86	16.544.365.250,00	6.492.621.149,00	39,24
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	526.500.000,00	458.700.000,00	87,12	0,00	458.700.000,00	0,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.791.000,00	3.791.000,00	100	566.422.400,00	(562.631.400,00)	(99,33)
Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	0,00	0,00		16.500.000,00	(16.500.000,00)	(100)
Belanja Hibah Uang Dana BOS Yang Di Terima Oleh Satdikdas Swasta	1.734.700.000,00	1.734.696.585,00	100	1.488.660.000,00	246.036.585,00	16,53
Belanja Hibah Uang Dana BOS Yang Di Terima Oleh Satdikmen Swasta	2.357.120.000,00	2.355.976.507,00	99,95	2.447.159.708,00	(91.183.201,00)	(3,73)
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.659.954.000,00	1.562.586.000,00	94,13	1.041.724.000,00	520.862.000,00	50,00
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah kepada BOP PAUD/SWASTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah atau Barang yang akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah kepada Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	90.250.288.544,00	88.112.346.572,00	97,63	47.840.575.664,00	40.271.770.908,00	84,18

Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan pada Tahun 2023 merupakan komponen



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

anggaran rekening Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.

Sedangkan Bantuan Sosial kepada Masyarakat pada Tahun 2023 merupakan komponen anggaran rekening Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

Rincian Belanja Hibah per-SKPD dijelaskan pada **Lampiran 4**.

d. Belanja Bantuan Sosial

Tabel 5 . 52 Belanja Bantuan Sosial

Uraian	TA. 2023		%	TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Belanja Bantuan Sosial	5.090.693.550,00	5.016.009.329,00	98,53	10.667.986.500,00	(5.651.977.171,00)	(52,98)

Merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat, dan Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan, dan Bidang Lainnya).

Tabel 5 . 53 Rincian Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	329.020.000,00	328.904.000,00	99,96	467.500.000,00	(138.596.000,00)	(29,65)
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	49.898.550,00	49.898.329,00	99,99	74.847.500,00	(24.949.171,00)	(33,33)
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	721.500.000,00	717.457.000,00	99,44	1.213.254.000,00	(495.797.000,00)	(40,87)
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	100	7.504.385.000,00	(4.804.385.000,00)	(64,02)
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00		8.000.000,00	(8.000.000,00)	(100,00)
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.290.275.000,00	1.219.750.000,00	94,53	1.400.000.000,00	(180.250.000,00)	(12,88)
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	5.090.693.550,00	5.016.009.329,00	98,53	10.667.986.500,00	(5.651.977.171,00)	(52,98)

Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan pada Tahun 2023 merupakan komponen anggaran rekening Belanja Bantuan Sosial yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Sedangkan Bantuan Sosial kepada Masyarakat pada Tahun 2023 merupakan komponen anggaran rekening Bantuan Sosial yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.

Rincian Belanja Bantuan Sosial per-SKPD dijelaskan pada **Lampiran 5**.

5.1.2.2 Belanja Modal	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	414.853.497.830,00	376.369.085.069,96	197.477.491.062,57

Belanja Modal terdiri dari:

Tabel 5 . 54 Belanja Modal

Belanja Modal	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	% Naik/ Turun
Belanja Tanah	8.720.000.000,00	5.332.333.880,00	61,15	1.561.416.000,00	241,51
Belanja Peralatan dan Mesin	105.589.831.537,00	92.930.369.497,00	88,01	55.895.634.639,00	66,26
Belanja Gedung dan Bangunan	84.364.027.489,00	78.000.133.887,96	92,39	39.452.963.723,00	97,70
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	214.563.157.164,00	198.503.513.797,00	92,52	98.293.080.931,57	101,95
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.301.481.640,00	1.287.834.008,00	98,95	2.274.395.769,00	(43,38)
Belanja Aset Lainnya	315.000.000,00	314.900.000,00	99,97	0,00	
Jumlah	414.853.497.830,00	376.369.085.069,96	90,71	197.477.491.062,57	90,59

Belanja Modal merupakan belanja pembelian/pengadaan atau pembangunan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud dengan Realisasi pada tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah

Tabel 5 . 55 Belanja Modal Tanah

Uraian	TA. 2023		%	TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Tanah	8.720.000.000,00	5.332.333.880,00	61,15	1.561.416.000,00	3.770.917.880,00	241,51

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5 . 56 Rincian Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Naik/ Turun
Tanah Persil	8.420.000.000,00	5.331.895.000,00	63,32	1.561.416.000,00	3.770.479.000,00	241,48
Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Belanja Modal Tanah	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Naik/ Turun
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lapangan	300.000.000,00	438.880,00	0,15	0,00	438.880,00	100,00
Jumlah	8.720.000.000,00	5.332.333.880,00	61,15	1.561.416.000,00	3.770.917.880,00	241,51

Rincian Belanja Modal – Tanah per-SKPD dijelaskan pada **Lampiran 6**.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran dan Realisasi Belanja modal Peralatan dan Mesin tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5 . 57 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	TA. 2023		%	TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.589.831.537,000	92.930.369.497,00	88,01	55.895.634.639,00	37.034.734.858,00	66,26

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5 . 58 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Naik/ Turun
Alat Besar Darat	1.465.200.000,00	1.445.775.000,00	98,67	0,00	1.445.775.000,00	100,00
Alat Bantu	432.072.000,00	429.206.600,00	99,34	526.128.860,00	(96.922.260,00)	(18,42)
Alat Angkutan Darat Bermotor	27.538.506.220,00	26.637.264.597,00	96,73	6.466.783.095,00	20.170.481.502,00	311,91
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	450.104.000,00	441.000.000,00	97,98	297.100.000,00	143.900.000,00	48,43
Alat Angkutan Apung Bermotor	0,00	0,00		77.278.000,00	(77.278.000,00)	(100,00)
Alat Bengkel Bermesin	165.418.200,00	164.860.000,00	99,66	0,00	164.860.000,00	100,00
Alat Bengkel Tak Bermesin	72.447.710,00	67.263.518,00	92,84	0,00	67.263.518,00	100,00
Alat Ukur	567.751.385,00	476.669.000,00	83,96	0,00	476.669.000,00	100,00
Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Alat Pertanian	42.909.000,00	42.709.000,00	99,53	0,00	42.709.000,00	100,00
Alat Kantor	4.445.320.846,00	4.172.586.683,00	93,86	8.700.332.125,00	(4.527.745.442,00)	(52,04)
Alat Rumah Tangga	11.500.332.129,00	10.424.198.020,00	90,64	4.181.586.368,00	6.242.611.652,00	149,29
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	826.035.540,00	501.034.040,00	60,66	259.530.650,00	241.503.390,00	93,05
Alat Studio	342.915.500,00	336.429.000,00	98,11	1.555.282.967,00	(1.218.853.967,00)	(78,37)
Alat Komunikasi	11.165.000,00	11.000.000,00	98,52	457.010.000,00	(446.010.000,00)	(97,59)
Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	167.880.000,00	(167.880.000,00)	(100,00)
Peralatan Komunikasi Navigasi	0,00	0,00	0,00	47.455.000,00	(47.455.000,00)	(100,00)
Alat Kedokteran	37.130.351.845,00	30.220.881.349,00	81,39	14.927.705.122,00	15.293.176.227,00	102,45
Alat Kesehatan Umum	5.357.294.550,00	3.306.446.084,00	61,72	669.522.500,00	2.636.923.584,00	393,85
Unit Alat Laboratorium	2.289.407.920,00	2.270.053.000,00	99,15	3.084.273.287,00	(814.220.287,00)	(26,40)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Naik/ Turun
Alat Peraga Praktek Sekolah	101.716.000,00	101.646.000,00	99,93	118.164.000,00	(16.518.000,00)	(13,98)
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	1.299.600.000,00	1.199.800.000,00	92,32	0,00	1.199.800.000,00	100,00
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	38.420.000,00	38.386.000,00	99,91	1.308.450.000,00	(1.270.064.000,00)	(97,07)
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00	16.686.400,00	(16.686.400,00)	(100,00)
Komputer Unit	7.766.395.820,00	7.093.060.671,00	91,33	10.705.091.015,00	(3.612.030.344,00)	(33,74)
Peralatan Komputer	2.450.584.067,00	2.303.777.570,00	94,01	1.900.788.250,00	402.989.320,00	21,20
Alat Eksplorasi Geofisika	0,00	0,00	0,00	950.000,00	(950.000,00)	(100,00)
Sumur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Bantu Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Deteksi	0,00	0,00	0,00	17.542.000,00	(17.542.000,00)	(100,00)
Alat Pelindung	30.000.000,00	29.250.000,00	97,50	26.038.000,00	3.212.000,00	12,34
Persenjataan Non Senjata Api	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Keamanan dan Perlindungan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.015.883.805,00	974.073.365,00	95,88	249.291.600,00	724.781.765,00	290,74
Peralatan Olahraga	250.000.000,00	243.000.000,00	97,20	127.600.000,00	115.400.000,00	90,44
BLUD	0,00	0,00		4.165.400,00	(4.165.400,00)	
Jumlah	105.589.831.537,00	92.930.369.497,00	88,01	55.895.634.639,00	37.034.734.858,00	66,26

Rincian Belanja Modal – Peralatan dan Mesin per-SKPD dijelaskan pada **Lampiran 7**.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tabel 5 . 59 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	TA. 2023		%	TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.364.027.489,00	78.000.133.887,96	92,46	39.452.963.723,00	38.547.170.164,96	97,70

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5 . 60 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Naik/ Turun
Bangunan Gedung Tempat Kerja	79.774.071.924,00	74.122.437.848,37	92,92	37.979.887.573,00	36.142.550.275,37	95,16
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.350.364.225,00	2.655.036.623,59	79,25	1.131.552.150,00	1.523.484.473,59	134,64
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	230.000.000,00	229.291.527,00	99,69	43.174.000,00	186.117.527,00	431,09
Tugu/Tanda Batas	1.009.591.340,00	993.367.889,00	98,39	298.350.000,00	695.017.889,00	232,95
Bangunan Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Naik/ Turun
BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	84.364.027.489,00	78.000.133.887,96	92,46	39.452.963.723,00	38.547.170.164,96	97,70

Rincian Belanja Modal – Gedung dan Bangunan per-SKPD dijelaskan pada **Lampiran 8**.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tabel 5 . 61 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	TA. 2023		%	TA. 2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	214.563.157.164,00	198.503.513.797,00	92,52	98.293.080.931,57	100.210.432.865,43	101,95

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5 . 62 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Naik/ Turun
Jalan	151.928.808.780,00	142.551.481.921,00	93,83	75.963.596.220,57	66.587.885.700,43	87,66
Jembatan	39.475.412.125,00	35.021.622.486,00	88,72	11.087.626.346,00	23.933.996.140,00	215,86
Bangunan Air Irigasi	13.016.957.864,00	12.090.143.515,00	92,88	5.140.325.665,00	6.949.817.850,00	135,20
Bangunan Air Pasang Surut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.240.911.000,00	1.769.642.800,00	78,97	704.419.900,00	1.065.222.900,00	151,22
Bangunan Air Bersih/Air Baku	5.595.557.395,00	4.865.353.000,00	86,95	4.349.104.800,00	516.248.200,00	11,87
Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalasi Air Minum/Air Bersih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalasi Pengaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	51.321.000,00	0,00	0,00
Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaringan Air Minum	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	0,00	70.000.000,00	100,00
Jaringan Listrik	2.235.510.000,00	2.135.270.075,00	95,52	996.687.000,00	1.138.583.075,00	114,24
Jumlah	214.563.157.164,00	198.503.513.797,00	92,52	98.293.080.931,57	100.210.432.865,43	101,95

Rincian Belanja Modal – Jalan, Irigasi dan Jaringan per-SKPD dijelaskan pada **Lampiran 9**.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tabel 5 . 63 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	TA. 2023		%	TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.301.481.640,00	1.287.834.008,00	98,95	2.274.395.769,00	(986.561.761,00)	(43,38)

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5 . 64 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Naik/ Turun
Buku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Barang-Barang Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bahan Perpustakaan Tercetak	1.068.541.640,00	1.057.339.008,00	98,85	1.759.077.492,00	(701.738.484,00)	(39,89)
Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00	266.944.617,00	(266.944.617,00)	(100,00)
Pengadaan Aset Tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	232.940.000,00	230.495.000,00	98,95	203.050.000,00	27.445.000,00	13,52
BLUD	0,00	0,00	0,00	45.323.660,00	(45.323.660,00)	(100,00)
Jumlah	1.301.481.640,00	1.287.834.008,00	98,55	2.274.395.769,00	(986.561.761,00)	(43,38)

Rincian Belanja Modal – Aset Tetap Lainnya per-SKPD dijelaskan pada **Lampiran 10**.

f. Belanja Modal Aset Lainnya

Tabel 5 . 65 Belanja Modal Aset Lainnya

Uraian	TA. 2023		% Naik/ Turun	TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Belanja Modal Aset Lainnya	315.000.000,00	314.900.000,00	99,97	0,00	314.900.000,00	100,00

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebagai berikut:

Tabel 5 . 66 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	% Naik/ Turun	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Naik/ Turun
Perangkat Lunak	315.000.000,00	314.900.000,00	99,97	0,00	314.900.000,00	100,00
Lisensi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	315.000.000,00	314.900.000,00	99,97	0,00	314.900.000,00	100,00

Rincian Belanja Modal – Aset Lainnya per-SKPD dijelaskan pada **Lampiran 11**.

Rincian Total Belanja Modal per-SKPD dijelaskan pada **Lampiran 12**.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	8.000.000.000,00	5.889.091.877,00	5.724.660.447,00

Belanja Tidak Terduga dialokasikan dalam APBD untuk pelaksanaan penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar. Realisasi Belanja Tidak Terduga selama tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp5.889.091.877,00 dan Rp5.724.660.447,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 67 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Belanja Tidak Terduga (Covid-19)	0,00	5.244.895.000,00	(5.244.895.000,00)
Belanja Tidak Terduga (Pengembalian Dana Desa)	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga (Bencana Alam)	2.642.919.337,00	215.500.000,00	2.427.419.337,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan kesehatan masyarakat miskin dan terlarut)	503.474.140,00	10.619.663,00	492.854.477,00
Belanja Tidak Terduga (Pelepasan tanah di Gang Saadah)	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga (Pengembalian klaim Non Kapitasi JKN Puskesmas Martapura 1)	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga (Dana Insentif Petugas Taruna Siaga Bencana (TAGANA))	0,00	0,00	0,00
Belanja Tidak Terduga (Pembayaran Gaji)	0,00	238.145.784,00	(238.145.784,00)
Belanja Tidak Terduga (Pasar Murah)	70.772.000,00	15.500.000,00	55.272.000,00
Belanja Tidak Terduga (Bantuan Sosial Yang Tidak Di Rencanakan)	2.335.706.400,00	0,00	2.335.706.400,00
Belanja Tidak Terduga (Sembako Untuk Masyarakat Tidak Mampu)	336.220.000,00	0,00	336.220.000,00
Jumlah	5.889.091.877,00	5.724.660.477,00	164.431.400,00

5.1.2.4 Belanja Transfer	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
	376.433.757.420,00	375.597.332.761,00	340.128.870.161,00

Belanja Transfer terdiri dari:

Tabel 5 . 68 Belanja Transfer

Belanja Transfer	TA. 2023		% Naik/ Turun	TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Belanja Bagi Hasil	8.916.525.800,00	8.508.135.897,00	95,42	12.138.437.549,00	(3.630.301.652,00)	(29,91)
Belanja Bantuan Keuangan	367.517.231.620,00	367.089.196.864,00	99,88	327.990.432.612,00	39.098.764.252,00	11,92
Jumlah	376.433.757.420,00	375.597.332.761,00	99,78	340.128.870.161,00	35.468.462.600,00	10,43

Merupakan belanja transfer atas bagi hasil dan belanja bantuan keuangan, dengan Realisasi pada tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

a. Belanja Bagi Hasil

Tabel 5 . 69 Belanja Bagi Hasil

Uraian	TA. 2023		% Naik/ Turun	TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	7.680.000.000,00	7.680.000.000,00	100	11.674.896.480,00	(3.994.896.480,00)	(34,22)
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.236.525.800,00	828.135.897,00	66,97	463.541.069,00	364.594.828,00	78,65
Jumlah	8.916.525.800,00	8.508.135.897,00	95,42	12.138.437.549,00	(3.630.301.652,00)	(29,91)

Merupakan belanja transfer atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa untuk pembiayaan APB-Desa sebanyak 277 desa se-Kabupaten Banjar. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa pada tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp7.680.000.000,00 dan Rp11.674.896.480,00 berupa Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.

Belanja Transfer atas Pendapatan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa untuk pembiayaan APB-Desa sebanyak 277 desa se-Kabupaten Banjar. Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa pada tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp828.135.897,00 dan Rp463.541.069,00 berupa Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa dimaksud agar pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal dan menindaklanjuti perhitungan yang merata dan proporsional Bagi Hasil Pajak Daerah.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Tabel 5 . 70 Belanja Bantuan Keuangan

Uraian	TA. 2023		% Naik/ Turun	TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Transfer Bantuan Keuangan Umum Antar Daerah Kabupaten/ Kota	4.847.712.820,00	4.419.678.064,00	91,17	4.237.304.060,00	182.374.004,00	4,30
Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	140.088.755.800,00	140.088.755.800,00	100	109.821.784.752,00	30.266.971.048,00	27,56



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Uraian	TA. 2023		% Naik/ Turun	TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	222.580.763.000,00	222.580.763.000,00	100	213.931.343.800,00	8.649.419.200,00	4,04
Jumlah	367.517.231.620,00	367.089.196.864,00	99,88	327.990.432.612,00	39.098.764.252,00	11,92

Transfer Bantuan Keuangan Umum Antar Kabupaten/Kota ke Desa merupakan realisasi belanja bantuan keuangan umum Daerah Antar Kabupaten/Kota yang diberikan kepada Pemerintahan Desa tahun Anggaran 2023 senilai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 71 Transfer Bantuan Keuangan Umum Antar Kabupaten/Kota ke Desa

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	APBD:			
	- Pembayaran Iuran Pemerintah Daerah Untuk Program JKN Kepala Dan Perangkat Desa (BPJS Kesehatan 4%)	4.847.712.820,00	4.419.678.064,00	91,17
	- Pembayaran Belanja Bantuan Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Se-Kabupaten Banjar	0,00	0,00	0,00
	- Pembayaran Belanja ADD Untuk Sarana Ibadah di Desa Kabupaten Banjar	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	4.847.712.820,00	4.419.678.064,00	91,17

Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa merupakan realisasi belanja bantuan keuangan umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang diberikan kepada Pemerintahan Desa tahun Anggaran 2023 senilai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 72 Transfer Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	APBD :			
	- Pembayaran Alokasi Dana Desa (ADD)	140.088.755.800,00	140.088.755.800,00	100
	- Pembayaran Iuran Pemerintah Daerah untuk program JKN kepala dan perangkat desa (BPJS Kesehatan 1%)	0,00	0,00	0,00
	- Pembayaran Belanja Pemilihan Kepala Desa se-Kabupaten Banjar	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	140.088.755.800,00	140.088.755.800,00	100

Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa merupakan realisasi belanja bantuan keuangan khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang diberikan kepada 277 Pemerintahan Desa tahun Anggaran 2023 senilai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 73 Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Naik/ Turun
1	APBN :			
	- Dana Desa	222.580.763.000,00	222.580.763.000,00	100
	Jumlah	222.580.763.000,00	222.580.763.000,00	100



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

5.1.3. PEMBIAYAAN

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
327.369.641.283,00	329.843.617.282,83	78.689.203.844,63

Pembiayaan adalah Realisasi Pembiayaan Neto merupakan selisih lebih/kurang antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5 . 74 Pembiayaan

Pembiayaan Neto	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	% Naik/ Turun
Penerimaan Pembiayaan	363.419.641.283,00	365.893.617.282,83	100,68	97.389.203.844,63	275,70
Pengeluaran Pembiayaan	36.050.000.000,00	36.050.000.000,00	100,00	18.700.000.000,00	92,78
Jumlah	327.369.641.283,00	329.843.617.282,83	100,76	78.689.203.844,63	319,17

Penjelasan masing-masing pembiayaan adalah sebagai berikut:

5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Tabel 5 . 75 Penerimaan Pembiayaan

Uraian	TA. 2023		%	TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Penerimaan Pembiayaan	363.419.641.283,00	365.893.617.282,83	100,68	97.389.203.844,63	97.389.203.844,63	275,70

Rincian Anggaran dan Realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun Anggaran 2023 dan 2022 bersumber dari:

Tabel 5 . 76 Rincian Penerimaan Pembiayaan

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Naik/ Turun
Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	363.419.641.283,00	363.419.641.283,00	100	97.389.203.844,63	266.030.437.438,37	273,15
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi kesalahan pembukuan SiLPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	0,00	2.473.976.000,00	100	0,00	2.473.976.000,00	100
Jumlah	363.419.641.283,00	365.893.617.282,83	100,68	97.389.203.844,63	268.504.413.438,37	275,70

5.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Tabel 5 . 77 Pengeluaran Pembiayaan

Uraian	TA. 2023		%	TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Pengeluaran Pembiayaan	36.050.000.000,00	36.050.000.000,00	100	18.700.000.000,00	17.350.000.000,00	92,78

Rincian Anggaran dan Realisasi pengeluaran pembiayaan daerah tahun Anggaran 2023 dan 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

sebesar Rp36.050.000.000,00 dan Rp18.700.000.000,00 merupakan pengeluaran pembiayaan daerah untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp36.050.000.000,00 dan pemberian pinjaman daerah kepada BUMD sebesar Rp0,00

Tabel 5 . 78 Rincian Pengeluaran Pembiayaan

Uraian	TA. 2023		%	TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)		
Penyertaan Modal Daerah	36.050.000.000,00	36.050.000.000,00	100	16.700.000.000,00	19.350.000.000,00	115,86
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(100)
Jumlah	36.050.000.000,00	36.050.000.000,00	100	18.700.000.000,00	17.350.000.000,00	92,78

- Penyertaan modal daerah sebesar Rp36.050.000.000,00 diberikan kepada Bank Kalsel sebesar Rp25.550.000.000,00, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 dan PT. Air Minum Intan Banjar sebesar Rp6.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2023, dan PT BPR sebesar Rp4.500.000.000,00.
- Pemberian pinjaman daerah kepada BUMD sebesar Rp0,00.

5.1.4. SiLPA

Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)
0,00	429.120.334.540,89	363.419.641.282,83

SiLPA pada tahun 2023 sebesar Rp429.120.334.540,89 merupakan surplus defisit, Pembiayaan Neto, dan SiLPA tahun Berjalan Pemerintah Kabupaten Banjar tahun Anggaran 2023 dan 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 79 SiLPA

Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	% Naik/ Turun
- Jumlah Pendapatan	2.232.265.489.838,00	2.361.153.311.871,04	105,77	2.138.112.511.477,77	223.040.800.393,27	10,43
- Jumlah Belanja + Transfer	2.559.635.131.121,00	2.261.876.594.612,98	88,37	1.853.382.074.039,57	408.494.520.573,41	22,04
Surplus (Defisit)	(327.369.641.283,00)	99.276.717.258,06	(30,33)	284.730.437.438,20	(185.453.720.180,14)	(65,13)
- Jumlah Penerimaan Pembiayaan	363.419.641.283,00	365.893.617.282,83	100,68	97.389.203.844,63	268.504.413.438,20	275,70
- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	36.050.000.000,00	36.050.000.000,00	100,00	18.700.000.000,00	17.350.000.000,00	92,78
Jumlah Pembiayaan Neto	327.369.641.283,00	329.843.617.282,83	100,76	78.689.203.844,63	251.154.413.438,20	319,17
SiLPA Tahun Berjalan	0,00	429.120.334.540,89		363.419.641.282,83	65.700.693.258,06	18,08

Dari SiLPA sebesar Rp429.120.334.540,89 terdapat SiLPA terikat atau SiLPA yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp357.294.953.214,47 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 80 SiLPA yang dibatasi Penggunaannya

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Sisa DAK	19.943.562.072,00	19.694.823.072,00	248.739.000,00	1,26
2	Sisa DAK Non Fisik:	14.052.566.354,20	8.279.680.292,20	5.772.886.062,00	69,72



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	- Sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru	179.250.000,00	169.750.000,00	9.500.000,00	5,60
	- Sisa Dana Tunjangan Profesi Guru	4.022.176.100,00	854.676.800,00	3.167.499.300,00	370,61
	- Tunjangan Khusus Guru	310.711.850,00	74.645.500,00	236.066.350,00	316,25
	- Sisa Dana BOP-Kesetaraan	194.800.525,00	172.155.000,00	22.645.525,00	13,15
	- Sisa Dana BOP-PAUD	1.125.899.000,00	1.098.832.000,00	27.067.000,00	2,46
	- Sisa Dana BOK-Kesehatan	2.909.777.445,00	1.090.330.700,00	1.819.446.745,00	166,87
	- Sisa Dana BOK-Puskesmas	3.321.175.040,00	3.321.175.040,00	0,00	0,00
	- Sisa Dana BOK-Kefarmasian dan Alat Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sisa Dana BOK-Stunting	88.900.000,00	88.900.000,00	0,00	0,00
	- Sisa Dana BOK-Pengawasan obat dan makanan	212.250.000,00	212.250.000,00	0,00	0,00
	- Sisa Dana BOK-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sisa Dana BOK-Jaminan Persalinan	526.820.000,00	526.820.000,00	0,00	0,00
	- Sisa Dana BOK-Tambahan	280.405.808,00	280.405.808,00	0,00	0,00
	- Sisa Dana BOK-KB	621.692.959,00	204.293.517,00	417.399.442,00	204,31
	- Sisa Dana Pelayanan Perlindungan dan Perempuan	55.211.000,00	55.211.000,00	0,00	0,00
	- Sisa Dana Fasilitas Penanaman Modal	166.475.700,00	105.097.000,00	61.378.700,00	58,40
	- Sisa Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	25,00	25,00	0,00	0,00
	- Sisa Dana Ketahanan Pangan Pertanian	28.720.700,00	16.837.700,00	11.883.000,00	70,57
	- Sisa Dana BOK-Tambahan Th.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sisa Dana Peningkatan Koperasi dan UKM	8.300.200,00	8.300.200,00	0,00	0,00
	- Sisa Dana Desa 2015	2,20	2,20	0,00	0,00
3	Sisa Dana Insentif Daerah (DID)	802.840.060,00	0,00	802.840.060,00	100
4	Sisa Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan (Dana Kelurahan)	312.960.450,00	131.114.870,00	181.845.580,00	138,69
5	Sisa Dana Lainnya	321.139.871.628,27	285.109.248.883,91	36.030.622.744,36	12,64
6	Sisa Dana Bantuan Keuangan Dinas Kesehatan 2013	1.043.152.650,00	1.043.152.650,00	0,00	0,00
7	Sisa Dana Alokasi Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	357.294.953.214,47	314.258.019.768,11	43.036.933.446,36	13,69

5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih TA 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp429.120.334.540,89 dan Rp363.419.641.282,83 dengan ringkasan sebagai berikut :

Tabel 5 . 81 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	363.419.641.282,83	97.389.203.844,63	266.030.437.438,20	273,16
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	363.419.641.282,83	97.389.203.844,63	266.030.437.438,20	273,16



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
3	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	429.120.334.540,89	363.419.641.282,83	65.700.693.258,06	18,08
5	Sub Total	429.120.334.540,89	363.419.641.282,83	65.700.693.258,06	18,08
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Saldo Anggaran Lebih Akhir	429.120.334.540,89	363.419.641.282,83	65.700.693.258,06	18,08

Dari tabel di atas diketahui realisasi Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2023 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022, Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp65.700.693.258,06 atau 18,08%, dengan penjelasan dari masing-masing komponen pada tabel diatas:

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	363.419.641.282,83	97.389.203.844,63

Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp363.419.641.282,83 dan Rp97.389.203.844,63 sehingga ada kenaikan sebesar Rp266.030.437.438,00 atau 273,16%. Saldo Anggaran Lebih Awal adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan ditambah/dikurangi penyesuaian lain yang diperkenankan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 . 82 Saldo Anggaran Lebih Awal

Uraian	31/12/2023 (Rp)	31/12/2022 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	% Naik/ Turun
Kas di Kas Daerah	314.258.119.368,11	39.303.579.809,26	274.954.539.558,85	699,57
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	6.628.878,00	0,00	6.628.878,00	100
Kas BLUD	48.951.658.480,72	57.021.924.753,37	-8.070.266.272,65	(14,15)
Kas di Bendahara Dana Kapitasi/JKN	115.141.842,00	297.861.469,00	-182.719.627,00	(61,34)
Kas di Bendahara Dana BOS	88.092.714,00	765.837.813,00	-677.745.099,00	(88,50)
Saldo Anggaran Lebih Awal	363.419.641.282,63	97.389.203.844,63	266.030.437.438,00	273,16

5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	363.419.641.282,83	97.389.203.844,63

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun Berjalan tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp363.419.641.282,83 dan Rp97.389.203.844,63.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	429.120.334.540,89	363.419.641.282,83

SiLPA tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp429.120.334.540,89 dan Rp363.419.641.282,83, sehingga ada kenaikan sebesar Rp65.700.693.258,06 SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Ringkasan perhitungan SiLPA Tahun 2023 dan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 . 83 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	% Naik/ Turun
Pendapatan Daerah	2.361.153.311.871,04	2.138.112.511.477,77	10,43
Belanja dan Transfer	2.261.876.594.612,98	1.853.382.074.039,57	22,04
Surplus (Defisit)	99.276.717.258,06	284.730.437.438,20	(65,13)
Pembiayaan Neto	329.843.617.282,83	78.689.203.844,63	319,17
SiLPA	429.120.334.540,89	363.419.641.282,83	18,08

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	0,00	0,00

Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya pada Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	429.120.334.540,89	363.419.641.282,83

Berdasarkan Surplus Realisasi Anggaran sebesar Rp99.276.717.258,06 dan Realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp329.843.617.282,83 maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun Anggaran 2023 sebesar Rp429.120.334.540,89 terdiri atas Kas di Kas Daerah sebesar Rp357.294.953.214,47, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00, Kas BLUD sebesar Rp67.791.212.262,42, Kas di Bendahara Dana Kapitasi/JKN sebesar Rp4.025.982.449,00 dan Kas di Bendahara Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sebesar Rp8.186.615,00. Nilai saldo akhir SAL ini merupakan nilai yang telah sesuai antara catatan SAL dengan fisik SAL dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 84 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir

Uraian	Nomor Rekening Bank kalsel	31/12/2023 (Rp)	31/12/2022 (Rp)	Naik/Turun %
Kas di Kas Daerah pada rekening	(009.00.03.00001.7.)	357.294.953.214,47,	314.258.119.368,11	13,69



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Uraian	Nomor Rekening Bank kalsel	31/12/2023 (Rp)	31/12/2022 (Rp)	Naik/Turun %
	2003910329			
Kas di 2 rekening Bendahara Pengeluaran:		0,00	6.628.878,00	(100,00)
- Kecamatan Aranio (telah disetorkan pada tanggal 10 Jan 2023)	009.00.04.00340.6.	0,00	6.369.878,00	(100,00)
- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (telah disetorkan pada tanggal 16 Feb 2023)	3200127632	0,00	259.761,00	(100,00)
Kas BLUD pada Puskesmas, RS Raza dan BLUD Intan Hijau		67.791.212.262,42	48.951.658.480,72	38,49
Kas di Bendahara Dana Kapitasi/JKN pada Puskesmas		4.025.982.449,00	115.141.842,00	3.396,54
Kas di rekening Bendahara Dana BOS pada SD, SMP Negeri, dan PAUD		8.186.615,00	88.092.714,00	(90,71)
Saldo Anggaran Lebih Akhir		429.120.334.540,89	363.419.654.282,83	18,08

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Komposisi Neraca Pemerintah Kabupaten Banjar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 . 85 Pos-Pos Neraca

Neraca	31/12/2023 (Rp)	31/12/2022 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	% Naik/Turun
ASET	4.411.938.561.173,80	3.806.252.264.856,85	605.686.296.316,95	15,91
KEWAJIBAN	83.443.113.658,53	112.998.714.385,00	(29.555.600.726,47)	(26,16)
EKUITAS	4.328.495.447.515,27	3.693.253.550.471,85	635.241.897.043,42	17,20

Berikut penjelasan dari masing-masing kelompok dari tabel diatas sebagai berikut:

5.3.1. ASET	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	4.411.938.561.173,80	3.806.252.264.856,85

Aset Pemerintah Kabupaten Banjar per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.411.938.561.173,80 dan Rp3.806.252.264.856,85.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Tabel 5 . 86 Aset

Jenis Aset	31/12/2023 (Rp)	31/12/2022 (Rp)	Naik/Turun (Rp)	% Naik/ Turun
Aset Lancar	554.873.780.071,87	503.642.118.487,26	51.231.661.584,61	10,17
Investasi Jangka Panjang	1.210.221.771.454,91	1.125.223.084.012,38	84.998.687.442,53	7,55
Aset Tetap	2.184.982.268.167,23	2.077.596.077.723,33	107.386.190.443,90	5,17
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	432.725.894.475,79	99.790.984.633,88	332.934.909.841,91	333,63
Properti Investasi	29.134.847.004,00	0,00	29.134.847.004,00	100
Jumlah	4.411.938.561.173,80	3.806.252.264.856,85	605.686.296.316,95	15,91

Penjelasan dari ke-lima Jenis Aset tersebut diatas adalah sebagai berikut:

5.3.1.1 ASET LANCAR

31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
554.873.780.071,87	503.642.118.487,26

Aset lancar terdiri dari kas, kas lainnya dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan termasuk persediaan. Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 naik sebesar Rp51.231.661.584,61 atau 10,17% dari saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022. Penjelasan dari unsur dalam kepemilikan Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah:

1. Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	429.120.334.540,89	363.419.641.282,83

Saldo kas per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari :

Tabel 5 . 87 Kas

Saldo Kas	31/12/2023 (Rp)	31/12/2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	357.294.953.214,47	314.258.119.368,11
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	6.628.878,00
Kas BLUD	67.791.212.262,42	48.951.658.480,72
Kas di Bendahara Dana Kapitasi/JKN	4.025.982.449,00	115.141.842,00
Kas di Bendahara Dana BOS	8.186.615,00	88.092.714,00
Jumlah	429.120.334.540,89	363.419.641.282,83

Rincian dari Saldo kas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

a. Kas di Kas Daerah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	357.294.953.214,47	314.258.119.368,11

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp357.294.953.214,47 dan Rp314.258.119.368,11 merupakan saldo kas daerah dan setara kas yang dikuasi oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), yang terdapat pada Bank Kalsel Cabang Martapura berupa rekening giro dengan nomor rekening 009.00.03.00001.7. melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/4/KUM/2023 tentang Penunjukkan Bank Kalimantan Selatan Cabang Martapura Sebagai Kas Umum Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2023.

Rincian saldo Kas Daerah pada rekening giro Bank Kalsel per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp357.294.953.214,47 dan Rp314.285.119.368,11 terdiri dari:

Tabel 5 . 88 Kas di Kas Daerah

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Sisa DAK	19.943.562.072,00	19.694.823.072,00	248.739.000,00	1,26
2	Sisa DAK Non Fisik:	14.052.566.354,20	8.279.680.292,20	5.772.886.062,00	69,72
	- Sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru	179.250.000,00	169.750.000,00	9.500.000,00	5,60
	- Sisa Dana Tunjangan Profesi Guru	4.022.176.100,00	854.676.800,00	3.167.499.300,00	370,61
	- Tunjangan Khusus Guru	310.711.850,00	74.645.500,00	236.066.350,00	316,25
	- Sisa Dana BOP-Kesetaraan	194.800.525,00	172.155.000,00	22.645.525,00	13,15
	- Sisa Dana BOP-PAUD	1.125.899.000,00	1.098.832.000,00	27.067.000,00	2,46
	- Sisa Dana BOK-Kesehatan	2.909.777.445,00	1.090.330.700,00	1.819.446.745,00	166,87
	- Sisa Dana BOK-Puskesmas	3.321.175.040,00	3.321.175.040,00	0,00	0,00
	- Sisa Dana BOK-Kefarmasian dan Alat Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sisa Dana BOK-Stunting	88.900.000,00	88.900.000,00	0,00	0,00
	- Sisa Dana BOK-Pengawasan obat dan makanan	212.250.000,00	212.250.000,00	0,00	0,00
	- Sisa Dana BOK-Akreditasi Puskesmas	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sisa Dana BOK-Jaminan Persalinan	526.820.000,00	526.820.000,00	0,00	0,00
	- Sisa Dana BOK-Tambahan	280.405.808,00	280.405.808,00	0,00	0,00
	- Sisa Dana BOK-KB	621.692.959,00	204.293.517,00	417.399.442,00	204,31
	- Sisa Dana Pelayanan Perlindungan dan Perempuan	55.211.000,00	55.211.000,00	0,00	0,00
	- Sisa Dana Fasilitas Penanaman Modal	166.475.700,00	105.097.000,00	61.378.700,00	58,40
	- Sisa Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	25,00	25,00	0,00	0,00
	- Sisa Dana Ketahanan Pangan Pertanian	28.720.700,00	16.837.700,00	11.883.000,00	70,57
	- Sisa Dana BOK-Tambahan Th.2022	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sisa Dana Peningkatan Koperasi dan UKM	8.300.200,00	8.300.200,00	0,00	0,00
	- Sisa Dana Desa 2015	2,20	2,20	0,00	0,00
3	Sisa Dana Insentif Daerah (DID)	802.840.060,00	0,00	802.840.060,00	100
4	Sisa Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan (Dana Kelurahan)	312.960.450,00	131.114.870,00	181.845.580,00	138,69
5	Sisa Dana Lainnya	321.139.871.628,27	285.109.348.483,91	36.030.523.144,36	12,64



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
6	Sisa Dana Bantuan Keuangan Dinas Kesehatan 2013	1.043.152.650,00	1.043.152.650,00	0,00	0,00
7	Sisa Dana Alokasi Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	357.294.953.214,47	314.258.119.368,11	43.036.833.846,36	13,69

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
b. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
c. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	6.628.878,00

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp0,00 dan Rp6.628.878,00. Saldo kas di bendahara pengeluaran tahun 2022 merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) yang sampai dengan akhir tahun Anggaran 2023 belum disetorkan ke kas daerah, yaitu: sisa Uang Persediaan pada SKPD Kecamatan Aranio sebesar Rp6.369.878,00 dan pada sisa Uang Persediaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp259.761,00.

Untuk sisa uang persediaan pada SKPD Kecamatan Aranio sebesar Rp6.369.878,00 telah dilakukan penyetoran ke kas daerah pada tanggal 10 Januari 2023 dan sisa uang persediaan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp259.761,00 telah dilakukan penyetoran ke kas daerah pada tanggal 16 Februari 2023.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah	67.791.212.262,42	48.951.658.480,72

Kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp67.791.212.262,42 dan Rp48.951.658.480,72 merupakan kas yang terdapat pada Badan Layanan Umum Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 89 Kas di Badan Layanan Umum Daerah

No.	Uraian	Nomor Rekening Bank Kalsel	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha	009.00.04.00330.0	65.701.162.040,09	47.268.348.656,51	18.432.813.383,58
2	Puskesmas Martapura 1	2003911422	542.452.052,81	730.682.705,16	(188.230.652,35)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No.	Uraian	Nomor Rekening Bank Kalsel	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
3	Puskesmas Kertak Hanyar	2003911392	304.134.793,28	50.060.840,93	254.073.952,35
4	Puskesmas Gambut	009.00.04.00481.9	286.333.987,19	30.797.493,14	255.536.494,05
5	Puskesmas Pengaron	2003911406	339.656.008,70	270.443.815,42	69.212.193,28
6	Puskesmas Simpang Empat2	009.00.04.00475.8	287.923.772,85	45.541.471,70	242.382.301,15
7	BLUD Intan Hijau	2003914847	329.549.607,50	555.783.497,86	(226.233.890,36)
Jumlah			67.791.212.262,42	48.951.658.480,72	18.839.553781,70

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
e. Kas di Bendahara Dana Kapitasi/JKN	4.025.982.449,00	115.141.842,00

Merupakan seluruh kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Puskesmas yang sumbernya berasal dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Saldo Kas di Bendahara Puskesmas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp4.025.982.449,00 dan Rp115.141.842,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 . 90 Kas di Bendahara Dana Kapitasi/JKN

No	Uraian	Nomor Rekening BPD Kal-Sel	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	% Naik/ Turun
1	Puskesmas Karang Intan 1	009.00.04.00828.8	270.968.895,00	3.966,00	270.964.929,00	6832196,90
2	Puskesmas Karang Intan 2	009.00.04.00817.2	211.600.895,00	31.287.612,00	180.313.283,00	576,31
3	Puskesmas Sungai Pinang	009.00.04.00818.5	350.930.268,00	483.849,00	350.446.419,00	72428,88
4	Puskesmas Paramasan	009.00.04.00820.8	304.265.757,00	277.790,00	303.987.967,00	109430,85
5	Puskesmas Simpang Empat 1	009.00.04.00.4625	145.777.102,00	23.063,00	145.754.039,00	631982,13
6	Puskesmas Aluh-Aluh	009.00.04.00827.4	269.039.590,00	1.979.795,00	267.059.795,00	13489,27
7	Puskesmas Beruntung Baru	009.00.04.00821.1	136.654.022,00	150.335,00	136.503.687,00	90799,67
8	Puskesmas Tatah Makmur	009.00.04.00819.7	20.374.885,00	26.257.710,00	(5.882.825,00)	(22,40)
9	Puskesmas Sungai Tabuk 1	009.00.04.00830.2	165.526.860,00	268.267,00	165.258.593,00	61602,28
10	Puskesmas Sungai Tabuk 2	009.00.04.00829.0	27.023.581,00	16.081.342,00	10.942.239,00	68,04
11	Puskesmas Sungai Tabuk 3	009.00.04.00822.6	95.379.004,00	3.510.290,00	91.868.714,00	2617,13
12	Puskesmas Martapura Barat	009.00.04.00824.1	312.756.270,00	171.958,00	312.584.714,00	181779,45
13	Puskesmas Martapura Timur	009.00.04.00814.4	130.753.107,00	0,00	130.753.107,00	100
14	Puskesmas Martapura 2	009.00.04.00832.3	250.707.656,00	63.467,00	250.644.189,00	394920,30
15	Puskesmas Sambung Makmur	009.00.04.00823.6	212.617.153,00	8.702.458,00	203.914.695,00	2343,19
16	Puskesmas Astambul	009.00.04.00831.6	127.219.733,00	558.726,00	126.661.007,00	22669,61
17	Puskesmas Mataraman	009.00.04.00816.9	140.802.724,00	3.295,00	140.799.429,00	4273123,79
18	Puskesmas Aranio	009.00.04.00815.3	338.843.174,00	16.254.068,00	322.589.106,00	1984,67
19	Puskesmas Telaga Bauntung	009.00.04.00503.9	227.043.039,00	8.984.280,00	218.058.759,00	2427,11
20	Puskesmas Cintapuri Darussalam	009.00.04.02745.8	287.698.734,00	79.571,00	287.619.163,00	361462,30
Jumlah			4.025.982.449,00	115.141.842,00	3.910.841.009,00	3.396,54

Saldo Kas dana bendahara Kapitasi/JKN merupakan saldo dana Kapitasi/JKN ditambah dana BOK dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Tabel 5 . 91 Kas di Bendahara Dana Kapitasi/JKN - Dana BOK

No	Uraian	Nomor Rekening BPD Kal-Sel	Dana BOK (Rp)	Dana JKN (Rp)	Jumlah
1	Puskesmas Aluh-Aluh	1589979008	249.981.661,00	19.057.929,00	269.039.590,00
2	Puskesmas Aranio	1589979019	318.722.374,00	20.120.800,00	338.843.174,00
3	Puskesmas Astambul	1589978991	82.193.300,00	45.026.433,00	127.219.733,00
4	Puskesmas Beruntung Baru	1589978811	103.818.653,00	32.835.369,00	136.654.022,00
5	Puskesmas Cintapuri Darussalam	1589978855	273.284.581,00	14.414.153,00	287.698.734,00
6	Puskesmas Karang Intan 1	1589978800	252.484.728,00	18.484.167,00	270.968.895,00
7	Puskesmas Karang Intan 2	1589978866	151.157.393,00	60.443.502,00	211.600.895,00
8	Puskesmas Martapura 2	1589978902	193.798.083,00	56.909.573,00	250.707.656,00
9	Puskesmas Martapura Barat	1589978913	303.310.857,00	9.445.413,00	312.756.270,00
10	Puskesmas Martapura Timur	1589978924	111.515.301,00	19.237.806,00	130.753.107,00
11	Puskesmas Mataraman	1589978899	107.072.194,00	33.730.530,00	140.802.724,00
12	Puskesmas Paramasan	1589978888	296.417.576,00	7.848.181,00	304.265.757,00
13	Puskesmas Sambung Makmur	1589978877	192.161.883,00	20.455.270,00	212.617.153,00
14	Puskesmas Simpang Empat 1	158997883	141.763.426,00	4.013.676,00	145.777.102,00
15	Puskesmas Sungai Pinang	1589978968	332.871.905,00	18.058.363,00	350.930.268,00
16	Puskesmas Sungai Tabuk 1	1589978946	112.334.616,00	53.192.244,00	165.526.860,00
17	Puskesmas Sungai Tabuk 2	1589978844	24.278.597,00	2.744.984,00	27.023.581,00
18	Puskesmas Sungai Tabuk 3	1589978822	69.446.924,00	25.932.080,00	95.379.004,00
19	Puskesmas Tatah Makmur	1589978797	20.328.681,00	46.204,00	20.374.885,00
20	Puskesmas Telaga Bauntung	1589978775	227.033.019,00	10.020,00	227.043.039,00
Jumlah			3.563.975.752,00	462.006.697,00	4.025.982.449,00

f. Kas di Bendahara Dana BOS	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	8.186.615,00	88.092.714,00

Merupakan saldo Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di masing-masing sekolah Negeri pada SKPD Dinas Pendidikan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp8.186.615,00 dan Rp88.092.714,00.

Tabel 5 . 92 Kas di Bendahara Dana BOS

Uraian	Saldo Awal	Setoran Ke Kas Daerah	Mutasi		Saldo Akhir
			Penerimaan	Pengeluaran	
SD NEGERI	71.772.796,00	0,00	38.876.971.889,00	38.940.812.012,00	7.932.673,00
SMP NEGERI	4.867.918,00	0,00	13.910.991.566,00	13.915.605.542,00	253.942,00
BOP PAUD	11.452.000,00	11.452.000,00	670.320.000,00	670.320.000,00	0,00
Jumlah	88.092.714,00	11.452.000,00	53.458.283.455	53.526.737.554,00	8.186.615,00

Pada kas di bendahara dana BOS terdapat dana BOP PAUD sebesar Rp11.452.000,00 yang pada awal tahun 2023 di setorkan ke Kas Daerah karena dana tersebut tidak digunakan oleh pihak sekolah.

Rincian Kas di Bendahara Dana BOS dapat dilihat pada **Lampiran 13**.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
g. Kas Lainnya	0,00	0,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
2. Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00

Saldo investasi jangka pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 masing – masing sebesar Rp0,00 dan 0,00.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
3. Piutang	103.738.456.739,23	121.906.683.067,49

Saldo Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari:

Tabel 5 . 93 Piutang

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Piutang Pajak	81.810.616.065,00	74.168.733.331,00
Penyisihan Piutang Pajak	(53.062.981.517,81)	(49.163.006.257,58)
Piutang Pajak Neto	28.747.634.547,19	25.005.727.073,42
Piutang Retribusi	30.160.200,00	30.160.200,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(30.160.200,00)	(30.160.200,00)
Piutang Retribusi Neto	0,00	0,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	10.006.549.342,00	12.434.410.086,42
Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(594.739.481,96)	(635.268.939,35)
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Neto	9.411.809.860,04	11.799.141.147,07
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	14.032.962.404,00	33.584.588.226,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	51.540.079.928,00	51.511.256.621,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	6.000.000,00	6.000.000,00
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	(30.000,00)	(30.000,00)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Neto	5.970.000,00	5.970.000,00
Piutang Lainnya	83.799.989,00	83.799.989,00
Penyisihan Piutang Lainnya	(83.799.989,00)	(83.799.989,00)
Piutang Lainnya Neto	0,00	0,00
Jumlah	103.738.456.739,23	121.906.683.067,49

Rincian masing-masing Saldo Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
a. Piutang Pajak	81.810.616.065,00	74.168.733.331,00

Rincian Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah:

Tabel 5 . 94 Piutang Pajak

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Piutang Pajak Reklame pada SKPD DPMPTSP	2.808.000,00	2.808.000,00	0,00	0,00
2	Piutang PBB-P2 pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	78.723.471.666,00	71.445.292.629,00	7.278.179.037,00	10,19
3	Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	3.069.586.137,00	2.720.632.702,00	348.953.435,00	12,83
4	Piutang Pajak MBLB pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	14.750.262,00	0,00	14.750.262,00	100
	Jumlah	81.810.616.065,00	74.168.733.331,00	7.641.882.734,00	10,30

Jumlah piutang pajak per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.641.882.734,00 atau sebesar 10,30%.
 Perincian transaksi masing-masing Piutang Pajak sebagai berikut:

Tabel 5 . 95 Rincian Piutang Pajak

No	Nama Subjek Pajak	Jenis Pajak	Saldo Awal (Rp)	Mutasi Kurang	Mutasi Tambah	Saldo Akhir (Rp)	Keterangan
1	Tumin Edy Saputra	Reklame	2.808.000,00	0,00	0,00	2.808.000,00	Jatuh tempo 14 Januari 2012
	jumlah		2.808.000,00	0,00	0,00	2.808.000,00	
2	PBB-P2	PBB	71.445.292.629,00	9.128.253.119,00	16.406.432.156,00	78.723.471.666,00	
	jumlah		71.445.292.629,00	9.128.253.119,00	16.406.432.156,00	78.723.471.666,00	
3	PPJU	PPJU	2.720.632.702,00	2.720.632.702,00	3.069.586.137,00	3.069.586.137,00	
	jumlah		2.720.632.702,00	2.720.632.702,00	3.069.586.137,00	3.069.586.137,00	
4	MBLB		0,00	0,00	14.750.262,00	14.750.262,00	
	jumlah		0,00	0,00	14.750.262,00	14.750.262,00	
	Jumlah Total		74.168.733.331,00	11.848.885.821,00	19.490.768.555,00	81.810.616.065,00	

Penjelasan lebih lanjut atas Piutang PBB-P2, PPJU dan MBLB yaitu:

1. Piutang PBB-P2 sebesar Rp78.723.471.666,00 dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Tabel 5 . 96 Piutang PBB-P2 dan PPJU

Nama Subjek Pajak	Uraian	Saldo Awal 2023 (Rp)	Penetapan		Mutasi			Saldo Akhir (Rp)
					Kurang	Tambah		
				Penghapusan	Kurang	Koreksi	Tambah	
PBB-P2	s.d 2003	2.200.569.535,00	0,00	0,00	1.512.776,00	0,00	0,00	2.199.056.759,00
	2004	342.221.841,00	0,00	0,00	749.354,00	0,00	0,00	341.472.487,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Nama Subjek Pajak	Uraian	Saldo Awal 2023 (Rp)	Penetapan		Mutasi			Saldo Akhir (Rp)
					Kurang	Tambah		
				Penghapusan	Kurang	Koreksi	Tambah	
	2005	919.547.443,00	0,00	0,00	934.419,00	0,00	0,00	918.613.024,00
	2006	908.025.299,00	0,00	0,00	1.077.329,00	0,00	0,00	906.947.970,00
	2007	1.169.718.361,00	0,00	0,00	2.393.732,00	0,00	0,00	1.167.324.629,00
	2008	2.087.847.595,00	0,00	0,00	2.539.835,00	0,00	0,00	2.085.307.760,00
	2009	3.447.020.157,00	0,00	0,00	3.854.402,00	0,00	0,00	3.443.165.755,00
	2010	4.501.121.423,00	0,00	0,00	8.709.304,00	0,00	0,00	4.492.412.119,00
	2011	5.345.469.227,00	0,00	0,00	11.292.852,00	0,00	0,00	5.334.176.375,00
	2012	5.379.503.011,00	0,00	0,00	14.134.882,00	0,00	0,00	5.365.368.129,00
	2013	5.696.799.057,00	0,00	0,00	16.181.588,00	0,00	0,00	5.680.617.469,00
	2014	3.112.053.818,00	0,00	0,00	21.355.985,00	0,00	0,00	3.090.697.833,00
	2015	3.489.020.752,00	0,00	0,00	24.701.725,00	0,00	0,00	3.464.319.027,00
	2016	3.757.735.567,00	0,00	0,00	35.082.132,00	0,00	0,00	3.722.653.435,00
	2017	3.746.396.368,00	0,00	0,00	58.549.413,00	0,00	0,00	3.687.846.955,00
	2018	3.476.959.957,00	0,00	0,00	75.193.502,00	0,00	0,00	3.401.766.455,00
	2019	3.912.391.751,00	0,00	0,00	143.592.834,00	0,00	0,00	3.768.798.917,00
	2020	4.821.215.742,00	0,00	0,00	178.475.265,00	0,00	0,00	4.642.740.477,00
	2021	7.240.960.850,00	0,00	0,00	389.479.490,00	0,00	0,00	6.851.481.360,00
	2022	5.890.714.875,00	0,00	0,00	653.584.805,00	20.000,00	0,00	5.237.110.070,00
	2023		16.406.432.156,00	141.595.077,00	7.343.242.418,00	0,00	0,00	78.723.471.666,00
Jumlah		71.445.292.629,00	16.406.432.156,00	141.595.077,00	8.986.638.042,00	20.000,00	0,00	78.723.471.666,00

2. Piutang PPJU merupakan piutang kepada Perusahaan Listrik Negara atas Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) bulan Desember 2023 senilai **Rp3.069.586.137,00** yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
3. Piutang MBLB merupakan piutang yang muncul atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan yang pada tahun 2023 sebesar **Rp14.750.262,00** yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
a.1. Penyisihan Piutang Pajak	(53.062.981.517,81)	(49.163.006.257,58)

Penyisihan Piutang Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang pajak yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Tabel 5 . 97 Penyisihan Piutang Pajak

No.	Uraian	Penyisihan Piutang	
		31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Piutang Pajak Reklame pada SKPD Dinas Penanaman Modal & PTSP	(2.808.000,00)	(2.808.000,00)
2	Piutang PBB-P2 pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	(53.060.099.766,81)	(49.160.198.257,58)
3	Piutang MBLB pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	(73.751,00)	0,00
Jumlah		(53.062.981.517,81)	(49.163.006.257,58)

Berdasarkan penyisihan tersebut, nilai Piutang Pajak Neto Tahun 2023 adalah sebesar Rp28.747.634.547,19 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5 . 98 Piutang Pajak Neto

No	Piutang Pajak	Umur Piutang dan Persen Penyisihan				Jumlah
		0 s.d < 1 Tahun 0,50%	1 s.d <2 Tahun 10%	2 s.d < 5 Tahun 50%	> 5 Tahun 100%	
1	Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	2.808.000,00	2.808.000,00
	Penyisihan	0,00	0,00	0,00	(2.808.000,00)	(2.808.000,00)
Piutang Pajak Reklame Neto						0,00
2	Pajak PBB-P2	8.921.594.661,00	12.088.591.430,00	11.813.305.849,00	45.899.979.726,00	78.723.471.666,00
	Penyisihan	(44.607.973,31)	(1.208.859.143,00)	(5.906.652.924,50)	(45.899.979.726,00)	(53.060.099.766,81)
Piutang Pajak PBB-P2 Neto						25.663.371.899,19
3	Pajak PJU	3.069.586.137,00	0,00	0,00	0,00	3.069.586.137,00
	Penyisihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak PJU Neto						3.069.586.137,00
4	Pajak - MBLB	14.750.262,00	0,00	0,00	0,00	14.750.262,00
	Penyisihan	(73.751,00)	0,00	0,00	0,00	(73.751,00)
Piutang Pajak MBLB Neto						14.676.511,00
TOTAL PIUTANG PAJAK						81.810.616.065,00
TOTAL PENYISIHAN PIUTANG PAJAK						(53.062.981.517,81)
PIUTANG PAJAK NETO						28.747.634.547,19

b. Piutang Retribusi	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	30.160.200,00	30.160.200,00

Merupakan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022 yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Tabel 5 . 99 Piutang Retribusi

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	- Piutang Retribusi Ijin Gangguan (HO) pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	29.760.200,00	29.760.200,00	0,00	0,00
2	- Piutang Retribusi Sewa Tanah Reklame Pada SKPD Dinas Penanaman Modal & PTSP	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	30.160.200,00	30.160.200,00	0,00	0,00

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
b.1. Penyisihan Piutang Retribusi	(30.160.200,00)	(30.160.200,00)

Penyisihan Piutang Retribusi adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang retribusi yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Retribusi pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 5 . 100 Penyisihan Piutang Retribusi

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	- Piutang Retribusi Ijin Gangguan (HO) pada SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	(29.760.200,00)	(29.760.200,00)
2	- Piutang Retribusi Sewa Tanah Reklame pada SKPD Badan Penanaman Modal & PTSP	(400.000,00)	(400.000,00)
	Jumlah	(30.160.200,00)	(30.160.200,00)

Berdasarkan penyisihan tersebut, nilai Piutang Retribusi Neto Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5 . 101 Piutang Retribusi Neto

No.	Piutang Retribusi	Umur Piutang dan Persen Penyisihan				Jumlah
		0 s.d < 1 Bulan	1 s.d < 3 Bulan	3 s.d 12 Bulan	> 12 Bulan	
		0,50%	10%	50%	100%	
1	Retribusi Ijin Gangguan (HO)	0,00	0,00	0,00	29.760.200,00	29.760.200,00
	Penyisihan	0,00	0,00	0,00	(29.760.200,00)	(29.760.200,00)
	Piutang Retribusi Ijin Gangguan (HO) Neto					0,00
2	Retribusi Sewa Tanah Reklame	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
	Penyisihan	0,00	0,00	0,00	(400.000,00)	(400.000,00)
	Piutang Retribusi Sewa Tanah Reklame Neto					0,00
	Piutang Retribusi Neto					0,00
	TOTAL PIUTANG RETRIBUSI					30.160.200,00
	TOTAL PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI					(30.160.200,00)
	PIUTANG RETRIBUSI NETO					0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
c. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	10.006.549.342,00	12.434.410.086,42

Merupakan saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Tabel 5 . 102 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Tagihan Pihak Ketiga pada BLUD Ratu Zalecha	318.739.636,00	300.846.484,00	17.893.152,00	5,95
2	Tagihan Jasa Parkir pada BLUD Ratu Zalecha	313.100.000,00	313.100.000,00	0,00	0,00
3	Klaim BPJS pada BLUD Ratu Zalecha	9.348.865.623,00	11.520.663.959,00	(2.171.798.336,00)	(18,85)
4	Klaim BPJS pada BLUD Ratu Zalecha (Tagihan Covid)	0,00	263.513.500,00	(263.513.500,00)	(100)
5	Dana Perkuatan Modal Usaha Mikro pada Dinas Koperasi & Usaha Mikro	21.600.000,00	26.350.000,00	(4.750.000,00)	18,03
6	Piutang Pendapatan Denda PBB-P2	0,00	6.000,00	(6.000,00)	(100)
7	Piutang Renumerasi Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	0,00	9.930.143,42	(9.930.143,42)	(100)
8	Piutang pendapatan denda MBLB Pada BPKPAD	1.789.183,00	0,00	1.789.183,00	100
9	Piutang pendapatan Dana JKN pada Dinas Kesehatan	2.454.900,00	0,00	2.454.900,00	100
	Jumlah	10.006.549.342,00	12.434.410.086,42	(2.4278.60.744,42)	(19,53)

- a. Tagihan Pihak Ketiga BLUD Ratu Zalecha per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp318.739.636,00 dan Rp300.846.484,00 merupakan tagihan pada perusahaan peserta jaminan kesehatan BPJS dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp300.846.484,00
Mutasi Kurang	Rp218.297.551,00 (Pelunasan)
Mutasi Tambah	<u>Rp236.190.703,00</u> (Tagihan 2023)
Saldo Akhir 2023	Rp318.739.636,00

- b. Tagihan Jasa Parkir RSUD Ratu Zalecha per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp313.100.000,00 dan Rp313.100.000,00 merupakan saldo tagihan pada pengelola parkir di BLUD Ratu Zalecha dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp313.100.000,00
Mutasi Kurang	Rp0,00 (Pelunasan)
Mutasi Tambah	<u>Rp0,00</u> (Tagihan 2023)
Saldo Akhir 2023	Rp313.100.000,00

- c. Klaim BPJS pada BLUD Ratu Zalecha per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp9.348.865.623,00 dan Rp11.520.663.959,00 merupakan saldo tagihan pada



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

BPJS atas perawatan pasien BLUD Ratu Zalecha, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp11.520.663.959,00
Mutasi Kurang	Rp11.520.663.959,00 (Pelunasan)
Mutasi Tambah	<u>Rp 9.348.865.623,00</u> (Tagihan 2023)
Saldo Akhir 2023	Rp 9.348.865.623,00

Nilai Piutang atas Klaim BPJS sebesar Rp9.348.865.623,00 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5 . 103 Piutang atas Klaim BPJS

No.	Piutang BPJS u.b.	Nilai	Dibayar Tanggal
1	Juli-Oktobre	24.528.006,00	29 Januari 2024
2	Desember	9.324.337.617,00	17 Januari 2024
Total		9.348.865.623,00	

- d. Dana Perkuatan Modal Kerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp21.600.000,00 dan Rp26.350.000,00. Dana tersebut merupakan sisa dana perkuatan modal kerja yang direalisasikan/dikucurkan sebesar Rp300.000.000,00 pada tahun Anggaran 2009, yang jatuh tempo pada tahun berikutnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 104 Dana Perkuatan Modal Kerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

No.	Nama	Alamat	Saldo Awal Pokok Pinjaman	Pembayaran Angsuran 2023 (Rp)	Sisa Pokok Pinjaman 2023 (Rp)
1	Zulkipli	Jl. Menteri Empat Martapura	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
2	Syamsul Bahri	Komplek Sa'adah I RT.10/04 Sei Paring Mtp	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
3	Surahmi	Kamp. Jl. Kampung Baru No.41 RT.03/01 Mtp	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
4	Nurani	Jl. Menteri Empat Martapura	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00
5	Mahyuni	Jl. Menteri Empat Martapura	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
6	M. Syaibandi	Jl. Melati Tunggul Irang Ulu Martapura	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
7	Syafruddin, SHI	Jl. Pekauman Ulu RT.03/02 Martapura	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
8	Rusdiah	Jl. Menteri Empat Martapura	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Jumlah			26.350.000,00	4.750.000,00	21.600.000,00

c.1. Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<u>(594.739.481,96)</u>	<u>(635.268.939,35)</u>

Penyisihan Piutang Piutang Lain-Lain PAD yang Sah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah yang ditentukan oleh kualitas piutang



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 5 . 105 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

No.	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Tagihan Pihak Ketiga BLUD Ratu Zalecha	(212.436.389,85)	(236.898.052,05)
2	Tagihan Jasa Parkir BLUD Ratu Zalecha	(313.100.000,00)	(313.100.000,00)
3	Klaim BPJS BLUD Ratu Zalecha	(46.744.328,11)	(58.920.887,30)
4	Dana Bergulir Perkuatan Modal Usaha Mikro pada Dinas Koperasi & UKM	(21.600.000,00)	(26.350.000,00)
5	Pendapatan denda pajak MBLB	(858.764,00)	0,00
	Jumlah	(594.739.481,96)	(635.268.939,35)

d. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	14.032.962.404,00	33.584.588.226,00

Merupakan nilai kurang bayar Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, sesuai dengan KMK Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar dan Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023, maka Pemerintah Kabupaten Banjar memiliki piutang kurang bayar atas Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 106 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

No.	Jenis DBH	Saldo Awal 2023	Penambahan KMK 38/KM.7/2023	Jumlah	Penyelesaian KMK 38/KM.07/2023	Sisa KB KMK 38/KM.7/2023	Saldo Akhir 2023
1	2	3	4	5= 3+4	6	7	8 = 5-6+7
1	PPh	1.590.024.684,00	2.000.932.000,00	3.590.956.684,00	2.000.932.000,00	911,00	1.590.025.595,00
2	PBB	12.442.931.233,00	12.363.305.000,00	24.806.236.233,00	12.363.305.000,00	2.207,00	12.442.933.440,00
3	Kehutanan	73.357.819,00	34.075.000,00	107.432.000,00	107.432.000,00	736,00	736,00
4	Minerba	19.478.257.245,00	140.586.400.000,00	160.064.657.000,00	160.064.657.000,00	679,00	679,00
5	Migas	0,00	209.265.000,00	209.265.000,00	209.265.000,00	645,00	645,00
6	Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Cukai	17.245,00	0,00	17.245,00	17.000,00	0,00	245,00
	Total	33.584.588.226,00	155.193.977.000,00	188.778.565.226,00	174.745.608.000,00	5.178,00	14.032.962.404,00

e. Piutang Transfer - Pemerintah Daerah Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	51.540.079.928,00	51.511.256.621,00

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan Piutang atas Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Selatan dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB & BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), penerimaan Pajak Air Permukaan (AP) dan Pajak Rokok. Piutang Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp51.511.256.621,00 dan Rp51.540.079.928,00 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Tabel 5 . 107 Piutang Transfer - Pemerintah Daerah Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Pajak Kendaraan bermotor (PKB)	8.188.772.647,00	9.051.525.461,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.514.662.229,00	4.484.518.358,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	34.126.990.186,00	33.132.766.870,00
4	Pajak Air Permukaan (AP)	464.040.605,00	144.178.485,00
5	Pajak Rokok	4.245.614.261,00	4.698.267.447,00
	Jumlah	51.540.079.928,00	51.511.256.621,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 108 Rincian Piutang Transfer - Pemerintah Daerah Lainnya

No	Uraian	Saldo Awal	Posisi di Tahun 2023		
			(Pengurangan)	Penambahan	31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Kendaraan bermotor (PKB)	9.051.525.461,00	9.051.525.461,00	8.188.772.647,00	8.188.772.647,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.484.518.358,00	4.484.518.358,00	4.514.662.229,00	4.514.662.229,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	33.132.766.870,00	33.132.766.870,00	34.126.990.186,00	34.126.990.186,00
4	Pajak Air Permukaan (AP)	144.178.485,00	144.178.485,00	464.040.605,00	464.040.605,00
5	Pajak Rokok	4.698.267.447,00	4.698.267.447,00	4.245.614.261,00	4.245.614.261,00
	Jumlah	51.511.256.621,00	51.511.256.621,00	51.540.079.928,00	51.540.079.928,00

f.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		6.000.000,00	6.000.000,00

Merupakan saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 atas sejumlah karyawan PNS yang bekerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar yang jatuh tempo pada tahun berikutnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 109 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

No	Nama	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Drs. HI	6.000.000,00	6.000.000,00
	Jumlah	6.000.000,00	6.000.000,00

f.1.	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
		(30.000,00)	(30.000,00)

Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tuntutan ganti rugi yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Tabel 5 . 110 Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

No.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Umur Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Persen Penyisihan				Jumlah
		0 s.d < 1 Bulan	1 s.d < 3 Bulan	3 s.d 12 Bulan	> 12 Bulan	
		0,50%	10%	50%	100%	
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Drs.HI	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	Penyisihan	(30.000,00)	0,00	0,00	0,00	(30.000,00)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Neto						5.970.000,00
TOTAL TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH						6.000.000,00
TOTAL PENYISIHAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH						30.000,00
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH NETO						5.970.000,00

g. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	83.799.989,00	83.799.989,00

Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp83.799.989,00 dan Rp83.799.989,00 merupakan Restitusi PPh 21 atas kelebihan pembayaran PPh 21 pada gaji anggota DPRD ditahun 2013, karena adanya perubahan besaran tarif pajak yang lebih rendah dari sebelumnya, namun nilai pajak yang terbayarkan sampai dengan akhir tahun tersebut masih menggunakan tarif pajak yang lama. Pemerintah Kabupaten Banjar sudah mengupayakan untuk merestitusi pajak dimaksud namun bukti data yang disampaikan pada kantor pajak sudah tidak ada lagi.

g.1. Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	(83.799.989,00)	(83.799.989,00)

Penyisihan Piutang Lainnya merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Lainnya. Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai minus Rp83.799.989,00 dan minus Rp83.799.989,00.

Tabel 5 . 111 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

No.	Piutang Lainnya	Umur Piutang Lainnya dan Persen Penyisihan				Jumlah
		0 s.d < 1 Bulan	1 s.d < 3 Bulan	3 s.d 12 Bulan	> 12 Bulan	
		0,50%	10%	50%	100%	
1	Piutang Lainnya – Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah	0,00	0,00	0,00	83.799.989,00	83.799.989,00
	Penyisihan	0,00	0,00	0,00	(83.799.989,00)	(83.799.989,00)
Piutang Lainnya bagian lancar tagihan jangka panjang – investasi dalam proyek pembangunan kepada pemerintah Neto						0,00
TOTAL PIUTANG LAINNYA						83.799.989,00
TOTAL PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA						(83.799.989,00)
PIUTANG LAINNYA NETO						0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4. Persediaan	22.014.988.791,75	18.315.794.136,94

Merupakan nilai Persediaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar per 31 Desember 2023 dan 2022 yang terdiri atas:

Tabel 5 . 112 Persediaan

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Bahan Kimia	215.714.528,36	275.518.836,99	(59.804.308,63)	(21,71)
Bahan Baku	75.584.316,00	0,00	75.584.316,00	100
Bahan Bangunan dan Konstruksi	150.000,00	0,00	150.000,00	100
Isi Tabung Gas	470.000,00	3.808.816,00	(3.338.816,00)	(87,66)
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	520.000,00	0,00	520.000,00	100
Bahan/Bibit Tanaman	750.000,00	0,00	750.000,00	100
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	50.273.500,00	57.730.000,00	(7.456.500,00)	(12,92)
Bahan Lainnya	106.781.437,50	591.440.391,00	(484.658.953,50)	(81,95)
Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	381.719.482,00	(381.719.482,00)	(100)
Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Tulis Kantor	184.316.329,34	546.134.367,00	(361.818.037,66)	(66,25)
Kertas dan Cover	170.008.649,81	1.377.000,00	168.631.649,81	12246,31
Bahan Cetak	230.965.800,00	442.380.945,00	(211.415.145,00)	(47,79)
Benda Pos	24.390.000,00	5.090.000,00	19.300.000,00	379,17
Bahan Komputer	467.767.524,00	355.684.700,00	112.082.824,00	31,51
Perabot Kantor	97.157.917,00	1.190.344.340,45	(1.093.186.423,45)	(91,84)
Alat Listrik	63.118.965,00	28.306.128,00	34.812.837,00	122,99
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	119.500,00	2.346.325,00	(2.226.825,00)	(94,91)
Obat	10.130.953.272,90	9.501.880.968,50	629.072.304,40	6,62
Obat-obatan Lainnya	4.061.559.357,84	4.835.356.863,00	(773.797.505,16)	(16,00)
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	6.112.336.694,00	47.093.409,00	6.065.243.285,00	12.879,18
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0,00	44.781.565,00	(44.781.565,00)	(100)
Pakan	18.600.000,00	0,00	18.600.000,00	100
Natura dan Pakan Lainnya	3.451.000,00	4.800.000,00	(1.349.000,00)	(28,10)
Jumlah	22.014.988.791,75	18.315.794.136,94	3.699.194.654,81	20,20

Jumlah persediaan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.699.194.654,81 atau sebesar 20,19%.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	1.210.221.771.454,91	1.125.223.084.012,38

Saldo Investasi Jangka Panjang tersebut terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian berikut :

Tabel 5 . 113 Investasi Jangka Panjang

Uraian	31/12/2023 (Rp)	31/12/2022 (Rp)	Naik/Turun	% Naik/ Turun
Investasi Permanen	1.210.195.747.454,91	1.122.723.084.012,38	87.474.663.442,53	7,79
Investasi Non Permanen	26.024.000,00	2.500.000.000,00	(2.473.976.000,00)	(98,96)
Jumlah	1.210.221.771.454,91	1.125.223.084.012,38	84.998.687.442,53	7,55

Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Investasi Permanen	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	1.210.195.747.454,91	1.122.723.084.012,38

Merupakan investasi Pemerintah Kabupaten Banjar yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan Dividen/pendapatan/meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan yang berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar pada Badan Usaha Milik Daerah. Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Banjar berupa penyertaan modal kepada enam BUMD, dengan rincian masing-masing sebagai berikut :

Tabel 5 . 114 Investasi Permanen

Investasi Permanen	31/12/2023 (Rp)	31/12/2022 (Rp)	Naik/Turun	% Naik/ Turun
PT Bank Kalsel	62.819.500.000,00	37.269.500.000,00	25.550.000.000,00	68,55
PDAM Intan Banjar	258.060.016.119,87	201.823.521.877,41	56.236.494.242,46	27,86
PD. Baramarta	0,00	0,00	0,00	0,00
PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera	19.184.545.905,04	14.125.837.866,97	5.058.708.038,07	35,81
PD Pasar Bauntung Batuah	870.131.685.430,00	869.504.224.268,00	627.461.162,00	0,07
PT. Banjar Intan Mandiri	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.210.195.747.454,91	1.122.723.084.012,38	87.472.663.442,53	7,79

Perhitungan nilai investasi untuk masing-masing BUMD dengan penjelasan sebagai berikut:



a. Penyertaan modal pada Bank Kalsel

Nilai investasi Pemerintah Kabupaten Banjar pada PT Bank Kalsel per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp62.819.500.000,00 dan Rp37.269.500.000,00.

Nilai investasi pada PT Bank Kalsel dicatat dengan metode biaya perolehan (*cost method*) karena kepemilikannya kurang dari 100% dan Pemerintah Kabupaten Banjar tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam pengendalian perusahaan. Jumlah saldo penyertaan modal pada PT Bank Kalsel per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp62.819.500.000,00 dengan porsi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Banjar kepada PT Bank Kalsel sebanyak 3,92%.

Total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banjar pada PT Bank Kalsel sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp62.819.500.000,-. Pada TA 2023 Pemerintah Kabupaten Banjar menambah nilai penyertaan modalnya sebesar Rp25.550.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2023.

Total Dividen/bagian laba yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Banjar sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar Rp39.944.786.896,00 atau 3,77% dari jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banjar kepada Bank Kal-Sel. Dividen Tahun Buku 2022 telah diterima Kas Umum Daerah pada tanggal 13 Pebruari 2023 sebesar Rp3.260.595.556,00.

Perhitungan nilai investasi pada PT Bank Kalsel berdasarkan laporan keuangan yang telah di audit oleh Auditor Indepeden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 . 115 Perhitungan nilai investasi pada PT Bank Kalsel

Investasi Kepada PT Bank Kalsel	per 31/12/ 2023 (Rp)	per 31/12/ 2022 (Rp)
Saldo Awal	37.269.500.000,00	24.569.500.000,00
Koreksi Saldo Awal		
Saldo Awal Setelah Koreksi	37.269.500.000,00	24.569.500.000,00
Mutasi tambah:		
Penyertaan Modal tahun 2023	25.550.000.000,00	12.700.000.000,00
Bagian Laba 2022 Audited (Laba/Rugi x2,36%)	3.260.595.556,00	3.009.261.248,00
Jumlah Penambahan	28.810.595.556,00	15.709.261.248,00
Mutasi Kurang:		
Penyetoran Dividen ke Kas Daerah	3.260.595.556,00	3.009.261.248,00
Jumlah Pengurangan	3.260.595.556,00	3.009.261.248,00
Kenaikan Investasi	25.550.000.000,00	12.700.000.000,00
Investasi per 31 Desember 2022	62.819.500.000,00	37.269.500.000,00



b. Penyertaan modal pada PT. Air Minum Intan Banjar

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banjar pada PT. Air Minum Intan Banjar per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp258.060.016.119,87 dan sebesar Rp201.823.521.877,41 dengan mutasi sebagai berikut:

Tabel 5 . 116 Penyertaan Modal pada PT. Air Minum Intan Banjar

Investasi Kepada PT.AM Intan Banjar	per 31/12/ 2023 (Rp)	per 31/12/ 2022 (Rp)
Saldo Awal	201.823.531.877,41	191.630.296.965,03
Koreksi Saldo Awal		
Saldo Awal Setelah Koreksi	201.823.531.877,41	191.630.296.965,03
Mutasi tambah:		
Penyertaan Modal tahun 2023	6.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Penyertaan Modal Aset	49.633.085.271,00	
Bagian Laba 2022	8.110.072.052,03	2.933.037.903,82
Penyesuaian Ekuitas BUMD		4.000.818.841,56
Jumlah Penambahan	63.743.157.323,03	10.933.856.745,38
Mutasi Kurang:		
Penyetoran Dividen ke Kas Daerah	1.862.222.185,00	740.631.833,00
Koreksi Ekuitas	5.644.440.895,58	
Jumlah Pengurangan	7.506.663.080,58	740.631.833,00
Kenaikan Investasi	56.236.494.242,45	10.193.224.912,38
Investasi per 31 Desember 2023	258.060.016.119,87	201.823.521.877,41

Penyertaan modal pada PDAM Intan Banjar dicatat dengan metode ekuitas. Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Banjar di PDAM Intan Banjar Tahun 2023 sebesar 52,16% dan Tahun 2022 sebesar 44,56%. Pada tahun 2023 penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banjar yang diberikan kepada PDAM Intan Banjar adalah sebesar Rp6.000.000.0000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2023 dan Penambahan Penyertaan Modal Aset sebesar Rp. 49.633.085,271,00 sesuai dengan BAST Nomor : 002.2.4/00192-06/BPKPAD tanggal 14 September 2023.

Berdasarkan Laporan Keuangan PT. Air Minum Intan Banjar Tahun 2023 *Unaudited*, Laba Usaha setelah pajak yang diperoleh PDAM Intan Banjar adalah sebesar Rp15.548.451,020,00 (persentase Dividen yang dibagikan 55% dari laba tahun berjalan). Dengan persentase kepemilikan sebesar 52,16%, maka bagian Dividen yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Banjar untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.862.222.185,00. Dividen yang diterima menjadi pengurang nilai investasi pada PT Air Minum. Pendapatan-LO yang diterima merupakan besaran laba rugi PT Air Minum Intan Banjar Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.548.451.020,00 dikalikan dengan persentasi kepemilikan pemerintah Kabupaten Banjar sebesar 52,16% maka didapat pendapatan LO sebesar Rp. 8.110.072.052,03 yang nantinya akan menjadi penambah nilai investasi pada PT Air Minum



Intan Banjar. Dari perhitungan tersebut maka kenaikan investasi PT.AM Intan Banjar TA 2023 sebesar Rp56.236.494.242,45.

c. Penyertaan Modal pada PT. Baramarta

Saldo penyertaan modal kepada PT. Baramarta per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, saldo tersebut tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan karena perusahaan tersebut sudah mengalami kerugian dari tahun 2022, namun dalam hal ini PT. Baramarta membayar Dividen atas utang Dividen pada tahun 2018 sebesar Rp2.638.675.413. Pada tanggal 26 Mei 2023 diterima pembayaran utang Dividen sebesar Rp1.000.000.000, kemudian pada tanggal 10 Juli 2023 diterima kembali pembayaran utang Dividen sebesar Rp1.000.000.000,00 dan terakhir pada tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp800.000.000,00, Dari jumlah penerimaan di atas terdapat kelebihan pembayaran utang Dividen sebesar Rp161.324.586,74 oleh pihak PT. Baramarta. Penyesuaian pada ekuitas serta penambahan kerugian dalam Laporan Keuangan PT. Baramarta tahun 2023, dengan mutasi sebagai berikut:

Tabel 5 . 117 Penyertaan Modal pada PT. Baramarta

Investasi Kepada PT. Baramarta	per 31/12/ 2023 (Rp)	per 31/12/ 2022 (Rp)
Saldo Awal Ekuitas	(499.439.985.202,00)	(354.506.864.781,00)
Koreksi Saldo Awal		
Saldo Awal Ekuitas Setelah Koreksi	(499.439.985.202,00)	(354.506.864.781,00)
Mutasi tambah:		
Penyertaan Modal tahun 2023	00,00	0,00
Pengurangan Dana Cadangan		
Koreksi Saldo laba		(1.273.843.998,00)
Rugi Tahun Berjalan	(162.961.205.727,00)	(7.748.512.316,00)
		(9.022.356.314,00)
Mutasi Kurang:		
Jumlah Penambahan		
Ekuitas per 31 Desember 2023	(336.478.779.475,00)	(363.529.221.095,00)

Secara administratif Pemerintah Kabupaten Banjar menyetorkan penyertaan modal secara tunai dari tahun 1999 sejak berdirinya **PT. Baramarta** s.d. tahun 2023 sebesar Rp205.000.000,00, persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Banjar modal kepada PT. Baramarta adalah sebesar 100%, sehingga dicatat dengan metode ekuitas. Saldo Penyertaan Modal pada PT. Baramarta belum selesai dilakukan audit oleh Auditor Independen. Laporan Keuangan PT Baramarta belum menyajikan penilaian atas ijin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (P2P2B).

Berdasarkan laporan keuangan unaudited PT. Baramarta tahun 2023, rugi usaha setelah pajak pada PT. Baramarta sebesar (Rp162.961.205.727,00) rugi usaha tersebut juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya sejak tahun 2020 s.d. tahun 2023 Sesuai dengan Pernyataan



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 06 tentang akuntansi penyertaan modal bahwa penyertaan modal tidak boleh bernilai negatif sehingga pada Neraca Laporan Keuangan penyertaan modal pada PT. Baramarta nilainya di anggap nol.

PT. Baramarta telah memberikan bagian Dividen kepada Pemerintah Kabupaten Banjar per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp2.800.000.000,00 dan Rp3.000.000.000,00. Sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan PT. Baramarta, pembagian Dividen tersebut bukan merupakan bagian dari pembagian Dividen pada tahun berjalan, melainkan setoran dari utang Dividen PT. Baramarta kepada Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2018 sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham dengan perhitungan 60% dari laba usaha.

d. Penyertaan Modal pada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera

Saldo penyertaan modal pada Pemerintah Kabupaten Banjar pada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp19.184.545.905,04 dan Rp14.125.837.866,97, dengan persentase kepemilikan sebesar 71,32% dan 64,86%, sehingga metode penilaian yang digunakan adalah metode ekuitas. Saldo penyertaan modal pada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera telah diaudit oleh Auditor Independen. Mutasi perhitungan nilai investasi daerah pada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera adalah sebagai berikut:

Tabel 5 . 118 Penyertaan Modal pada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera

Investasi Kepada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera	per 31/12/2023 (Rp)	per 31/12/2022 (Rp)
Saldo Awal	14.125.837.866,97	13.748.289.860,15
Koreksi Saldo Awal		
Saldo Awal Setelah Koreksi	14.125.837.866,97	13.748.289.860,15
Mutasi tambah:		
Penyertaan Modal tahun 2023	4.500.000.000,00	0,00
Penyertaan Modal Aset tahun 2023	1.105.255.000,00	
Bagian Laba tahun berjalan	1.036.599.097,37	676.146.712,45
Jumlah Penambahan	6.641.854.097,37	676.146.712,45
Mutasi Kurang:		
Penyetoran Dividen ke Kas Daerah	338.086.481,00	186.631.436,00
Koreksi Ekuitas	1.245.059.578,29	111.967.269,63
Jumlah Pengurangan	1.583.146.059,29	298.598.705,63
Kenaikan Investasi	5.058.708.038,08	377.548.006,82
Investasi per 31 Desember 2022	19.184.545.905,04	14.125.837.866,97

Tahun 2022, PT. BPR melakukan penggabungan perseroan menjadi PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera, sehingga nilai investasi BPR Astambul, BPR Simpang Empat, BPR Sungai Tabuk dan BPR Martapura telah digabungkan menjadi nilai investasi pada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera. Pada tahun 2023 penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banjar yang diberikan kepada PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera adalah sebesar Rp4.500.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun



2022 dan Penambahan Penyertaan Modal Aset sebesar Rp1.105.255.000,00 sesuai dengan BAST Nomor : 002.2.4/197-06/BPKPAD tanggal 4 Oktober 2023.

Berdasarkan Laporan Keuangan PT BPR Martapura Banjar Sejahtera Tahun 2023 audited, Laba Usaha setelah pajak yang diperoleh sebesar Rp1.453.447.977,25 (persentase Dividen yang dibagikan 50% dari laba tahun berjalan). Dengan persentase kepemilikan sebesar 71,32%, maka bagian Dividen yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Banjar untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp338.086.481,00. Dividen yang diterima menjadi pengurang nilai investasi pada PT. BPR Martapura. Pendapatan-LO yang diterima merupakan besaran laba rugi PT BPR Martapura Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.453.447.977,25 dikalikan dengan persentase kepemilikan pemerintah Kabupaten Banjar sebesar 71,32% maka didapat pendapatan LO sebesar Rp1.036.599.097,37 yang nantinya akan menjadi penambah nilai investasi pada PT BPR Martapura Banjar Dari perhitungan tersebut maka kenaikan investasi PT.BPR TA 2023 sebesar Rp5.058.708.038,08.

e. Penyertaan Modal pada PD Pasar Bauntung Batuah

Saldo penyertaan modal pada PD Pasar Bauntung Batuah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp870.131.685.430,00 dan Rp869.504.224.268,00 dengan persentase kepemilikan 100%, sehingga metode penilaian yang digunakan adalah metode ekuitas. Saldo Penyertaan Modal pada PD Pasar Bauntung Batuah belum diaudit oleh Auditor Independen. Mutasi perhitungan nilai investasi daerah pada PD Pasar Bauntung Batuah adalah sebagai berikut:

Tabel 5 . 119 Penyertaan Modal pada PD Pasar Bauntung Batuah

Investasi Kepada PD Pasar Bauntung Batuah	per 31/12/ 2023 (Rp)	per 31/12/ 2022 (Rp)
Saldo Awal	869.504.224.268,00	868.666.070.218,00
Koreksi Saldo Awal		
Saldo Awal Setelah Koreksi	869.504.224.268,00	868.666.070.218,00
Mutasi tambah:		
Penyertaan Modal tahun 2023	0,00	0,00
Bagian Laba	1.646.059.735,00	1.170.260.914,00
Jumlah Penambahan	1.646.059.735,00	1.170.260.914,00
Mutasi Kurang:		
Penyetoran Dividen ke Kas Daerah	655.346.112,00	231.245.549,00
Koreksi Ekuitas	363.252.461,00	100.861.315,00
Jumlah Pengurangan	1.018.598.573,00	332.106.864,00
Kenaikan Investasi	627.461.162,00	838.154.050,00
Investasi per 31 Desember 2022	870.131.685.430,00	869.504.224.268,00

Berdasarkan Laporan Keuangan PD Pasar Bauntung Batuah Tahun 2023 unaudited, Laba Usaha setelah pajak yang diperoleh sebesar Rp1.646.059.735,00 (persentase Dividen yang dibagikan 56% dari laba tahun berjalan). Dengan persentase kepemilikan sebesar 100%, maka bagian Dividen yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Banjar untuk Tahun 2023



adalah sebesar Rp655.346.112,00. Dividen yang diterima menjadi pengurang nilai investasi pada PD Bauntung Batuah. Pendapatan-LO yang diterima merupakan besaran laba rugi PD Bauntung Batuah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.646.059.735,00 dikalikan dengan persentase kepemilikan pemerintah Kabupaten Banjar sebesar 100% maka didapat pendapan LO sebesar Rp1.646.059.735,00 yang nantinya akan menjadi penambah nilai investasi pada PT BPR Martapura Banjar. Dari perhitungan di atas maka kenaikan nilai investasi PD Bauntung Batuah TA 2023 sebesar Rp627.461.162,00.

f. Penyertaan Modal pada PT. Banjar Intan Mandiri

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya Nomor 54/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN Niaga Surabaya tanggal 17 Desember 2022 PD. Banjar Intan Mandiri dinyatakan pailit, atas putusan tersebut Pemerintah Kabupaten Banjar telah melakukan berbagai upaya dengan pendampingan JPN Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan berupa peninjauan kembali yang telah diusulkan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Surabaya, upaya tersebut salah satunya berdasarkan novum hasil Audit tujuan tertentu dari BPKP dengan melakukan pendaftaran dan penyampaian memori Peninjauan Kembali yang dilaksanakan tanggal 26 April 2023, namun permohonan Peninjauan Kembali ditolak Pengadilan Negeri Surabaya karena sesuai ketentuan Perundang-Undangan terhadap Putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Banjar melakukan koordinasi dengan JPN Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan untuk melakukan upaya hukum lain seperti pengajuan Kasasi demi kepentingan hukum melalui Kejaksaan Agung. Laporan Keuangan PT Banjar Intan Mandiri belum menyajikan penilaian atas ijin Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (P2P2B).

2. Investasi Non Permanen	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	26.024.000,00	2.500.000.000,00

Saldo Investasi Non Permanen yang disajikan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp26.024.000,00 dan Rp2.500.000.000,00 berupa dana bergulir. Dana tersebut digulirkan untuk program Kredit Usaha Rakyat Martapura Maju, Mandiri, Agamis (Kurma Manis) berupa pinjaman modal bagi para pelaku usaha mikro di Kabupaten Banjar, melalui kerjasama Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Martapura Banjar Sejahtera. Kerjasama pengguliran dana tersebut dilakukan mulai tahun 2022 melalui perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Martapura Banjar Sejahtera, dan untuk tahun 2023 merupakan tahun kedua penyaluran dana bergulir tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

- a. Kerjasama Nomor 18/PKS/Banjar/2022 Tanggal 11 Oktober 2021 dengan nilai dana sebesar Rp500.000.000,00, dana bergulir diberikan kepada pelaku usaha mikro pada sektor pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya diantaranya pada sektor jasa, kerajinan dan keterampilan. Dana bergulir ini dibayarkan kembali pada tanggal 26 September 2023 sebesar Rp500.000.000,00.
- b. Kerjasama Nomor 011/PKS-Banjar/2023 Tanggal 13 Mei 2022 dengan nilai dana sebesar Rp2.000.000.000,00, dana bergulir diberikan kepada pelaku usaha mikro pada sektor pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya diantaranya pada sektor jasa, kerajinan dan keterampilan dengan jangka waktu pengembalian pinjaman modal usaha mikro paling lama 1 (satu) tahun atau 12 bulan setelah pinjaman dicairkan/dialurkan dengan melakukan pembayaran angsuran kepada Lembaga Keuangan Bank sebagai Lembaga Penyalur Pinjaman. Dana bergulir ini dibayarkan kembali pada tanggal 27 Desember 2023 sebesar Rp1.973.976.000,00 sehingga sisa Investasi Non Permanen berupa dana bergulir PT. BPR Martapura pada Desember 2023 sebesar Rp26.024.000,00 yang akan dibayarkan paling lambat tanggal 30 Desember 2024 sesuai Adendum Perjanjian kerjasama Nomor 029/PKS-Banjar/2023 Tanggal 08 Desember 2023.

5.3.1.3 ASET TETAP

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(Rp)	(Rp)
2.184.982.268.167,23	2.077.596.077.723,33

Saldo Aset Tetap Kabupaten Banjar per 31 Desember 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Tabel 5 . 120 Aset Tetap

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Tanah	638.373.372.999,47	639.739.327.990,92	(1.365.954.991,45)	(0,21)
2	Peralatan dan Mesin	872.516.788.071,01	797.291.885.002,11	75.224.903.068,90	9,44
3	Gedung dan Bangunan	1.199.334.535.324,35	1.147.206.923.443,10	52.127.611.881,25	4,54
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.979.211.943.293,42	1.792.215.738.120,42	186.996.205.173,00	10,343
5	Aset Tetap Lainnya	82.704.483.562,87	80.347.699.930,87	2.356.783.632,00	2,93
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	18.610.383.715,00	2.377.604.679,00	16.232.779.036,00	682,74
7	Akumulasi Penyusutan	(2.605.769.238.798,89)	(2.381.583.101.443,09)	(224.186.137.355,80)	9,41
	Jumlah	2.184.982.268.167,23	2.077.596.077.723,33	107.386.190.443,90	5,17

Penjelasan masing-masing Aset Tetap adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

5.3.1.3.1. Tanah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	638.373.372.999,47	639.739.327.990,92

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp638.373.372.999,47 dan Rp639.739.327.990,92. Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.365.954.991,45 yang disebabkan adanya penambahan sebesar Rp140.380.527.740,00 dan pengurangan sebesar Rp141.746.482.732,45 dengan rincian mutasi aset sebagai berikut:

Tabel 5 . 121 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Saldo Awal 1 Januari	639.739.327.990,92	625.302.005.775,74	14.437.322.215,18	2,31
2	Penambahan:				
	a. Belanja Modal	5.332.333.880,00	1.561.416.000,00	3.770.917.880,00	241,51
	b. Mutasi dari SKPD lain	134.690.266.860,00	9.379.170.361,00	125.311.096.499,00	1.336,06
	c. Belanja Barang dan Jasa yang Dikapitalisasi ke Aset Tetap	45.400.000,00	111.347.200,00	(65.947.200,00)	(59,23)
	d. Belum tercatat	161.116.000,00	5.299.909.418,00	(5.138.793.418,00)	(97,96)
	e. Hibah	1,00	9.395.221.141,00	(9.395.221.140,00)	(100)
	f. Koreksi catat	0,00	0,00	0,00	0,00
	g. Reklasifikasi antar KIB	151.411.000,00	643.837.500,00	(492.426.500,00)	(76,48)
	- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100
	- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	148.911.000,00	643.837.500,00	(494.926.500,00)	(76,87)
	Jumlah Penambahan	140.380.527.741,00	26.390.901.620,00	113.989.626.121,00	431,93
3	Pengurangan :				
	a. Mutasi ke SKPD lain	134.690.266.860,00	9.379.170.361,00	125.311.096.499,00	1.336,06
	b. Belanja Modal tidak Masuk Kategori Aset	5.332.333.880,00	0,00	5.332.333.880,00	100
	c. Koreksi catat	110.000,00	3,00	109.997,00	100
	d. Hibah	0,00	2.574.409.040,82	(2.574.409.040,82)	(100)
	e. Penghapusan	85.374.492,45	0,00	85.374.492,45	100
	f. Menjadi properti investasi	1.638.397.500,00	0,00	1.638.397.500,00	100
	Jumlah Pengurangan	141.746.482.732,45	11.953.579.404,82	129.792.903.327,63	1.085,81
	Total Penurunan Tahun 2023	(1.365.954.992,45)	14.437.322.215,18	(15.803.277.206,63)	(109,46)
4	Saldo Akhir 31 Desember	638.373.372.999,47	639.739.327.990,92	(1.365.954.992,45)	(0,21)

Penurunan aset Tanah secara signifikan dipengaruhi oleh adanya belanja modal bukan kategori aset sebesar Rp5.332.333.880,00 tahun 2023 dengan persentase penurunan sebesar 100%.

Penurunan nilai Tanah Kabupaten Banjar pada tahun 2023 sebesar Rp1.365.954.992,45 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya penambahan nilai Tanah sebesar Rp140.380.527.741,00 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

- a. Penambahan saldo Tanah berdasarkan Belanja Modal tahun 2023 Sebesar Rp5.332.333.880,00.
- b. Mutasi antar SKPD sebesar Rp134.690.266.860,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 122 Mutasi antar SKPD - Aset Tetap Tanah

No.	Dari SKPD	Jumlah (Rp)	Ke SKPD
1	Dinas Kesehatan	148.911.000,00	UPT. PKM Sungai Tabuk 1
2	Dinas Pertanian	3.527.625.000,00	DPRKPLH
3	BPKPAD	12.592.533.000,00	DPRKPLH
4	BPKPAD	3.785.600.000,00	Sekretariat Daerah
5	BPKPAD	114.635.597.860,00	Pengelola Barang
	Jumlah	134.690.266.860,00	

- c. Penambahan aset Tanah karena adanya belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi ke aset tetap sebesar Rp45.400.000,00 dari Dinas Pendidikan
- d. Penambahan aset Tanah karena adanya aset Tanah yang Belum Tercatat/ catat baru senilai Rp161.116.000,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 123 Aset Belum Tercatat/Catat Baru - Aset Tetap Tanah

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	UPT. PKM Kertak Hanyar	150.000.000,00
2	Dinas Pendidikan	11.116.000,00
	Jumlah	161.116.000,00

- e. Penambahan aset Tanah karena adanya Hibah pada tahun anggaran 2023 senilai Rp1,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 124 Penambahan karena Hibah - Aset Tetap Tanah

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Hibah Dari
1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	1,00	Provinsi Kalsel berupa Tanah Rusun Nelayan di Kecamatan Aluh-Aluh
	Jumlah	1,00	

- f. Penambahan aset Tanah karena adanya reklasifikasi antar KIB pada tahun anggaran 2023 senilai Rp151.411.000,00 terdiri dari:
- Reklasifikasi Aset tetap Tanah dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.500.000,00 pada Dinas Pendidikan
 - Reklasifikasi Aset tetap Tanah dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp148.911.000,00 pada Dinas kesehatan.
2. Pengurangan nilai Tanah sebesar Rp141.746.482.732,45 terdiri dari:
- a. Mutasi antar SKPD sebesar Rp134.690.266.860,00 dengan rincian yang sama dengan tabel mutasi antar SKPD diatas.
- b. Pengurangan aset Tanah karena Belanja Modal tidak Masuk Kategori Aset senilai Rp5.332.333.880,00 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Tabel 5 . 125 Belanja Modal Aset Tetap Tanah tidak masuk kategori Aset - Aset Tetap Tanah

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas PUPRP	438.880,00
2	Dinas Pendidikan	5.331.895.000,00
	Jumlah	5.332.333.880,00

- c. Pengurangan aset Tanah karena koreksi catat senilai Rp110.000,00 dari Dinas Disbudporapar.
- d. Pengurangan aset Tanah karena hibah senilai Rp0,00 pada tahun 2023
- e. Pengurangan aset Tanah karena adanya penghapusan senilai Rp85.374.492,45 terdiri dari:

Tabel 5 . 126 Pengurangan karena Penghapusan - Aset Tetap Tanah

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Hibah Ke
1	DPRKPLH	39.808.000,00	Penyertaan Modal Ke PT. BPR
2	Kecamatan Astambul	35.671.053,15	Penyertaan Modal Ke PT. BPR
3	Kecamatan Simpang Empat	9.895.439,30	Penyertaan Modal Ke PT. BPR
	Jumlah	85.374.492,45	

- f. Pengurangan aset Tanah karena masuk ke dalam akun Properti Investasi sebesar Rp1.638.397.500,00 yang terdiri dari:

Tabel 5 . 127 Pengurangan karena Reklasifikasi ke Properti Investasi - Aset Tetap Tanah

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	DKUMPP	1.506.197.500,00
2	Sekretariat Daerah	132.200.000,00
	Jumlah	1.638.397.500,00

Penambahan dan pengurangan pada Aset Tetap Tanah mempengaruhi Saldo Akhir Aset Tetap Tanah per SKPD, secara rinci dimuat pada **Lampiran 14**.

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	872.516.788.071,01	797.291.885.002,11

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp872.516.788.071,01 dan Rp797.291.885.002,11. Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp75.224.903.068,90 karena adanya penambahan sebesar Rp117.722.234.219,75 dan pengurangan sebesar Rp42.497.331.150,85 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 128 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Saldo Awal 1 Januari	797.291.885.002,11	734.617.890.792,04	62.673.994.210,07	8,53
2	Penambahan :				



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	a. Belanja Modal	92.930.369.497,00	55.895.634.639,00	37.034.734.858,00	66,26
	b. Mutasi antar SKPD	16.985.141.289,00	13.915.058.701,00	3.070.082.588,00	22,26
	c. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi	115.246.175,00	260.456.610,00	(145.210.435,00)	(55,75)
	d. Belanja Barang dan Jasa berupa aset	721.622.379,00	1.373.446.430,00	(651.824.051,00)	(47,46)
	e. Aset yang belum tercatat	493.780.000,00	10.000.000,00	483.780.000,00	4837,80
	f. Hibah Masuk	5.461.220.856,00	7.256.362.500,00	(1.795.141.644,00)	(24,74)
	g. Reklasifikasi antar KIB:	1.014.854.023,75	828.373.545,00	186.480.478,75	22,51
	– Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	545.554.023,75	358.873.686,00	186.680.337,75	52,02
	– Reklasifikasi dari JIJ	455.800.000,00	0,00	455.800.000,00	(100)
	– Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	13.500.000,00	319.499.859,00	(305.999.859,00)	(95,77)
	– Reklasifikasi dari KDP	0,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)	(100)
	Jumlah Penambahan	117.722.234.219,75	79.539.332.425,00	38.182.901.794,75	48,01
3	Pengurangan :				
	a. Mutasi antar SKPD	16.985.141.289,00	13.915.058.701,00	3.070.082.588,00	22,06
	b. Belanja modal tidak masuk Kategori Aset	20.136.323.998,00	1.227.976.940,00	18.908.347.058,00	1539,80
	c. Penghapusan	151.309.272,00	223.010.617,93	(71.701.345,93)	(32,15)
	d. Reklasifikasi antar KIB	3.612.396.707,85	1.037.552.706,00	2.574.844.001,85	248,17
	- Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100
	– Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	428.775.365,00	59.620.000,00	369.155.365,00	619,18
	– Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	86.980.000,00	32.686.400,00	54.293.600,00	166,10
	– Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	249.989.900,00	0,00	249.989.900,00	100
	– Reklasifikasi ke Aset Lainnya	2.498.992.204,85	0,00	2.498.992.204,85	100
	– Reklasifikasi ke Ekstrakom	345.159.238,00	945.246.306,00	(600.087.068,00)	(63,48)
	e. Hibah Keluar	1.222.659.884,00	461.739.250,00	760.920.634,00	164,79
	f. Koreksi catat	389.500.000,00	0,00	389.500.000,00	100
	Jumlah Pengurangan	42.497.331.150,85	16.865.338.214,93	25.631.992.935,92	151,98
	Total Kenaikan Tahun 2023	75.224.903.068,90	62.673.994.210,07	12.550.908.858,83	20,03
	Saldo Akhir 31 Desember	872.516.788.071,01	797.291.885.002,11	75.224.903.068,90	9,44

Kenaikan aset peralatan dan mesin secara signifikan dipengaruhi oleh Belanja Modal sebesar Rp92.930.369.497,00 tahun 2023.

Kenaikan nilai Peralatan dan Mesin Kabupaten Banjar pada tahun 2023 sebesar Rp75.224.903.068,90 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp**117.722.234.219,75** terdiri dari:
 - a. Penambahan saldo Peralatan dan Mesin berdasarkan Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp92.930.369.497,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

b. Mutasi antar SKPD sebesar Rp16.985.141.289,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 129 Mutasi antar SKPD - Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	Dari SKPD	Jumlah (Rp)	Ke SKPD
1	Sekretariat Daerah	14.535.000,00	Kecamatan Telaga Bauntung
2	Sekretariat Daerah	242.750.000,00	Disnakertrans
3	Inspektorat Daerah	94.750.000,00	Kecamatan Beruntung Baru
4	Inspektorat Daerah	178.000.000,00	DPMPSTP
5	DPRKPLH	218.631.331,00	Satpol PP
6	Dinas Perhubungan	331.903.000,00	DKUMPP
7	BPKPAD	256.610.000,00	Sekretariat Daerah
8	DKUMPP	278.000.000,00	Sekretariat Daerah
9	BPKPAD	149.750.000,00	DKPP
10	Disnakertrans	353.350.000,00	Dinas Perhubungan
11	Disnakertrans	252.400.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
12	DPUPRP	558.969.100,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
13	Kecamatan Aluh-Aluh	16.924.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
14	DKUMPP	196.400.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
15	UPT PKM Pengaron	145.000.000,00	UPT PKM Sungai Tabuk 3
	UPT PKM Pengaron	40.000.000,00	Dinas Kesehatan
16	UPT PKM Sungai Tabuk 3	110.000.000,00	Dinas Kesehatan
17	Dinas Kesehatan	210.752.146,00	UPT PKM Sambung Makmur
18	Dinas Kesehatan	92.347.957,00	UPT PKM Kertak Hanyar
19	Dinas Kesehatan	1.054.782.252,00	UPT PKM Aranio
20	Dinas Kesehatan	468.188.154,00	UPT PKM Mataraman
21	Dinas Kesehatan	1.313.023.155,00	UPT PKM Martapura Timur
22	Dinas Kesehatan	1.040.482.253,00	UPT PKM Martapura Barat
23	Dinas Kesehatan	111.197.957,00	UPT PKM Tatah Makmur
24	Dinas Kesehatan	106.647.957,00	UPT PKM Beruntung Baru
25	Dinas Kesehatan	1.271.824.876,00	UPT PKM Aluh-ALuh
26	Dinas Kesehatan	149.482.252,00	UPT PKM Paramasan
27	Dinas Kesehatan	306.740.901,00	UPT PKM Gambut
28	Dinas Kesehatan	411.053.858,00	UPT PKM Sungai Pinang
29	Dinas Kesehatan	149.482.253,00	UPT PKM Astambul
30	Dinas Kesehatan	405.624.875,00	UPT PKM Pengaron
31	Dinas Kesehatan	318.705.901,00	UPT PKM Telaga Bauntung
32	Dinas Kesehatan	28.050.000,00	UPT Lab Kesda
33	Dinas Kesehatan	163.782.252,00	UPT PKM Karang Intan 1
34	Dinas Kesehatan	400.724.875,00	UPT PKM Karang Intan 2
35	Dinas Kesehatan	92.347.957,00	UPT PKM Martapura 1
36	Dinas Kesehatan	191.754.719,67	UPT PKM Martapura 2
37	Dinas Kesehatan	92.347.956,00	UPT PKM Simpang Empat 1
38	Dinas Kesehatan	195.647.252,00	UPT PKM Simpang Empat 2
39	Dinas Kesehatan	1.564.265.778,00	UPT PKM Sungai Tabuk 1



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No.	Dari SKPD	Jumlah (Rp)	Ke SKPD
40	Dinas Kesehatan	1.040.482.253,00	UPT PKM Sungai Tabuk 2
41	Dinas Kesehatan	1.082.754.719,67	UPT PKM Sungai Tabuk 3
42	Dinas Kesehatan	1.284.674.348,66	UPT PKM Cintapuri Darussalam
	Jumlah	16.985.141.289,00	

- b. Penambahan aset Peralatan dan Mesin karena adanya Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi senilai Rp115.246.175,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 130 Penambahan karena Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi - Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	980.000,00
2	Kecamatan Kertak Hanyar	3.251.188,00
3	Sekretariat Daerah	39.840.000,00
4	Kecamatan Gambut	3.251.188,00
5	Kecamatan Martapura	3.109.748,00
6	Kecamatan Astambul	3.251.188,00
7	Kecamatan Karang Intan	3.251.188,00
8	Kecamatan Aranio	3.246.403,00
9	Kecamatan Sungai Tabuk	3.251.263,00
10	Kecamatan Aluh-Aluh	3.251.188,00
11	Kecamatan Mataraman	3.251.188,00
12	Kecamatan Simpang Empat	3.251.188,00
13	Kecamatan Pengaron	3.251.188,00
14	Kecamatan Pinang	3.251.188,00
15	Kecamatan Beruntung Baru	3.251.188,00
16	Kecamatan Martapura Barat	3.251.188,00
17	Kecamatan Sambung Makmur	3.251.188,00
18	Kecamatan Martapura Timur	2.903.333,00
19	Kecamatan Paramasan	3.247.608,00
20	Kecamatan Tatah Makmur	3.251.188,00
21	Kecamatan Telaga Bauntung	3.251.188,00
22	Kecamatan Cintapuri Darussalam	3.251.188,00
23	BKPSDM	9.900.000,00
	Jumlah	115.246.175,00

- c. Penambahan aset Peralatan dan Mesin karena adanya aset Peralatan dan Mesin yang belum tercatat pada tahun anggaran 2023 senilai Rp493.780.000,00 dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- d. Penambahan aset Peralatan dan Mesin karena adanya Hibah senilai Rp5.461.220.856,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 131 Penambahan karena Hibah - Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	SKPD	Jumlah (Rp)	Hibah Dari
1	Dinas Perhubungan	5.080.759.656,00	Kemenhub
2	Dinas Pertanian	64.200.000,00	SMK-PP /Kementerian Pertanian
3	BPBD	316.261.200,00	BNPD Pusat
	Jumlah	5.461.220.856,00	



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

e. Penambahan aset Peralatan dan Mesin karena adanya reklasifikasi antar KIB pada tahun anggaran 2023 senilai **Rp1.014.854.023,75** terdiri dari:

- Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar **Rp545.554.023,75** pada:

Tabel 5 . 132 Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan - Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	BKPSDM	113.800.000,00
2	DPUPRP	107.364.750,00
3	DPRKPLH	22.488.000,00
4	Dinson P3AP2KB	195.314.200,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian	7.500.000,00
6	DKUMPP	5.750.000,00
7	Sekretariat Daerah	67.253.373,75
8	Dinas Pendidikan	26.083.700,00
	Jumlah	545.554.023,75

- Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar **Rp455.800.000,00** terdiri dari:

Tabel 5 . 133 Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan - Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	DPRKPLH	64.800.000,00
2	DPUPRP	391.000.000,00
	Jumlah	455.800.000,00

- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp13.500.000,00 pada Dinas Pendidikan.

f. Penambahan aset Peralatan dan Mesin karena adanya belanja barang dan jasa berupa aset tetap pada tahun anggaran senilai **Rp721.622.379,00** terdiri dari:

Tabel 5 . 134 Penambahan karena Belanja Barang dan Jasa berupa Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	5.597.000,00
2	UPT PKM Martapura Timur	1.500.000,00
3	UPT PKM Tatah Makmur	3.618.000,00
4	UPT PKM Martapura 1	21.535.750,00
5	UPT PKM Simpang Empat 2	23.500.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.690.000,00
7	Disnakertrans	5.805.000,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7.600.000,00
9	Dinas Perhubungan	29.132.795,00
10	DKUMPP	198.708.315,00
11	DPMPTSP	6.021.500,00
12	Sekretariat Daerah	62.581.321,00
13	Kecamatan Kertak Hanyar	1.742.700,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
14	Kecamatan Aluh-aluh	6.600.000,00
15	Kecamatan Pengaron	15.602.000,00
16	Kecamatan Paramasan	3.200.000,00
17	Inspektorat Daerah	11.375.000,00
18	BPKPAD	28.319.148,00
19	BLUD Intan	71.427.250,00
20	Sekretariat DPRD	107.656.600,00
21	Dinas Pendidikan	108.410.000,00
	Jumlah	721.622.379,00

2. Adanya pengurangan nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp**42.497.331.150,85** terdiri dari :
- Mutasi antar SKPD sebesar Rp16.985.141.289,00 dengan rincian yang sama dengan tabel mutasi antar SKPD diatas.
 - Pengurangan aset Peralatan dan Mesin karena terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang bukan kategori aset senilai Rp20.136.323.998,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 135 Pengurangan karena Belanja Modal bukan kategori Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	33.914.775,00
2	Dinas Kesehatan	19.971.589.870,00
3	UPT PKM Martapura 1	1.531.800,00
4	RSUD Raza	316.350,00
5	DPRKPLH	23.826.000,00
6	Dinas Perhubungan	57.194.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.100.000,00
8	DPMPTSP	9.800.000,00
9	Kecamatan Gambut	26.061.203,00
10	Sekretariat Daerah	9.990.000,00
	Jumlah	20.136.323.998,00

- Pengurangan aset Peralatan dan Mesin karena penghapusan pada tahun anggaran 2023 senilai Rp151.309.272,00 dari Dinas Pendidikan.
- Pengurangan aset Peralatan dan Mesin karena adanya reklasifikasi antar KIB senilai Rp3.612.396.707,85 yang terdiri dari:
 - Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah sebesar Rp2.500.000,00 pada Dinas Pendidikan
 - Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp428.775.365,00 pada Dinas Disbudporapar
 - Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp86.980.000,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

- Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud pada tahun 2023 sebesar Rp249.989.900,00 dari RSUD Ratu Zalecha
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp2.498.992.204,85 terdiri dari:

Tabel 5 . 136 Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.000.000,00
2	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	33.000.000,00
3	Disbudporapar	117.433.000,00
4	Sekretariat DPRD	28.000.000,00
5	Kecamatan Astambul	9.500.000,00
6	Kecamatan Martapura	12.800.000,00
7	Kecamatan Aluh-Aluh	34.524.258,00
8	Kecamatan Mataraman	16.131.000,00
9	Kecamatan Martapura Timur	71.990.000,00
10	BPKPAD	412.016.160,85
11	Dinas Kesehatan	164.900.000,00
12	RSUD Ratu Zalecha	1.563.174.786,00
13	Dinas Pendidikan	25.523.000,00
	Jumlah	2.498.992.204,85

- Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Ekstrakomtable sebesar Rp345.159.238,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 137 Reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke Ekstrakomtable

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Upt. PKM Martapura Timur	5.356.100,00
2	Upt. Puskesmas Gambut	1.400.000,00
3	Upt. Puskesmas Pengaron	21.878.250,00
4	Upt. Puskesmas Martapura 1	31.586.925,00
5	Upt. Puskesmas Martapura 2	1.400.000,00
6	Dinas Perhubungan	7.399.000,00
7	DPMPTSP	1.700.000,00
8	Kecamatan Kertak Hanyar	2.190.371,00
9	Kecamatan Astambul	558.671,00
10	Kecamatan Gambut	558.671,00
11	Kecamatan Karang Intan	558.671,00
12	Kecamatan Martapura	12.220.007,00
13	Kecamatan Aranio	564.029,00
14	Kecamatan Sungai Tabuk	545.285,00
15	Kecamatan Aluh-Aluh	558.671,00
16	Kecamatan Mataraman	558.671,00
17	Kecamatan Simpang Empat	558.671,00
18	Kecamatan Pengaron	558.671,00
19	Kecamatan Sungai Pinang	558.671,00
20	Kecamatan Beruntung Baru	558.671,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
22	Kecamatan Martapura Barat	1.415.171,00
23	Kecamatan Sambung Makmur	558.671,00
24	Kecamatan Martapura Timur	533.333,00
25	Kecamatan Paramasan	2.449.281,00
26	Kecamatan Tatah Makmur	558.671,00
27	Kecamatan Telaga Bauntung	558.671,00
28	Kecamatan Cintapuri Darussalam	10.207.694,00
29	Bappedalitbang	26.560.000,00
30	Dinas Kesehatan	63.408.480,00
31	RSUD Ratu Zalecha	46.351.450,00
32	Satuan Polisi Pamong Praja	3.500.000,00
33	Sekretariat DPRD	380.000,00
34	Dinas Pendidikan	97.409.810,00
	Jumlah	345.159.238,00

- e. Pengurangan aset Peralatan dan Mesin karena dihibahkan senilai Rp1.222.659.884,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 138 Pengurangan Peralatan dan Mesin karena Hibah

No.	SKPD	Jumlah (Rp)	Hibah Ke
1	UPT PKM Sambung Makmur	318.000.000,00	Pesantren Ar Riyad
2	UPT PKM Sungai Tabuk 1	75.000.000,00	Desa Kaliukan Kec Astambul
3	RSUD Ratu Zalecha	530.784.884,00	Pemdes, Lapas Martapura
4	Sekretariat DPRD	298.875.000,00	Barisan Pemadam Kebakaran Kec. Martapura Timur
	Jumlah	1.222.659.884,00	

- f. Pengurangan aset Peralatan dan Mesin karena adanya koreksi catat senilai Rp389.500.000,00 pada Dinas Pertanian.

Penambahan dan pengurangan pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin mempengaruhi Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD, secara rinci dimuat pada **Lampiran 15**.

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	1.199.334.535.324,35	1.147.206.923.443,10

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.199.334.535.324,35 dan Rp1.147.206.923.443,10. Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp52.127.611.881,25 karena adanya penambahan sebesar Rp140.614.931.978,62 dan pengurangan sebesar Rp88.487.320.097,37 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Tabel 5 . 139 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Saldo Awal 1 Januari	1.147.206.923.443,10	1.101.208.918.780,84	45.998.004.652,26	4,18
2	Penambahan :				
	a. Belanja Modal	78.000.133.887,96	39.452.963.723,00	38.547.170.164,96	97,70
	b. Mutasi dari SKPD lain	37.672.643.285,52	24.668.738.134,87	13.003.905.150,65	52,71
	c. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi	7.876.212.271,14	1.489.408.641,56	6.386.803.629,58	428,81
	d. Hibah	11.873.600.401,00	0,00	11.873.600.401,00	100
	e. Reklasifikasi antar KIB	3.947.423.544,00	4.106.686.167,00	(5.084.275.915,34)	(68,92)
	– Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	428.775.365,00	59.620.000,00	86.286.856,00	5,89
	– Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.810.000,00	2.324.145.167,00	(5.912.373.200,34)	(100)
	– Reklasifikasi dari KDP	656.314.000,00	739.878.900,00	741.810.429,00	100
	– Reklasifikasi dari Aset Lainnya	2.858.524.179,00	983.042.100,00	5.234.854.000,00	100
	f. Koreksi Catat	0,00	249.900.000,00	(249.900.000,00)	(100)
	g. belum tercatat/catat baru	0,00	581.768.000,00	(581.768.000,00)	(100)
	h. Barang dan Jasa berupa Aset	1.104.077.889,00	9.398.864.248,00	(8.294.786.359,00)	(88,25)
	i. Perolehan dari utang	140.840.700,00	0,00	140.840.700,00	100
	Jumlah Penambahan	140.614.931.978,62	79.948.328.914,43	60.666.603.064,19	75,88
3	Pengurangan :				
	a. Mutasi ke SKPD lain	37.672.643.285,52	24.668.738.134,87	13.003.905.150,65	52,71
	b. Belanja modal bukan kategori aset	855.471.383,19	1.520.677.355,50	(665.205.972,31)	(43,74)
	c. Reklasifikasi antar KIB	5.801.785.874,66	5.532.824.778,64	268.961.096,02	4,86
	- Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah	148.911.000,00	0,00	148.911.000,00	100
	– Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	545.554.023,75	358.873.686,00	186.680.337,75	52,02
	– Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.551.340.000,00	1.465.053.144,00	86.286.856,00	5,89
	– Reklasifikasi ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.284.435.539,00	230.820.000,00	1.053.615.539,00	456,47
	– Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	281.890.000,00	133.209.500,00	148.680.500,00	111,61
	– Reklasifikasi ke Aset Lainnya	1.740.398.136,26	3.187.351.778,96	(1.446.953.642,70)	(45,40)
	– Reklasifikasi ke Ekstrakomtable	249.257.175,65	157.516.669,68	91.740.505,97	58,24
	d. Penghapusan	264.924.000,00	176.840.000,00	88.084.000,00	49,81
	e. Hibah	11.960.000,00	2.051.243.983,16	(2.039.283.983,16)	(99,42)
	f. Menjadi Properti Investasi	43.880.535.554,00	0,00	43.880.535.554,00	100
	Jumlah Pengurangan	88.487.320.097,37	33.950.324.252,17	54.536.995.845,20	160,64
	Total Kenaikan Tahun 2023	52.127.611.881,25	45.998.004.662,26	6.129.607.218,99	13,33
	Saldo Akhir 31 Desember	1.199.334.535.324,35	1.147.206.923.443,10	52.127.611.871,25	4,54



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Kenaikan aset Gedung Dan Bangunan secara signifikan dipengaruhi oleh Belanja Modal di tahun 2023 sebesar Rp78.000.133.887,96

Kenaikan nilai Gedung dan Bangunan Kabupaten Banjar pada tahun 2023 sebesar Rp52.127.611.881,25 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya penambahan nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp140.614.931.978,62 terdiri dari :
 - a. Penambahan saldo Gedung dan Bangunan berdasarkan Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp78.000.133.887,96.
 - b. Mutasi antar SKPD pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp37.672.643.285,52 terdiri dari:

Tabel 5 . 140 Mutasi Antar SKPD - Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	Dari SKPD	Jumlah (Rp)	Ke SKPD
1	Dinas Kesehatan	5.836.902.694,12	UPT PKM Beruntung Baru
2	Dinas Kesehatan	360.279.618,82	UPT PKM Gambut
3	Dinas Kesehatan	482.476.000,00	UPT PKM Telaga Bauntung
4	Dinas Kesehatan	455.746.000,00	UPT Lab Kesda
5	Dinas Kesehatan	143.770.000,00	UPT PKM Martapura 2
6	Dinas Kesehatan	10.559.930.281,73	UPT PKM Sungai Tabuk 1
7	Dinas Kesehatan	360.939.000,00	UPT PKM Sungai Tabuk 3
8	Dinas Pertanian	581.768.000,00	DPRKPLH
9	DPRKPLH	11.572.081.168,81	Sekretariat Daerah
10	DPUPRP	1.853.829.181,92	Sekretariat Daerah
11	DPUPRP	327.097.500,00	Dinas Perpustakaan dan kearsipan
12	DPUPRP	1.955.706.874,00	Kecamatan Kertak Hanyar
13	DPUPRP	679.627.533,00	Kecamatan Gambut
14	DPUPRP	361.630.000,00	Kecamatan Sungai Tabuk
15	DPUPRP	111.653.333,00	Kecamatan Pengaron
16	DPUPRP	436.040.000,00	Kecamatan Martapura Timur
17	DPUPRP	218.672.500,00	Dinas pendidikan
18	BPKPAD	1.374.493.600,12	Pengelola BMD
	Jumlah	37.672.643.285,52	

- c. Penambahan aset Gedung dan Bangunan karena adanya Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi ke aset Gedung dan Bangunan senilai Rp7.876.212.271,14 terdiri dari:

Tabel 5 . 141 Penambahan karena Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	1.293.749.618,82
2	Dinas Pendidikan	4.714.852.730,00
3	RSUD Ratu Zalecha	95.520.000,00
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	29.127.669,00
5	Dinsos P3AP2KB	1.130.000,00
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.580.000,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	186.480.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan dan Desa	58.465.367,41
9	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	96.829.000,00
10	DKUMPP	309.954.287,41



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
11	DPMPTSP	174.989.722,00
12	Dinas Pertanian	245.632.000,00
13	Sekretariat DPRD	47.303.400,00
14	Sekretariat Daerah	409.545.279,50
15	Kecamatan Kertak Hanyar	54.304.838,00
16	Kecamatan Karang Intan	2.100.000,00
17	Kecamatan Aranio	2.100.000,00
18	Kecamatan Mataraman	59.323.099,00
19	Kecamatan Simpang Empat	1.200.000,00
20	Kecamatan Sambung Makmur	1.200.000,00
21	Kecamatan Telaga Bauntung	900.000,00
22	BPKPAD	89.925.260,00
	Jumlah	7.876.212.271,14

- d. Penambahan aset Gedung dan Bangunan karena adanya Hibah pada tahun 2023 senilai Rp11.873.600.401,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 142 Penambahan karena Hibah

No.	SKPD	Jumlah (Rp)	Hibah Dari
1	DPRKPLH	5.074.778.401,00	Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Provinsi Kalsel
2	Dinas Perhubungan	6.798.822.000,00	Kemenhub
	Jumlah	11.873.600.401,00	

- e. Penambahan aset Gedung dan Bangunan karena adanya reklasifikasi aset tetap antar KIB sebesar Rp3.947.423.554,00 terdiri dari:

- Penambahan aset Gedung dan Bangunan karena adanya reklasifikasi aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp428.775.365,00 pada Disbudporapar
- Penambahan aset Gedung dan Bangunan karena adanya reklasifikasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp3.810.000,00 pada DPRKPLH
- Penambahan aset Gedung dan Bangunan karena adanya reklasifikasi aset tetap dari KDP senilai Rp656.314.000,00 pada terdiri dari:

Tabel 5 . 143 Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	DPUPRP	141.530.000,00
2	Dinas Pendidikan	514.784.000,00
	Jumlah	656.314.000,00

- Penambahan aset Gedung dan Bangunan karena adanya reklasifikasi Aset Tetap dari Aset Lainnya senilai Rp2.858.524.197,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 144 Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	DPUPRP	554.903.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
2	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	2.303.621.179,00
	Jumlah	2.858.524.197,00

- f. Penambahan aset Gedung dan Bangunan karena adanya koreksi catat senilai Rp0,00.
- g. Penambahan aset Gedung dan Bangunan karena belum tercatat senilai Rp0,00.
- h. Penambahan aset Gedung dan Bangunan karena adanya barang dan jasa berupa aset tetap pada tahun 2023 sebesar **Rp1.104.077.889,00** terdiri dari:

Tabel 5 . 145 Penambahan karena Belanja Barang dan Jasa berupa Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	843.415.000,00
2	UPT. PKM Martapura 1	25.953.813,00
3	DPRKPLH	34.000.000,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	38.878.796,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72.959.795,00
6	DPMPTSP	29.415.000,00
7	Kecamatan Martapura Barat	59.455.485,00
	Jumlah	1.104.077.889,00

- i. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan karena adanya utang belanja modal bangunan gedung sebesar Rp140.840.700,00 pada Dinas Pendidikan.
2. Adanya pengurangan nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp88.487.320.097,37 terdiri dari:
- a. Mutasi antar SKPD sebesar Rp37.672.643.285,52 dengan rincian yang sama dengan tabel mutasi antar SKPD diatas.
- b. Pengurangan aset Gedung dan Bangunan karena adanya Belanja Modal yang bukan kategori aset pada tahun anggaran 2023 senilai Rp855.471.383,19 yang terdiri dari:

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	UPT PKM Kertak Hanyar	16.703.888,00
2	DPRKPLH	715.982.000,00
3	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	62.092.975,05
4	DKUMPP	23.098.797,12
5	DPMPTSP	12.000.000,00
6	Sekretariat Daerah	18.349.723,02
7	BKPSDM	7.244.000,00
	Jumlah	855.471.383,19

- c. Pengurangan aset Gedung dan Bangunan karena adanya reklasifikasi aset tetap antar KIB senilai **Rp5.801.785.874,66** yang terdiri dari:
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah sebesar Rp148.911.000,00 pada Dinas Kesehatan.
 - Reklasifikasi ke aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp 545.554.023,75 pada:

Tabel 5 . 146 Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	DPRKPLH	22.488.000,00
2	Dinsos P3AP2KB	195.314.200,00
3	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	7.500.000,00
4	DKUMPP	5.750.000,00
5	Sekretariat Daerah	67.253.373,75
6	BKPSDM	113.800.000,00
7	Dinas Pendidikan	26.083.700,00
8	DPUPRP	107.364.750,00
	Jumlah	545.554.023,75

- Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.551.340.000,00 pada:

Tabel 5 . 147 Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	DPRKPLH (Blud Intan)	91.590.000,00
2	Dinas Pendidikan	1.459.750.000,00
	Jumlah	1.551.340.000,00

- Reklasifikasi ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.284.435.539,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 148 Reklasifikasi ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	RSUD Ratu Zalecha	18.620.000,00
2	DPMPTSP	18.400.000,00
3	Dinas Pertanian	87.350.000,00
4	DPUPRP	701.430.539,00
5	Dinas Pendidikan	458.635.000,00
	Jumlah	1.284.435.539,00

- Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp281.890.000,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 149 Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	DPRKPLH (Blud Intan)	34.960.000,00
2	DPMPTSP	99.000.000,00
3	Sekretariat DPRD	147.930.000,00
	Jumlah	281.890.000,00

- Reklasifikasi ke Aset Lainnya senilai Rp1.740.398.136,26 terdiri dari:

Tabel 5 . 150 Reklasifikasi ke Aset Lainnya

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	563.693.562,26
2	Dinas Kesehatan	135.024.000,00
3	UPT PKM Beruntung Baru	1.026.063.000,00
4	UPT PKM Sungai Tabuk 2	15.617.574,00
	Jumlah	1.740.398.136,26



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

- Pengurangan aset Gedung dan Bangunan karena adanya reklasifikasi ke Ekstrakomptable senilai Rp249.257.175,65 yang terdiri dari:

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinsos P3AP2KB	10.911.300,00
2	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	17.379.019,65
3	DKUMPP	2.230.000,00
4	Disbudporapar	61.497.586,00
5	Sekretariat Daerah	72.013.510,00
6	Inspektorat Daerah	15.550.000,00
7	Dinas Pendidikan	69.675.760,00
	Jumlah	249.257.175,65

- d. Pengurangan aset Gedung dan Bangunan karena adanya Penghapusan pada tahun anggaran 2023 senilai Rp264.924.000,00 pada Dinas Pendidikan.
- e. Pengurangan aset Gedung dan Bangunan karena adanya Hibah senilai Rp11.960.000,00 pada UPT PKM Sungai Pinang ke desa kahelaan berupa bangunan gedung kantor permanen (rumah bidan desa kahelaan).
- f. Pengurangan aset Gedung dan Bangunan karena menjadi aset properti investasi sebesar Rp43.880.535.554,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 151 Pengurangan karena Reklasifikasi ke Properti Investasi - Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.822.816.972,00
2	DKUMPP	38.060.308.582,00
3	Sekretariat Daerah	3.997.410.000,00
	Jumlah	43.880.535.554,00

Penambahan dan pengurangan pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan mempengaruhi Saldo Akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD, secara rinci dimuat pada **Lampiran 16**.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	1.979.211.943.293,42	1.792.215.738.120,42

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.979.211.943.293,42 dan Rp1.792.215.738.120,42. Saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp186.996.205.173,00 yang dipengaruhi oleh penambahan sebesar Rp206.135.878.226,00 dan pengurangan sebesar Rp19.139.673.053,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 152 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Saldo awal 1 Januari	1.792.215.738.120,42	1.714.481.077.183,51	77.734.660.936,91	4,53
2	Penambahan :				



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	a. Belanja Modal	198.503.513.797,00	98.293.080.931,57	100.210.432.865,43	101,95
	b. Mutasi dari SKPD lain	0,00	2.959.672.667,00	(2.959.672.667,00)	(100)
	c. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi ke aset	104.360.000,00	11.000.000,00	93.360.000,00	848,73
	d. Reklasifikasi antar KIB :	2.293.150.429,00	7.377.426.344,34	(5.084.275.915,34)	(68,92)
	– Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.551.340.000,00	1.465.053.144,00	(1.373.463.144,00)	(93,75)
	– Reklasifikasi dari Aset Tetap JIJ	0,00	5.912.373.200,34	(5.912.373.200,34)	(100)
	– Reklasifikasi dari KDP	741.810.429,00	0,00	689.100.429,00	100
	e. Belanja Barang dan Jasa berupa aset tetap	5.234.854.000,00	0,00	5.234.854.000,00	100
	Jumlah Penambahan	206.135.878.226,00	108.641.179.942,91	97.494.698.283,09	89,74
3	Pengurangan :				
	a. Mutasi ke SKPD lain	0,00	2.959.672.667,00	(2.959.672.667,00)	(100)
	b. Belanja Modal tidak masuk Kategori Aset	1.448.308.593,00	9.185.425.401,00	(7.737.116.808,00)	(84,23)
	c. Reklasifikasi antar KIB	17.683.864.460,00	18.761.420.938,00	(1.077.556.478,00)	(5,74)
	– Reklasifikasi ke Tanah	0,00	643.837.500,00	(643.837.500,00)	(100)
	– Reklasifikasi ke Peralatan dan mesin	455.800.000,00	0,00	455.800.000,00	100
	– Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	3.810.000,00	2.324.145.167,00	(2.320.335.167,00)	(99,84)
	– Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	1.049.494.000,00	99.160.000,00	950.334.000,00	958,38
	– Reklasifikasi ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan	16.109.062.660,00	98.197.000,00	16.010.865.660,00	16.304,84
	– Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain)	0,00	15.596.081.271,00	(15.596.081.271,00)	(100)
	- Reklasifikasi ke Ekstrakomtable	65.697.800,00	0,00	65.697.800,00	100
	d. Koreksi Catat	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100
	Jumlah Pengurangan	19.139.673.053,00	30.906.519.006,00	(11.766.845.953,00)	(38,07)
	Total Kenaikan Tahun 2023	186.996.205.173,00	77.734.660.936,91	109.261.544.236,09	140,58
4	Saldo Akhir 31 Desember	1.979.211.943.293,42	1.792.215.738.120,42	186.996.205.173,00	10,43

Kenaikan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan secara signifikan dipengaruhi oleh Belanja Modal sebesar Rp198.503.513.197. Kenaikan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Kabupaten Banjar pada tahun 2023 sebesar Rp186.996.205.173,00 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp206.135.878.226,00 terdiri dari:
 - a. Penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp198.503.513.797,00.
 - b. Penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan karena adanya Mutasi antar SKPD senilai Rp0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

- c. Penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan karena adanya belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi ke aset tetap senilai Rp104.360.000,00 pada:

Tabel 5 . 153 Penambahan karena Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas PUPRP	32.850.000,00
2	DPRKPLH	71.510.000,00
	Jumlah	104.360.000,00

- d. Penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan karena adanya Reklasifikasi antar KIB sebesar **Rp2.293.150.429,00** yang terdiri dari:

- Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp1.551.340.000,00 pada:

Tabel 5 . 154 Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1.459.750.000,00
2	DPRKPLH (Blud Intan)	91.590.000,00
	Jumlah	1.551.340.000,00

- Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp741.810.429,00 pada :

Tabel 5 . 155 Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	52.710.000,00
2	DPUPRP	689.100.429,00
	Jumlah	741.810.429,00

- e. Penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan karena adanya belanja barang jasa berupa aset tetap sebesar Rp5.234.854.000.000,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 156 Penambahan karena Belanja Barang dan Jasa berupa Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas PUPRP	5.035.728.000,00
2	DPRKPLH	99.676.000,00
3	Dinas Pendidikan	99.450.000,00
	Jumlah	5.234.854.000,00

2. Adanya pengurangan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp19.139.673..053,00 terdiri dari:

- a. Mutasi antar SKPD sebesar Rp0,00 dengan rincian yang sama dengan tabel mutasi antar SKPD diatas.
- b. Pengurangan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Belanja Modal Bukan kategori sebagai Aset Tetap pada tahun anggaran 2023 senilai Rp1.448.308.593,00 yang terdiri dari:

Tabel 5 . 157 Pengurangan karena Belanja Modal bukan kategori Aset Tetap

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1.448.308.593,00
	Jumlah	1.448.308.593,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

c. Pengurangan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan karena adanya Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp17.683.864.460,00 terdiri dari:

- Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin senilai Rp455.800.000,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 158 Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	391.000.000,00
2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	64.800.000,00
	Jumlah	455.800.000,00

- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan senilai Rp3.810.000,00 pada Dinas PUPRP.
 - Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp1.049.494.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.
 - Reklasifikasi ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp16.109.062.660,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan.
- d. Pengurangan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan karena adanya Reklasifikasi ke Ekstrakomtable senilai Rp65.697.800,00 pada Kecamatan Martapura.
- e. Pengurangan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan karena adanya koreksi catat senilai Rp7.500.000,00 pada Kecamatan Cintapuri Darussalam.

Penambahan dan pengurangan pada Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan mempengaruhi Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per SKPD, secara rinci dimuat pada **Lampiran 17**.

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	82.704.483.562,87	80.347.699.930,87

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp82.704.483.562,87 dan Rp80.347.699.930,87. Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.356.783.232,00 karena adanya penambahan sebesar Rp2.747.501.008,00 dan pengurangan sebesar Rp390.717.776,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 159 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Saldo Awal 1 Januari	80.347.699.930,87	78.229.275.522,87	2.118.424.408,00	2,71
2	Penambahan :				
	a. Belanja Modal	1.287.834.008,00	2.274.395.769,00	(986.561.761,00)	(43,38)
	b. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	d. Belanja Barang & Jasa Berupa aset tetap	41.303.400,00	53.410.694,00	(12.107.694,00)	(22,67)
	e. Reklasifikasi antar KIB :	1.418.364.000,00	582.369.400,00	835.994.600,00	143,55



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
	– Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	86.980.000,00	32.686.400,00	54.293.600,00	166,10
	– Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	281.890.000,00	133.209.500,00	148.680.500,00	111,61
	– Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.049.494.000,00	99.160.000,00	950.334.000,00	958,38
	– Reklasifikasi dari Aset Tetap KDP	0,00	317.313.500,00	(317.313.500,00)	(100)
	f. Mutasi antar SKPD	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Penambahan	2.747.501.408,00	2.910.175.863,00	(162.674.455,00)	(5,59)
3	Pengurangan :				
	a. Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	0,00	180.008.891,00	(180.008.891,00)	(100)
	b. Reklasifikasi antar KIB	257.185.508,00	611.742.564,00	(354.557.056,00)	(57,96)
	– Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	13.500.000,00	319.499.859,00	(305.999.859,00)	(95,77)
	– Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	186.138.268,00	138.541.294,00	47.596.974,00	34,36
	– Reklasifikasi ke Ekstrakomtable	57.547.240,00	153.701.411,00	(96.154.171,00)	(62,56)
	c. Belanja modal bukan kategori aset	67.459.968,00	0,00	67.459.968,00	100
	d. Penghapusan	66.072.300,00	0,00	66.072.300,00	100
	Jumlah Pengurangan	390.717.776,00	791.751.455,00	(401.033.679,00)	(50,65)
	Total Kenaikan Tahun 2023	2.356.783.232,00	2.118.424.408,00	238.358.824,00	11,25
	Saldo Akhir 31 Desember	82.704.483.162,87	80.347.699.930,87	2.356.783.232,00	2,93

Kenaikan aset tetap lainnya secara signifikan dipengaruhi oleh belanja modal di tahun 2023 sebesar Rp1.287.834.008,00 . Kenaikan nilai Aset Tetap Lainnya Kabupaten Banjar pada tahun 2023 sebesar Rp2.356.783.232,00 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya penambahan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.747.501.008,00 terdiri dari:
 - a. Penambahan saldo Aset Tetap Lainnya berdasarkan Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp1.287.834.008,00.
 - b. Penambahan Aset Tetap Lainnya karena adanya Beban Barang dan Jasa yang dikapitalisasi senilai Rp0,00
 - c. Penambahan Aset Tetap Lainnya karena adanya Hibah senilai Rp0,00.
 - d. Penambahan Aset Tetap Lainnya karena adanya Belanja Barang dan Jasa berupa Aset Tetap senilai Rp41.303.400,00 pada Dinas Pendidikan.
 - e. Penambahan Aset Tetap Lainnya karena adanya reklasifikasi antar KIB senilai Rp1.418.364.000,00 yang terdiri dari:
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp86.980.000,00 pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
 - Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp281.890.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 160 Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Aset Tetap Lainnya

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	DPRKLP (BLUD Intan)	34.960.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
2	DPMPTSP	99.000.000,00
3	Sekretariat DPRD	147.930.000,00
	Jumlah	281.890.000,00

- Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai **Rp1.049.494.000,00** pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 2. Adanya pengurangan nilai aset tetap lainnya sebesar Rp390.717.776,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena adanya Reklasifikasi ke Barang dan Jasa pada tahun anggaran 2023 senilai Rp0,00.
 - b. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena adanya Reklasifikasi antar KIB senilai Rp257.185.508,00 terdiri dari:
 - Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp13.500.000,00 pada Dinas Pendidikan
 - Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud senilai Rp186.138.268,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 161 Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	61.345.000,00
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14.993.268 ,00
3	BPKPAD	24.800.000,00
4	BKPSDM	85.000.000,00
	Jumlah	186.138.268,00

- Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena adanya Reklasifikasi ke *Ekstrakomptable* senilai Rp57.547.240,00 yang terdiri dari:

Tabel 5 . 162 Reklasifikasi ke Ekstrakomptable

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	29.873.000,00
2	Sekretariat DPRD	4.995.000,00
3	Dinas Pendidikan	22.679.240,00
	Jumlah	57.547.240,00

- c. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena adanya belanja modal bukan kategori aset senilai Rp67.459.968,00 pada :

Tabel 5 . 163 Pengurangan karena Belanja Modal bukan kategori Aset Tetap Lainnya

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Perhubungan.	59.350.000,00
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	8.109.968,00
	Jumlah	67.459.968,00

- d. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena adanya penghapusan senilai Rp66.072.300,00 pada Dinas Pendidikan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Penambahan dan pengurangan pada Aset Tetap Lainnya mempengaruhi Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya per SKPD, secara rinci dimuat pada **Lampiran 18**.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	18.610.383.715,00	2.377.604.679,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp18.610.383.715,00 dan Rp2.377.604.679,00. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp16.232.779.036,00 karena adanya penambahan sebesar Rp17.630.903.465,00 dan pengurangan sebesar Rp1.398.124.429,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 164 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Saldo Awal 1 Januari	2.377.604.679,00	8.502.329.279,34	(6.124.724.600,34)	(72,04)
2	Penambahan:				
	a. Reklasifikasi antar KIB	17.393.498.199,00	329.017.000,00	17.064.481.199,00	5186,50
	– Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.284.435.539,00	230.820.000,00	1.053.615.539,00	456,47
	– Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	16.109.062.660,00	98.197.000,00	16.010.865.660,00	16304,84
	b. Belanja barang & jasa berupa aset	237.405.266,00	665.824.000,00	(428.418.734,00)	(64,34)
	Jumlah Penambahan	17.630.903.465,00	994.841.000,00	16.636.062.465,00	1672,23
3	Pengurangan:				
	a. Reklasifikasi antar KIB	1.398.124.429,00	7.119.565.600,34	(5.721.441.171,34)	(80,36)
	– Reklasifikasi ke Peralatan & Mesin	0,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)	(100)
	– Reklasifikasi Aset Tetap ke Gedung dan Bangunan	656.314.000,00	739.878.900,00	(83.564.900,00)	(11,29)
	– Reklasifikasi ke JIJ	741.810.429,00	5.912.373.200,34	(5.170.562.771,34)	(87,45)
	– Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	0,00	317.313.500,00	(317.313.500,00)	(100,00)
	Jumlah Pengurangan	1.398.124.429,00	7.119.565.600,34	(5.721.441.171,34)	(80,36)
	Total Kenaikan Tahun 2023	16.232.779.036,00	(6.124.724.600,34)	22.357.503.636,34	(365,04)
4	Saldo Akhir 31 Desember	18.610.383.715,00	2.377.604.679,00	16.232.779.036,00	682,74

Kenaikan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan secara signifikan dipengaruhi oleh reklasifikasi ke aset tetap sebesar Rp17.393.498.199,00. Kenaikan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Kabupaten Banjar pada tahun 2023 sebesar Rp16.232.779.036,00 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Adanya penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp17.630.903.465,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Penambahan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan karena adanya reklasifikasi aset tetap antar KIB senilai Rp17.393.498.199,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

- Reklasifikasi aset tetap dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.284.435.539,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 165 Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	RSUD Ratu Zalecha	18.620.000,00
2	DPUPRP	701.430.539,00
3	DPMPTSP	18.400.000
4	Dinas Pertanian	87.350.000,00
5	Dinas Pendidikan	458.635.000,00
Jumlah		1.284.435.539,00

- Reklasifikasi aset tetap dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 16.109.062.660,00 dari Dinas PUPRP.
- b. Penambahan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan karena adanya belanja barang dan jasa berupa aset senilai Rp237.405.266,00 dari Dinas Pertanian.
- 2. Pengurangan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Kabupaten Banjar tahun 2023 sebesar Rp1.398.124.429,00 disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penurunan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan karena adanya reklasifikasi aset tetap antar KIB sebesar Rp1.398.124.429,00 terdiri dari:
 - Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp656.314.000,00 pada Dinas PUPRP.

Tabel 5 . 166 Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	DPUPRP	141.530.000,00
2	Dinas Pendidikan	514.784.000,00
Jumlah		656.314.000,00

- Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp741.810.429,00 pada:

Tabel 5 . 167 Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Perhubungan.	689.100.429,00
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	52.710.000,00
Jumlah		741.810.429,00

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan	(2.605.769.238.798,89)	(2.381.583.101.443,09)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar (Rp2.605.769.238.798,89) dan (Rp2.381.583.101.443,09). Akumulasi



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain untuk Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Lainnya. Rincian akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 . 168 Akumulasi Penyusutan

No	Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(690.090.887.591,86)	(617.962.242.870,83)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(668.408.750.311,24)	(629.990.107.051,39)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.246.561.232.595,78)	(1.132.926.967.595,87)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(708.368.300,00)	(703.783.925,00)
Jumlah Akumulasi Penyusutan		(2.605.769.238.798,89)	(2.381.583.101.443,09)

Pemerintah Kabupaten Banjar melakukan perhitungan penyusutan atas aset tetap dengan metode Garis Lurus (*Straight Line Method*) Rincian penyusutan aset pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5 . 169 Akumulasi Penyusutan per KIB - per SKPD

No.	Nama SKPD	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2023				
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Total
1	Dinas Pendidikan	(124.487.689.609,29)	(273.708.046.704,39)	(1.836.376.862,14)	0,00	(400.032.113.175,82)
2	Dinas Kesehatan	(64.467.319.806,62)	(55.225.516.446,00)	(3.909.662.452,00)	0,00	(123.602.498.704,62)
3	Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha	(179.056.602.343,17)	(77.082.287.922,00)	(1.117.435.347,00)	0,00	(257.256.325.612,17)
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	(18.755.506.292,50)	(75.876.033.920,00)	(1.156.621.017.030,42)	0,00	(1.251.252.557.242,92)
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	(43.759.487.973,44)	(27.749.729.203,31)	(59.014.738.971,22)	(103.645.000,00)	(130.627.601.147,97)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	(5.123.852.634,00)	(1.893.233.361,00)	0,00	(160.900.000,00)	(7.177.985.995,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(9.897.660.123,00)	(2.465.943.512,00)	(10.806.228.057,00)	0,00	(23.169.831.692,00)
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	(6.602.539.055,00)	(1.011.541.317,00)	0,00	0,00	(7.614.080.372,00)
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(9.995.399.258,39)	(5.170.998.444,00)	(8.196.617,00)	0,00	(15.174.594.319,39)
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	(2.182.466.409,00)	(703.568.723,00)	0,00	0,00	(2.886.035.132,00)
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	(13.585.230.897,00)	(10.092.993.560,00)	(2.342.491.219,00)	0,00	(26.020.715.676,00)
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	(6.375.559.689,00)	(1.771.803.688,00)	0,00	0,00	(8.147.363.377,00)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	(3.821.468.345,00)	(1.182.686.552,00)	0,00	0,00	(5.004.154.897,00)
14	Dinas Perhubungan	(13.495.003.299,22)	(8.633.058.222,00)	(1.479.461.658,00)	0,00	(23.607.523.179,22)
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	(13.672.317.948,00)	(1.093.712.074,00)	(1.875.000,00)	0,00	(14.767.905.022,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No.	Nama SKPD	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2023				
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya	Total
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	(25.804.040.826,50)	(23.634.492.796,00)	(3.785.600,00)	0,00	(49.442.319.222,50)
17	Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	(5.911.798.787,00)	(3.281.016.811,55)	0,00	0,00	(9.192.815.598,55)
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	(3.729.064.795,75)	(1.932.245.749,00)	0,00	(19.525.000,00)	(5.680.835.544,75)
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(6.830.283.450,93)	(11.093.630.952,98)	(1.432.081.138,00)	(290.045.875,00)	(19.646.041.416,91)
20	Dinas Pertanian	(32.506.785.128,00)	(13.373.654.267,00)	(3.489.435.219,00)	(16.450.000,00)	(49.386.324.614,00)
21	Sekretariat Daerah	(31.361.269.406,00)	(24.447.092.716,01)	(96.395.217,00)	(67.052.000,00)	(55.971.809.339,01)
22	Inspektorat Daerah	(2.753.322.199,00)	(1.011.359.044,00)	0,00	0,00	(3.764.681.243,00)
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	(7.241.444.350,00)	(930.892.243,00)	0,00	0,00	(8.172.336.593,00)
24	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	(15.208.484.905,65)	(6.417.454.296,00)	0,00	0,00	(21.625.939.201,65)
25	Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(7.543.519.563,22)	(4.332.489.899,00)	0,00	(50.750.425,00)	(11.926.759.887,22)
26	Sekretariat DPRD	(11.863.969.360,00)	(6.472.107.008,00)	0,00	0,00	(18.336.076.368,00)
27	Kecamatan Kertak Hanyar	(1.452.433.835,18)	(2.486.086.154,00)	(711.262.843,00)	0,00	(4.649.782.832,18)
28	Kecamatan Astambul	(1.145.124.524,00)	(381.706.613,00)	0,00	0,00	(1.526.831.137,00)
29	Kecamatan Gambut	(1.219.927.589,00)	(2.440.497.309,00)	(785.323.826,00)	0,00	(4.445.748.724,00)
30	Kecamatan Karang Intan	(1.345.123.904,00)	(1.305.826.250,00)	0,00	0,00	(2.650.950.154,00)
31	Kecamatan Martapura	(2.734.806.431,00)	(4.489.642.990,00)	(2.584.197.156,00)	0,00	(9.808.646.577,00)
32	Kecamatan Aranio	(1.091.405.955,00)	(1.440.371.770,00)	(1.765.726,00)	0,00	(2.533.543.451,00)
33	Kecamatan Sungai Tabuk	(1.382.134.037,00)	(1.410.085.228,00)	(160.611.803,00)	0,00	(2.952.831.068,00)
34	Kecamatan Aluh-Aluh	(984.477.298,00)	(838.453.748,00)	0,00	0,00	(1.822.931.046,00)
35	Kecamatan Mataraman	(963.610.573,00)	(1.535.443.946,00)	0,00	0,00	(2.499.054.519,00)
36	Kecamatan Simpang Empat	(1.021.165.736,00)	(827.893.625,00)	0,00	0,00	(1.849.059.361,00)
37	Kecamatan Pengaron	(975.702.584,00)	(1.281.096.833,00)	(2.990.696,00)	0,00	(2.259.790.113,00)
38	Kecamatan Sungai Pinang	(920.135.875,00)	(1.289.061.717,00)	0,00	0,00	(2.209.197.592,00)
39	Kecamatan Beruntung Baru	(882.997.824,00)	(861.248.025,00)	0,00	0,00	(1.744.245.849,00)
40	Kecamatan Martapura Barat	(916.883.852,00)	(1.033.387.397,00)	0,00	0,00	(1.950.271.249,00)
41	Kecamatan Sambung Makmur	(833.623.339,00)	(1.031.491.286,00)	0,00	0,00	(1.865.114.625,00)
42	Kecamatan Martapura Timur	(850.961.853,00)	(1.179.883.230,00)	0,00	0,00	(2.030.845.083,00)
43	Kecamatan Paramasan	(535.659.475,00)	(1.276.915.032,00)	(152.120.673,00)	0,00	(1.964.695.180,00)
44	Kecamatan Tatah Makmur	(809.827.989,00)	(835.559.775,00)	0,00	0,00	(1.645.387.764,00)
45	Kecamatan Telaga Bauntung	(661.001.475,00)	(973.353.459,00)	0,00	0,00	(1.634.354.934,00)
46	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	(1.109.323.903,00)	(902.737.415,00)	0,00	0,00	(2.012.061.318,00)
47	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	(2.222.473.086,00)	(419.078,00)	(3.779.485,00)	0,00	(2.226.671.649,00)
Total		(690.090.887.591,86)	(668.408.750.311,24)	(1.246.561.232.595,78)	(708.368.300,00)	(2.605.769.238.798,89)

Penyusutan dilaksanakan terhadap aset Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi,



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

dan Jaringan, sedangkan aset Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan dan Aset Tetap Lainnya selain buku perpustakaan, barang bersifat kebudayaan, hewan, ternak dan tanaman tidak disusutkan.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.4. Dana Cadangan	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 karena Pemerintah Kabupaten Banjar tidak membentuk dana cadangan.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.5. Aset Lainnya	(Rp)	(Rp)
	432.725.894.475,79	99.790.984.633,88

Saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Banjar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang terdiri dari Saldo Neto 1) Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang telah dilakukan penyisihan; 2) Aset Tak Berwujud yang telah diperhitungkan amortisasinya, 3) Aset lain-lain dengan akumulasinya; dan 4) Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Tabel 5 . 170 Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik/ Turun (Rp)
1	Tagihan Penjualan Angsuran	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	(60.000.000,00)	(60.000.000,00)	0,00
	Tagihan Penjualan Angsuran Neto	0,00	0,00	0,00
2	Tuntutan Perbendaharaan	5.849.877.797,00	5.849.877.797,00	0,00
	Penyisihan Tuntutan Perbendaharaan	(5.849.877.797,00)	(5.849.877.797,00)	0,00
	Penyisihan Tuntutan Perbendaharaan Neto	0,00	0,00	0,00
3	Tuntutan Ganti Rugi	296.228.250,00	429.978.250,00	(133.750.000,00)
	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	(185.085.750,00)	(185.115.750,00)	30.000,00
	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi Neto	111.142.500,00	244.862.500,00	(133.720.000,00)
4	Aset Tak Berwujud	12.168.432.105,00	11.322.656.732,00	845.775.373,00
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(10.317.608.656,00)	(9.213.523.312,00)	(1.104.085.344,00)
	Aset Tak Berwujud Neto	1.850.823.449,00	2.109.133.420,00	(258.309.971,00)
5	Aset Lain-Lain	176.868.535.949,56	232.687.669.784,34	(55.819.133.834,78)
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(64.944.526.422,77)	(176.194.591.473,46)	111.250.065.050,69
	Aset Lain-Lain Neto	111.924.009.526,79	56.493.078.310,88	55.430.931.215,91
6	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	318.839.919.000,00	40.943.910.403,00	277.896.008.597,00
	Jumlah Aset Lainnya	514.082.993.101,56	291.294.092.966,34	222.788.900.135,22
7	Penyisihan	(6.094.963.547,00)	(6.094.993.547,00)	30.000,00
8	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(10.317.608.656,00)	(9.213.523.312,00)	(1.104.085.344,00)
9	Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	(64.944.526.422,77)	(176.194.591.473,46)	111.250.065.050,69
	Jumlah Aset Lainnya Neto	432.725.894.475,79	99.790.984.633,88	332.934.909.841,91



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp432.725.894.475,79 dan Rp99.790.984.633,88, merupakan saldo neto atas Aset Lainnya tahun 2023 dan 2022 yang telah diperhitungkan dengan mengurangi nilainya karena penyisihan, amortisasi dan penyusutan komponen akun aset lainnya. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp332.934.909.841,91 dengan penjelasan masing-masing sebagai berikut:

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	60.000.000,00	60.000.000,00

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 dan Rp60.000.000,00 adalah saldo Tagihan Penjualan Angsuran yang terjadi atas penjualan aktiva tetap tanah Pemerintah Kabupaten Banjar yang jatuh tempo dan berpotensi tak tertagih dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 171 Tagihan Penjualan Angsuran

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
- Muhammad Said	2.500.000,00	2.500.000,00
- H Abdul Hamid Ja'far	2.500.000,00	2.500.000,00
- H Musa	2.500.000,00	2.500.000,00
- H Murhan Basri	2.500.000,00	2.500.000,00
- Effendi Sumintapura	50.000.000,00	50.000.000,00
Jumlah Tagihan Penjualan Angsuran	60.000.000,00	60.000.000,00

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tagihan Penjualan Angsuran atas nama Muhammad Said sebesar Rp2.500.000,00 merupakan penjualan atas tanah di cempaka yang telah jatuh tempo tahun 2010.
2. Tagihan Penjualan Angsuran atas nama H Abdul Hamid Ja'far sebesar Rp2.500.000,00 merupakan penjualan atas tanah di cempaka yang telah jatuh tempo tahun 2010.
3. Tagihan Penjualan Angsuran atas nama H Musa sebesar Rp2.500.000,00 merupakan penjualan atas tanah di cempaka yang telah jatuh tempo tahun 2010.
4. Tagihan Penjualan Angsuran atas nama H. Murhan Basri sebesar Rp2.500.000,00 merupakan penjualan atas tanah di cempaka yang telah jatuh tempo tahun 2010.
5. Tagihan Penjualan Angsuran atas nama Effendi Sumintapura sebesar Rp50.000.000,00 merupakan penjualan atas tanah di Sa'adah yang telah jatuh tempo tahun 2010.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

1.a. Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<u>(60.000.000,00)</u>	<u>(60.000.000,00)</u>

Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Penjualan Angsuran yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang debitur. Nilai penyisihan tagihan penjualan angsuran tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp60.000.000,00) atau disisihkan dengan nilai 100% karena termasuk dalam kualitas macet sesuai dengan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Nomor 85 Tahun 2023.

Perhitungan Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 5 . 172 Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
- Muhammad Said	2.500.000,00	2.500.000,00
- H Abdul Hamid Ja'far	2.500.000,00	2.500.000,00
- H Musa	2.500.000,00	2.500.000,00
- H Murhan Basri	2.500.000,00	2.500.000,00
- Effendi Sumintapura	50.000.000,00	50.000.000,00
Jumlah Tagihan Penjualan Angsuran	60.000.000,00	60.000.000,00
Jumlah penyisihan	(60.000.000,00)	(60.000.000,00)
Tagihan Penjualan Angsuran Neto	0,00	0,00

2. Tuntutan Perbendaharaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<u>Rp5.849.877.797,00</u>	<u>Rp5.849.877.797,00</u>

Saldo Tuntutan Perbendaharaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp5.849.877.797,00 dan Rp5.849.877.797,00 adalah saldo atas tuntutan perbendaharaan atas nama H.Rz yaitu Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah merupakan kasus pengeluaran uang daerah atas sisa uang persediaan tahun 2008 yang belum dipertanggungjawabkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 214 K/PID.SUS/2011 tanggal 30 Maret 2011, namun belum terdapat SK Pembebanan dari BPK.

2.a. Penyisihan Tuntutan Perbendaharaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	<u>(5.849.877.797,00)</u>	<u>(5.849.877.797,00)</u>

Nilai penyisihan Tuntutan Perbendaharaan tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp5.849.877.797,00) atau disisihkan dengan nilai 100% karena termasuk kualitas macet



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

sesuai dengan Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Nomor 85 Tahun 2023.

Perhitungan Penyisihan Tuntutan Perbendaharaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 5 . 173 Penyisihan Tuntutan Perbendaharaan

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Tuntutan Perbendaharaan	5.849.877.797,00	5.849.877.797,00
Jumlah penyisihan	(5.849.877.797,00)	(5.849.877.797,00)
Tuntutan Perbendaharaan Neto	0,00	0,00

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
3. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	296.228.250,00	429.978.250,00

Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp296.228.250,00 dan Rp429.978.250,00 adalah merupakan saldo atas Tuntutan Ganti Rugi dari sejumlah karyawan PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar, terdiri dari :

Tabel 5 . 174 Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

No	Nama	31 Desember 2022 (Rp)	Pengurangan (Rp)	Penambahan (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	M. ZA	111.492.250,00	0,00	0,00	111.492.250,00
2	Drs. HI	17.500.000,00	6.000.000,00	0,00	11.500.000,00
3	Jn	65.696.000,00	0,00	0,00	65.696.000,00
4	SM	7.840.000,00	0,00	0,00	7.840.000,00
5	GM	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
6	DE	36.450.000,00	35.000.000,00	0,00	1.450.000,00
7	AR	42.750.000,00	42.750.000,00	0,00	0,00
8	MFN	40.000.000,00	35.000.000,00	0,00	5.000.000,00
9	G.M.H.F	37.250.000,00	0,00	0,00	37.250.000,00
10	AR	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
11	SAS	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
	Jumlah	429.978.250,00	133.750.000,00	0,00	296.228.250,00

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
3.a. Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	(185.085.750,00)	(185.115.750,00)

Perhitungan Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Tabel 5 . 175 Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi

No	Nama	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	M. ZA	TGR	111.492.250,00	111.492.250,00	0,00
		Penyisihan	(111.492.250,00)	(111.492.250,00)	0,00
		TGR Neto	0,00	0,00	0,00
2	Drs. HI	TGR	11.500.000,00	17.500.000,00	(6.000.000,00)
		Penyisihan	(57.500,00)	(87.500,00)	30.000,00
		TGR Neto	11.442.500,00	17.412.500,00	(5.970.000,00)
3	Jn	TGR	65.696.000,00	65.696.000,00	0,00
		Penyisihan	(65.696.000,00)	(65.696.000,00)	0,00
		TGR Neto	0,00	0,00	0,00
4	SM	TGR	7.840.000,00	7.840.000,00	0,00
		Penyisihan	(7.840.000,00)	(7.840.000,00)	0,00
		TGR Neto	0,00	0,00	0,00
5	GM	TGR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
		Penyisihan	0,00	0,00	0,00
		TGR Neto	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
6	DE	TGR	1.450.000,00	36.450.000,00	(36.450.000,00)
		Penyisihan	0,00	0,00	0,00
		TGR Neto	1.450.000,00	36.450.000,00	(36.450.000,00)
7	AR	TGR	0,00	42.750.000,00	(42.750.000,00)
		Penyisihan	0,00	0,00	0,00
		TGR Neto	0,00	42.750.000,00	(42.750.000,00)
8	MFN	TGR	5.000.000,00	40.000.000,00	(35.000.000,00)
		Penyisihan	0,00	0,00	0,00
		TGR Neto	5.000.000,00	40.000.000,00	(35.000.000,00)
9	G.M.H.F	TGR	37.250.000,00	37.250.000,00	0,00
		Penyisihan	0,00	0,00	0,00
		TGR Neto	37.250.000,00	37.250.000,00	0,00
10	AR	TGR	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)
		Penyisihan	0,00	0,00	0,00
		TGR Neto	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)
11	SAS	TGR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
		Penyisihan	0,00	0,00	0,00
		TGR Neto	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	Jumlah	TGR	296.228.250,00	429.978.250,00	(133.750.000,00)
		Penyisihan	(185.085.750,00)	(185.115.750,00)	(30.000,00)
		TGR Neto	111.142.500,00	244.862.500,00	221.480.000,00

Dengan penjelasan sebagai berikut:

- Tuntutan Ganti Rugi atas nama M.ZA sebesar Rp111.492.250,00 merupakan kasus penyalahgunaan setoran izin trayek tahun 2004 dan proses TP-TGR macet karena yang bersangkutan menghilang/tidak diketahui keberadaannya. Sesuai hasil rapat tim



- penyelesaian kerugian daerah akan dipertimbangkan untuk dihapuskan (proses penghapusan).
- b. Tuntutan Ganti Rugi atas nama Drs. HI sebesar Rp11.500.000,00 merupakan kasus penyelewengan retribusi penyewaan alat berat pada tahun 2007 dan yang bersangkutan telah meninggal dunia. Proses TP-TGR lancar melalui pemotongan gaji pensiun dengan besaran Rp500.000,00 per-bulan.
- c. Tuntutan Ganti Rugi atas nama Jn sebesar Rp65.696.000,00 merupakan kasus penyelewengan dana DAK pengadaan Buku, yang bersangkutan sudah dihukum dan putusan pengadilan tidak diharuskan mengembalikan kerugian. Proses TP-TGR macet dan sudah dihapus dengan SK Bupati Nomor 535 tahun 2011 tetapi belum ada persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
- d. Tuntutan Ganti Rugi atas nama SM sebesar Rp7.840.000,00 merupakan kasus kekurangan perbendaharaan kantor Camat Sungai Tabuk karena dana pinjaman dan proses TP-TGR macet karena yang bersangkutan telah meninggal dunia dan akan dipertimbangkan untuk dihapuskan (proses penghapusan).
- e. Tuntutan Ganti Rugi atas nama GM sebesar Rp50.000.000,00 merupakan kasus yang ditimbulkan dari penggunaan dana tugas belajar dan yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari tugas belajar tersebut. Tuntutan ganti rugi ini timbul dengan adanya Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak Nomor 188.45/421/KUM/2021 dan ditandatangani oleh pihak bersangkutan sebagai kesepakatan atas besarnya Kerugian Daerah yang harus diganti. Sampai dengan tahun 2023 pihak bersangkutan tidak ada melakukan pembayaran atas kerugian daerah tersebut.
- f. Saldo Tuntutan Ganti Rugi atas nama DE sebesar Rp1.450.000,00 merupakan kasus yang ditimbulkan dari penggunaan dana tugas belajar dan yang bersangkutan tidak menyelesaikan pendidikan tugas belajar tersebut. Tuntutan ganti rugi ini timbul dengan adanya Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak Nomor 188.45/421/KUM/2021 dan ditandatangani oleh pihak bersangkutan sebagai kesepakatan atas besarnya Kerugian Daerah yang harus diganti.
- g. Saldo Tuntutan Ganti Rugi atas nama AR sebesar Rp0,00 merupakan kasus yang ditimbulkan dari penggunaan dana tugas belajar dan yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari tugas belajar tersebut. Tuntutan ganti rugi ini timbul dengan adanya Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak Nomor 188.45/421/KUM/2021 dan ditandatangani oleh pihak bersangkutan sebagai kesepakatan atas besarnya Kerugian Daerah yang harus diganti. Pada tahun 2023 pihak bersangkutan telah melunasi kerugian daerah tersebut.
-



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

- h. Saldo Tuntutan Ganti Rugi atas nama MFN sebesar Rp5.000.000,00 merupakan kasus yang ditimbulkan dari penggunaan dana tugas belajar dan yang bersangkutan telah menyelesaikan tugas belajar tersebut tetapi tidak melakukan pengabdian dan telah mutasi ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Tuntutan ganti rugi ini timbul dengan adanya Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak Nomor 188.45/421/KUM/2021 dan ditandatangani oleh pihak bersangkutan sebagai kesepakatan atas besarnya Kerugian Daerah yang harus diganti.
- i. Tuntutan Ganti Rugi atas nama GMHF sebesar Rp37.250.000,00 merupakan kasus yang ditimbulkan dari penggunaan dana tugas belajar dan yang bersangkutan telah menyelesaikan tugas belajar tersebut tetapi tidak melakukan pengabdian dan telah mutasi ke Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Tuntutan ganti rugi ini timbul dengan adanya Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak Nomor 188.45/421/KUM/2021 dan ditandatangani oleh pihak bersangkutan sebagai kesepakatan atas besarnya Kerugian Daerah yang harus diganti.
- j. Saldo Tuntutan Ganti Rugi atas nama AR sebesar Rp0,00 merupakan kasus yang ditimbulkan dari penggunaan dana tugas belajar dan yang bersangkutan telah menyelesaikan tugas belajar tersebut tetapi tidak melakukan pengabdian dan telah mutasi ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Tuntutan ganti rugi ini timbul dengan adanya Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak Nomor 188.45/421/KUM/2022 dan ditandatangani oleh pihak bersangkutan sebagai kesepakatan atas besarnya Kerugian Daerah yang harus diganti. Pada tahun 2023 pihak bersangkutan telah melunasi kerugian daerah tersebut.
- k. Tuntutan Ganti Rugi atas nama SAS Rp6.000.000,00 merupakan kasus yang ditimbulkan dari hilangnya Barang Milik Daerah berupa 1 unit Motor Yamaha Xeon DA 510 B. Tuntutan ganti rugi ini timbul dengan adanya Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak Nomor 188.45/478/KUM/2021 dan ditandatangani oleh pihak bersangkutan sebagai kesepakatan atas besarnya Kerugian Daerah yang harus diganti. Pada tahun 2023 pihak bersangkutan tidak ada melakukan pembayaran atas kerugian daerah tersebut.

Jumlah Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 seluruhnya adalah sebesar (Rp6.094.993.547,00) dan (Rp6.095.023.547,00) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 . 176 Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi Neto

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Naik/Turun (Rp)
1	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran	(60.000.000,00)	(60.000.000,00)	0,00
2	Penyisihan Tuntutan Perbendaharaan	(5.849.877.797,00)	(5.849.877.797,00)	0,00
3	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	(185.085.750,00)	(185.115.750,00)	30.000,00
	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi Neto	(6.094.993.547,00)	(6.095.023.547,00)	30.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

4. Aset Tak Berwujud	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	12.168.432.105,00	11.322.656.732,00

Aset Tak Berwujud merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp12.168.432.105,00 dan Rp11.322.656.732,00. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp845.775.373,00 karena adanya penambahan sebesar Rp845.775.373,00,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 177 Aset Tak Berwujud

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Saldo awal 1 Januari	11.322.656.732,00	11.209.115.438,00	113.541.294,00	1,01
2	Penambahan:				
	a. Belanja modal aset lainnya	314.900.000,00	0,00	314.900.000,00	100
	b. Reklasifikasi antar KIB:	436.128.168,00	218.041.294,00	218.086.874,00	100,02
	– Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	249.989.900,00	0,00	249.989.900,00	100
	– Reklasifikasi dari ATL	186.138.268,00	218.041.294,00	(31.903.026,00)	(14,63)
	c. Belanja barang & Jasa berupa aset	94.747.205,00	0,00	94.747.205,00	100
	Jumlah Penambahan	845.775.373,00	218.041.294,00	627.734.079,00	257,90
3	Pengurangan:				
	a. Belanja Modal tidak dikategorikan sebagai aset	0,00	79.500.000,00	(79.500.000,00)	(100)
	b. Koreksi Catat	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(100)
	Jumlah Pengurangan	0,00	104.500.000,00	(104.500.000,00)	(100)
	Total Kenaikan Tahun 2023	845.775.373,00	113.541.294,00	732.234.079,00	644,91
4	Jumlah Aset Tak Berwujud 31 Desember	12.168.432.105,00	11.322.656.732,00	845.775.373,00	7,47
5	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(10.317.608.656,00)	(9.213.523.312,00)	(1.104.085.344,00)	11,98
6	Aset Tak Berwujud Neto	1.850.823.449,00	2.109.133.420,00	172.635.216,00	(12,25)

Kenaikan nilai Aset Tak Berwujud Kabupaten Banjar pada tahun 2023 sebesar Rp845.775.373,00 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya penambahan nilai Aset Tak Berwujud sebesar Rp845.775.373,00 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

- a. Penambahan saldo Aset Tak Berwujud berdasarkan Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp314.900.000,00
- b. Penambahan Aset Tak Berwujud karena adanya reklasifikasi antar KIB sebesar Rp**436.128.168,00** terdiri dari:
 - Reklasifikasi aset tetap dari Peralatan dan Mesin senilai Rp249.989.900,00 pada RSUD Ratu Zalecha.
 - Reklasifikasi aset tetap dari Aset Tetap Lainnya senilai Rp186.138.268,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 178 Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	61.345.000,00
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14.993.268,00
3	BPKPAD	24.800.000,00
4	BKPSDM	85.000.000,00
Jumlah		186.138.268,00

- c. Penambahan Aset Tak Berwujud karena belanja barang dan jasa berupa aset sebesar Rp94.747.205,00 pada:

Tabel 5 . 179 Penambahan karena Belanja Barang dan Jasa berupa Aset Tak Berwujud

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	UPT PKM Martapura 1	3.300.000,00
2	BLUD Intan	40.000.000,00
3	Dinas Perhubungan	51.417.205,00
Jumlah		97.747.205,00

2. Pengurangan nilai Aset Tak Berwujud sebesar Rp0,00.

Saldo Aset Tak Berwujud per SKPD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 . 180 Aset Tak Berwujud per SKPD

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	2.071.086.600,00	2.071.086.600,00
2	Dinas Kesehatan	69.453.039,00	66.123.039,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	162.311.000,00	162.311.000,00
4	DPRKPLH	64.560.000,00	64.560.000,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	192.465.000,00	131.120.000,00
6	Dinas Perhubungan	301.195.205,00	249.778.000,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	498.156.032,00	498.156.032,00
8	DKUMPP	70.057.000,00	70.057.000,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	98.907.000,00	98.907.000,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	221.232.690,00	206.239.422,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	84.100.000,00	84.100.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No	SKPD	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
12	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	118.671.000,00	118.671.000,00
13	Dinas Pertanian	49.280.000,00	49.280.000,00
14	Sekretariat Daerah	207.145.000,00	207.145.000,00
15	Inspektorat Daerah	24.100.000,00	24.100.000,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	4.066.017.800,00	4.066.017.800,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	3.124.754.464,00	2.849.954.464,00
18	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	274.681.000,00	124.781.000,00
19	Sekretariat DPRD	104.094.375,00	104.094.375,00
20	Kecamatan Kertak Hanyar	7.500.000,00	7.500.000,00
21	Kecamatan Gambut	2.500.000,00	2.500.000,00
22	Kecamatan Martapura	5.000.000,00	5.000.000,00
23	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	61.175.000,00	61.175.000,00
24	RSUD Ratu Zalecha	249.989.900,00	0,00
25	BLUD Intan Hijau	40.000.000,00	0,00
	Jumlah	12.168.432.105,00	11.322.656.732,00

4.a. Amortisasi Aset Tak Berwujud	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	(10.317.608.656,00)	(9.213.523.312,00)

Saldo akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp10.317.608.656,00) dan (Rp9.213.523.312,00). Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud merupakan kontra akun Aset Tak Berwujud yang disajikan berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tak Berwujud dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 181 Amortisasi Aset Tak Berwujud

No	SKPD	Akun	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Aset Tidak Berwujud	2.071.086.600,00	2.071.086.600,00
		Penyisihan	(1.790.062.870,00)	(1.377.487.217,00)
		Aset Tidak Berwujud Neto	281.023.730,00	693.599.383,00
2	Dinas Kesehatan	Aset Tidak Berwujud	69.453.039,00	66.123.039,00
		Penyisihan	(62.538.797,00)	(53.284.189,00)
		Aset Tidak Berwujud Neto	6.914.242,00	12.838.850,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang	Aset Tidak Berwujud	162.311.000,00	162.311.000,00
		Penyisihan	(139.245.650,00)	(107.391.783,00)
		Aset Tidak Berwujud Neto	23.065.350,00	54.919.217,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Aset Tidak Berwujud	64.560.000,00	64.560.000,00
		Penyisihan	(26.564.000,00)	(16.652.000,00)
		Aset Tidak Berwujud Neto	37.996.000,00	47.908.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No	SKPD	Akun	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Aset Tidak Berwujud	192.465.000,00	131.120.000,00
		Penyisihan	(139.299.333,00)	(123.138.833,00)
		Aset Tidak Berwujud Neto	53.165.667,00	7.981.167,00
6	Dinas Perhubungan	Aset Tidak Berwujud	301.195.205,00	249.778.000,00
		Penyisihan	(250.180.867,00)	(231.811.333,00)
		Aset Tidak Berwujud Neto	51.014.338,00	17.966.667,00
7	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	Aset Tidak Berwujud	498.156.032,00	498.156.032,00
		Penyisihan	(404.844.136,00)	(316.464.929,00)
		Aset Tidak Berwujud Neto	93.311.896,00	181.691.103,00
8	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	Aset Tidak Berwujud	70.057.000,00	70.057.000,00
		Penyisihan	(70.057.000,00)	(70.057.000,00)
		Aset Tidak Berwujud Neto	0,00	0,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Aset Tidak Berwujud	98.907.000,00	98.907.000,00
		Penyisihan	(60.992.650,00)	(41.211.250,00)
		Aset Tidak Berwujud Neto	37.914.350,00	57.695.750,00
10	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Aset Tidak Berwujud	221.232.690,00	206.239.422,00
		Penyisihan	(162.420.649,00)	(131.179.297,00)
		Aset Tidak Berwujud Neto	58.812.041,00	75.060.125,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Aset Tidak Berwujud	84.100.000,00	84.100.000,00
		Penyisihan	(61.758.333,00)	(44.938.333,00)
		Aset Tidak Berwujud Neto	22.341.667,00	39.161.667,00
12	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Aset Tidak Berwujud	118.671.000,00	118.671.000,00
		Penyisihan	(88.894.167,00)	(71.839.967,00)
		Aset Tidak Berwujud Neto	29.776.833,00	46.831.033,00
13	Dinas Pertanian	Aset Tidak Berwujud	49.280.000,00	49.280.000,00
		Penyisihan	(49.280.000,00)	(49.280.000,00)
		Aset Tidak Berwujud Neto	0,00	0,00
14	Sekretariat Daerah	Aset Tidak Berwujud	207.145.000,00	207.145.000,00
		Penyisihan	(191.565.000,00)	(186.645.000,00)
		Aset Tidak Berwujud Neto	15.580.000,00	20.500.000,00
15	Inspektorat Daerah	Aset Tidak Berwujud	24.100.000,00	24.100.000,00
		Penyisihan	(24.100.000,00)	(24.100.000,00)
		Aset Tidak Berwujud Neto	0,00	0,00
16	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	Aset Tidak Berwujud	4.066.017.800,00	4.066.017.800,00
		Penyisihan	(4.016.796.466,00)	(3.963.100.466,00)
		Aset Tidak Berwujud Neto	49.221.334,00	102.917.334,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Aset Tidak Berwujud	3.124.754.464,00	2.849.954.464,00
		Penyisihan	(2.459.310.989,00)	(2.142.461.423,00)
		Aset Tidak Berwujud Neto	665.443.475,00	707.493.041,00
18	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Aset Tidak Berwujud	274.681.000,00	124.781.000,00
		Penyisihan	(120.544.801,00)	(103.361.334,00)
		Aset Tidak Berwujud Neto	154.136.199,00	21.419.666,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No	SKPD	Akun	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
19	Sekretariat DPRD	Aset Tidak Berwujud	104.094.375,00	104.094.375,00
		Penyisihan	(104.094.375,00)	(104.094.375,00)
		Aset Tidak Berwujud Neto	0,00	0,00
20	Kecamatan Kertak Hanyar	Aset Tidak Berwujud	7.500.000,00	7.500.000,00
		Penyisihan	(7.500.000,00)	(7.500.000,00)
		Aset Tidak Berwujud Neto	0,00	0,00
21	Kecamatan Gambut	Aset Tidak Berwujud	2.500.000,00	2.500.000,00
		Penyisihan	(2.500.000,00)	(2.500.000,00)
		Aset Tidak Berwujud Neto	0,00	0,00
22	Kecamatan Martapura	Aset Tidak Berwujud	5.000.000,00	5.000.000,00
		Penyisihan	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)
		Aset Tidak Berwujud Neto	0,00	0,00
23	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Aset Tidak Berwujud	61.175.000,00	61.175.000,00
		Penyisihan	(51.059.583,00)	(40.024.583,00)
		Aset Tidak Berwujud Neto	10.115.417,00	21.150.417,00
24	RSUD Ratu Zalecha	Aset Tidak Berwujud	249.989.900,00	0,00
		Penyisihan	(24.998.990,00)	0,00
		Aset Tidak Berwujud Neto	224.990.910,00	0,00
25	BLUD Intan	Aset Tidak Berwujud	40.000.000,00	0,00
		Penyisihan	(4.000.000,00)	0,00
		Aset Tidak Berwujud Neto	36.000.000,00	0,00
Total Aset Tidak Berwujud			12.168.432.105,00	11.322.656.732,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud			(10.317.608.656,00)	(9.213.523.312,00)
Total Aset Tidak Berwujud Neto			1.850.823.449,00	2.109.133.420,00

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Amortisasi aset tidak berwujud pada 7 SKPD dengan nilai 100% sehingga saldo aset tetap tidak berwujud setelah amortisasi bernilai Rp0,00 karena harga perolehan aset tidak berwujud sama nilainya dengan jumlah amortisasi aset tidak berwujud tersebut.
2. Amortisasi aset tidak berwujud pada 18 SKPD menunjukkan bahwa harga perolehan aset tidak berwujud masih di atas nilai amortisasi aset tidak berwujud sehingga untuk selanjutnya masih dilakukan perhitungan amortisasi terhadap aset tidak berwujud tersebut.

5. Aset Lain-Lain	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	176.868.535.949,56	232.687.669.784,34

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp176.868.535.949,56 dan Rp232.687.669.784,34 mengalami penurunan sebesar Rp55.819.133.834,78 karena adanya penambahan sebesar Rp4.254.840.341,11 dan pengurangan sebesar Rp60.073.974.175,89 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Tabel 5 . 182 Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Saldo awal 1 Januari	232.687.669.784,34	217.069.576.070,38	15.618.093.713,96	7,19
2	Penambahan:				
	a. Mutasi antar SKPD	15.450.000,00	282.010.000,00	(266.560.000,00)	(94,52)
	b. Reklasifikasi antar KIB	4.239.390.341,11	18.783.433.049,96	(14.544.042.708,85)	(77,43)
	-Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	2.498.992.204,85	0,00	2.498.992.204,85	100
	-Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	1.740.398.136,26	0,00	1.740.398.136,26	100
	Jumlah Penambahan	4.254.840.341,11	19.065.443.049,96	(14.810.602.708,85)	(77,68)
3	Pengurangan:				
	a. Penghapusan	57.178.999.996,89	2.182.297.236,00	54.996.702.760,89	2520,13
	b. Mutasi antar SKPD	15.450.000,00	282.010.000,00	(266.560.000,00)	(94,52)
	c. Reklasifikasi antar KIB	2.858.524.179,00	983.042.100,00	1.875.482.079,00	190,78
	-Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	2.858.524.179,00	983.042.100,00	1.875.482.079,00	190,78
	d. Koreksi Catat	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	100
	Jumlah Pengurangan	60.073.974.175,89	3.447.349.336,00	56.626.624.839,89	1642,61
	Total Penurunan Tahun 2023	(55.819.133.834,78)	15.618.093.704,96	(71.437.227.548,74)	(457,40)
4	Saldo Akhir 31 Desember Aset Lain-Lain	176.868.535.949,56	232.687.669.784,34	(55.819.133.834,78)	(23,99)

Penurunan signifikan aset lain-lain dipengaruhi adanya penambahan penghapusan aset sebesar Rp57.178.999.996,89. Penurunan nilai Aset Lain-Lain Kabupaten Banjar pada tahun 2023 sebesar Rp55.819.133.834,78 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya penambahan nilai Aset Lain-Lain sebesar Rp4.254.840.34,11 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penambahan Aset Lain-Lain karena adanya mutasi antar SKPD senilai Rp15.450.000,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 183 Mutasi Antar SKPD - Aset Lain-Lain

No	SKPD	Jumlah (Rp)	SKPD Penerima
1	UPT PKM Sambung Makmur	11.500.000,00	UPT PKM Astambul
2	DPRKPLH	3.950.000,00	Satpol PP
	Jumlah	15.450.000,00	

- b. Penambahan saldo Aset Lain-Lain karena adanya reklasifikasi dari aset yang lain senilai **Rp4.239.390.341,11** terdiri dari:
 - Reklasifikasi Aset Lain-lain dari Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.498.992.204,85

Tabel 5 . 184 Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin - Aset Lain-Lain

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	25.523.000,00
2	Dinas Kesehatan	164.900.000,00
3	RSUD Ratu Zalecha	1.563.174.786,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.000.000,00
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	33.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No	SKPD	Jumlah (Rp)
6	Disbudporapar	117.433.000,00
7	Sekretariat DPRD	28.000.000,00
8	Kecamatan Astambul	9.500.000,00
9	Kecamatan martapura	12.800.000,00
10	Kecamatan Aluh-ALuh	34.524.258,00
11	Kecamatan Mataraman	16.131.000,00
12	Kecamatan martapura Timur	71990000
13	BPKPAD	412.016.160,85
	Jumlah	2.498.992.204,85

- Reklasifikasi Aset Lain-Lain dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.740.398.136,26 dengan rincian:

Tabel 5 . 185 Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan - Aset Lain-Lain

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	563.693.562,26
2	Dinas Kesehatan	135.024.000,00
3	UPT PKM Beruntung Baru	1.026.063.000,00
4	UPT PKM Sungai Tabuk 2	15.617.574,00
	Jumlah	1.740.398.136,26

2. Adanya pengurangan nilai Aset Lain-Lain sebesar Rp60.073.974.175,89 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengurangan Aset Lain-lain karena adanya penghapusan sebesar Rp57.178.999.996,89 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 186 Pengurangan karena Penghapusan

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	311.659.375,00
2	Dinas Kesehatan	449.724.000,00
3	RSUD Ratu Zalecha	195.918.939,00
4	Dinas PUPRP	55.052.681.824,89
5	DPRKPLH	625.867.600,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.000.000,00
7	Dinsos P3AP2KB	5.000.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	24.000.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.000.000,00
10	Disbudporapar	117.433.000,00
11	Sekretariat DPRD	32.000.000,00
12	Kecamatan Astambul	9.500.000,00
13	Kecamatan martapura	172.090.000,00
14	Kecamatan Aranio	43.480.000,00
15	Kecamatan Aluh-Aluh	34.524.258,00
16	Kecamatan Mataraman	16.131.000,00
17	Kecamatan Martapura Timur	64.990.000,00
18	Kecamatan Tatah Makmur	6.000.000,00
	Jumlah	57.178.999.996,89



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

- b. Pengurangan Aset Lain-Lain karena adanya Mutasi antar SKPD sebesar Rp15.450.000,00.
- c. Pengurangan Aset Lain-Lain karena adanya Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp2.858.524.179,00 dengan rincian:
 - Reklasifikasi Aset Lain-Lain ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.858.524.179,00 dengan rincian:

Tabel 5 . 187 Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan - Aset Lain-Lain

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas PUPRP	554.903.000,00
2	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	2.303.621.179,00
	Jumlah	2.858.524.179,00

- d. Pengurangan Aset Lain-Lain karena adanya koreksi catat sebesar Rp21.000.000,00 pada Dinas Pertanian.

6. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	(64.944.526.422,77)	(176.194.591.473,46)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar minus Rp64.944.526.422,77 dan minus Rp176.194.591.473,46 dan. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain merupakan reklasifikasi dari akumulasi aset tetap sehubungan adanya aset tetap yang akan dihapuskan.

Atas aset-aset yang telah diusulkan untuk dihapuskan tersebut, belum ditindak lanjuti dengan proses penghapusan karena masih adanya validasi atas aset-aset yang akan dihapuskan.

7. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Merupakan pencatatan saldo Dana Bagi hasil dalam bentuk nontunai dilakukan dengan *Treasury Deposit Facility* ke Daerah (TDF-TKD). Saldo TDF tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp40.943.910.403,00 dan Rp318.839.919.000,00 yang dicatat sebagai aset lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 188 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	PPh 21	1.932.606.000,00	1.233.596.324,00
2	PPh 25/29	10.558.000,00	45.062.643,00
3	DBH PBB	4.708.738.000,00	1.952.391.680,00
4	DBH Perikanan	0,00	211.753.211,00
5	DBH Minerba Royalti	311.921.641.000,00	37.482.513.834,00
6	DBH Minerba Landrent	225.669.000,00	0,00
7	DBH Kehutanan	30.301.000,00	9.805.817,00
8	DBH Minyak Bumi	10.406.000,00	8.748.300,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
9	DBH Cukai Hasil Tembakau	0,00	38.594,00
	Jumlah	318.839.919.000,00	40.943.910.403,00

5.3.1.6. Properti Investasi	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	29.134.847.004,00	0,00

Properti investasi merupakan properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

1. Properti Investasi Tanah

Saldo properti investasi tanah pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.638.397.500,00 terdiri dari:

Tabel 5 . 189 Properti Investasi Tanah

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Saldo awal Januari	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penambahan:				
	a. Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah	1.638.397.500,00	0,00	1.638.397.500,00	100
	Jumlah Penambahan	1.638.397.500,00	0,00	1.638.397.500,00	100
3	Pengurangan:				
	Jumlah Pengurangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Kenaikan tahun 2023	1.638.397.500,00	0,00	1.638.397.500,00	100
4	Saldo Akhir 31 Desember 2023	1.638.397.500,00	0,00	1.638.397.500,00	100

Kenaikan saldo properti investasi tanah sebesar Rp1.638.397.500,00 dikarenakan adanya penambahan saldo properti investasi sebesar Rp1.638.397.500,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00 yang terdiri dari:

- Penambahan aset properti investasi dikarenakan reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah sebesar Rp1.638.397.500,00 yang terdiri dari:

Tabel 5 . 190 Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	DKUMPP	1.506.197.500,00
2	Sekretariat Daerah	132.200.000,00
	Jumlah	1.638.397.500,00

2. Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Saldo properti investasi Gedung dan bangunan pada tahun 2022 dn 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp43.880.535.554,00 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Tabel 5 . 191 Properti Investasi Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Saldo awal Januari	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penambahan:				
	a. Reklasifikasi dari Aset Tetap GB	43.880.535.554,00	0,00	43.880.535.554,00	100
	Jumlah Penambahan	43.880.535.554,00	0,00	43.880.535.554,00	100
3	Pengurangan:				
	Jumlah Pengurangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Kenaikan tahun 2023	43.880.535.554,00	0,00	43.880.535.554,00	100
4	Saldo Akhir 31 Desember 2023	43.880.535.554,00	0,00	43.880.535.554,00	100

Kenaikan saldo properti investasi Gedung dan bangunan sebesar Rp43.880.535.554,00 dikarenakan adanya penambahan saldo properti investasi sebesar Rp43.880.535.554,00 dan pengurangan sebesar Rp0,00 yang terdiri dari:

- a. Penambahan aset properti investasi dikarenakan reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp43.880.535.554,00 yang terdiri dari:

Tabel 5 . 192 Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	1.822.816.972,00
2	DKUMPP	38.060.308.582,00
3	Sekretariat Daerah	3.997.410.000,00
	Jumlah	43.880.535.554,00

2a. Akumulasi penyusutan properti investasi

Saldo akumulasi penyusutan properti investasi yang disajikan yaitu akumulasi penyusutan properti investasi Gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp16.384.086.050,00) dan (Rp0,00). Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud merupakan kontra akun properti investasi yang disajikan berdasarkan akumulasi atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset properti investasi.

5.3.2. KEWAJIBAN	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	83.443.113.658,53	112.998.714.385,00

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp83.443.113.658,53 dan Rp112.998.714.385,00 adalah saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Banjar dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	83.443.113.658,53	112.998.714.385,00

Mutasi Kewajiban Jangka Pendek selama Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 . 193 Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31/12/2022	Penambahan	Pengurangan	31/12/2023
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	2.763.041.629,00	1.414.428.553,00	2.763.041.629,00	1.414.428.553,00
3	Utang Belanja	10.066.254.344,00	13.325.853.712,53	10.066.254.344,00	13.325.853.712,53
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	100.169.418.412,00	7.315.438.981,00	38.782.026.000,00	68.702.831.393,00
JUMLAH		112.998.714.385,00	22.045.068.332,53	112.998.714.385,00	83.443.113.658,53

Penjelasan mutasi atas masing-masing kewajiban jangka pendek adalah sebagai berikut:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak ada penambahan maupun pengurangan atas rekening ini. Pemerintah Kabupaten Banjar per 31 Desember 2023 tidak mempunyai Utang Perhitungan Pihak Ketiga.

2. Pendapatan Diterima di Muka	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
	1.414.428.553,00	2.763.041.629,00

Saldo Pendapatan Diterima di Muka merupakan selisih lebih penerimaan pembayaran dengan hak yang telah timbul pada pemerintah daerah. Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.414.428.553,00 dan Rp2.763.041.629,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5 . 194 Pendapatan Diterima di Muka

No	Uraian	31/12/2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31/12/2023 (Rp)
	Pendapatan Pajak:	2.159.105.596,00	1.125.882.820,00	2.159.105.596,00	1.125.882.820,00
1	Penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah	2.159.105.596,00	1.125.882.820,00	2.159.105.596,00	1.125.882.820,00
	Lain-Lain PAD yang Sah:	603.936.033,00	0,00	315.390.300,00	288.545.733,00
1	Penerimaan Sewa ATM Dinas Pendidikan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	49.592.700,00	0,00	5.510.300,00	44.082.400,00
2	Penerimaan Sewa ATM Bank Kalsel pada Badan Pengelolaan	42.440.000,00	0,00	21.220.000,00	21.220.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No	Uraian	31/12/2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31/12/2023 (Rp)
	Kuangan Pendapatan dan Aset Daerah				
3	Penerimaan Sewa ATM Bank Mandiri pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	42.440.000,00	0,00	21.220.000,00	21.220.000,00
4	Penerimaan Sewa ATM BRI pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	42.440.000,00	0,00	21.220.000,00	21.220.000,00
5	Penerimaan Sewa ATM BNI pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	42.440.000,00	0,00	21.220.000,00	21.220.000,00
6	Penerimaan Sewa Unit Pengolahan Ikan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	160.000.000,00	0,00	120.000.000,00	40.000.000,00
7	Penerimaan Sewa ATM Bank Kalsel pada BLUD RAZA	160.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
8	Penerimaan Sewa ATM Bank BNI pada BLUD RAZA	64.583.333,00	0,00	25.000.000,00	39.583.333,00
	Jumlah	2.763.041.629,00	1.125.882.820,00	2.474.495.896,00	1.414.428.553,00

Jumlah pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2022 sebesar (Rp1.348.613.076,00) atau sebesar (48,81%).

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
3 Utang Belanja	13.325.853.712,53	12.467.195.409,00

Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp13.325.853.712,53 dan Rp12.467.195.409,00 merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Mutasi Utang Belanja sebagai berikut:

Tabel 5 . 195 Utang Belanja

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang kepada Pihak Ketiga pada BLUD Ratu Zalecha	3.547.176.781,00	5.057.215.546,00	3.547.176.781,00	5.057.215.546,00
2	Utang Jasa Pelayanan pada BLUD Ratu Zalecha	5.747.533.990,00	7.048.366.620,00	5.747.533.990,00	7.048.366.620,00
3	Utang kepada PMI pada BLUD Ratu Zalecha	132.120.000,00	279.300.000,00	132.120.000,00	279.300.000,00
4	Utang Belanja	639.423.573,00	922.275.234,53	639.423.573,00	922.275.234,53
	Jumlah	12.467.195.409,00	13.325.853.712,53	12.467.195.409,00	13.325.853.712,53

- Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar masing-masing sebesar Rp5.057.215.546,00 dan Rp3.547.176.781,00 merupakan utang BLUD Ratu Zalecha ke perusahaan besar farmasi atas pengadaan obat dengan rincian sebagai berikut:

- Saldo per 31 Desember 2022	Rp 3.547.176.781,00
- Mutasi Kurang	(Rp 3.547.176.781,00) (Pelunasan)
- Mutasi Tambah	<u>Rp 5.057.215.546,00</u> (Tagihan 2023)
- Saldo Akhir 2023	Rp 5.057.215.546,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

2. Utang jasa pelayanan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp dan Rp merupakan utang BLUD Ratu Zalecha ke karyawan atas jasa klaim ke BPJS, Pelayanan Pasien Umum, Pelayanan Covid, dan Pelayanan Bagamis dengan rincian sebagai berikut:
 - Saldo per 31 Desember 2022 Rp5.747.533.990,00
 - Mutasi Kurang Rp5.747.533.990,00 (Pelunasan)
 - Mutasi Tambah Rp7.048.366.620,00 (Tagihan 2023)
 - Saldo Akhir 2023 Rp7.048.366.620,00
3. Utang kepada PMI per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp279.300.000,00 dan Rp132.120.000,00 merupakan utang BLUD Ratu Zalecha atas pengadaan kantong darah pasien BPJS dan Jamkesda untuk bulan Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :
 - Saldo per 31 Desember 2022 Rp 132.120.000,00
 - Mutasi Kurang Rp 132.120.000,00 (Pelunasan)
 - Mutasi Tambah Rp 279.300.000,00 (Tagihan 2023)
 - Saldo Akhir 2023 Rp 279.300.000,00
4. Utang Belanja meliputi Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Tagihan Telepon, Tagihan Air, Tagihan Listrik, Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan, Paket/Pengiriman, Surat Kabar, Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid – 19, dan Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan untuk pembayaran pemakaian bulan Desember 2023 yang dibayarkan di tahun 2024 di lingkup SKPD Pemerintah Kabupaten Banjar senilai Rp922.275.234,53.

Tabel 5 . 196 Rincian Utang Belanja

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/Turun (%)
Jasa Tenaga Kesehatan	295.214.074,53	0,00	0,00
Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.365.319,00	19.953.248,00	(73,11)
Tagihan Telepon	32.007.581,00	35.792.984,00	(10,58)
Tagihan Air	56.972.093,00	49.195.732,00	15,81
Tagihan Listrik	376.596.079,00	328.907.247,00	14,50
Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	15.104.388,00	22.224.362,00	(32,04)
Paket/ Pengiriman	175.000,00	0,00	0,00
Surat Kabar	0,00	90.000,00	(100,00)
Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid - 19	0,00	183.260.000,00	(100,00)
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	140.840.700,00	0,00	0,00
Jumlah	922.275.234,53	639.423.573,00	44,24

Rincian Utang Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, Jasa Tenaga Pelayanan Umum, Tagihan Telepon, Tagihan Air, Tagihan Listrik, Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan, Paket/



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Pengiriman, Surat Kabar, Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid – 19, dan Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan tahun 2023 dijelaskan pada **Lampiran 19**.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
4. Utang Jangka Pendek Lainnya	68.702.831.393,00	100.169.418.412,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp68.702.831.393,00 dan Rp100.169.418.412,00, merupakan Utang Lebih Bayar Dana Transfer Pemerintah Pusat yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Banjar kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan KMK Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023. Rincian Mutasi untuk tiap-tiap DBH adalah sebagai berikut:

Tabel 5 . 197 Utang Jangka Pendek Lainnya

No.	Jenis DBH	Saldo Awal 2023	Penambahan	Jumlah	Penyelesaian	Saldo Akhir 2023
			KMK38/KM.7/2023		KMK38/KM.7/2023	
1	2	3	4	5=3+4	6	7=5-6
1	PPh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PBB	870.193.172,00	2.443.305.894,00	3.313.499.066,00	870.193.000,00	2.443.306.066,00
3	Kehutanan	12.244.036,00	0,00	12.244.036,00	0,00	12.244.036,00
4	Minerba	98.397.024.380,00	4.576.867.154,00	102.973.891.534,00	37.911.833.000,00	65.062.058.534,00
5	Migas	716.483.900,00	0,00	716.483.900,00	0,00	716.483.900,00
6	Perikanan	173.472.924,00	295.260.621,00	468.733.545,00	0,00	468.733.545,00
7	Cukai	0,00	5.312,00	5.312,00	0,00	5.312,00
Total		100.169.418.412,00	7.315.438.981,00	107.484.857.393,00	38.782.026.000,00	68.702.831.393,00

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.3. EKUITAS	4.328.495.447.515,27	3.693.253.550.471,85

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.328.495.447.515,27 dan Rp3.693.253.550.471,85 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban yang mencakup ekuitas awal, surplus/defisit periode bersangkutan, dan dampak kumulatif akibat perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Tabel 5 . 198 Ekuitas

Uraian	31/12/2023	31/12/2022	Naik/Turun
Ekuitas Awal	3.693.253.550.471,85	3.415.589.002.337,90	277.664.548.133,95
Surplus/Defisit-Lo	337.952.269.691,83	153.989.883.521,97	183.962.386.169,86



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Uraian	31/12/2023	31/12/2022	Naik/Turun
Dampak Kumulatif Perubahan kebijakan/ koreksi kesalahan	297.289.627.351,59	123.674.664.611,98	173.614.962.739,61
Ekuitas Per 31 Desember	4.328.495.447.515,27	3.693.253.550.471,85	635.241.897.043,42

5.3.4. KEWAJIBAN DAN EKUITAS	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	4.411.938.561.173,80	3.806.252.264.856,85

Jumlah kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.411.938.561.173,80 dan Rp3.806.252.264.856,85. Jumlah kewajiban dan ekuitas dana adalah merupakan jumlah kewajiban ditambah jumlah ekuitas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 199 Kewajiban dan Ekuitas

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Jumlah Kewajiban	83.443.113.658,53	112.998.714.385,00
2	Jumlah Ekuitas	4.328.495.447.515,27	3.693.253.550.471,85
	Jumlah kewajiban dan ekuitas	4.411.938.561.173,80	3.806.252.264.856,85

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh Kegiatan Operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/(Defisit) Non-Operasional.

Tabel 5 . 200 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
Pendapatan	2.427.138.955.873,02	2.034.852.674.322,09	392.286.281.550,93	19,28
Beban	2.088.827.283.152,19	1.874.904.642.854,12	213.922.640.298,07	11,41
Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	338.311.672.720,83	159.948.031.467,97	178.363.641.252,86	111,51
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(359.403.029,00)	(233.487.499,00)	(125.915.530,00)	53,93
Pos Luar Biasa	0,00	(5.724.660.447,00)	5.724.660.447,00	(100)
Surplus/Defisit LO	337.952.269.691,83	153.989.883.521,97	183.962.386.169,86	119,46

5.4.1 PENDAPATAN – LO	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	2.427.138.955.873,02	2.034.852.674.322,09

Pendapatan - LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Banjar yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah - LO, Pendapatan Transfer - LO,



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional dengan realisasi tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5 . 201 Pendapatan - LO

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah - LO	289.316.399.954,02	214.125.298.572,46	75.191.101.381,56
2	Pendapatan Transfer - LO	2.116.560.179.927,00	1.782.116.999.667,63	334.443.180.259,37
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	21.262.375.992,00	38.610.376.082,00	(17.348.000.090,00)
	Jumlah	2.427.138.955.873,02	2.034.852.674.322,09	392.286.281.550,93

Realisasi masing-masing akun Pendapatan – LO dapat diuraikan sebagai berikut :

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah - LO	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	289.316.399.954,02	214.125.298.572,46

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp289.316.399.954,02 dan Rp214.125.298.572,46 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 . 202 Pendapatan Asli Daerah - LO

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Pajak Daerah - LO	118.499.920.519,00	99.120.716.169,00	19.379.204.350,00
2	Retribusi Daerah - LO	8.367.069.839,00	6.607.584.388,00	1.759.485.451,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	14.053.326.440,40	7.788.706.778,27	6.264.619.662,13
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	148.396.083.155,62	100.608.291.237,19	47.787.791.918,43
	Jumlah	289.316.399.954,02	214.125.298.572,46	75.191.101.381,56

Pendapatan Operasional dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5 . 203 Pendapatan Asli Daerah - LO per SKPD

No.	Nama SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Dinas Kesehatan	20.584.006.305,48	15.034.624.656,06	5.549.381.649,42
2	Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha	106.907.373.747,58	78.655.215.948,39	28.252.157.799,19
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	4.213.614.639,00	3.320.658.538,00	892.956.101,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	671.118.452,64	492.670.906,90	178.447.545,74
5	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	678.681.192,00	0,00	678.681.192,00
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	274.341.000,00	273.986.000,00	355.000,00
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	38.050.000,00	47.150.000,00	(9.100.000,00)
8	Dinas Perhubungan	803.877.000,00	928.035.000,00	(124.158.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No.	Nama SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
9	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	228.560.000,00	410.670.000,00	(182.110.000,00)
10	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	158.785.000,00	158.768.500,00	16.500,00
11	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	10.980.000,00	10.615.000,00	365.000,00
12	Dinas Pertanian	171.500.000,00	195.682.000,00	(24.182.000,00)
13	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	154.442.912.617,32	114.410.622.023,11	40.032.290.594,21
14	Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	132.600.000,00	186.600.000,00	(54.000.000,00)
	Jumlah	289.316.399.954,02	214.125.298.572,46	75.191.101.381,56

Realisasi masing-masing jenis PAD tahun 2023 dan 2022 dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah - LO	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	118.499.920.519,00	99.120.716.169,00

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banjar. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Rincian realisasi pendapatan Pajak Daerah tahun 2023 sebesar Rp118.499.920.519,00 dan tahun 2022 sebesar Rp99.120.716.169,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 . 204 Pajak Daerah - LO

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Pajak Hotel - LO	4.945.101.732,00	4.555.390.742,00	389.710.990,00
2	Pajak Restoran - LO	11.246.976.546,00	10.528.599.068,00	718.377.478,00
3	Pajak Hiburan - LO	661.216.680,00	355.025.050,00	306.191.630,00
4	Pajak Reklame - LO	3.285.562.274,00	1.229.343.927,00	1.022.995.571,00
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	34.144.504.951,00	31.008.455.267,00	2.787.096.249,00
6	Pajak Parkir - LO	1.057.715.272,00	786.142.865,00	271.572.407,00
7	Pajak Air Tanah - LO	268.613.069,00	256.925.021,00	11.688.048,00
8	Pajak Sarang Burung Walet - LO	11.665.500,00	22.123.500,00	(10.688.048,00)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	6.022.943.727,00	2.481.824.230,00	3.541.119.497,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	16.264.837.079,00	13.717.048.959,00	2.547.788.120,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	40.590.783.689,00	34.179.837.540,00	6.410.946.149,00
	Jumlah	118.499.920.519,00	99.120.716.169,00	19.379.204.350,00

Penjelasan atas Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2023 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Tabel 5 . 205 Penjelasan Pajak Daerah - LO

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a.	Pendapatan Pajak	
	Pendapatan Pajak-LRA 2023	109.824.795.009,00
b.	Penambahan	
	Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023	12.147.526.137,00
	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023	2.159.105.596,00
c.	Pengurangan	
	Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023	4.364.028.326,00
	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023	1.125.882.820,00
	Penghapusan Piutang Pajak	141.595.077,00
d.	Pendapatan Pajak-LO 2023	118.499.920.519,00

2. Retribusi - LO

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
8.367.069.839,00	6.607.584.388,00

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil. Realisasi Pendapatan Retribusi tahun 2023 sebesar Rp8.367.069.839,00 dan tahun 2022 sebesar Rp6.607.584.388,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 206 Retribusi - LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO			
Dinas Kesehatan	1.506.000.550,00	922.007.850,00	583.992.700,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO			
Dinas Perhubungan	629.120.000,00	756.849.000,00	(127.729.000,00)
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO			
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	92.767.500,00	94.721.000,00	(1.953.500,00)
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO			
Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	223.560.000,00	410.670.000,00	(187.110.000,00)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO			
Dinas Kesehatan	201.893.500,00	283.978.500,00	(82.085.000,00)
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	268.736.051,00	62.511.832,00	206.224.219,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	20.254.375,00	19.063.000,00	1.191.375,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Dinas Perhubungan	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatik, Statistik dan Persendian	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	28.536.000,0	54.611.000,00	(26.075.000,00)
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	66.017.500,00	64.047.500,00	1.970.000,00
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	750.000,00	0,00	750.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	480.000,00	0,00	480.000,00
Retribusi Terminal-LO			
Dinas Perhubungan	29.806.000,00	36.806.000,00	(7.000.000,00)
Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO			
Dinas Perhubungan	120.900.000,00	112.250.000,00	8.650.000,00
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	103.650.000,00	17.600.000,00	86.050.000,00
Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	132.600.000,00	186.600.000,00	(54.000.000,00)
Retribusi Rumah Potong Hewan-LO			
Dinas Pertanian	138.435.000,00	122.055.000,00	16.380.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO			
Dinas Perhubungan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO			
Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	10.230.000,00	10.615.000,00	(385.000,00)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO			
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	125.805.000,00	99.375.000,00	26.430.000,00
Dinas Pertanian	33.065.000,00	73.627.000,00	(40.562.000,00)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO			
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	3.926.976.171,00	3.258.146.706,00	668.829.465,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO			
Dinas Perhubungan	19.256.000,00	19.650.000,00	(394.000,00)
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO			
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	678.681.192,00	0,00	678.681.192,00
Jumlah	8.367.069.839,00	6.607.584.388,00	1.759.485.451,00

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	14.053.326.440,40	7.788.706.778,27

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dalam bentuk pendapatan Dividen dan hasil Investasi atas Penyertaan pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Daerah. Realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp14.053.326.440,40 dan tahun 2022 sebesar Rp7.788.706.778,27.

Rincian realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 . 207 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

No	URAIAN	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal BUMD (Lembaga Keuangan)			
	- Bank Kal Sel	3.260.595.556,00	3.009.261.248,00	251.334.308,00
	- PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera	1.036.599.097,37	676.146.712,45	360.452.384,92
2	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal BUMD (Aneka Usaha)			
	- PD. Baramarta	0,00	0,00	0,00
	- PD Pasar Bauntung Batuah	1.646.059.735,00	1.170.260.914,00	475.798.821,00
3	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal BUMD (Bidang Air Minum)			
	- PDAM Intan Banjar	8.110.072.052,03	2.933.037.903,82	5.177.034.148,21
	Jumlah	14.053.326.440,40	7.788.706.778,27	6.264.619.662,13

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LO dengan metode ekuitas dicatat berdasarkan jumlah keuntungan (laba) BUMD pada periode berjalan dikali dengan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Banjar. Sementara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LO dengan metode biaya yaitu pada PT Bank Kalsel dicatat berdasarkan jumlah Dividen yang diterima Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun berjalan sebesar Rp3.260.595.556,00 untuk PT. Baramartha Dividen yang disetorkan tidak bisa mengurangi investasi karena sudah defisit.

Penjelasan atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5 . 208 Penjelasan atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

No	Keterangan	Nilai
a	Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah	
	Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Berjalan-LRA 2023	8.916.250.334,00
b	Penambahan	
	Pengumuman Laba 2022 metode Ekuitas:	
	- PT. Air Minum Intan Banjar	6.247.849.867,03
	- PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera	698.512.616,37
	- Perumda Pasar Bauntung Batuah	990.713.623,00
	Jumlah Penambahan	7.937.076.106,40
c	Pengurangan	
	Dividen dari PT Baramartha	2.800.000.000,00
d.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	14.053.326.440,40



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	148.396.083.155,62	100.608.291.237,19

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Rincian realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah untuk periode tahun 2023 sebesar Rp148.396.083.155,62 dan tahun 2022 sebesar Rp100.608.291.237,19 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 209 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Hasil Penjualan Bangunan Gedung-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	20.000.000,00	29.160.000,00	(9.160.000,00)
Hasil Sewa BMD-LO			
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	210.890.300,00	213.874.300,00	(2.984.000,00)
Jasa Giro pada Kas Daerah-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	9.068.420.254,73	4.060.778.988,72	5.007.641.266,01
Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	462.869.040,47	271.501.369,96	191.367.670,51
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	8.086.301.369,88	0,00	8.086.301.369,88
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah		228.450.000,00	(228.450.000,00)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	362.368.852,12	472.084.092,99	(109.715.240,87)
Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	505.970,00	2.697.349,00	(2.191.379,00)
Pendapatan Denda Pajak Losmen-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	18.000,00	26.000,00	(8.000,00)
Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.504.960,00	597.020,00	907.940,00
Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	40.800,00	54.400,00	(13.600,00)
Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	4.590.996,00	5.568.978,00	(977.982,00)
Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	4.508.921,00	2.421.008,00	2.087.913,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	18.196.565,00	16.352.976,00	1.843.589,00
Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	5.110,00	(5.110,00)
Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.983.756,00	7.385.628,00	(5.401.872,00)
Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	29.816.597,00	12.829.630,00	16.986.967,00
Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	149.460,00	413.802,00	(264.342,00)
Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	94.806,00	167.520,00	(72.714,00)
Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	233.090,00	(233.090,00)
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	26.724.164,00	27.308.698,00	(584.534,00)
Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	97.200,00	24.000,00	73.200,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	15.000,00	(15.000,00)
Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	123.920	1.094.212,00	(970.292,00)
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	824.319,00	1.387.333,00	(563.014,00)
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.215.975,00	2.443.735,00	(227.760,00)
Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	256.482,00	0,00	256.482,00
Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	649.750,00	230.994,00	418.756,00
Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	50.860.650,00	7.650.729,00	43.209.921,00
Pendapatan Denda PBBP2-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	361.233.239,00	469.558.122,00	(108.324.883,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.129.115,00	0,00	1.129.115,00
Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO			
Dinas Perhubungan	225.000,00	80.000,00	145.000,00
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan-LO			
Dinas Perhubungan	200.000,00	0,00	200.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	58.122.955,74	1.508.760.350,75	(1.497.942.348,75)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	151.361.543,00	124.927.496,00	26.434.047,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	626.306.607,93	5.637.000,00	620.669.607,93
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	13.740.000,00	0,00	13.740.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis- Makanan dan Minuman Rapat-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	10.780.000,00	0,00	10.780.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	5.535.000,00	0,00	5.535.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	50.630.500,00	0,00	50.630.500,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	123.675.650,00	0,00	123.675.650,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.255.000,00	0,00	2.255.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	46.400.000,00	0,00	46.400.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	61.819.347,18	0,00	61.819.347,18



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Suka			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	17.039.540,00	0,00	17.039.540,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	5.376.642,79	0,00	5.376.642,79
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	945.552,00	0,00	945.552,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	9.028.690,00	0,00	9.028.690,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.578.182,00	0,00	1.578.182,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.790.910,00	0,00	1.790.910,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	36.405.767,26	0,00	36.405.767,26
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	14.876.037,99	0,00	14.876.037,99
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	731.281.372,74	0,00	731.281.372,74
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Desa-LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	101.132.168,48	0,00	101.132.168,48
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.049.505,03	0,00	2.049.505,03
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	163.000	0,00	163.000
Pendapatan dari BLUD-LO			
Dinas Kesehatan	1.255.444.410,48	2.525.618.550,06	(1.270.174.139,58)
Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha	106.907.373.747,58	78.655.215.948,39	28.252.157.799,19



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	650.864.077,64	473.607.906,90	177.256.170,74
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO			
Dinas Kesehatan	17.620.667.845,00	11.303.019.756,00	6.317.648.089,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO			
,00Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	38.050.000,00	47.150.000,00	(9.100.000,00)
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya – LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	30.000,00	(30.000,00)
Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF) – LO			
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.000.348.640,58	9.930.143,42	990.418.497,16
Jumlah	148.396.083.155,62	100.608.291.237,19	47.787.791.918,43

Penjelasan atas Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5 . 210 Penjelasan atas Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a	Lain-lain PAD yang Sah	
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA 2023	150.833.459.844,04
b	Penambahan	
	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023	9.589.300.409,00
	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023	315.390.300,00
c	Pengurangan	
	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023	12.150.908.153,42
	Penjualan Aset yang Tidak Dicatat Sebagai Pendapatan per 31 Desember 2023	191.159.244,00
d	Lain-lain PAD yang sah-LO	148.396.083.155,62

5.4.1.2. Pendapatan Transfer - LO	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	2.116.560.179.927,00	1.782.116.999.667,63

Pendapatan Transfer untuk periode tahun 2023 sebesar Rp2.116.560.179.927,00 dan tahun 2022 sebesar Rp1.782.116.999.667,63 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 211 Pendapatan Transfer - LO

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO	1.922.456.283.619,00	1.609.752.791.545,00	312.703.492.074,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO	5.672.424.000,00	0,00	5.672.424.000,00)
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO	188.431.472.308,00	172.364.208.122,63	16.067.264.185,37
4	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.116.560.179.927,00	1.782.116.999.667,63	334.443.180.259,47



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO	1.922.456.283.619,00	1.609.752.791.545,00

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan untuk periode tahun 2023 sebesar Rp1.922.456.283.619,00 dan tahun 2022 sebesar Rp1.609.752.791.545,00 terdiri atas penerimaan transfer sebagai berikut:

Tabel 5 . 212 Dana Perimbangan - LO

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak - LO	40.392.200.118,00	33.491.445.859,00	6.900.754.259,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO	819.840.695.060,00	601.869.511.528,00	217.971.183.532,00
3	Dana Alokasi Umum - LO	720.866.934.775,00	672.370.620.442,00	48.496.314.333,00
4	Dana Alokasi Khusus - LO	341.356.453.666,00	302.021.213.716,00	39.335.239.950,00
	Jumlah	1.922.456.283.619,00	1.609.752.791.545,00	312.703.492.074,00

Penjelasan masing-masing pendapatan Dana Perimbangan-LO sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil Pajak - LO

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat terdiri atas Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) dan Bagi Hasil Cukai tahun 2023 sebesar Rp40.392.200.118,00 dan tahun 2022 sebesar Rp33.491.445.859,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 213 Dana Bagi Hasil Pajak - LO

No	Dana Bagi Hasil Pajak	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan - LO	40.392.200.118,00	33.491.445.859,00	6.900.754.259,00
	Jumlah	40.392.200.118,00	33.491.445.859,00	6.900.754.259,00

Penjelasan atas Dana Bagi Hasil Pajak -LO TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5 . 214 Penjelasan atas Dana Bagi Hasil Pajak - LO

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a. Dana Bagi Hasil Pajak		
	Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LRA 2023	36.971.401.241,00
b. Penambahan		
	Penerimaan Treasury Deposite Facility (TDF) 2024 yang dicatat sebagai aset lain-lain	6.651.902.000,00
	Piutang atas kurang bayar dana transfer	3.363,00
c. Pengurangan		
	Penerimaan Treasury Deposite Facility (TDF) 2023 yang dicatat sebagai aset lain-lain	3.231.089.241,00
	Penyelesaian atas kurang bayar dana transfer	17.245,00
d. Dana Bagi Hasil Pajak -LO 2023		40.392.200.118,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terdiri atas Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam tahun 2023 sebesar Rp819.840.695.060,00 dan tahun 2022 sebesar Rp601.869.511.528,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 215 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO

No	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) – LO	901.697.000,0	5.643.996.754,00	(4.742.299.754,00)
2	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO	810.025.413.679,00	593.791.948.627,00	216.233.465.052,00
3	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan – LO	1.297.839.000,00	2.170.064.211,00	(872.225.211,00)
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi – LO	181.772.645,00	89.653.300,00	92.119.345,00
5	Bagi Hasil SDA Kehutanan - LO	411.482.736,00	173.848.636,00	237.634.100,00
6	Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Perkebunan Sawit	7.022.490.000,00	0,00	7.022.490.000,00
	Jumlah	819.840.695.060,00	601.869.511.528,00	217.971.183.532,00

Penjelasan atas Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)-LO TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5 . 216 Penjelasan atas Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)-LO

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	
	Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak-LRA 2023	564.917.111.162,00
b.	Penambahan	
	Penerimaan Treasury Deposit Facility (TDF) 2024 yang dicatat sebagai aset lain-lain	312.188.017.000,00
	Piutang atas kurang bayar dana transfer	3.124,00
c.	Pengurangan	
	Penerimaan Treasury Deposit Facility (TDF) 2023 yang dicatat sebagai aset lain-lain	37.712.821.162,00
	Penyelesaian atas kurang bayar dana transfer	19.551.615.064,00
d.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)-LO 2023	819.840.695.060,00

c. Dana Alokasi Umum

Realisasi Dana Alokasi Umum tahun 2023 sebesar Rp720.866.934.775,00 dan tahun 2022 sebesar Rp672.370.620.442,00 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

d. Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Khusus tahun 2023 sebesar Rp341.356.453.666,00 dan tahun 2022 sebesar Rp302.021.213.716,00 merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 217 Dana Alokasi Khusus

No	Dana Alokasi Khusus	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	1.185.304.399,00	1.429.544.000,00	(244.239.601,00)
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	20.173.286.550,00	14.652.667.908,00	5.520.618.642,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	1.190.252.500,00	10.201.410.500,00	(9.011.158.000,00)
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB-LO	948.973.000,00	0,00	948.973.000,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar-Penugasan Intervensi Stunting-LO	4.335.109.000,00	0,00	4.335.109.000,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO	0,00	0,00	0,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian-LO	0,00	2.718.249.468,00	(2.718.249.468,00)
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO	0,00	1.587.598.916,00	(1.587.598.916,00)
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO	0,00	1.481.660.000,00	(1.481.660.000,00)
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO	0,00	2.149.848.500,00	(2.149.848.500,00)
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)-LO	0,00	0,00	0,00
12	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya-LO	0,00	0,00	0,00
13	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO	0,00	0,00	0,00
14	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	0,00	7.158.435.041,00	(7.158.435.041,00)
15	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan-LO	0,00	618.258.650,00	(618.258.650,00)
16	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	19.501.473.000,00	20.886.214.858,00	(1.384.741.858,00)
17	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	0,00	7.796.060.000,00	(7.796.060.000,00)
18	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	12.705.266.000,00	7.878.601.000,00	4.826.665.000,00
19	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	8.322.300.000,00	3.811.750.000,00	4.510.550.000,00
20	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	0,00	5.625.746.700,00	(5.625.746.700,00)
21	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO	0,00	1.308.450.000,00	(1.308.450.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No	Dana Alokasi Khusus	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
22	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan - LO	0,00	17.884.705.679,00	(17.884.705.679,00)
23	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penugasan-Keluarga Berencana-LO	1.927.151.000,00	0,00	1.927.151.000,00
24	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	48.422.198.327,00	0,00	48.422.198.327,00
25	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	53.198.636.547,00	53.385.441.355,00	(186.804.808)
26	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	3.760.000.000,00	1.840.000.000,00	1.920.000.000,00
27	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	104.531.944.300,00	97.597.988.140,00	6.933.956.160,00
28	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	2.344.750.000,00	2.083.500.000,00	261.250.000,00
29	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	3.166.784.000,00	2.917.543.200,00	249.240.800,00
30	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	9.325.422.000,00	8.553.780.000,00	771.642.000,00
31	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	8.706.500.000,00	5.597.950.000,00	3.108.550.000,00
32	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	3.755.273.260,00	2.530.291.898,00	1.224.981.362,00
33	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan-LO	0,00	311.454.000,00	(311.454.000,00)
34	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas- LO	24.646.259.000,00	13.780.371.440,00	10.865.887.560,00
35	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan-LO	0,00	343.907.500,00	(343.907.500,00)
36	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	0,00	355.924.000,00	(355.924.000,00)
37	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO	0,00	0,00	0,00
38	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS-LO	0,00	0,00	0,00
39	DAK Non Fisik - Fasilitas Penanaman Modal - LO	354.003.000,00	365.024.100,00	(11.021.100,00)
40	DAK Non Fisik - BOKB - KB - LO	8.116.830.483,00	4.974.705.863,00	3.142.124.620,00
41	DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	738.737.300,00	194.131.000,00	544.606.300,00
	Jumlah	341.356.453.666,00	302.021.213.716,00	39.335.239.950,00

- | | | |
|---|-------------------------|-------------------|
| | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
| | (Rp) | (Rp) |
| 2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO | 5.672.424.000,00 | 0,00 |
- Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk periode tahun 2023 sebesar Rp5.672.424.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00 adalah Dana Insentif Daerah yang diterima dalam tahun 2023.

- | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|
| | Tahun 2023 | Tahun 2022 |
| | (Rp) | (Rp) |
| 3. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO | 188.431.472.308,00 | 172.364.208.122,63 |
- Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi untuk periode tahun 2023 sebesar Rp188.431.472.308,00 dan tahun 2022 sebesar Rp172.364.208.122,63 merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Tabel 5 . 218 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO

No	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	188.431.472.308,00	172.364.208.122,63	16.067.264.185,37
2	Bantuan Keuangan	0,00	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)
	Jumlah	188.431.472.308,00	173.364.208.122,63	15.067.264.185,37

a. Bagi Hasil Pajak

Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk periode tahun 2023 sebesar Rp188.431.472.308,00 dan tahun 2022 Rp172.364.208.122,63 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 219 Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

No	URAIAN	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	30.654.681.660,00	30.796.971.298,42	(142.289.638,42)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	18.165.300.468,00	16.469.568.977,39	1.695.731.490,61
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	112.285.866.082,00	98.736.111.476,71	13.549.754.605,29
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	2.226.785.450,00	570.232.648,11	1.656.552.801,89
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	25.098.838.648,00	25.791.323.722,00	(692.485.074,00)
	Jumlah	188.431.472.308,00	172.364.208.122,63	16.067.264.185,37

Penjelasan atas Bagi Hasil Pajak-LO TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5 . 220 Penjelasan atas Bagi Hasil Pajak-LO

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a.	Bagi Hasil Pajak	
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA 2023	188.402.649.001,00
b.	Penambahan	
	Piutang Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2023	51.540.079.928,00
c.	Pengurangan	
	Piutang Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2023	51.511.256.621,00
d.	Bagi Hasil Pajak -LO 2023	188.431.472.308,00

b. Bantuan Keuangan

Penerimaan Bantuan Keuangan untuk periode tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan tahun 2022 Rp1.000.000.000,00 merupakan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
4. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO	0,00	1.450.000.000,00

Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya untuk periode tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan tahun 2022 Rp1.450.000.000,00 merupakan Bantuan Keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara senilai Rp200.000.000,00 dan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara senilai Rp1.250.000.000,00 untuk penanganan bencana banjir di beberapa daerah di Kabupaten Banjar.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	21.262.375.992,00	38.610.376.082,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Pendapatan Lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp21.262.375.992,00 dan tahun 2022 sebesar Rp38.610.376.082,00 Pendapatan Lainnya merupakan Pendapatan Hibah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 221 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

No	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	11.185.207.200,00	24.847.846.496,00	(13.662.639.296,00)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	5.002.390.390,00	4.415.108.446,00	587.281.944,00
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	5.074.778.402,00	8.788.671.140,00	(3.713.892.738,00)
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	0,00	558.750.000,00	(558.750.000,00)
5	Pendapatan Hibah Dana BOS – LO	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	21.262.375.992,00	38.610.376.082,00	(17.348.000.090,00)

Penjelasan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5 . 222 Penjelasan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA	
	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA 2023	2.444.000.000,00
b.	Penambahan	
	Pendapatan Hibah berupa barang/aset	18.818.375.992,00
c.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	21.262.375.992,00

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.4.2 BEBAN	2.088.827.283.152,19	1.874.904.642.854,12

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

kewajiban. Realisasi beban tahun 2023 sebesar Rp2.088.827.283.152,19 dan tahun 2022 sebesar Rp1.874.904.642.854,12 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 223 Beban

No	Beban	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan(Rp)
1	Beban Pegawai	806.394.151.209,00	764.735.189.475,00	41.658.961.734,00
2	Beban Persediaan	142.570.443.157,19	119.794.721.001,38	22.775.722.155,81
3	Beban Jasa	315.176.530.041,53	269.343.273.864,00	45.833.256.177,53
4	Beban Pemeliharaan	60.317.371.331,07	47.842.637.319,33	12.474.734.011,74
5	Beban Perjalanan Dinas	81.780.524.671,00	59.456.090.840,00	22.324.433.831,00
6	Beban Hibah	96.460.906.540,00	51.657.149.510,98	44.803.757.029,02
7	Beban Subsidi	52.300.000,00	0,00	52.300.000,00
8	Beban Bantuan Sosial	9.816.502.295,00	10.667.986.500,00	(851.484.205,00)
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	245.256.964.507,91	271.269.867.924,70	(26.012.903.416,79)
10	Beban Penyisihan Piutang	3.864.195.802,84	4.057.950.881,44	(193.755.078,60)
11	Beban Lain-lain	174.120.823.835,65	149.882.249.176,29	24.238.574.659,36
12	Beban Bagi Hasil	8.508.135.897,00	12.138.437.549,00	(3.630.301.652,00)
13	Beban Bantuan Keuangan	144.508.433.864,00	114.059.088.812,00	30.449.345.052,00
	Jumlah	2.088.827.283.152,19	1.874.904.642.854,12	213.922.640.298,07

Penjelasan masing-masing Beban adalah sebagai berikut:

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.4.2.1. Beban Pegawai	806.394.151.209,00	764.735.189.475,00

Beban Pegawai untuk periode tahun 2023 sebesar Rp806.394.151.209,00 dan tahun 2022 sebesar Rp764.735.189.475,00 dengan rincian beban sebagai berikut:

Tabel 5 . 224 Beban Pegawai

No	Beban Pegawai	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	465.271.936.903,00	438.701.419.506,00	26.570.517.397,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	187.840.425.383,0	173.024.448.571,00	14.815.976.812,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	119.515.458.422,0	119.656.830.898,00	(141.372.476,00)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	26.690.704.239,00	26.258.775.854,00	431.928.385,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.134.476.262,00	978.983.646,00	155.492.616,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	852.000.000,00	0,00
7	Beban Pegawai BLUD	5.089.150.000,00	5.262.731.000,00	(173.581.000,00)
	Jumlah	806.394.151.209,00	764.735.189.475,00	41.658.961.734,00

Penjelasan Beban Pegawai – LO TA 2023 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Tabel 5 . 225 Penjelasan Beban Pegawai – LO

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a.	Belanja Pegawai-LRA	
	Belanja Pegawai-LRA 2023	806.633.031.475,00
b.	Penambahan	
	Reklas dari barjas BLUD	600.000,00
c	Pengurangan:	
	Beban pegawai yang direklas/kapitalisasi ke aset tetap	239.480.266,00
d	Beban Pegawai -LO TA 2023	806.394.151.209,00

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.2. Beban Persediaan	142.570.443.157,19	119.794.721.001,38

Beban Persediaan tahun 2023 sebesar Rp142.570.443.157,19 dan tahun 2022 sebesar Rp119.794.721.001,38 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 226 Beban Persediaan

No	Beban Barang	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Bahan Pakai Habis	142.434.944.157,19	118.859.250.797,38	23.575.693.359,81
2	Beban Barang Tak Pakai Habis	135.499.000,00	935.470.204,00	(799.971.204,00)
3	Beban Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00	0,00
4	Beban Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
5	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Jumlah		142.570.443.157,19	119.794.721.001,38	22.775.722.155,81

Penjelasan Beban Persediaan TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5 . 227 Penjelasan Beban Persediaan

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a.	Belanja Persediaan - LRA	
	Belanja Persediaan - LRA 2023	81.647.277.048,00
b.	Penambahan	127.243.640.850,94
	Beban Persediaan tahun 2022	18.315.794.136,94
	Belanja Modal bukan kategori aset	25.518.828.998,00
	Beban Hibah yang menjadi persediaan	1.483.554.734,00
	Reklasifikasi dari Belanja BLUD	35.523.706.604,00
	Reklasifikasi dari Belanja BOS	46.095.286.378,00
	Reklasifikasi dari BTT	306.470.000,00
c	Pengurangan:	66.320.474.741,75
	Reklasifikasi ke Beban Hibah	8.340.860.000,00
	Reklasifikasi ke Beban Jasa	18.209.859.948,00
	Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan	3.796.856.827,00
	Reklasifikasi ke Beban Perjalanan Dinas	3.313.027.324,00
	Reklasifikasi ke Beban Pegawai	600.000,00
	Reklasifikasi ke Aset Tetap	245.249.884,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No	Keterangan	Nilai (Rp)
	Reklasifikasi ke Ekstrakomtable	10.332.191.980,00
	Koreksi Persediaan	8.266.693,00
	Obat Kadalua	58.573.294,00
	Beban Persediaan Tahun 2023	22.014.988.791,75
d	Beban Persediaan-LO TA 2023	142.570.443.157,19

5.4.2.3. Beban Jasa

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
315.176.530.041,53	269.343.273.864,00

Beban Jasa tahun 2023 sebesar Rp315.176.530.041,53 dan tahun 2022 sebesar Rp269.343.273.864,00 dengan Rincian Sebagai berikut:

Tabel 5 . 228 Beban Jasa

No	Beban Jasa	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	240.292.515.365,53	212.220.425.552,00	28.072.089.813,53
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	41.247.960.500,0	27.574.684.651,00	13.673.275.849,00
3	Beban Sewa Tanah	44.190.000,00	6.600.000,00	37.590.000,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	3.245.683.320,0	1.359.071.616,00	1.886.611.704,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.023.391.000,00	4.556.986.422,00	(2.533.595.422,00)
6	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.000.000,00	45.500.000,00	(42.500.000,00)
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	44.120.000,00	49.870.000,00	(5.750.000,00)
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	10.687.313.931,00	7.952.271.349,00	2.735.042.582,00
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.834.353.712,00	3.836.393.829,00	(2.040.117,00)
10	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	0,00	0,00	0,00
11	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	777.000,00	47.400.000,00	(46.623.000,00)
12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	265.000.000,00	(265.000.000,00)
13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.753.225.213,00	11.429.070.445,00	2.324.154.768,00
Jumlah		315.176.530.041,53	269.343.273.864,00	45.833.256.177,53

Penjelasan beban jasa TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5 . 229 Penjelasan Beban Jasa

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a.	Belanja Jasa -LRA	
	Belanja Jasa-LRA 2023	335.757.588.671,00
b.	Penambahan	37.724.604.442,53
	Reklasifikasi dari Belanja Modal	1.600.000,00
	Reklasifikasi dari BTT	490.813.715,00
	Reklasifikasi dari Barjas BOS	18.152.777.498,00
	Reklasifikasi dari Barjas BLUD	5.753.559.517,00
	Utang belanja tahun 2022	13.325.853.712,53



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No	Keterangan	Nilai (Rp)
c	Pengurangan:	58.305.663.072,00
	Reklasifikasi ke Belanja Modal	3.062.434.629,00
	Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtable	26.145.610,00
	Reklasifikasi ke Persediaan	35.523.706.604,00
	Reklasifikasi ke Jasa	5.696.477.067,00
	Reklasifikasi ke Pemeliharaan	2.765.121.374,00
	Reklasifikasi ke Perjadin	929.935.539,00
	Reklasifikasi ke ATB	94.747.205,00
	Utang belanja Modal	140.840.700,00
	Utang belanja tahun 2023	10.066.254.344,00
d	Beban Jasa -LO TA 2023	315.176.530.041,53

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.4. Beban Pemeliharaan	60.317.371.331,07	47.842.637.319,33

Beban Pemeliharaan tahun 2023 sebesar Rp60.317.371.331,07 dan tahun 2022 sebesar Rp47.842.637.319,33 dengan Rincian Sebagai berikut:

Tabel 5 . 230 Beban Pemeliharaan

No	Beban Pemeliharaan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	603.219.000,00	188.216.200,00	415.002.800,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.040.936.789,20	17.297.401.829,00	3.743.534.960,20
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.725.865.394,87	10.696.546.747,33	(1.970.681.352,46)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	29.912.685.497,00	19.651.130.881,00	10.261.554.616,00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	24.813.400,00	9.341.662,00	15.471.738,00
6	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Tidak Berwujud	9.851.250,00	0,00	9.851.250,00
Jumlah		60.317.371.331,07	47.842.637.319,33	12.474.734.011,74

Penjelasan Beban Pemeliharaan TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5 . 231 Penjelasan Beban Pemeliharaan

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a.	Belanja Pemeliharaan-LRA	
	Belanja Pemeliharaan-LRA 2023	63.245.766.820,02
b.	Penambahan	10.398.656.252,19
	Reklasifikasi dari barjas BLUD	3.295.712.273,00
	Reklasifikasi dari BTT	216.482.000,00
	Reklasifikasi dari Barjas BOS	3.221.966.128,00
	Belanja Modal bukan Kategori Aset	3.620.196.051,19
	Reklasifikasi dari Beban Persediaan	44.299.800,00
c	Pengurangan:	13.327.051.741,14
	Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtable	82.639.065,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No	Keterangan	Nilai (Rp)
	Reklasifikasi ke Aset Tetap	13.244.412.676,14
d	Beban Pemeliharaan -LO TA 2023	60.317.371.331,07

5.4.2.5. Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	81.780.524.671,00	59.456.090.840,00

Beban Perjalanan Dinas tahun 2023 sebesar Rp81.780.524.671,00 dan tahun 2022 sebesar Rp59.456.090.840,00 dengan Rincian Sebagai berikut:

Tabel 5 . 232 Beban Perjalanan Dinas

No	Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	81.780.524.671,00	59.456.090.840,00	22.324.433.831,00
	Jumlah	81.780.524.671,00	59.456.090.840,00	22.324.433.831,00

Penjelasan Beban Perjalanan Dinas TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5 . 233 Penjelasan Beban Perjalanan Dinas

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a.	Belanja Perjalanan Dinas – LRA	
	Belanja Perjalanan Dinas	77.513.778.612,00
b.	Penambahan:	4.266.746.059,00
	Reklasifikasi dari Barjas BLUD	1.055.246.708,00
	Reklasifikasi dari BTT	22.533.196,00
	Reklasifikasi dari Barjas BOS	3.187.716.155,00
	Reklasifikasi dari belanja modal bukan kategori aset	1.250.000,00
c.	Pengurangan:	0,00
d.	Beban Perjalanan Dinas – LO TA 2023	81.780.524.671,00

5.4.2.6. Beban Hibah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	96.460.906.540,00	51.657.149.510,98

Beban hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah Masyarakat dan Organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Berdasarkan kelompok penerima, beban hibah tahun 2023 sebesar Rp96.460.906.540,00 tahun 2022 sebesar Rp51.657.149.510,98 terdiri atas:

Tabel 5 . 234 Beban Hibah

No	Beban Hibah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.240.800.000,00	0,00	2.240.800.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No	Beban Hibah	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
2	Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat	55.140.000,00	523.102.040,82	(467.962.040,82)
3	Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	3.816.348.246,16	(3.816.348.246,16)
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	58.736.699.741,00	25.774.280.613,00	32.962.419.128,00
5	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.252.588.968,00	0,00	1.252.588.968,00
6	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.923.551.340,00	0,00	4.923.551.340,00
7	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	23.036.986.399,00	16.544.365.250,00	6.492.621.149,00
8	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	458.700.000,00	0,00	458.700.000,00
9	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.791.000,00	5.009.653,00	(1.218.653,00)
10	Beban Hibah Barang kepada Koperasi	0,00	16.500.000,00	(16.500.000,00)
11	Beban Hibah Uang Dana BOS Yang Di Terima Oleh Satdikdas Swasta	1.779.696.585,00	1.488.660.000,00	291.036.585,00
12	Beban Hibah Uang Dana BOS Yang Di Terima Oleh Satdikmen Swasta	2.410.366.507,00	2.447.159.708,00	(36.793.201,00)
13	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.562.586.000,0	1.041.724.000,00	520.862.000,00
Jumlah		96.460.906.540,00	51.657.149.510,98	44.803.757.029,02

Penjelasan Beban Hibah TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5 . 235 Penjelasan Beban Hibah

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a	Belanja Hibah – LRA	
	Belanja Hibah	88.112.346.572,00
b.	Penambahan:	8.348.559.968,00
	Reklasifikasi dari BOS Kesetaraan swasta	8.241.470.000,00
	Reklasifikasi dari belanja modal bukan kategori aset	7.699.968,00
	Reklasifikasi dari Barjas BOS swasta	80.000.000,00
	Pengembalian belanja BOS Kesetaraan swasta	19.390.000,00
c.	Pengurangan:	0,00
d	Beban Hibah – LO TA 2023	96.460.906.540,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.4.2.7. Beban Subsidi	52.300.000,00	0,00

Beban subsidi tahun 2023 sebesar Rp52.300.000,00 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5 . 236 Beban Subsidi

No	Beban Subsidi	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Subsidi	52.300.000,00	0,00	52.300.000,00
	Jumlah	52.300.000,00	0,00	52.300.000,00

Penjelasan Beban Subsidi TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5 . 237 Penjelasan Beban Subsidi

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a	Belanja Subsidi – LRA	
	Belanja Subsidi	0,00
b.	Penambahan:	52.300.000,00
	Reklasifikasi dari Beban Tak Terduga (BTT)	52.300.000,00
c.	Pengurangan:	0,00
d.	Beban Subsidi – LO TA 2023	52.300.000,00

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.4.2.8. Beban Bantuan Sosial	9.816.502.295,00	10.667.986.500,00

Beban Bantuan Sosial tahun 2023 sebesar Rp9.816.502.295,00 dan tahun 2022 sebesar Rp10.667.986.500,00 Dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5 . 238 Beban Bantuan Sosial

No	Beban Bantuan Sosial	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	467.500.000,00	(467.500.000,00)
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	328.904.000,00	0,00	328.904.000,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	767.355.329,00	74.847.500,00	692.507.829,00
4	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	1.213.254.000,00	(1.213.254.000,00)
5	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	7.500.492.966,00	7.504.385.000,00	(3.892.034,00)
6	Beban Bantuan Sosial Barang Kepada Kelompok Masyarakat	0,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)
7	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.219.750.000,00	1.400.000.000,00	(180.250.000,00)
	Jumlah	9.816.502.295,00	10.667.986.500,00	(851.484.205,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Penjelasan Beban Bantuan Sosial TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5 . 239 Penjelasan Beban Bantuan Sosial

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a	Belanja Bantuan Sosial – LRA	
	Belanja Bantuan Sosial	5.016.009.329,00
b.	Penambahan:	4.826.960.966,00
	Reklasifikasi dari Beban Tak Terduga (BTT)	3.719.620.966,00
	Reklasifikasi dari Beban Hibah	1.107.340.000,00
c.	Pengurangan:	26.468.000,00
	Koreksi catat	26.468.000,00
d.	Beban Bantuan Sosial – LO TA 2023	9.816.502.295,00

5.4.2.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	245.256.964.507,91	271.269.867.924,70

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan Beban Penyusutan Aset Tetap dan Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2023 sebesar Rp245.256.964.507,91 dan tahun 2022 sebesar Rp271.269.867.924,70 yang terdiri atas:

Tabel 5 . 240 Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	76.290.377.571,00	73.349.430.944,14	2.940.946.626,86
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	54.234.751.270,00	49.239.138.175,68	4.995.613.094,32
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	113.623.165.948,91	147.593.325.382,88	(33.970.159.433,97)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	4.584.375,00	13.456.250,00	(8.871.875,00)
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	1.104.085.343,00	1.074.517.172,00	29.568.171,00
	Jumlah	245.256.964.507,91	271.269.867.924,70	(26.012.903.416,79)

5.4.2.10. Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	3.864.195.802,84	4.057.950.881,44

Beban Penyisihan adalah beban dari penyisihan piutang tahun 2023 sebesar Rp3.864.195.802,84 dan tahun 2022 sebesar Rp4.057.950.881,44 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 241 Beban Penyisihan Piutang

No	Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	3.899.901.509,23	4.161.169.239,03	(261.267.729,80)
2	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	(36.638.221,39)	(103.218.357,59)	66.580.136,20



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No	Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
3	Beban Penyisihan piutang MBLB	932.515,00	0,00	932.515,00
	Jumlah	3.864.195.802,84	4.057.950.881,44	(193.755.078,60)

5.4.2.11. Beban Lain-lain	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	174.120.823.835,65	149.882.249.176,29

Beban Lain-Lain merupakan beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori beban pegawai, beban barang dan jasa, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, dan beban penyisihan piutang. Dalam hal ini beban lain-lain tahun 2023 sebesar Rp174.120.823.835,65 digunakan untuk mencatat penurunan nilai investasi sebesar Rp162.961.205.727,00 dan untuk mencatat nilai aset yang dipindahkan ke Ekstrakomtable sebesar Rp11.159.618.108,65 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 242 Beban Lain-lain

No	Beban Lain-lain	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	PT Baramarta	162.961.205.727,00	143.659.276.424,00	19.301.929.303,00
2	BPR Martapura Banjar Sejahtera	0,00	0,00	0,00
3	PD Pasar Bauntung Batuah	0,00	0,00	0,00
4	PT Banjar Intan Mandiri	0,00	0,00	0,00
5	Bank Kalsel	0,00	0,00	0,00
6	PDAM intan Banjar	0,00	0,00	0,00
7	Aset Ekstrakomtable	11.159.618.108,65	6.222.972.752,29	4.936.645.356,36
	Jumlah	174.120.823.835,65	149.882.249.176,29	24.238.574.659,36

Adapun beban lain-lain yang merupakan Aset Ekstrakomtable tahun 2023 sebesar Rp11.159.618.108,65 dan tahun 2022 Sebesar Rp6.222.972.752,29 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 243 beban lain-lain yang merupakan Aset Ekstrakomtable per SKPD

No	SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan	9.798.553.386,00	5.600.269.433,00	4.198.283.953,00
2	Dinas Kesehatan	320.048.812,00	167.004.195,00	153.044.617,00
3	Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha	46.351.450,00	0,00	46.351.450,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	120.000,00	1.015.000,00	(895.000)
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	12.179.500,00	2.941.000,00	9.238.500,00
6	UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah BLUD Intan Hijau	5.907.000,00	0,00	5.907.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	17.417.000,0	3.778.000,00	13.639.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	4.800.000,00	(4.800.000,00)
9	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	22.016.332,00	11.158.000,00	10.858.332,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No	SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
10	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.131.300,00	19.840.285,00	(4.708.985,00)
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	445.000,00	1.500.000,00	(1.055.000,00)
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	894.000,00	11.900.350,00	(11.006.350,00)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	338.000,00	432.000,00	(94.000,00)
14	Dinas Perhubungan	15.109.000,00	500.000,00	14.609.000,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	17.379.019,65	6.460.000,00	10.919.019,65
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	18.664.190,00	35.240.703,00	(16.576.513,00)
17	Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	19.410.000,00	25.628.134,61	(6.218.134,61)
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	33.274.000,0	32.818.650,00	455.350,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	64.147.586,00	750.000,00	63.397.586,00
20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11.352.000,00	0,00	11.352.000,00
21	Dinas Pertanian	2.126.250,00	50.203.181,68	(48.076.931,68)
22	Sekretariat Daerah	308.908.510,0	83.987.300,00	224.921.210,00
23	Inspektorat	17.399.800,00	0,00	17.399.800,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	40.555.000,00	0,00	40.555.000,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	44.218.000,00	0,00	44.218.000,00
26	Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	62.881.000,00	2.562.000,00	60.319.000,00
27	Sekretariat DPRD	18.575.000,0	41.234.500,00	(22.659.500,00)
28	Kecamatan Kertak Hanyar	18.899.783,00	31.877.930,00	(12.978.147,00)
29	Kecamatan Astambul	3.857.483,00	0,00	3.857.483,00
30	Kecamatan Gambut	3.857.483,00	7.666.250,00	(3.808.767,00)
31	Kecamatan Martapura	109.484.584,0	9.287.500,00	100.197.084,00
32	Kecamatan Beruntung Baru	5.541.483,00	0,00	5.541.483,00
33	Kecamatan Aranio	4.467.626,00	25.080.000,00	(20.612.374,00)
34	Kecamatan Sungai Tabuk	4.547.022,00	982.000,00	3.565.022,00
35	Kecamatan Aluh-Aluh	10.957.483,00	3.000.000,00	7.957.483,00
36	Kecamatan Mataraman	3.857.483,00	4.748.500,00	(891.017,00)
37	Kecamatan Karang Intan	3.857.483,00	0,00	3.857.483,00
38	Kecamatan Simpang Empat	3.857.483,00	0,00	3.857.483,00
39	Kecamatan Pengaron	8.942.483,00	0,00	8.942.483,00
40	Kecamatan Martapura Barat	4.713.983,00	0,00	4.713.983,00
41	Kecamatan Sungai Pinang	16.675.483,00	930.000,00	15.745.483,00
42	Kecamatan Sambung Makmur	3.857.483,00	6.570.000,00	(2.712.517,00)
43	Kecamatan Martapura Timur	3.780.000,00	3.100.000,00	680.000,00
44	Kecamatan Paramasan	7.877.673,00	9.469.840,00	(1.592.167,00)
45	Kecamatan Telaga Bauntung	9.457.483,00	0,00	9.457.483,00
46	Kecamatan Tatah Makmur	3.857.483,0	10.300.000,00	(6.442.517,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No	SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
47	Kecamatan Cinta Puri	13.506.506,00	0,00	13.506.506,00
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	363.000,00	5.938.000,00	(5.575.000,00)
	Jumlah	11.159.618.108,65	6.222.972.752,29	4.936.645.356,36

5.4.2.12. Beban Bagi Hasil	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	8.508.135.897,00	12.138.437.549,00

Beban Bagi Hasil tahun 2023 sebesar Rp8.508.135.897,00 dan tahun 2022 sebesar Rp12.138.437.549,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 244 Beban Bagi Hasil

No	Beban Bagi Hasil	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Tranfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota - LO	7.680.000.000,00	11.674.896.480,00	(3.994.896.480,00)
2	Beban Tranfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa –LO	828.135.897,00	463.541.069,00	364.594.828,00
	Jumlah	8.508.135.897,00	12.138.437.549,00	(3.630.301.652)

5.4.2.13. Beban Bantuan Keuangan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	144.508.433.864,00	114.059.088.812,00

Beban Bantuan Keuangan tahun 2023 sebesar Rp144.508.433.864,00 dan tahun 2022 sebesar Rp114.059.088.812,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 245 Beban Bantuan Keuangan

No	Beban Bantuan Keuangan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Beban Bantuan Keuangan Umum Antar Daerah Kabupaten/ Kota	4.419.678.064,00	4.237.304.060,00	182.374.004,00
2	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	140.088.755.800,00	109.821.784.752,00	30.266.971.048,00
3	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	0,00	0,00	0,00
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa – LO	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	144.508.433.864,00	114.059.088.812,00	30.449.345.052,00

Penjelasan Beban Bantuan Keuangan TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5 . 246 Penjelasan Beban Bantuan Keuangan

No	Keterangan	Nilai (Rp)
a	Belanja Bantuan Keuangan – LRA	
	Belanja Bantuan Keuangan	367.089.196.864,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No	Keterangan	Nilai (Rp)
b.	Penambahan:	0,00
c.	Pengurangan:	222.580.763.000,00
	Reklasifikasi ke Pendapatan Dana Desa	222.580.763.000,00
d.	Beban Bantuan Keuangan – LO TA 2023	144.508.433.864,00

5.4.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	(359.403.029,00)	(233.487.499,00)

Kegiatan Non Operasional tahun 2023 sebesar minus Rp359.403.029,00, dan tahun 2022 sebesar minus Rp233.487.499,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 247 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

No	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	179.844.921,00	0,00	179.844.921,00
2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00
3	Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	478.674.656,00	218.029.167,00	260.645.489,00
4	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	15.458.332,00	(15.458.332,00)
5	Defisit penghapusan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
6	Defisit non operasional Lainnya	60.573.294,00	0,00	60.573.294,00
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(359.403.029,00)	(233.487.499,00)	(125.915.530,00)

Penjelasan Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional masing-masing adalah sebagai berikut:

a. Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO selama tahun 2023 sebesar Rp179.844.921,00 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 248 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO

No	Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	16.304.500,00	0,00	16.304.500,00
2	Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha	69.377.341,00	0,00	69.377.341,00
3	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00
4	Sekretariat DPRD	7.931.940,00	0,00	7.931.940,00
5	Dinsos, P3AP2KB	1.451.256,00	0,00	1.451.256,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.762.133,00	0,00	2.762.133,00
7	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	29.138.579,00	0,00	29.138.579,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	4.178.719,00	0,00	4.178.719,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No	Surplus Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
9	Kecamatan Aranio	9.800.710,00	0,00	9.800.710,00
10	Kecamatan Mataraman	3.420.915,00	0,00	3.420.915,00
11	Kecamatan Astambul	1.654.076,00	0,00	1.654.076,00
12	Kecamatan Tatah Makmur	1.146.111,00	0,00	1.146.111,00
13	Kecamatan Martapura Timur	20.702.971,00	0,00	20.702.971,00
14	Kecamatan Aluh-Aluh	7.498.343,00	0,00	7.498.343,00
15	Kecamatan Martapura	2.567.141,00	0,00	2.567.141,00
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.910.186,00	0,00	1.910.186,00
	Jumlah	179.844.921,00	0,00	179.844.921,00

b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO selama tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00.

c. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO selama tahun 2023 sebesar Rp478.674.656,00 dan tahun 2022 sebesar Rp Rp218.029.167,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 249 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

No	Defisit Penjualan/Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar	SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Defisit Penjualan Peralatan dan Mesin-LO		0,00	0,00	0,00
	Jumlah		0,00	0,00	0,00
2	Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	218.029.167,00	(218.029.167,00)
	Jumlah			218.029.167,00	(218.029.167,00)
3	Defisit Penjualan Aset Lainnya-LO	Dinas Pendidikan	197.034.236,00	0,00	197.034.236,00
		DPRKPLH	281.640.420,00	0,00	281.640.420,00
	Jumlah		478.674.656,00	0,00	478.674.656,00
Jumlah Defisit Penjualan/ Pertukaran/Aset Non Lancar			478.674.656,00	218.029.167,00	260.645.489,00

d. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO selama tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp15.458.332,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 250 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

No	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	0,00	15.458.332,00	(15.458.332,00)
	Jumlah	0,00	15.458.332,00	(15.458.332,00)



e. Defisit Non-Operasional Lainnya - LO

Defisit non operasional lainnya-LO selama tahun 2023 sebesar Rp60.573.294,00 dan tahun 2022 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 251 Defisit Non-Operasional Lainnya-LO

No	Defisit Non Operasional Lainnya - LO	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	60.573.294,00	0,00	60.573.294,00
	Jumlah	60.573.294,00	0,00	60.573.294,00

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.4.4. POS LUAR BIASA	0,00	5.724.660.447,00

Pos Luar Biasa merupakan Beban Tak Terduga yang sifatnya bukan merupakan operasi biasa, tidak sering terjadi dan berada di luar kendali entitas. Realisasi beban tak terduga untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan tahun 2022 adalah sebesar Rp5.724.660.447,00.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.4.5. SURPLUS/DEFISIT – LO	337.952.269.691,83	153.989.883.521,97

Surplus/Defisit – LO tahun 2023 sebesar Rp337.952.269.691,83 dan tahun 2022 sebesar minus Rp153.989.883.521,97 adalah selisih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 252 Surplus/Defisit – LO

No	Surplus/Defisit	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Jumlah Pendapatan-LO	2.427.138.955.873,02	2.034.852.674.322,09	392.286.281.550,93
2	Jumlah Beban	2.088.827.283.152,19	1.874.904.642.854,12	213.922.640.298,07
3	Surplus/Defisit dari Operasi	338.311.672.720,83	159.948.031.467,97	178.363.641.252,86
4	Jumlah Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(359.403.029,00)	(233.487.499,00)	(125.915.530,00)
5	Beban Tak Terduga	0,00	5.724.660.447,00	(5.724.660.447,00)
6	Surplus/Defisit- LO	337.952.269.691,83	153.989.883.521,97	183.962.386.169,86



5.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktifitas operasi, aktifitas investasi, aktifitas pembiayaan dan aktifitas non anggaran. Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD. Sisa kas di Bendahara SKPD baik Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari arus kas keluar di Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran, namun sisa dana kas di Bendahara SKPD tersebut merupakan bagian dari Kas Daerah.

Arus Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Banjar untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut :

Tabel 5 . 253 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Arus Kas Bersih Dari		Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Aktivitas Operasi	475.434.643.084,02	482.178.768.500,77
2.	Aktivitas Investasi	(412.207.925.825,96)	(214.148.331.062,57)
3.	Aktivitas Pendanaan	2.473.976.000,00	(2.000.000.000,00)
4.	Aktivitas Transitoris	0,00	0,00
Kenaikan/Penurunan Kas		65.700.693.258,06	65.700.693.258,06
5.	Saldo Awal Kas di BUD, BLUD dan Dana Kapitasi/JKN dan Dana BOS	363.419.641.282,83	97.389.203.844,63
6.	Koreksi SiLPA	0,00	0,00
7.	Saldo Akhir Kas	429.120.334.540,89	363.419.641.282,83

Rincian atas masing-masing aktivitas adalah sebagai berikut :

5.5.1 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	475.434.643.084,02	482.178.768.500,77

Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Banjar untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp475.434.643.084,02 dan Rp482.178.768.500,77 Arus kas bersih aktivitas operasi tersebut merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dengan perhitungan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Tabel 5 . 254 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Arus masuk kas dari aktivitas operasi	2.360.942.152.627,04	2.138.083.351.477,77
2	Arus keluar kas dari aktivitas operasi	1.885.507.509.543,02	1.655.904.582.977,00
Arus kas bersih dari aktivitas operasi		475.434.643.084,02	482.178.768.500,77

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Arus masuk kas dari aktivitas operasi	2.360.942.152.627,04	2.138.083.351.477,77

Arus masuk kas dari aktivitas operasi merupakan kas yang diterima dari kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi. Jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.360.942.152.627,04 dan sebesar Rp2.138.083.351.477,77 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 255 Arus masuk kas dari aktivitas operasi

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	109.824.795.009,00	93.731.388.091,00
2	Penerimaan Retribusi Daerah	8.367.069.839,00	6.599.136.034,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.916.250.334,00	7.167.770.066,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	150.622.300.600,04	93.981.898.809,77
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	36.971.401.241,00	30.260.339.373,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	564.917.111.162,00	544.605.075.302,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	720.866.934.775,00	672.370.620.442,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	341.356.453.666,00	302.021.213.716,00
9	Penerimaan Dana Insentif Daerah	5.672.424.000,00	0,00
10	Penerimaan Dana Desa	222.580.763.000,00	213.931.343.800,00
11	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil	188.402.649.001,00	172.130.565.844,00
12	Penerimaan Hibah	2.444.000.000,00	1.284.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		2.360.942.152.627,04	2.138.083.351.477,77

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2. Arus keluar kas dari aktivitas operasi	1.885.507.509.543,02	1.655.904.582.977,00

Arus keluar kas dari aktivitas operasi merupakan kas yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi dan tidak menambah ekuitas. Jumlah arus keluar kas dari aktivitas operasi untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.885.507.509.543,02 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.655.904.582.977,00 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Tabel 5 . 256 Arus keluar kas dari aktivitas operasi

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	806.633.031.475,00	764.955.869.085,00
2	Pembayaran Barang	604.259.697.529,02	486.586.621.120,00
3	Pembayaran Hibah	88.112.346.572,00	47.840.575.664,00
4	Pembayaran Bantuan Sosial	5.016.009.329,00	10.667.986.500,00
5	Pembayaran Tak Terduga	5.889.091.877,00	5.724.660.447,00
6	Pembayaran Bagi Hasil	8.508.135.897,00	12.138.437.549,00
7	Pembayaran Bantuan Keuangan	367.089.196.864,00	327.990.432.612,00
Jumlah Arus Keluar Kas		1.885.507.509.543,02	1.655.904.582.977,00

**5.5.2 ARUS KAS BERSIH DARI
 AKTIVITAS INVESTASI/
 INVESTASI ASET NON
 KEUANGAN**

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
(412.207.925.825,96)	(214.148.331.062,57)

Aktivitas investasi/investasi aset non keuangan merupakan aktivitas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi dalam satu periode akuntansi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp412.207.925.825,96) dan (Rp214.148.331.062,57) Arus kas bersih aktivitas operasi tersebut merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5 . 257 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Arus masuk kas dari aktivitas investasi/ investasi aset non keuangan	211.159.244,00	29.160.000,00
2	Arus keluar kas dari aktivitas investasi/ investasi aset non keuangan	412.419.085.069,96	214.177.491.062,57
Arus kas bersih dari aktivitas investasi/ investasi aset non keuangan		(412.207.925.825,96)	(214.148.331.062,57)

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Arus masuk kas dari aktivitas investasi/investasi aset non keuangan	211.159.244,00	29.160.000,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan merupakan kas yang diterima dari pelepasan sumber daya ekonomi selama satu periode akuntansi. Jumlah arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp211.159.244,00 dan Rp29.160.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 . 258 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	191.159.244,00	0,00
2	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	29.160.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		211.159.244,00	29.160.000,00

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2. Arus keluar kas dari aktivitas investasi/investasi aset non keuangan	412.419.085.069,96	214.177.491.062,57

Arus keluar kas dari aktivitas investasi/investasi aset non keuangan merupakan kas yang dikeluarkan untuk memperoleh sumber daya ekonomi selama satu periode akuntansi. Jumlah arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp412.419.085.069,96 dan Rp214.177.491.062,57 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 . 259 Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Perolehan Tanah	5.332.333.880,00	1.561.416.000,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	92.930.369.497,00	55.895.634.639,00
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	78.000.133.887,96	39.452.963.723,00
4	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	198.503.513.797,00	98.293.080.931,57
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.287.834.008,00	2.274.395.769,00
6	Perolehan Aset Lainnya	314.900.000,00	0,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	36.050.000.000,00	16.700.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		412.419.085.069,96	214.177.491.062,57

5.5.3. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN/ PEMBIAYAAN	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	2.473.976.000,00	(2.000.000.000,00)

Aktivitas pendanaan/pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, serta bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.473.976.000,00 dan minus



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Rp2.000.000.000,00. Arus kas bersih aktivitas operasi tersebut merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5 . 260 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Arus masuk kas dari Aktivitas Pendanaan	2.473.976.000,00	0,00
2	Arus keluar kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	2.000.000.000,00
Arus kas bersih dari aktivitas investasi/ investasi aset non keuangan		2.473.976.000,00	(2.000.000.000,00)

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1. Arus masuk kas dari Aktivitas Pendanaan	2.473.976.000,00	0,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.473.976.000,00 dan Rp0,00. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp2.473.976.000,00 tersebut merupakan Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah.

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2. Arus keluar kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	2.000.000.000,00

Arus keluar kas dari Aktivitas untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp2.000.000.000,00. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp2.000.000.000,00 tersebut merupakan Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah.

5.5.4. ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	0,00	0,00

Aktivitas transitoris/non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto selama satu periode akuntansi yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Jumlah arus kas bersih dari transitoris/non anggaran untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp0,00 dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5 . 261 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Arus masuk kas dari aktivitas transitoris/ non anggaran	116.450.387.472,83	92.810.589.231,13



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
2	Arus keluar kas dari aktivitas transitoris/ non anggaran	116.450.387.472,83	92.810.589.231,13
Arus kas bersih dari aktivitas transitoris/ non anggaran		0,00	0,00

1. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris/non anggaran	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	116.450.387.472,83	92.810.589.231,13

Jumlah arus masuk kas dari aktivitas transitoris/non anggaran untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 yaitu penerimaan perhitungan pihak ketiga masing-masing sebesar Rp116.450.387.472,83 dan Rp92.810.589.231,13 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5 . 262 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

No.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	0,00	8.329.370.176,00
2	IWP (1%)	7.889.684.407,00	233.207.406,00
3	IWP (8%)	22.872.045.414,00	20.572.003.855,00
4	IWP PPPK	0,00	471.444.327,00
5	Taspen	259.104.365,00	0,00
6	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	714.990.910,00	673.351.936,00
7	Jaminan Kematian (JKM)	2.144.979.794,00	2.021.289.520,00
8	PPh Pasal 21	30.217.342.004,00	29.327.960.042,00
9	PPh Pasal 22	1.861.349.302,58	1.216.281.548,00
10	PPh Pasal 23	1.307.006.835,73	971.159.429,00
11	PPh Pasal 25	75.676,00	0,00
12	PPh Pasal 26	93.420,00	0,00
13	PPh Pasal 4 ayat 2	5.590.201.684,08	3.054.988.077,00
14	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	41.941.863.441,44	24.555.402.368,13
15	Pajak Daerah (Makan dan Minum)	1.651.650.219,00	1.382.782.562,00
16	Lainnya	0,00	1.347.985,00
Jumlah		116.450.387.472,83	92.810.589.231,13

2. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris/non anggaran	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	116.450.387.472,83	92.810.589.231,13

Jumlah arus keluar kas dari aktivitas transitoris/non anggaran untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 yaitu pengeluaran perhitungan pihak ketiga masing-masing sebesar Rp116.450.387.472,83 dan Rp92.810.589.231,13 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Tabel 5 . 263 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

No.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai	0,00	8.329.370.176,00
2	IWP (1%)	7.889.684.407,00	233.207.406,00
3	IWP (8%)	22.872.045.414,00	20.572.003.855,00
4	IWP PPPK	0,00	471.444.327,00
5	Taspen	259.104.365,00	0,00
6	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	714.990.910,00	673.351.936,00
7	Jaminan Kematian (JKM)	2.144.979.794,00	2.021.289.520,00
8	PPh Pasal 21	30.217.342.004,00	29.327.960.042,00
9	PPh Pasal 22	1.861.349.302,58	1.216.281.548,00
10	PPh Pasal 23	1.307.006.835,73	971.159.429,00
11	PPh Pasal 25	75.676,00	0,00
12	PPh Pasal 26	93.420,00	0,00
13	PPh Pasal 4 ayat 2	5.590.201.684,08	3.054.988.077,00
14	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	41.941.863.441,44	24.555.402.368,13
15	Pajak Daerah (Makan dan Minum)	1.651.650.219,00	1.382.782.562,00
16	Lainnya	0,00	1.347.985,00
Jumlah		116.450.387.472,83	92.810.589.231,13

**5.5.5. SALDO AWAL KAS DI BUD, BLUD
 DAN DANA KAPITASI/JKN DAN
 DANA BOS**

Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
363.419.641.282,83	97.389.203.844,63

Saldo Awal Kas merupakan sisa dana kas akhir tahun lalu yang menjadi saldo awal kas tahun berjalan yang ada di BUD, BLUD dan Dana Kapitasi/JKN dan Dana BOS, dengan rincian masing-masing sebagai berikut :

Tabel 5 . 264 Saldo awal kas di BUD, BLUD dan Dana Kapitasi/JKN dan Dana BOS

No	Saldo awal kas di BUD, BLUD dan Dana Kapitasi/JKN dan Dana BOS	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	314.258.119.368,11	39.303.579.809,26
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	6.628.878,00	0,00
4	Kas BLUD	48.951.658.480,72	57.021.924.753,37
5	Kas di Bendahara Dana Kapitasi/JKN	115.141.842,00	297.861.469,00
6	Kas di Bendahara Dana BOS	88.092.714,00	765.837.813,00
Jumlah		363.419.641.282,83	97.389.203.844,63

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.5.6. KOREKSI SILPA	0,00	0,00

Koreksi SILPA adalah koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5.5.7. SALDO AKHIR KAS	429.120.334.540,89	363.419.641.282,83

Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Banjar untuk tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp429.120.334.540,89 dan sebesar Rp363.419.641.282,83 dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5 . 265 Saldo Akhir Kas

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Kenaikan/Penurunan Kas	65.700.693.258,06	266.030.437.438,20
Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, dan Dana Kapitasi/JKN dan Dana BOS	363.419.641.282,83	97.389.203.844,63
Koreksi SiLPA	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, dan Dana Kapitasi/ JKN dan Dana BOS	429.120.334.540,89	363.419.641.282,83
Saldo Akhir Kas Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Saldo Akhir Kas	429.120.334.540,89	363.419.641.282,83

5.6 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas. Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.328.495.447.515,27 dan Rp3.693.253.550.471,85 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 266 Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

No	Ekuitas	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)(Rp)	% Naik/ Turun
1	Ekuitas Awal	3.693.253.550.471,85	3.415.589.002.337,90	277.664.548.133,95	8,13
2	Surplus/Defisit - LO	337.952.269.691,83	153.989.883.521,97	183.962.386.169,86	119,46
3	Koreksi Ekuitas	297.289.627.351,59	123.674.664.611,98	173.614.962.739,61	140,38
	Jumlah	4.328.495.447.515,27	3.693.253.550.471,85	635.241.897.043,42	17,20

Jumlah Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp635.241.897.043,42 atau sebesar 17,20%. Kenaikan Ekuitas Akhir tersebut secara signifikan terdapat pada koreksi ekuitas sebesar Rp173.614.962.739,61 dibandingkan tahun sebelumnya.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

5.6.1. EKUITAS AWAL	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
	3.693.253.550.471,85	3.415.589.002.337,90

Ekuitas Awal tahun 2023 dan 2022 masing-masing berasal dari saldo ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 yang merupakan Total Aset dikurangi Total Kewajiban dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Ekuitas Awal	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)(Rp)	% Naik/ Turun
1	Aset Lancar	503.642.118.487,26	206.901.507.849,83	296.740.610.637,43	143,42
2	Investasi Jangka Panjang	1.125.223.084.012,38	1.099.114.157.043,18	26.108.926.969,20	2,38
3	Aset Tetap	2.077.596.077.723,33	2.093.431.170.154,00	(15.835.092.430,67)	-0,76
4	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	99.790.984.633,88	157.164.350.545,89	(57.373.365.912,01)	(36,51)
6	Kewajiban	112.998.714.385,00	141.022.183.255,00	(28.023.468.870,00)	(19,87)
	Jumlah	3.693.253.550.471,85	3.415.589.002.337,90	277.664.548.133,95	8,13

Jumlah ekuitas awal per 31 Desember 2023 dilihat dari sisi neraca mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp277.664.548.133,95 atau sebesar 8,13%. Kenaikan ekuitas awal tersebut secara signifikan terdapat pada kenaikan aset lancar sebesar Rp296.740.610.637,43 dibandingkan tahun sebelumnya atau sebesar 143,42%.

5.6.2. Surplus/Defisit – LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp)	(Rp)
	337.952.269.691,83	153.989.883.521,97

Surplus/(Defisit) - LO tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp337.952.269.691,83 dan Rp153.989.883.521,97 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 . 267 Surplus/Defisit – LO

No	Surplus/Defisit LO	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)(Rp)	% Naik/ Turun
1	Pendapatan - LO	2.427.138.955.873,02	2.034.852.674.322,09	392.286.281.550,93	19,28
2	Beban - LO	2.088.827.283.152,19	1.874.904.642.854,12	213.922.640.298,07	11,41
3	Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional	(359.403.029,00)	(233.487.499,00)	(125.915.530,00)	53,93
4	Beban Luar Biasa	0,00	5.724.660.447,00	(5.724.660.447,00)	(100)
	Jumlah	337.952.269.691,83	153.989.883.521,97	183.962.386.169,86	119,46

Jumlah Surplus/(Defisit) - LO per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp183.962.386.169,86 atau sebesar 119,46%. kenaikan Surplus/(Defisit) – LO tersebut secara signifikan terdapat pada kenaikan pendapatan-LO sebesar Rp392.286.281.550,93 dibandingkan tahun sebelumnya atau sebesar 19,28%.



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Rincian Surplus/(Defisit) - LO tahun 2023 dan 2022 dijelaskan lebih lanjut dalam Laporan Operasional.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	297.289.627.351,59	123.674.664.611,98

Merupakan koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas. Koreksi ekuitas tahun 2023 dan 2022 merupakan koreksi ekuitas berupa penambahan dan pengurangan masing-masing sebesar Rp297.289.627.351,59 dan Rp123.674.664.611,98

Tabel 5 . 268 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

No	Koreksi Ekuitas	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)(Rp)	% Naik/ Turun
1	Koreksi Ekuitas - Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Koreksi Ekuitas - Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Koreksi Ekuitas - Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap (Neto)	0,00	51.476.954.987,06	(51.476.954.987,06)	(100)
7	Koreksi Ekuitas - Penyusutan dan Amortisasi	0,00	0,00	0,0	0,00
8	Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Koreksi Ekuitas - Kewajiban	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Koreksi Ekuitas - Ekstrakomptable	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Koreksi Ekuitas - Lainnya	297.289.627.351,59	72.197.709.624,92	225.091.917.726,67	311,77
	Jumlah	297.289.627.351,59	123.674.664.611,98	173.614.962.739,61	140,38

Jumlah koreksi ekuitas per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp173.614.962.739,61 atau sebesar 140,38%.

a. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Koreksi Ekuitas Selisih Revaluasi Aset Tetap selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

b. Koreksi Ekuitas – Investasi

Koreksi Ekuitas – Investasi selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

c. Koreksi Ekuitas – Aset Tetap

Koreksi Ekuitas - Aset Tetap selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp51.476.954.987,06 terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

Tabel 5 . 269 Koreksi Ekuitas – Aset Tetap

No	SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)(Rp)	% Naik/ Turun
1	Dinas Pendidikan	0,00	756.047.523,02	(756.047.523,02)	(100,00)
2	Dinas Kesehatan	0,00	174.704.377,00	(174.704.377,00)	(100,00)
3	Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha	0,00	35,00	(35,00)	(100,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,00	(4.021.552.182,88)	4.021.552.182,88	100,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	0,00	42.238.008.886,37	(42.238.008.886,37)	(100,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	2.466.737.639,00	(2.466.737.639,00)	(100,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	237.323.685,00	(237.323.685,00)	(100,00)
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	1.249.318.020,32	(1.249.318.020,32)	(100,00)
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	(51.001.541,00)	51.001.541,00	100,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	1.422.021.693,00	(1.422.021.693,00)	(100,00)
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	5.849.396.672,00	(5.849.396.672,00)	(100,00)
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	(1,00)	1,00	100,00
13	Dinas Perhubungan	0,00	(96,00)	96,00	100,00
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	0,00	(143.550.001,00)	143.550.001,00	100,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	676.348.765,00	(676.348.765,00)	(100,00)
16	Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	0,00	1.597.120.923,23	(1.597.120.923,23)	(100,00)
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	15.516.959,00	(15.516.959,00)	(100,00)
18	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	4.363.339.596,00	(4.363.339.596,00)	(100,00)
19	Dinas Pertanian	0,00	(5.298.960.276,00)	5.298.960.276,00	100,00
20	Sekretariat Daerah	0,00	341.234.128,00	(341.234.128,00)	(100,00)
21	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	0,00	(69.441.647,00)	69.441.647,00	100,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	(3.302.905.235,00)	3.302.905.235,00	100,00
24	Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	22.252.082,00	(22.252.082,00)	(100,00)
25	Sekretariat DPRD	0,00	(4,00)	4,00	100,00
26	Kecamatan Kertak Hanyar	0,00	669.081.990,00	(669.081.990,00)	(100,00)
27	Kecamatan Astambul	0,00	220.650.000,00	(220.650.000,00)	(100,00)
28	Kecamatan Gambut	0,00	457.313.333,00	(457.313.333,00)	(100,00)
29	Kecamatan Karang Intan	0,00	(2,00)	2,00	100,00
30	Kecamatan Martapura	0,00	13.643.998,00	(13.643.998,00)	(100,00)
31	Kecamatan Aranio	0,00	44.641.042,00	(44.641.042,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No	SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)(Rp)	% Naik/ Turun
32	Kecamatan Sungai Tabuk	0,00	553.742.831,00	(553.742.831,00)	(100,00)
33	Kecamatan Aluh-Aluh	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Mataraman	0,00	1,00	(1,00)	(100,00)
35	Kecamatan Simpang Empat	0,00	(36.502.709,00)	36.502.709,00	100,00
36	Kecamatan Pengaron	0,00	170.109.500,00	(170.109.500,00)	(100,00)
37	Kecamatan Sungai Pinang	0,00	(1,00)	1,00	100,00
38	Kecamatan Beruntung Baru	0,00	1,00	(1,00)	(100,00)
39	Kecamatan Martapura Barat	0,00	215.705.000,00	(215.705.000,00)	(100,00)
40	Kecamatan Sambung Makmur	0,00	1,00	(1,00)	(100,00)
41	Kecamatan Martapura Timur	0,00	219.110.001,00	(219.110.001,00)	(100,00)
42	Kecamatan Paramasan	0,00	(1,00)	1,00	100,00
43	Kecamatan Tatah Makmur	0,00	206.350.002,00	(206.350.002,00)	(100,00)
44	Kecamatan Telaga Bauntung	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	0,00	221.150.000,00	(221.150.000,00)	(100,00)
46	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Koreksi Ekuitas - Aset Tetap		0,00	51.476.954.987,06	(51.476.954.987,06)	(100,00)

Koreksi Nilai Aset Tetap tersebut disebabkan adanya pencatatan aset baru atas perolehan sebelum tahun berjalan, adanya kapitalisasi aset tetap, penghapusan Sebagian aset tetap. Koreksi nilai pencatatan atas aset tetap.

d. Koreksi Ekuitas – Aset Lainnya

Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

e. Koreksi Ekuitas – Kewajiban

Koreksi Ekuitas - Kewajiban selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

f. Koreksi Ekuitas - Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya selama tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp297.289.627.351,59 dan Rp72.197.709.624,92 terdiri dari:

Tabel 5 . 270 Koreksi Ekuitas - Lainnya

No	SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
1	Dinas Pendidikan	75.039.003.147,49	69.293.737.512,00	5.745.265.635,49	8,29
2	Dinas Kesehatan	24.882.654.488,00	502.137.075,00	24.380.517.413,00	4.855,35
3	Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha	(77.644.039,61)	(20.000.000,00)	(57.644.039,61)	288,22
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	22.091.105.265,23	(61.247.285.644,00)	83.338.390.909,23	(136,07)
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	12.023.304.335,19	(1.591.563.402,66)	13.614.867.737,85	(855,44)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No	SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	115,00	(37.339.187,70)	37.339.302,70	(100,00)
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	196.374.720,00	0,00	196.374.720,00	0,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(1.451.252,00)	(21.304.000,00)	19.852.748,00	(93,19)
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	(211.412.502,00)	0,00	(211.412.502,00)	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	(4.178.734,00)	(619.946.492,00)	615.767.758,00	(99,33)
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	(2.762.134,00)	0,00	(2.762.134,00)	0,00
13	Dinas Perhubungan	250.702.457,00	0,00	250.702.457,00	0,00
14	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	417.886.110,00	0,00	417.886.110,00	0,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	28.076.423.775,23	(30.155.220.310,41)	58.231.644.085,64	(193,11)
16	Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	(5,00)	(145.394.150,00)	145.394.145,00	(100,00)
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	271.176.471,00	0,00	271.176.471,00	0,00
18	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(28.725.742,00)	(640.109.530,00)	611.383.788,00	(95,51)
19	Dinas Pertanian	(3.678.723.562,00)	(3.519.495.280,00)	(159.228.282,00)	4,52
20	Sekretariat Daerah	10.088.504.542,73	(1.956.070.168,84)	12.044.574.711,57	(615,75)
21	Inspektorat Daerah	(2,00)	0,00	(2,00)	0,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	124.895.158.054,78	105.940.828.265,93	18.954.329.788,85	17,89
24	Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,00	(37.054.300,00)	37.054.301,00	(100,00)
25	Sekretariat DPRD	(7.931.932,00)	(12.000.000,00)	4.068.068,00	(33,90)
26	Kecamatan Kertak Hanyar	1.807.141.398,00	(6.000.000,00)	1.813.141.398,00	(30.219,02)
27	Kecamatan Astambul	(37.325.129,15)	(61.209.676,00)	23.884.546,85	(39,02)
28	Kecamatan Gambut	568.369.292,00	0,00	568.369.292,00	0,00
29	Kecamatan Karang Intan	(1,00)	0,00	(1,00)	0,00
30	Kecamatan Martapura	(2.567.140,00)	(159.290.000,00)	156.722.860,00	(98,39)
31	Kecamatan Aranio	(9.800.708,00)	0,00	(9.800.708,00)	0,00
32	Kecamatan Sungai Tabuk	334.908.998,00	(34.063.926,00)	368.972.924,00	(1.083,18)
33	Kecamatan Aluh-Aluh	(7.498.344,00)	(513.377.649,00)	505.879.305,00	(98,54)
34	Kecamatan Mataraman	(3.420.915,00)	0,00	(3.420.915,00)	0,00
35	Kecamatan Simpang Empat	(9.895.441,30)	(764.881.600,00)	754.986.158,70	(98,71)
36	Kecamatan Pengaron	83.274.779,00	(565.310.899,40)	648.585.678,40	(114,73)
37	Kecamatan Sungai Pinang	1,00	0,00	1,00	0,00
38	Kecamatan Beruntung Baru	1,00	0,00	1,00	0,00
39	Kecamatan Martapura Barat	10,00	(733.464.712,00)	733.464.722,00	(100,00)
40	Kecamatan Sambung Makmur	1,00	0,00	1,00	0,00
41	Kecamatan Martapura Timur	356.017.644,00	(14.000.000,00)	370.017.644,00	(2.642,98)
42	Kecamatan Paramasan	(1,00)	0,00	(1,00)	0,00
43	Kecamatan Tatah Makmur	(1.146.111,00)	(481.610.250,00)	480.464.139,00	(99,76)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023 DAN 2022

No	SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	% Naik/ Turun
44	Kecamatan Telaga Bauntung	(1,00)	(135.002.050,00)	135.002.049,00	(100,00)
45	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	(5.984.374,00)	0,00	(5.984.374,00)	0,00
46	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	(1.910.186,00)	0,00	(1.910.186,00)	0,00
47	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1,00	(68.000.000,00)	68.000.001,00	(100,00)
Jumlah Koreksi Ekuitas - Lainnya		297.289.627.351,59	72.197.709.624,92	225.091.917.726,67	311,77

koreksi ekuitas lainnya diperoleh dari adanya mutasi aset tetap antar SKPD, pencatatan aset baru, koreksi atas pencatatan aset, penghapusan sebagian aset, koreksi nilai akumulasi aset rusak berat (aset lain-lain), mencatat penyesuaian penambahan dan penyelesaian dana transfer dari pemerintah pusat/, koreksi atas investasi jangka panjang.

5.6.4. EKUITAS AKHIR	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	4.328.495.447.515,27	3.693.253.550.471,85

Nilai Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.328.495.447.515,27 dan Rp3.693.253.550.471,85. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan Saldo Awal Ekuitas, Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.



BAB VI

PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan Laporan dengan penjelasan secara Naratif, Analisis atau Daftar Terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca Laporan dalam mengevaluasi Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2023.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu meridho'i setiap langkah kita bersama dan senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi kepentingan Bangsa, Negara serta Daerah.

Martapura, 30 April 2024
BUPATI BANJAR,

H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom 

LAMPIRAN

**Rincian Pendapatan per-SKPD
Tahun Anggaran 2023**

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Pendapatan	
		Anggaran	Realisasi
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	23.320.135.276,00	20.581.551.405,48
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	96.500.000.000,00	109.219.792.431,58
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	4.987.500.000,00	4.207.758.939,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	12.657.375,00	20.254.375,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	36.285.600,00	678.681.192,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	194.750.000,00	154.341.000,00
12	UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah _ BLUD Intan Hijau	750.000.000,00	650.864.077,64
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	40.000.000,00	38.050.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00
15	Dinas Perhubungan	860.000.000,00	803.877.000,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	455.000.000,00	228.560.000,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	165.000.000,00	158.785.000,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	13.320.000,00	10.980.000,00
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	0,00
21	Dinas Pertanian	243.550.000,00	171.500.000,00
22	Sekretariat Daerah	0,00	0,00
23	Sekretariat DPRD	0,00	0,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2.104.437.291.587,00	2.224.095.716.450,34
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	250.000.000,00	132.600.000,00
27	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
28	Kecamatan Sambung Makmur	0,00	0,00
29	Kecamatan Pengaron	0,00	0,00
30	Kecamatan Tatah Makmur	0,00	0,00
31	Kecamatan Martapura Timur	0,00	0,00
32	Kecamatan Paramasan	0,00	0,00
33	Kecamatan Kertak Hanyar	0,00	0,00
34	Kecamatan Aluh-Aluh	0,00	0,00
35	Kecamatan Martapura	0,00	0,00
36	Kecamatan Martapura Barat	0,00	0,00
37	Kecamatan Simpang Empat	0,00	0,00
38	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	0,00	0,00
39	Kecamatan Beruntung Baru	0,00	0,00
40	Kecamatan Karang Intan	0,00	0,00
41	Kecamatan Aranio	0,00	0,00
42	Kecamatan Mataraman	0,00	0,00
43	Kecamatan Sungai Tabuk	0,00	0,00
44	Kecamatan Sungai Pinang	0,00	0,00
45	Kecamatan Gambut	0,00	0,00
46	Kecamatan Telaga Bauntung	0,00	0,00
47	Kecamatan Astambul	0,00	0,00
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00
TOTAL		2.232.265.489.838,00	2.361.153.311.871,04

**Rincian Belanja Pegawai per-SKPD
Tahun Anggaran 2023**

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Belanja Pegawai	
		Anggaran	Realisasi
1	Dinas Pendidikan	536.988.843.014,00	379.935.905.732,00
2	Dinas Kesehatan	132.276.485.703,00	120.111.333.331,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	65.048.764.694,00	59.659.199.956,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	9.181.691.393,00	8.366.474.365,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	9.112.694.473,00	8.363.758.489,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	5.531.953.466,00	5.124.493.147,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.200.487.538,00	3.062.306.905,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	2.679.463.439,00	2.586.101.973,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.815.137.526,00	5.126.026.991,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.535.911.751,00	3.335.707.181,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	6.057.608.237,00	5.742.832.252,00
12	UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah _ BLUD Intan Hijau	9.600.000,00	9.000.000,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.760.565.742,00	3.233.757.138,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.943.359.692,00	3.803.395.708,00
15	Dinas Perhubungan	4.753.474.323,00	4.184.425.833,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	4.038.076.561,00	3.659.955.269,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	6.270.690.658,00	6.005.699.741,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.547.913.749,00	4.219.567.868,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	5.591.119.486,00	5.043.312.666,00
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.245.177.224,00	3.065.343.707,00
21	Dinas Pertanian	25.675.468.328,00	24.283.739.336,00
22	Sekretariat Daerah	18.276.326.189,00	17.842.577.384,00
23	Sekretariat DPRD	33.653.964.445,00	30.654.112.951,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	6.012.915.911,00	4.959.806.145,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	44.032.034.994,00	36.759.793.907,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.188.315.863,00	4.848.785.501,00
27	Inspektorat Daerah	8.732.108.698,00	8.379.828.193,00
28	Kecamatan Sambung Makmur	1.412.203.068,00	1.276.958.967,00
29	Kecamatan Pengaron	1.896.448.094,00	1.641.926.528,00
30	Kecamatan Tatah Makmur	1.699.568.626,00	1.625.338.053,00
31	Kecamatan Martapura Timur	2.176.587.979,00	1.828.034.799,00
32	Kecamatan Paramasan	1.442.071.330,00	1.156.504.816,00
33	Kecamatan Kertak Hanyar	3.719.696.492,00	3.186.199.493,00
34	Kecamatan Aluh-Aluh	1.619.850.396,00	1.347.447.932,00
35	Kecamatan Martapura	8.153.410.559,00	7.945.106.668,00
36	Kecamatan Martapura Barat	1.673.801.429,00	1.564.029.050,00
37	Kecamatan Simpang Empat	1.552.118.983,00	1.499.592.568,00
38	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	1.582.694.511,00	1.227.145.763,00
39	Kecamatan Beruntung Baru	1.769.174.091,00	1.612.831.112,00
40	Kecamatan Karang Intan	2.142.514.567,00	1.817.938.734,00
41	Kecamatan Aranio	1.809.846.160,00	1.664.806.642,00
42	Kecamatan Mataraman	1.914.559.946,00	1.571.843.810,00
43	Kecamatan Sungai Tabuk	2.762.190.786,00	2.226.142.625,00
44	Kecamatan Sungai Pinang	1.478.833.545,00	1.358.830.849,00
45	Kecamatan Gambut	3.684.991.860,00	3.308.407.569,00
46	Kecamatan Telaga Bauntung	1.563.838.986,00	1.360.239.332,00
47	Kecamatan Astambul	1.915.209.841,00	1.667.877.816,00
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.517.770.215,00	3.378.586.680,00
TOTAL		1.006.647.534.561,00	806.633.031.475,00

**Rincian Belanja Barang dan Jasa per-SKPD
Tahun Anggaran 2023**

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Belanja Barang dan Jasa	
		Anggaran	Realisasi
1	Dinas Pendidikan	103.378.053.119,00	99.119.081.992,00
2	Dinas Kesehatan	122.683.419.291,00	109.186.802.436,82
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	96.665.381.300,00	88.967.646.247,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	51.548.649.649,00	46.161.006.535,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	46.456.658.087,00	44.472.460.351,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	6.410.776.728,00	6.270.393.761,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.725.429.343,00	4.920.107.634,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	4.041.541.065,00	3.746.973.734,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19.026.396.015,00	16.854.675.717,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	3.352.335.475,00	3.001.579.037,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	4.693.614.263,00	4.556.807.029,00
12	UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah _ BLUD Intan Hijau	5.553.956.670,00	5.621.809.204,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.933.345.000,00	4.816.015.964,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	8.709.550.296,00	7.832.145.572,00
15	Dinas Perhubungan	4.142.702.254,00	3.961.839.933,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	12.624.853.739,00	12.371.810.371,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	7.471.504.824,00	6.942.022.962,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.634.472.753,00	4.469.806.847,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	13.696.229.978,00	13.383.425.097,00
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.781.078.946,00	1.686.886.329,00
21	Dinas Pertanian	10.920.140.011,00	9.988.469.122,00
22	Sekretariat Daerah	21.514.648.635,00	19.989.863.769,00
23	Sekretariat DPRD	44.145.311.537,00	36.851.566.504,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	7.326.072.019,00	6.937.097.492,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	9.740.950.675,00	9.295.631.264,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.586.691.000,00	7.410.829.080,20
27	Inspektorat Daerah	3.766.541.503,00	2.958.729.113,00
28	Kecamatan Sambung Makmur	601.908.375,00	566.300.135,00
29	Kecamatan Pengaron	598.464.786,00	576.152.154,00
30	Kecamatan Tatah Makmur	583.914.906,00	564.021.045,00
31	Kecamatan Martapura Timur	607.543.072,00	584.090.788,00
32	Kecamatan Paramasan	588.266.177,00	543.511.750,00
33	Kecamatan Kertak Hanyar	1.866.162.329,00	1.827.205.265,00
34	Kecamatan Aluh-Aluh	630.436.205,00	624.592.710,00
35	Kecamatan Martapura	3.469.325.713,00	3.350.564.149,00
36	Kecamatan Martapura Barat	693.583.150,00	664.172.969,00
37	Kecamatan Simpang Empat	575.444.940,00	551.403.220,00
38	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	575.782.650,00	515.658.143,00
39	Kecamatan Beruntung Baru	593.632.600,00	572.031.512,00
40	Kecamatan Karang Intan	782.589.990,00	767.691.733,00
41	Kecamatan Aranio	648.812.904,00	572.399.658,00
42	Kecamatan Mataraman	664.882.800,00	661.696.431,00
43	Kecamatan Sungai Tabuk	1.043.052.050,00	962.381.586,00
44	Kecamatan Sungai Pinang	647.844.105,00	530.461.415,00
45	Kecamatan Gambut	2.548.612.574,00	2.457.696.414,00
46	Kecamatan Telaga Bauntung	590.645.000,00	572.706.267,00
47	Kecamatan Astambul	578.873.000,00	565.345.754,00
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.939.277.715,00	4.454.131.334,00
TOTAL		658.359.359.216,00	604.259.697.529,02

**Rincian Belanja Hibah per-SKPD
Tahun Anggaran 2023**

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Belanja Hibah	
		Anggaran	Realisasi
1	Dinas Pendidikan	14.409.850.894,00	14.311.539.491,00
2	Dinas Kesehatan	680.180.350,00	676.366.119,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	24.157.833.000,00	22.689.342.700,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00
12	UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah _ BLUD Intan Hijau	0,00	0,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00
15	Dinas Perhubungan	2.264.500.000,00	2.240.800.000,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	0,00	0,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3.378.916.900,00	3.184.380.861,00
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	0,00
21	Dinas Pertanian	0,00	0,00
22	Sekretariat Daerah	9.613.626.400,00	9.372.660.011,00
23	Sekretariat DPRD	0,00	0,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	0,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	180.000.000,00	169.531.390,00
27	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
28	Kecamatan Sambung Makmur	0,00	0,00
29	Kecamatan Pengaron	0,00	0,00
30	Kecamatan Tatah Makmur	0,00	0,00
31	Kecamatan Martapura Timur	0,00	0,00
32	Kecamatan Paramasan	0,00	0,00
33	Kecamatan Kertak Hanyar	0,00	0,00
34	Kecamatan Aluh-Aluh	0,00	0,00
35	Kecamatan Martapura	0,00	0,00
36	Kecamatan Martapura Barat	0,00	0,00
37	Kecamatan Simpang Empat	0,00	0,00
38	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	0,00	0,00
39	Kecamatan Beruntung Baru	0,00	0,00
40	Kecamatan Karang Intan	0,00	0,00
41	Kecamatan Aranio	0,00	0,00
42	Kecamatan Mataraman	0,00	0,00
43	Kecamatan Sungai Tabuk	0,00	0,00
44	Kecamatan Sungai Pinang	0,00	0,00
45	Kecamatan Gambut	0,00	0,00
46	Kecamatan Telaga Bauntung	0,00	0,00
47	Kecamatan Astambul	0,00	0,00
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	35.565.381.000,00	35.467.726.000,00
TOTAL		90.250.288.544,00	88.112.346.572,00

**Rincian Belanja Bantuan Sosial per-SKPD
Tahun Anggaran 2023**

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Belanja Bantuan Sosial	
		Anggaran	Realisasi
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	771.398.550,00	767.355.329,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.319.295.000,00	2.248.654.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00
12	UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah _ BLUD Intan Hijau	0,00	0,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00
15	Dinas Perhubungan	0,00	0,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	0,00	0,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	0,00
21	Dinas Pertanian	0,00	0,00
22	Sekretariat Daerah	0,00	0,00
23	Sekretariat DPRD	0,00	0,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	0,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
27	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
28	Kecamatan Sambung Makmur	0,00	0,00
29	Kecamatan Pengaron	0,00	0,00
30	Kecamatan Tatah Makmur	0,00	0,00
31	Kecamatan Martapura Timur	0,00	0,00
32	Kecamatan Paramasan	0,00	0,00
33	Kecamatan Kertak Hanyar	0,00	0,00
34	Kecamatan Aluh-Aluh	0,00	0,00
35	Kecamatan Martapura	0,00	0,00
36	Kecamatan Martapura Barat	0,00	0,00
37	Kecamatan Simpang Empat	0,00	0,00
38	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	0,00	0,00
39	Kecamatan Beruntung Baru	0,00	0,00
40	Kecamatan Karang Intan	0,00	0,00
41	Kecamatan Aranio	0,00	0,00
42	Kecamatan Mataraman	0,00	0,00
43	Kecamatan Sungai Tabuk	0,00	0,00
44	Kecamatan Sungai Pinang	0,00	0,00
45	Kecamatan Gambut	0,00	0,00
46	Kecamatan Telaga Bauntung	0,00	0,00
47	Kecamatan Astambul	0,00	0,00
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00
TOTAL		5.090.693.550,00	5.016.009.329,00

Rincian Belanja Modal - Tanah per-SKPD
Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Tanah	
		Anggaran	Realisasi
1	Dinas Pendidikan	8.000.000.000,00	5.331.895.000,00
2	Dinas Kesehatan	20.000.000,00	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	400.000.000,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	300.000.000,00	438.880,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00
12	UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah _ BLUD Intan Hijau	0,00	0,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00
15	Dinas Perhubungan	0,00	0,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	0,00	0,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	0,00
21	Dinas Pertanian	0,00	0,00
22	Sekretariat Daerah	0,00	0,00
23	Sekretariat DPRD	0,00	0,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	0,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
27	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
28	Kecamatan Sambung Makmur	0,00	0,00
29	Kecamatan Pengaron	0,00	0,00
30	Kecamatan Tatah Makmur	0,00	0,00
31	Kecamatan Martapura Timur	0,00	0,00
32	Kecamatan Paramasan	0,00	0,00
33	Kecamatan Kertak Hanyar	0,00	0,00
34	Kecamatan Aluh-Aluh	0,00	0,00
35	Kecamatan Martapura	0,00	0,00
36	Kecamatan Martapura Barat	0,00	0,00
37	Kecamatan Simpang Empat	0,00	0,00
38	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	0,00	0,00
39	Kecamatan Beruntung Baru	0,00	0,00
40	Kecamatan Karang Intan	0,00	0,00
41	Kecamatan Aranio	0,00	0,00
42	Kecamatan Mataraman	0,00	0,00
43	Kecamatan Sungai Tabuk	0,00	0,00
44	Kecamatan Sungai Pinang	0,00	0,00
45	Kecamatan Gambut	0,00	0,00
46	Kecamatan Telaga Bauntung	0,00	0,00
47	Kecamatan Astambul	0,00	0,00
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00
TOTAL		8.720.000.000,00	5.332.333.880,00

Rincian Belanja Modal - Peralatan dan Mesin per-SKPD
Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Peralatan dan Mesin	
		Anggaran	Realisasi
1	Dinas Pendidikan	10.647.053.249,00	9.991.225.336,00
2	Dinas Kesehatan	42.104.338.150,00	36.368.622.210,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	13.503.955.995,00	10.210.195.781,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	4.145.172.000,00	3.761.953.950,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	5.474.960.245,00	5.317.692.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	636.422.000,00	618.796.400,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	287.170.200,00	283.234.997,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	337.786.250,00	336.448.735,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.392.349.000,00	1.349.151.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	609.917.750,00	590.271.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00
12	UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah _ BLUD Intan Hijau	1.932.741.000,00	1.575.747.000,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	88.504.250,00	85.990.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.100.000,00	2.100.000,00
15	Dinas Perhubungan	1.555.203.955,00	1.507.307.000,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	558.049.580,00	557.308.000,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	240.713.000,00	238.377.300,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.294.974.870,00	4.196.014.500,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.395.120.875,00	1.350.512.176,00
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	151.850.000,00	149.999.000,00
21	Dinas Pertanian	643.940.000,00	576.607.118,00
22	Sekretariat Daerah	6.995.009.872,00	6.730.981.000,00
23	Sekretariat DPRD	2.273.285.050,00	1.072.304.000,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	543.931.600,00	511.571.000,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	897.714.000,00	853.488.594,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	898.221.000,00	875.904.000,00
27	Inspektorat Daerah	673.424.807,00	635.150.000,00
28	Kecamatan Sambung Makmur	93.087.000,00	88.615.307,00
29	Kecamatan Pengaron	74.268.900,00	73.949.000,00
30	Kecamatan Tatah Makmur	81.845.000,00	78.900.000,00
31	Kecamatan Martapura Timur	44.350.000,00	40.638.566,00
32	Kecamatan Paramasan	553.085.000,00	519.300.000,00
33	Kecamatan Kertak Hanyar	229.206.580,00	227.021.300,00
34	Kecamatan Aluh-Aluh	66.288.420,00	64.160.000,00
35	Kecamatan Martapura	564.055.540,00	534.601.860,00
36	Kecamatan Martapura Barat	72.440.000,00	70.256.500,00
37	Kecamatan Simpang Empat	31.912.000,00	29.579.000,00
38	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	55.704.000,00	54.021.587,00
39	Kecamatan Beruntung Baru	33.527.400,00	31.307.400,00
40	Kecamatan Karang Intan	40.250.000,00	40.250.000,00
41	Kecamatan Aranio	47.700.999,00	46.626.000,00
42	Kecamatan Mataraman	25.050.000,00	25.050.000,00
43	Kecamatan Sungai Tabuk	103.619.000,00	101.354.438,00
44	Kecamatan Sungai Pinang	30.847.000,00	28.047.000,00
45	Kecamatan Gambut	226.698.000,00	224.664.703,00
46	Kecamatan Telaga Bauntung	32.415.000,00	31.814.000,00
47	Kecamatan Astambul	50.137.000,00	43.667.739,00
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	849.436.000,00	829.593.000,00
TOTAL		105.589.831.537,00	92.930.369.497,00

Rincian Belanja Modal - Gedung dan Bangunan per-SKPD
Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Gedung dan Bangunan	
		Anggaran	Realisasi
1	Dinas Pendidikan	35.943.406.873,00	34.243.088.094,00
2	Dinas Kesehatan	17.741.899.837,00	17.061.511.283,85
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	1.305.210.000,00	941.610.100,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	11.562.598.188,00	9.727.003.214,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	3.575.441.447,00	3.487.742.907,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	244.544.164,00	242.920.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	70.200.000,00	68.552.000,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	70.200.000,00	69.648.800,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.927.535.919,00	1.854.884.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	70.200.000,00	68.768.740,00
12	UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah _ BLUD Intan Hijau	545.000.000,00	519.430.000,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	73.140.000,00	69.500.000,00
15	Dinas Perhubungan	740.588.000,00	733.839.000,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	320.200.000,00	317.370.550,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	915.200.000,00	856.477.132,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	276.600.000,00	239.000.000,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.286.329.150,00	1.174.077.375,14
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	72.300.000,00	65.900.000,00
21	Dinas Pertanian	2.129.700.000,00	2.029.603.000,00
22	Sekretariat Daerah	1.790.958.725,00	1.449.580.310,17
23	Sekretariat DPRD	1.040.200.000,00	210.760.000,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	70.500.000,00	62.311.000,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	0,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	743.095.000,00	742.012.644,80
27	Inspektorat Daerah	130.750.000,00	59.201.137,00
28	Kecamatan Sambung Makmur	71.100.000,00	71.100.000,00
29	Kecamatan Pengaron	60.000.000,00	59.889.000,00
30	Kecamatan Tatah Makmur	71.400.000,00	69.883.000,00
31	Kecamatan Martapura Timur	215.611.886,00	214.494.000,00
32	Kecamatan Paramasan	71.100.000,00	70.691.000,00
33	Kecamatan Kertak Hanyar	71.100.000,00	70.400.000,00
34	Kecamatan Aluh-Aluh	71.100.000,00	69.050.000,00
35	Kecamatan Martapura	233.074.600,00	232.754.600,00
36	Kecamatan Martapura Barat	72.000.000,00	71.314.000,00
37	Kecamatan Simpang Empat	71.100.000,00	70.911.000,00
38	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	71.100.000,00	70.187.000,00
39	Kecamatan Beruntung Baru	71.100.000,00	70.691.000,00
40	Kecamatan Karang Intan	70.200.000,00	69.730.000,00
41	Kecamatan Aranio	70.200.000,00	69.569.000,00
42	Kecamatan Mataraman	12.300.000,00	12.300.000,00
43	Kecamatan Sungai Tabuk	72.300.000,00	71.530.000,00
44	Kecamatan Sungai Pinang	70.200.000,00	69.365.000,00
45	Kecamatan Gambut	71.100.000,00	70.155.000,00
46	Kecamatan Telaga Bauntung	70.200.000,00	69.869.000,00
47	Kecamatan Astambul	70.200.000,00	69.760.000,00
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	61.743.700,00	61.700.000,00
TOTAL		84.364.027.489,00	78.000.133.887,96

Rincian Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan per-SKPD
Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Jalan Jaringan dan Irigasi	
		Anggaran	Realisasi
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	199.701.087.667,00	183.944.455.005,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	12.905.256.177,00	12.637.591.433,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00
12	UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah _ BLUD Intan Hijau	325.000.000,00	314.382.000,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00
15	Dinas Perhubungan	0,00	0,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	0,00	0,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	0,00
21	Dinas Pertanian	0,00	0,00
22	Sekretariat Daerah	0,00	0,00
23	Sekretariat DPRD	0,00	0,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	0,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00
27	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
28	Kecamatan Sambung Makmur	0,00	0,00
29	Kecamatan Pengaron	0,00	0,00
30	Kecamatan Tatah Makmur	0,00	0,00
31	Kecamatan Martapura Timur	0,00	0,00
32	Kecamatan Paramasan	0,00	0,00
33	Kecamatan Kertak Hanyar	441.570.520,00	437.926.559,00
34	Kecamatan Aluh-Aluh	0,00	0,00
35	Kecamatan Martapura	692.587.800,00	671.503.800,00
36	Kecamatan Martapura Barat	0,00	0,00
37	Kecamatan Simpang Empat	0,00	0,00
38	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	0,00	0,00
39	Kecamatan Beruntung Baru	0,00	0,00
40	Kecamatan Karang Intan	0,00	0,00
41	Kecamatan Aranio	0,00	0,00
42	Kecamatan Mataraman	0,00	0,00
43	Kecamatan Sungai Tabuk	150.750.000,00	150.750.000,00
44	Kecamatan Sungai Pinang	0,00	0,00
45	Kecamatan Gambut	346.905.000,00	346.905.000,00
46	Kecamatan Telaga Bauntung	0,00	0,00
47	Kecamatan Astambul	0,00	0,00
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00
TOTAL		214.563.157.164,00	198.503.513.797,00

Rincian Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya per-SKPD
Tahun Anggaran 2023

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Aset Tetap Lainnya	
		Anggaran	Realisasi
1	Dinas Pendidikan	935.261.640,00	927.701.240,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,00	0,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00
12	UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah _ BLUD Intan Hijau	0,00	0,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	61.960.000,00	61.345.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00
15	Dinas Perhubungan	60.000.000,00	59.350.000,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	0,00	0,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	90.000.000,00	89.698.268,00
21	Dinas Pertanian	0,00	0,00
22	Sekretariat Daerah	0,00	0,00
23	Sekretariat DPRD	43.280.000,00	39.939.500,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	25.980.000,00	24.800.000,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	85.000.000,00	85.000.000,00
27	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
28	Kecamatan Sambung Makmur	0,00	0,00
29	Kecamatan Pengaron	0,00	0,00
30	Kecamatan Tatah Makmur	0,00	0,00
31	Kecamatan Martapura Timur	0,00	0,00
32	Kecamatan Paramasan	0,00	0,00
33	Kecamatan Kertak Hanyar	0,00	0,00
34	Kecamatan Aluh-Aluh	0,00	0,00
35	Kecamatan Martapura	0,00	0,00
36	Kecamatan Martapura Barat	0,00	0,00
37	Kecamatan Simpang Empat	0,00	0,00
38	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	0,00	0,00
39	Kecamatan Beruntung Baru	0,00	0,00
40	Kecamatan Karang Intan	0,00	0,00
41	Kecamatan Aranio	0,00	0,00
42	Kecamatan Mataraman	0,00	0,00
43	Kecamatan Sungai Tabuk	0,00	0,00
44	Kecamatan Sungai Pinang	0,00	0,00
45	Kecamatan Gambut	0,00	0,00
46	Kecamatan Telaga Bauntung	0,00	0,00
47	Kecamatan Astambul	0,00	0,00
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00
TOTAL		1.301.481.640,00	1.287.834.008,00

**Rincian Belanja Modal - Aset Lainnya per-SKPD
Tahun Anggaran 2023**

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Aset Lainnya	
		Anggaran	Realisasi
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	0,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	0,00	0,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	0,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	0,00	0,00
12	UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah _ BLUD Intan Hijau	0,00	0,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00
15	Dinas Perhubungan	0,00	0,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	0,00	0,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	0,00	0,00
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	0,00
21	Dinas Pertanian	0,00	0,00
22	Sekretariat Daerah	0,00	0,00
23	Sekretariat DPRD	0,00	0,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	0,00	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	65.000.000,00	64.900.000,00
27	Inspektorat Daerah	0,00	0,00
28	Kecamatan Sambung Makmur	0,00	0,00
29	Kecamatan Pengaron	0,00	0,00
30	Kecamatan Tatah Makmur	0,00	0,00
31	Kecamatan Martapura Timur	0,00	0,00
32	Kecamatan Paramasan	0,00	0,00
33	Kecamatan Kertak Hanyar	0,00	0,00
34	Kecamatan Aluh-Aluh	0,00	0,00
35	Kecamatan Martapura	0,00	0,00
36	Kecamatan Martapura Barat	0,00	0,00
37	Kecamatan Simpang Empat	0,00	0,00
38	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	0,00	0,00
39	Kecamatan Beruntung Baru	0,00	0,00
40	Kecamatan Karang Intan	0,00	0,00
41	Kecamatan Aranio	0,00	0,00
42	Kecamatan Mataraman	0,00	0,00
43	Kecamatan Sungai Tabuk	0,00	0,00
44	Kecamatan Sungai Pinang	0,00	0,00
45	Kecamatan Gambut	0,00	0,00
46	Kecamatan Telaga Bauntung	0,00	0,00
47	Kecamatan Astambul	0,00	0,00
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00
TOTAL		315.000.000,00	314.900.000,00

**Rincian Belanja Modal per-SKPD
Tahun Anggaran 2023**

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Belanja Modal	
		Anggaran	Realisasi
1	Dinas Pendidikan	55.525.721.762,00	50.493.909.670,00
2	Dinas Kesehatan	59.866.237.987,00	53.430.133.493,85
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	15.209.165.995,00	11.151.805.881,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	215.708.857.855,00	197.433.851.049,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	21.955.657.869,00	21.443.026.340,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	880.966.164,00	861.716.400,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	357.370.200,00	351.786.997,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	407.986.250,00	406.097.535,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.319.884.919,00	3.204.035.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	609.917.750,00	590.271.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	70.200.000,00	68.768.740,00
12	UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah _ BLUD Intan Hijau	2.802.741.000,00	2.409.559.000,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	150.464.250,00	147.335.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	75.240.000,00	71.600.000,00
15	Dinas Perhubungan	2.355.791.955,00	2.300.496.000,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	878.249.580,00	874.678.550,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	1.155.913.000,00	1.094.854.432,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.571.574.870,00	4.435.014.500,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.681.450.025,00	2.524.589.551,14
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	314.150.000,00	305.597.268,00
21	Dinas Pertanian	2.773.640.000,00	2.606.210.118,00
22	Sekretariat Daerah	8.785.968.597,00	8.180.561.310,17
23	Sekretariat DPRD	3.356.765.050,00	1.323.003.500,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	614.431.600,00	573.882.000,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.173.694.000,00	1.128.288.594,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.791.316.000,00	1.767.816.644,80
27	Inspektorat Daerah	804.174.807,00	694.351.137,00
28	Kecamatan Sambung Makmur	164.187.000,00	159.715.307,00
29	Kecamatan Pengaron	134.268.900,00	133.838.000,00
30	Kecamatan Tatah Makmur	153.245.000,00	148.783.000,00
31	Kecamatan Martapura Timur	259.961.886,00	255.132.566,00
32	Kecamatan Paramasan	624.185.000,00	589.991.000,00
33	Kecamatan Kertak Hanyar	741.877.100,00	735.347.859,00
34	Kecamatan Aluh-Aluh	137.388.420,00	133.210.000,00
35	Kecamatan Martapura	1.489.717.940,00	1.438.860.260,00
36	Kecamatan Martapura Barat	144.440.000,00	141.570.500,00
37	Kecamatan Simpang Empat	103.012.000,00	100.490.000,00
38	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	126.804.000,00	124.208.587,00
39	Kecamatan Beruntung Baru	104.627.400,00	101.998.400,00
40	Kecamatan Karang Intan	110.450.000,00	109.980.000,00
41	Kecamatan Aranio	117.900.999,00	116.195.000,00
42	Kecamatan Mataraman	37.350.000,00	37.350.000,00
43	Kecamatan Sungai Tabuk	326.669.000,00	323.634.438,00
44	Kecamatan Sungai Pinang	101.047.000,00	97.412.000,00
45	Kecamatan Gambut	644.703.000,00	641.724.703,00
46	Kecamatan Telaga Bauntung	102.615.000,00	101.683.000,00
47	Kecamatan Astambul	120.337.000,00	113.427.739,00
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	911.179.700,00	891.293.000,00
TOTAL		414.853.497.830,00	376.369.085.069,96

DAFTAR RINCIAN KAS DI BENDAHARA DANA BOS TA 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Nama Sekolah	Per 1 Januari 2023	Pendapatan	Belanja	Per 31 Desember 2023
1	SDN Sungai Pinang (Kec. Sungai Tabuk)	-	27.550.000,00	27.550.000,00	-
2	SDN Gudang Hirang 4	25.809,00	130.124.191,00	130.150.000,00	-
3	SDN Sungai Tabuk Keramat 2	-	192.850.000,00	192.850.000,00	-
4	SDN Sumber Baru 2	-	41.800.000,00	41.800.000,00	-
5	SDN Sumber Harapan 1	-	94.700.000,00	94.700.000,00	-
6	SDN Sumber Harapan 2	-	56.050.000,00	56.050.000,00	-
7	SDN Sungai Alang 1	69.511,00	84.651.489,00	84.650.148,00	70.852,00
8	SDN Sungai Alang 2	544,00	116.249.456,00	116.249.992,00	8,00
9	SDN Sungai Alat 1	-	99.750.000,00	99.750.000,00	-
10	SDN Sungai Alat 2	-	138.100.000,00	138.100.000,00	-
11	SDN Sungai Arpat 1	6,00	43.699.994,00	43.700.000,00	-
12	SDN Sungai Arpat 2	-	47.500.000,00	47.500.000,00	-
13	SDN Sungai Asam	725,00	118.502.275,00	116.778.417,00	1.724.583,00
14	SDN Sungai Bakung	-	49.400.000,00	49.400.000,00	-
15	SDN Sumber Baru 1	-	99.750.000,00	99.750.000,00	-
16	SDN Sungai Pulantan	4,00	83.300.000,00	83.300.004,00	-
17	SDN Simpang Warga 2	-	77.600.000,00	77.600.000,00	-
18	SDN Sungai Tabuk Keramat 3	-	95.000.000,00	95.000.000,00	-
19	SDN Sungai Tabuk Kota 1	-	150.100.000,00	150.100.000,00	-
20	SDN Simpang Empat 1	-	137.450.000,00	137.449.984,00	16,00
21	SDN Simpang Empat 2	-	156.750.000,00	156.750.000,00	-
22	SDN Simpang Empat 3	-	103.550.000,00	103.550.000,00	-
23	SDN Simpang Empat 4	-	105.450.000,00	105.450.000,00	-
24	SDN Simpang Empat	-	111.150.000,00	111.150.000,00	-
25	SDN Simpang Lima	204.526,00	36.100.000,00	36.100.000,00	204.526,00
26	SDN Simpang Tiga	-	163.400.000,00	163.400.000,00	-
27	SDN Simpang Warga 1	-	216.000.000,00	216.000.000,00	-
28	SDN Sungai Bangkal	430,00	90.250.000,00	90.250.000,00	430,00
29	SDN Sungai Batang 1	-	49.400.000,00	49.400.000,00	-
30	SDN Sungai Lurus	-	95.950.000,00	95.950.000,00	-
31	SDN Sungai Musang	-	73.150.000,00	73.150.000,00	-
32	SDN Sungai Paring 2	272.193,00	144.777.807,00	145.050.000,00	-
33	SDN Sungai Pinang Baru 1	847,00	15.200.000,00	15.200.000,00	847,00
34	SDN Sungai Pinang Baru 2	-	43.700.000,00	43.700.000,00	-
35	SDN Sungai Pinang (Kec. Sungai Pinang)	398.194,00	177.005.000,00	177.403.194,00	-
36	SDN Sungai Rangas	-	137.750.000,00	137.750.000,00	-
37	SDN Sungai Rangas Ulu	-	154.200.000,00	154.200.000,00	-
38	SDN Sungai Raya 1	-	118.750.000,00	118.750.000,00	-
39	SDN Sungai Raya 2	-	43.700.000,00	43.700.000,00	-
40	SDN Sungai Lulut 2	91,00	152.000.000,00	152.000.000,00	91,00
41	SDN Sungai Lulut 1	271.774,00	484.228.226,00	484.500.000,00	-
42	SDN Sungai Langsung	-	66.200.000,00	66.200.000,00	-
43	SDN Sungai Batang 2	-	77.900.000,00	77.900.000,00	-
44	SDN Sungai Batang Banyu	-	153.900.000,00	153.900.000,00	-
45	SDN Sungai Batang Ilir 1	3.240,00	156.950.000,00	156.953.240,00	-
46	SDN Sungai Batang Ilir 2	150.654,00	166.468.500,00	166.360.500,00	258.654,00
47	SDN Sungai Jati	-	38.000.000,00	38.000.000,00	-
48	SDN Sungai Kitano 1	-	58.900.000,00	58.900.000,00	-
49	SDN Sungai Kitano 2	-	85.500.000,00	85.500.000,00	-
50	SDN Kupang	-	39.900.000,00	39.900.000,00	-
51	SDN Sungai Lakum 1	-	81.700.000,00	81.700.000,00	-
52	SDN Sungai Lakum 2	-	114.650.000,00	114.650.000,00	-
53	SDN Sungai Landas	-	124.990.000,00	124.990.000,00	-
54	SDN Sungai Tabuk Kota 2 (SDN Abumbun Jaya)	-	167.850.000,00	167.841.069,00	8.931,00
55	SDN Panyuruan	-	69.350.000,00	69.300.600,00	49.400,00
56	SDN Pejambuan 2	-	89.300.000,00	89.300.000,00	-
57	SDN Pekauman 1	-	63.650.000,00	63.650.000,00	-
58	SDN Pekauman 2	-	93.750.000,00	93.750.000,00	-
59	SDN Pemakuan	-	189.050.000,00	189.050.000,00	-
60	SDN Pematang Baru	-	135.850.000,00	135.850.000,00	-
61	SDN Pematang Danau 1	-	119.700.000,00	119.700.000,00	-
62	SDN Pematang Panjang	-	129.200.000,00	129.200.000,00	-
63	SDN Pembantanan 1	-	95.000.000,00	95.000.000,00	-
64	SDN Pembantanan 2	-	110.200.000,00	110.200.000,00	-
65	SDN Pejambuan 1	18.355,00	109.231.645,00	109.250.000,00	-
66	SDN Pasayangan Selatan	-	57.950.000,00	57.950.000,00	-
67	SDN Paring Tali	-	56.050.000,00	56.050.000,00	-
68	SDN Pasar Jati 1	-	106.400.000,00	106.400.000,00	-
69	SDN Pasar Jati 2	-	107.350.000,00	107.350.000,00	-
70	SDN Pasar Jati 3	-	124.450.000,00	124.450.000,00	-
71	SDN Pasar Kamis 1	-	152.000.000,00	152.000.000,00	-
72	SDN Pasar Kamis 2	-	55.100.000,00	55.100.000,00	-
73	SDN Pasayangan 1	-	107.350.000,00	107.350.000,00	-
74	SDN Pasayangan 2	-	179.900.000,00	179.900.000,00	-
75	SDN Pasayangan 3	50.697,00	59.550.000,00	59.550.000,00	50.697,00
76	SDN Pemurus 1	-	96.900.000,00	96.900.000,00	-

No.	Nama Sekolah	Per 1 Januari 2023	Pendapatan	Belanja	Per 31 Desember 2023
77	SDN Pemurus 2	-	67.450.000,00	67.450.000,00	-
78	SDN Rampah	-	30.400.000,00	30.400.000,00	-
79	SDN Rantau Nangka	20.648,00	194.729.352,00	194.749.000,00	1.000,00
80	SDN Rantau Bakula	-	152.650.000,00	152.650.000,00	-
81	SDN Rantau Bujur (Aranio)	6.945.562,00	82.650.000,00	89.595.562,00	-
82	SDN Rantau Bujur	-	123.500.000,00	123.500.000,00	-
83	SDN Remo	-	57.000.000,00	57.000.000,00	-
84	SDN Salat Makmur	-	24.700.000,00	24.700.000,00	-
85	SDN Sungai Paring 1	-	164.996.860,00	164.996.860,00	-
86	SDN Sungai Rangas Hambuku	104.217,00	157.700.000,00	157.699.997,00	104.220,00
87	SDN Pulau Nyiur 1	-	179.900.000,00	179.900.000,00	-
88	SDN Podok 2	-	92.150.000,00	92.149.999,00	1,00
89	SDN Podok 1	-	152.000.000,00	152.000.000,00	-
90	SDN Pengaron 2	-	148.200.000,00	148.200.000,00	-
91	SDN Pengaron 3	-	126.350.000,00	126.350.000,00	-
92	SDN Pengalaman 1	-	126.350.000,00	126.350.000,00	-
93	SDN Pengalaman 2	-	56.050.000,00	56.050.000,00	-
94	SDN Penyambaran 1	-	-	-	-
95	SDN Penyambaran 2	-	81.700.000,00	81.700.000,00	-
96	SDN Paramasan Atas	-	57.000.000,00	57.000.000,00	-
97	SDN Pingaran 1	3,00	29.924.997,00	29.925.000,00	-
98	SDN Pingaran 2	-	57.950.000,00	57.950.000,00	-
99	SDN Pingaran Ulu	-	56.050.000,00	56.050.000,00	-
100	SDN Sungai Tabuk Keramat 1	-	231.800.000,00	231.800.000,00	-
101	SDN Sungai Tandipah	-	39.900.000,00	39.900.000,00	-
102	SDN Tambak Baru Ilir	-	114.950.000,00	114.940.079,00	9.921,00
103	SDN Tambak Baru Ulu	22.515.000,00	108.950.000,00	131.465.000,00	-
104	SDN Tambak Danau	-	74.100.000,00	74.100.000,00	-
105	SDN Tambak Padi 1	-	54.150.000,00	54.150.000,00	-
106	SDN Tambak Padi 2	-	35.150.000,00	35.150.000,00	-
107	SDN Tambak Raya	-	74.100.000,00	74.100.000,00	-
108	SDN Tambak Sirang Baru	-	62.700.000,00	62.700.000,00	-
109	SDN Tampang Awang	79.774,00	85.500.000,00	85.500.000,00	79.774,00
110	SDN Tanah Habang	-	88.050.000,00	88.050.000,00	-
111	SDN Tanah Intan	-	41.800.000,00	41.800.000,00	-
112	SDN Tambak Anyar Ulu	-	148.200.000,00	148.200.000,00	-
113	SDN Tambak Anyar	-	123.500.000,00	123.500.000,00	-
114	SDN Tambak Sirang Darat	-	26.600.000,00	26.600.000,00	-
115	SDN Sungai Tuan	-	96.900.000,00	96.900.000,00	-
116	SDN Sungai Uyak	-	126.350.000,00	126.350.000,00	-
117	SDN Sungkai 1	-	339.150.000,00	339.150.000,00	-
118	SDN Sungkai 2	-	45.600.000,00	45.600.000,00	-
119	SDN Sungkai Baru	32.585,00	132.017.415,00	132.050.000,00	-
120	SDN Surian (Mataraman)	-	72.850.000,00	72.850.000,00	-
121	SDN Surian	-	89.000.000,00	89.000.000,00	-
122	SDN Tatah Bangkal	-	85.200.000,00	85.200.000,00	-
123	SDN Tajau Landung 1	-	82.650.000,00	82.650.000,00	-
124	SDN Tajau Landung 2	62.390,00	95.000.000,00	95.062.390,00	-
125	SDN Takuti	-	71.900.000,00	71.900.000,00	-
126	SDN Tatah Layap Baru	-	38.950.000,00	38.950.000,00	-
127	SDN Telaga Baru	-	72.200.000,00	72.200.000,00	-
128	SDN Teluk Selong	-	51.300.000,00	51.300.000,00	-
129	SDN Terapu	-	70.000.000,00	69.999.999,00	1,00
130	SDN Tiwingan Baru	-	66.200.000,00	66.200.000,00	-
131	SDN Tiwingan	3.095,00	56.050.000,00	56.053.095,00	-
132	SDN Tunggul Irang Ulu	20.002,00	39.102.000,00	39.080.002,00	42.000,00
133	SDN Tungkaran	2.714,00	308.947.286,00	308.950.000,00	-
134	SDN Tatah Pemangkih Tengah	-	109.250.000,00	109.250.000,00	-
135	SDN Tatah Pemangkih Laut 2	-	183.350.000,00	183.350.000,00	-
136	SDN Tatah Pamangkih Laut 1	-	116.850.000,00	116.850.000,00	-
137	SDN Tanipah	-	126.350.000,00	126.350.000,00	-
138	SDN Tanjung Rema	2,00	109.249.998,00	109.249.998,00	2,00
139	SDN Tanjung Rema Darat	4,00	248.900.000,00	248.900.000,00	4,00
140	SDN Tatah Belayung Baru	-	165.300.000,00	165.300.000,00	-
141	SDN Tatah Jaruju	-	57.000.000,00	57.000.000,00	-
142	SDN Tatah Layap 1	-	9.500.000,00	9.500.000,00	-
143	SDN Tatah Layap 2	-	46.550.000,00	46.550.000,00	-
144	SDN Tatah Layap 3	-	32.300.000,00	32.300.000,00	-
145	SDN Tatah Pamangkih Baru	-	97.550.000,00	97.550.000,00	-
146	SDN Tatah Pamangkih Darat	-	72.850.000,00	72.850.000,00	-
147	SDN Pakutik	635.989,00	133.950.000,00	134.585.989,00	-
148	SDN Bunipah 3	-	37.050.000,00	37.050.000,00	-
149	SDN Desa Lima	-	106.400.000,00	106.400.000,00	-
150	SDN Galam Rabah 1	-	85.500.000,00	85.500.000,00	-
151	SDN Galam Rabah 2	50.789,00	41.310.000,00	41.360.789,00	-
152	SDN Galam Rabah 3	-	49.100.000,00	49.100.000,00	-
153	SDN Galam Rabah 4	-	92.500.000,00	92.500.000,00	-
154	SDN Gambut 1	109.413,00	394.440.587,00	394.548.358,00	1.642,00
155	SDN Gambut 10	-	145.285.000,00	145.285.000,00	-

No.	Nama Sekolah	Per 1 Januari 2023	Pendapatan	Belanja	Per 31 Desember 2023
156	SDN Gambut 11	-	189.050.000,00	189.050.000,00	-
157	SDN Gambut 2	124.201,00	301.150.000,00	301.274.201,00	-
158	SDN Gambut 3	-	117.800.000,00	117.800.000,00	-
159	SDN Desa Baru 2	191.606,00	74.100.000,00	74.100.000,00	191.606,00
160	SDN Desa Baru 1	-	144.750.000,00	144.749.997,00	3,00
161	SDN Cabi	4,00	159.600.000,00	159.600.000,00	4,00
162	SDN Cindai Alus 1	-	488.300.000,00	488.300.000,00	-
163	SDN Cintapuri 1	-	139.650.000,00	139.650.000,00	-
164	SDN Cintapuri 2	-	87.400.000,00	87.400.000,00	-
165	SDN Dalam Pagar	-	78.850.000,00	78.850.000,00	-
166	SDN Dalam Pagar Ulu 1	-	126.350.000,00	126.350.000,00	-
167	SDN Dalam Pagar Ulu 2	-	61.750.000,00	61.750.000,00	-
168	SDN Danau Salak 1	-	92.150.000,00	92.150.000,00	-
169	SDN Danau Salak 2	-	49.400.000,00	49.400.000,00	-
170	SDN Gambut 4	-	62.700.000,00	62.700.000,00	-
171	SDN Gambut 5	-	144.400.000,00	144.400.000,00	-
172	SDN Gunung Batu	-	90.250.000,00	90.250.000,00	-
173	SDN Gunung Ulin	-	95.950.000,00	95.950.000,00	-
174	SDN Hakim	-	92.150.000,00	92.150.000,00	-
175	SDN Handil Bujur 1	100.000,00	88.250.000,00	88.350.000,00	-
176	SDN Handil Bujur 2	18.929,00	49.082.000,00	49.100.000,00	929,00
177	SDN Handil Purai 1	-	78.850.000,00	78.850.000,00	-
178	SDN Handil Purai 2	-	26.600.000,00	26.600.000,00	-
179	SDN Haur Kuning	-	63.650.000,00	63.650.000,00	-
180	SDN Indrasari 1	22.008,00	420.827.992,00	420.850.000,00	-
181	SDN Jambu Burung	-	66.200.000,00	66.200.000,00	-
182	SDN Guntung Ujung 2	-	76.000.000,00	76.000.000,00	-
183	SDN Guntung Ujung 1	-	77.900.000,00	77.900.000,00	-
184	SDN Guntung Papuyu	-	66.500.000,00	66.500.000,00	-
185	SDN Gambut 6	-	223.250.000,00	223.250.000,00	-
186	SDN Gambut 7	-	224.550.000,00	224.550.000,00	-
187	SDN Gambut 8	-	108.300.000,00	108.300.000,00	-
188	SDN Gambut 9	-	137.750.000,00	137.750.000,00	-
189	SDN Garis	-	24.700.000,00	24.700.000,00	-
190	SDN Garis Hanyar	-	141.550.000,00	141.550.000,00	-
191	SDN Gudang Hirang 1	-	189.050.000,00	189.050.000,00	-
192	SDN Gudang Hirang 2	302.848,00	81.397.152,00	81.700.000,00	-
193	SDN Gudang Hirang 3	22.857,00	194.727.143,00	193.195.093,00	1.554.907,00
194	SDN Gudang Tengah	-	144.400.000,00	144.400.000,00	-
195	SDN Jati 1	514.600,00	96.385.400,00	96.900.000,00	-
196	SDN Aranio 2	-	145.350.000,00	145.350.000,00	-
197	SDN Astambul Kota	-	95.000.000,00	95.000.000,00	-
198	SDN Astambul Seberang	-	79.800.000,00	79.800.000,00	-
199	SDN Atayau	-	49.400.000,00	49.400.000,00	-
200	SDN Ati'im	-	137.750.000,00	137.750.000,00	-
201	SDN Awang Bangkal Barat	30.080,00	163.750.000,00	163.750.000,00	30.080,00
202	SDN Awang Bangkal Timur	34,00	129.199.966,00	129.199.000,00	1.000,00
203	SDN Bakambat	-	150.100.000,00	150.100.000,00	-
204	SDN Balau	4,00	116.850.000,00	116.850.000,00	4,00
205	SDN Banyu Hirang	-	88.350.000,00	88.350.000,00	-
206	SDN Batu Balian 1	-	100.400.000,00	100.400.000,00	-
207	SDN Aranio 1	72.829,00	65.471.671,00	65.544.500,00	-
208	SDN Antasan Senor	-	52.250.000,00	52.250.000,00	-
209	SDN Antaraku	-	55.100.000,00	55.100.000,00	-
210	SDN Abirau	-	102.600.000,00	102.600.000,00	-
211	SDN Akar Bagantung	65,00	178.600.000,00	178.600.000,00	65,00
212	SDN Alalak Padang	-	87.400.000,00	87.399.993,00	7,00
213	SDN Alimukim	-	67.450.000,00	67.450.000,00	-
214	SDN Aluh-Aluh Besar 1	-	161.483.000,00	161.483.000,00	-
215	SDN Aluh-Aluh Besar 2	7.774,00	149.500.000,00	149.507.774,00	-
216	SDN Aluh-Aluh Besar 3	-	52.250.000,00	52.249.999,00	1,00
217	SDN Aluh-Aluh Kecil 1	-	57.000.000,00	57.000.000,00	-
218	SDN Aluh-Aluh Kecil 2	-	79.500.000,00	79.500.000,00	-
219	SDN Aluh-Aluh Kecil Muara	-	110.850.000,00	110.850.000,00	-
220	SDN Angkipih	-	82.650.000,00	82.650.000,00	-
221	SDN Batu Balian 2	-	151.050.000,00	151.050.000,00	-
222	SDN Batu Balian 3	5.346,00	220.394.654,00	220.400.000,00	-
223	SDN Benua Anyar Danau Salak 1	-	53.200.000,00	53.200.000,00	-
224	SDN Benua Anyar Danau Salak 2	-	36.100.000,00	36.100.000,00	-
225	SDN Benua Anyar Sungai Tuan	-	75.050.000,00	75.050.000,00	-
226	SDN Benua Riam	793,00	70.299.207,00	70.300.000,00	-
227	SDN Bi'ih	-	53.200.000,00	53.200.000,00	-
228	SDN Bincau 1	3.836,00	177.646.164,00	177.650.000,00	-
229	SDN Bincau 2	60.720,00	149.150.000,00	149.150.000,00	60.720,00
230	SDN Bincau Muara	-	67.450.000,00	67.450.000,00	-
231	SDN Bumi Rata	627,00	173.550.000,00	173.550.000,00	627,00
232	SDN Bunglai	1.845,00	165.871.000,00	165.872.845,00	-
233	SDN Bunipah 1	-	42.750.000,00	42.750.000,00	-
234	SDN Benua Anyar	-	53.850.000,00	53.850.000,00	-

No.	Nama Sekolah	Per 1 Januari 2023	Pendapatan	Belanja	Per 31 Desember 2023
235	SDN Benteng Seberang	-	130.150.000,00	130.150.000,00	-
236	SDN Bawahan Pasar	-	86.450.000,00	86.450.000,00	-
237	SDN Bawahan Selan 1	-	171.650.000,00	171.650.000,00	-
238	SDN Bawahan Selan 2	-	55.750.000,00	55.750.000,00	-
239	SDN Bawahan Selan 3	-	30.400.000,00	30.400.000,00	-
240	SDN Bawahan Selan 4	33,00	2.375.000,00	-	2.375.033,00
241	SDN Bawahan Selan 5	448,00	104.850.000,00	104.849.000,00	1.448,00
242	SDN Bawahan Selan 6	307.383,00	75.700.000,00	76.005.183,00	2.200,00
243	SDN Belangian	800,00	38.649.200,00	38.650.000,00	-
244	SDN Belimbing Baru	379,00	148.199.621,00	148.200.000,00	-
245	SDN Belimbing Lama 1	-	81.400.000,00	81.400.000,00	-
246	SDN Bunipah 2	-	85.200.000,00	85.200.000,00	-
247	SDN Lawahan	-	62.700.000,00	62.700.000,00	-
248	SDN Makmur	-	41.800.000,00	41.800.000,00	-
249	SDN Mali-Mali	9,00	110.199.999,00	110.200.000,00	8,00
250	SDN Malintang 1	-	39.900.000,00	39.900.000,00	-
251	SDN Malintang 2	-	131.100.000,00	131.100.000,00	-
252	SDN Manarap Baru	-	109.250.000,00	109.250.000,00	-
253	SDN Manarap Lama 1	52.179,00	232.750.000,00	232.750.000,00	52.179,00
254	SDN Manarap Lama 2	24.300,00	296.075.700,00	296.100.000,00	-
255	SDN Manarap Tengah 1	180.825,00	193.800.000,00	193.980.825,00	-
256	SDN Manarap Tengah 2	-	187.015.500,00	187.015.500,00	-
257	SDN Mandikapau Barat 1	26.097,00	70.273.903,00	70.300.000,00	-
258	SDN Mandikapau Barat 2	17.670.490,00	13.680.000,00	31.350.490,00	-
259	SDN Madurejo 1	-	42.750.000,00	42.750.000,00	-
260	SDN Madurejo 2	-	73.150.000,00	73.150.000,00	-
261	SDN Lawiran	-	21.850.000,00	21.850.000,00	-
262	SDN Limamar	27.000,00	179.523.000,00	179.544.000,00	6.000,00
263	SDN Lok Baintan	1.094,00	35.150.000,00	35.150.000,00	1.094,00
264	SDN Lok Baintan Dalam	17.000,00	95.933.000,00	95.950.000,00	-
265	SDN Lok Buntar	-	149.150.000,00	149.150.000,00	-
266	SDN Lok Gabang	449,00	61.749.551,00	61.750.000,00	-
267	SDN Lok Cantung	-	106.750.000,00	106.750.000,00	-
268	SDN Lok Tanah 1	-	87.400.000,00	87.400.000,00	-
269	SDN Loktangga	443,00	61.749.996,00	61.749.508,00	931,00
270	SDN Lok Tunggul	808,00	67.450.000,00	67.450.000,00	808,00
271	SDN Mandiangin Timur 1	-	154.200.000,00	154.200.000,00	-
272	SDN Mandiangin Timur 2	1,00	169.099.999,00	169.100.000,00	-
273	SDN Melayu	57,00	95.000.000,00	95.000.000,00	57,00
274	SDN Melayu Tengah	-	95.950.000,00	95.950.000,00	-
275	SDN Muara Halayung	-	76.000.000,00	76.000.000,00	-
276	SDN Munggu Raya	-	60.800.000,00	60.800.000,00	-
277	SDN Murung Kenanga	-	53.850.000,00	53.850.000,00	-
278	SDN Padang Panjang	-	229.250.000,00	229.249.964,00	36,00
279	SDN Paku	-	133.950.000,00	133.950.000,00	-
280	SDN Mekar Sari	-	77.900.000,00	77.900.000,00	-
281	SDN Mekar Raya	-	113.700.000,00	113.700.000,00	-
282	SDN Mandikapau Timur	70,00	136.499.930,00	136.500.000,00	-
283	SDN Mangkauk 1	66,00	113.050.000,00	113.050.000,00	66,00
284	SDN Mangkauk 2	-	89.300.000,00	89.300.000,00	-
285	SDN Mangkauk 3	-	118.750.000,00	118.750.000,00	-
286	SDN Maniapun	-	113.050.000,00	113.050.000,00	-
287	SDN Mataraman 1	5,00	80.449.995,00	80.449.995,00	5,00
288	SDN Mataraman 2	-	71.250.000,00	71.250.000,00	-
289	SDN Mataraman 3	-	68.400.000,00	68.400.000,00	-
290	SDN Mekar	-	157.100.000,00	157.100.000,00	-
291	SDN Paku Alam	30.115,00	75.019.885,00	75.050.000,00	-
292	SDN Jati 2	-	41.800.000,00	41.800.000,00	-
293	SDN Kaliukan 1	-	82.650.000,00	82.650.000,00	-
294	SDN Kaliukan 2	-	50.350.000,00	50.350.000,00	-
295	SDN Kampung Baru	-	82.650.000,00	82.649.100,00	900,00
296	SDN Karang Intan 1	959,00	105.449.041,00	104.735.000,00	715.000,00
297	SDN Karang Intan 2	1,00	70.537.499,00	70.537.500,00	-
298	SDN Kayu Bawang 1	-	285.950.000,00	285.950.000,00	-
299	SDN Kayu Bawang 2	-	88.350.000,00	88.350.000,00	-
300	SDN Keladan Baru	-	93.750.000,00	93.750.000,00	-
301	SDN Kelampaian	100.000,00	148.100.000,00	148.200.000,00	-
302	SDN Kelampaian Ilir 1	-	49.839.079,00	49.839.079,00	-
303	SDN Kelampaian Ilir 2	-	79.800.000,00	79.800.000,00	-
304	SDN Kalaan Baru	-	84.511.000,00	84.506.799,00	4.201,00
305	SDN Kahelaan 2	-	65.550.000,00	65.550.000,00	-
306	SDN Kahelaan 1	-	101.350.000,00	101.350.000,00	-
307	SDN Jawa 1	1.000,00	150.100.000,00	150.101.000,00	-
308	SDN Jawa 2	52,00	223.074.948,00	223.073.000,00	2.000,00
309	SDN Jawa 3 / SDN Sekumpul 1	-	281.550.000,00	281.550.000,00	-
310	SDN Jawa 5	431,00	353.750.000,00	353.750.431,00	-
311	SDN Jawa Laut 1	-	26.600.000,00	26.600.000,00	-
312	SDN Jawa Laut 2	863,00	97.850.000,00	97.850.863,00	-
313	SDN Jingah Habang Hilir	-	106.400.000,00	106.400.000,00	-

No.	Nama Sekolah	Per 1 Januari 2023	Pendapatan	Belanja	Per 31 Desember 2023
314	SDN Jingah Habang Hulu	-	82.650.000,00	82.650.000,00	-
315	SDN Kelampaian Ulu	-	114.664.982,00	114.664.982,00	-
316	SDN Labat Muara	-	168.150.000,00	168.150.000,00	-
317	SDN Kertak Empat	-	43.700.000,00	43.700.000,00	-
318	SDN Kertak Hanyar 1-1	87.652,00	297.650.000,00	297.737.652,00	-
319	SDN Kertak Hanyar 1-2	-	147.250.000,00	147.250.000,00	-
320	SDN Kertak Hanyar 1-3	-	131.100.000,00	131.100.000,00	-
321	SDN Kiram	257.932,00	89.812.000,00	89.812.000,00	257.932,00
322	SDN Kuin Besar 1	20.000,00	58.841.250,00	58.861.250,00	-
323	SDN Kuin Besar 2	-	60.800.000,00	60.799.999,00	1,00
324	SDN Kuin Kecil	-	33.535.000,00	33.535.000,00	-
325	SDN Sungai Kupang	40.354,00	32.300.000,00	32.300.000,00	40.354,00
326	SDN Kupang Rejo	-	84.550.000,00	84.550.000,00	-
327	SDN Keraton 5	-	139.650.000,00	139.650.000,00	-
328	SDN Keliling Benteng Tengah	-	82.650.000,00	82.650.000,00	-
329	SDN Keliling Benteng Ulu 1	-	132.050.000,00	132.050.000,00	-
330	SDN Keliling Benteng Ulu 2	-	70.300.000,00	70.298.494,00	1.506,00
331	SDN Keliling Benteng Ilir	65.956,00	138.700.000,00	138.765.956,00	-
332	SDN Keramat	15.080,00	64.600.000,00	64.615.080,00	-
333	SDN Keramat Mina	-	202.350.000,00	202.350.000,00	-
334	SDN Keraton 1	2,00	237.500.000,00	237.500.000,00	2,00
335	SDN Keraton 4	21.806,00	184.300.000,00	184.300.000,00	21.806,00
336	SDN Keraton 3	-	168.450.000,00	168.450.000,00	-
337	SDN Keraton 2	-	99.750.000,00	99.750.000,00	-
338	SDN Baliangin	355,00	38.000.000,00	38.000.355,00	-
339	SDN Cindai Alus 2	189,00	471.199.811,00	471.200.000,00	-
340	SDN Indrasari 2	622,00	327.149.378,00	327.150.000,00	-
341	SDN Pulau Nyiur 2	-	110.850.000,00	110.850.000,00	-
342	SDN Kecil Kiram	-	57.650.000,00	57.650.000,00	-
343	SDN Belimbing Lama 2	-	45.300.000,00	45.300.000,00	-
344	SDN Belimbing Lama 3	-	14.250.000,00	14.250.000,00	-
345	SDN Kahelaan 3	-	74.750.000,00	74.750.000,00	-
346	SDN Paramasan Bawah 2	19.095.000,00	74.100.000,00	93.193.447,00	1.553,00
347	SDN Paramasan Bawah 3	-	44.650.000,00	44.650.000,00	-
348	SDN Paramasan Bawah 4	54.992,00	60.745.008,00	60.800.000,00	-
349	SDN Kecil Paramasan Atas	10.000,00	79.490.000,00	79.500.000,00	-
350	SDN Kecil Remo	-	57.000.000,00	57.000.000,00	-
351	SDN Lubang Baru 1	-	59.850.000,00	59.850.000,00	-
352	SDN Lubang Baru 2	-	76.950.000,00	76.950.000,00	-
353	SDN Lok Tanah 2	-	57.000.000,00	57.000.000,00	-
354	SDN Cintapuri 3	-	26.600.000,00	26.600.000,00	-
355	SDN Paramasan Bawah 1	-	132.050.000,00	132.050.000,00	-
356	SDN Pematang Danau 2	-	79.800.000,00	79.800.000,00	-
357	SDN Artain	89.893,00	56.050.000,00	56.139.893,00	-
358	SDN Paau	38.813,00	58.861.187,00	58.900.000,00	-
359	SDN Simpang Tiga 2	-	62.700.000,00	62.700.000,00	-
360	SDN Sekumpul 2	-	163.400.000,00	163.400.000,00	-
361	SMPN 1 Astambul	212,00	468.639.788,00	468.640.000,00	-
362	SMPN 1 Gambut	-	765.600.000,00	765.600.000,00	-
363	SMPN 1 Karang Intan	-	157.760.000,00	157.760.000,00	-
364	SMPN 1 Kertak Hanyar	-	600.880.000,00	600.880.000,00	-
365	SMPN 1 Martapura	81.985,00	1.067.716.942,00	1.067.708.642,00	90.285,00
366	SMPN 1 Mataraman	1.167,00	179.280.000,00	179.281.150,00	17,00
367	SMPN 1 Pengaron	4.500,00	139.200.000,00	139.204.500,00	-
368	SMPN 1 Sungai Pinang	-	156.600.000,00	156.600.000,00	-
369	SMPN 1 Sungai Tabuk	-	353.800.000,00	353.799.997,00	3,00
370	SMPN 1 Beruntung Baru	-	129.920.000,00	129.920.000,00	-
371	SMPN 1 Aranio	10.230,00	77.710.000,00	77.720.000,00	230,00
372	SMPN 1 Aluh-Aluh	-	392.080.000,00	392.080.000,00	-
373	SMPN 2 Aranio	-	89.520.000,00	89.520.000,00	-
374	SMPN 2 Astambul	97,00	91.639.903,00	91.639.966,00	34,00
375	SMPN 3 Sungai Pinang	-	64.960.000,00	64.960.000,00	-
376	SMPN 3 Sungai Tabuk	-	164.720.000,00	164.720.000,00	-
377	SMPN 3 Martapura	40.352,00	760.439.106,00	760.427.678,00	51.780,00
378	SMPN 1 Martapura Barat	3.904.502,00	158.920.000,00	162.824.502,00	-
379	SMPN 4 Martapura	-	244.120.000,00	244.120.000,00	-
380	SMPN 1 Simpang Empat	-	533.600.000,00	533.600.000,00	-
381	SMPN 1 Cintapuri Darussalam	-	97.640.000,00	97.640.000,00	-
382	SMPN 2 Martapura	163.500,00	707.636.500,00	707.800.000,00	-
383	SMPN 2 Kertak Hanyar	-	494.360.000,00	494.360.000,00	-
384	SMPN 2 Gambut	-	61.480.000,00	61.480.000,00	-
385	SMPN 2 Karang Intan	-	203.400.000,00	203.400.000,00	-
386	SMPN 1 Tatah Makmur	-	190.640.000,00	190.640.000,00	-
387	SMPN 2 Martapura Timur	5.781,00	426.114.219,00	426.118.987,00	1.013,00
388	SMPN 2 Mataraman	-	119.480.000,00	119.480.000,00	-
389	SMPN 2 Pengaron	3,00	56.839.999,00	56.840.000,00	2,00
390	SMPN 2 Simpang Empat	-	239.525.400,00	239.525.400,00	-
391	SMPN 2 Sungai Pinang	-	69.600.000,00	69.600.000,00	-
392	SMPN 2 Sungai Tabuk	272.055,00	288.568.000,00	288.840.000,00	55,00

No.	Nama Sekolah	Per 1 Januari 2023	Pendapatan	Belanja	Per 31 Desember 2023
393	SMPN 2 Aluh-aluh	-	151.000.000,00	151.000.000,00	-
394	SMPN 3 Gambut	-	229.680.000,00	229.680.000,00	-
395	SMPN 3 Aranio	4.553,00	168.600.000,00	168.604.553,00	-
396	SMPN 3 Karang Intan	-	145.000.000,00	145.000.000,00	-
397	SMPN 3 Mataraman	-	104.400.000,00	104.400.000,00	-
398	SMPN 4 Aranio	-	49.880.000,00	49.880.000,00	-
399	SMPN 2 Cintapuri Darussalam	-	207.840.000,00	207.840.000,00	-
400	SMPN 1 Telaga Bauntung	-	94.160.000,00	94.160.000,00	-
401	SMPN 3 Aluh-aluh	601,00	61.479.400,00	61.480.000,00	1,00
402	SMPN 4 Aluh-aluh	-	148.480.000,00	148.480.000,00	-
403	SMPN 5 Martapura	-	121.800.000,00	121.800.000,00	-
404	SMPN 3 Astambul	-	139.200.000,00	139.200.000,00	-
405	SMPN 4 Karang Intan	132.800,00	94.987.200,00	95.114.800,00	5.200,00
406	SMPN 5 Karang Intan	13.699,00	118.320.000,00	118.259.655,00	74.044,00
407	SMPN 1 Paramasan	-	111.360.000,00	111.337.525,00	22.475,00
408	SMPN 1 Sambung Makmur	-	88.360.000,00	88.360.000,00	-
409	SMPN 4 Mataraman	-	66.120.000,00	66.120.000,00	-
410	SMPN 3 Cintapuri Darussalam	-	95.320.000,00	95.320.000,00	-
411	SMPN 4 Cintapuri Darussalam	-	52.200.000,00	52.193.000,00	7.000,00
412	SMPN 3 Simpang Empat	-	40.600.000,00	40.600.000,00	-
413	SMPN 4 Simpang Empat	51.989,00	25.468.011,00	25.520.000,00	-
414	SMPN 7 Aluh-Aluh	93.000,00	56.747.000,00	56.840.000,00	-
415	SMPN 2 Martapura Barat	-	97.440.000,00	97.440.000,00	-
416	SMPN 1 Martapura Timur	6.379,00	273.120.000,00	273.126.316,00	63,00
417	SMPN 3 Pengaron	396,00	72.120.000,00	72.120.000,00	396,00
418	SMPN 2 Sambung Makmur	-	70.760.000,00	70.760.000,00	-
419	SMPN 5 Aluh-aluh	-	99.760.000,00	99.760.000,00	-
420	SMPN 6 Aluh-Aluh	-	69.600.000,00	69.600.000,00	-
421	SMPN 7 Karang Intan	79.412,00	268.400.588,00	268.480.000,00	-
422	SMPN 4 Astambul	2,00	24.360.000,00	24.360.000,00	2,00
423	SMPN 6 Karang Intan	2,00	131.080.000,00	131.078.871,00	1.131,00
424	SMPN 8 Aluh-Aluh	577,00	44.079.510,00	44.080.000,00	87,00
425	SMPN 6 Martapura	124,00	527.160.000,00	527.160.000,00	124,00
426	SMPN 4 Sungai Tabuk	-	309.720.000,00	309.720.000,00	-
427	TK NEGERI PEMBINA SUNGAI PINANG	-	19.530.000,00	19.530.000,00	-
428	TK NEGERI PEMBINA	-	68.040.000,00	68.040.000,00	-
429	TK NEGERI PERTIWI PODOK	-	26.460.000,00	26.460.000,00	-
430	TK NEGERI TUNAS PRATAMA	-	38.430.000,00	38.430.000,00	-
431	TK NEGERI SEKUMPUL MARTAPURA	-	52.920.000,00	52.920.000,00	-
432	TK NEGERI JAWA MARTAPURA	-	31.500.000,00	31.500.000,00	-
433	PAUD NEGERI PEMBINA MATARAMAN	-	27.720.000,00	27.720.000,00	-
434	TK NEGERI TANJUNG REMA DARAT MARTAPURA	-	59.220.000,00	59.220.000,00	-
435	TK NEGERI INTAN LESTARI	-	58.590.000,00	58.590.000,00	-
436	TK NEGERI PEMBINA KERTAK HANYAR	-	69.930.000,00	69.930.000,00	-
437	TK NEGERI PERTIWI	-	33.390.000,00	33.390.000,00	-
438	TK NEGERI PEMBINA PENGARON	-	33.390.000,00	33.390.000,00	-
439	TK NEGERI PEMBINA ARANIO	-	22.050.000,00	22.050.000,00	-
440	TK NEGERI PEMBINA TELAGA BAUNTUNG	-	15.120.000,00	15.120.000,00	-
441	TK NEGERI PEMBINA SIMPANG EMPAT	-	25.200.000,00	25.200.000,00	-
442	TK NEGERI PEMBINA CINTAPURI DARUSSALAM	-	8.820.000,00	8.820.000,00	-
443	TK NEGERI PEMBINA ALUH-ALUH	-	25.200.000,00	25.200.000,00	-
444	TK NEGERI PEMBINA BERUNTUNG BARU	-	10.710.000,00	10.710.000,00	-
445	TK NEGERI PEMBINA MARTAPURA TIMUR	-	27.720.000,00	27.720.000,00	-
446	TK PERMATA 2	-	16.380.000,00	16.380.000,00	-
447	SPNF SKB BANJAR	-	445.640.000,00	445.640.000,00	-
JUMLAH		76.640.714,00	53.903.923.455,00	53.972.377.554,00	8.186.615,00

**Rincian Saldo Akhir Aset Tetap - Tanah per-SKPD
Tahun Anggaran 2023**

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Saldo Akhir
1	Dinas Pendidikan	105.684.740.532,14
2	Dinas Kesehatan	18.936.818.465,92
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	6.439.702.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	123.050.795.338,26
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	100.146.679.537,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	1.733.951.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.499.678.730,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.998.795.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.402.698.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	11.467.392.900,00
12	UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah _ BLUD Intan Hijau	0,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	362.376.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.381.975.000,00
15	Dinas Perhubungan	7.670.125.320,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	1.160.217.000,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	4.805.136.710,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.507.930.000,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	17.461.039.033,18
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.600.000.000,00
21	Dinas Pertanian	4.070.564.215,00
22	Sekretariat Daerah	65.096.444.000,00
23	Sekretariat DPRD	0,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	114.635.597.860,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.602.270.000,00
27	Inspektorat Daerah	4.574.416.000,00
28	Kecamatan Sambung Makmur	195.450.000,00
29	Kecamatan Pengaron	623.406.000,00
30	Kecamatan Tatah Makmur	665.350.000,00
31	Kecamatan Martapura Timur	3.400.259.404,68
32	Kecamatan Paramasan	15.909.300,00
33	Kecamatan Kertak Hanyar	3.559.338.543,14
34	Kecamatan Aluh-Aluh	77.576.000,00
35	Kecamatan Martapura	2.822.419.000,00
36	Kecamatan Martapura Barat	75.013.600,00
37	Kecamatan Simpang Empat	197.164.560,70
38	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	18.200.000,00
39	Kecamatan Beruntung Baru	57.473.000,00
40	Kecamatan Karang Intan	353.700.000,00
41	Kecamatan Aranio	0,00
42	Kecamatan Mataraman	2.064.486.780,16
43	Kecamatan Sungai Tabuk	512.185.500,00
44	Kecamatan Sungai Pinang	71.658.000,00
45	Kecamatan Gambut	13.983.610.000,00
46	Kecamatan Telaga Bauntung	0,00
47	Kecamatan Astambul	390.830.669,29
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00
TOTAL		638.373.372.999,47

**Rincian Saldo Akhir Aset Tetap - Peralatan dan Mesin per-SKPD
Tahun Anggaran 2023**

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Saldo Akhir
1	Dinas Pendidikan	157.351.339.645,95
2	Dinas Kesehatan	95.412.725.273,52
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	202.754.168.240,17
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	24.075.604.242,90
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	59.903.665.314,44
6	Satuan Polisi Pamong Praja	6.074.937.104,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.353.255.498,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	7.320.298.760,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.668.040.702,39
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.866.683.233,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	14.224.716.130,43
12	UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah _ BLUD Intan Hijau	2.429.512.750,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8.008.226.106,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.483.546.305,00
15	Dinas Perhubungan	19.686.270.326,23
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	14.977.351.815,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	36.030.757.869,50
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.081.613.573,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	8.409.891.675,93
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4.620.114.888,75
21	Dinas Pertanian	38.245.349.508,00
22	Sekretariat Daerah	46.233.519.553,75
23	Sekretariat DPRD	15.893.053.646,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	8.340.655.566,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	16.933.597.888,65
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.224.248.954,22
27	Inspektorat Daerah	3.609.782.103,00
28	Kecamatan Sambung Makmur	1.070.446.311,00
29	Kecamatan Pengaron	1.172.965.654,00
30	Kecamatan Tatah Makmur	1.032.610.020,00
31	Kecamatan Martapura Timur	927.436.879,00
32	Kecamatan Paramasan	1.074.421.280,00
33	Kecamatan Kertak Hanyar	1.989.834.204,18
34	Kecamatan Aluh-Aluh	1.220.608.958,00
35	Kecamatan Martapura	3.777.367.378,00
36	Kecamatan Martapura Barat	1.140.279.544,00
37	Kecamatan Simpang Empat	1.157.288.024,00
38	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	1.192.422.061,00
39	Kecamatan Beruntung Baru	1.049.497.986,00
40	Kecamatan Karang Intan	1.496.123.360,00
41	Kecamatan Aranio	1.257.771.530,00
42	Kecamatan Mataraman	1.091.228.410,00
43	Kecamatan Sungai Tabuk	1.619.648.056,00
44	Kecamatan Sungai Pinang	1.088.993.084,00
45	Kecamatan Gambut	1.611.456.530,00
46	Kecamatan Telaga Bauntung	835.678.676,00
47	Kecamatan Astambul	1.314.929.622,00
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.182.853.830,00
TOTAL		872.516.788.071,01

**Rincian Saldo Akhir Aset Tetap - Gedung dan Bangunan per-SKPD
Tahun Anggaran 2023**

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Saldo Akhir
1	Dinas Pendidikan	503.426.058.972,98
2	Dinas Kesehatan	117.466.766.844,25
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	88.540.367.162,06
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	137.102.940.585,62
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	53.305.854.198,25
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2.916.212.937,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.930.415.863,33
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	1.868.213.311,32
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.209.967.569,58
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1.231.988.905,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	18.117.866.030,00
12	UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah _ BLUD Intan Hijau	1.126.466.500,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.640.693.508,33
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.378.484.307,41
15	Dinas Perhubungan	18.272.599.100,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	2.298.028.611,30
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	43.392.919.528,67
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.704.436.559,94
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	20.213.983.540,90
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5.473.280.231,12
21	Dinas Pertanian	26.547.047.478,62
22	Sekretariat Daerah	43.767.083.105,67
23	Sekretariat DPRD	11.534.295.925,76
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	2.689.979.555,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	7.829.345.632,67
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.833.722.799,80
27	Inspektorat Daerah	2.163.267.783,96
28	Kecamatan Sambung Makmur	1.892.761.257,52
29	Kecamatan Pengaron	2.639.469.648,03
30	Kecamatan Tatah Makmur	1.784.901.657,52
31	Kecamatan Martapura Timur	2.770.755.365,03
32	Kecamatan Paramasan	2.213.708.050,00
33	Kecamatan Kertak Hanyar	5.749.651.895,35
34	Kecamatan Aluh-Aluh	1.025.903.333,00
35	Kecamatan Martapura	7.037.573.922,51
36	Kecamatan Martapura Barat	1.970.653.350,03
37	Kecamatan Simpang Empat	1.787.938.756,33
38	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	2.015.415.879,71
39	Kecamatan Beruntung Baru	1.233.239.940,45
40	Kecamatan Karang Intan	2.125.058.463,28
41	Kecamatan Aranio	2.046.501.424,69
42	Kecamatan Mataraman	2.911.562.114,03
43	Kecamatan Sungai Tabuk	3.118.550.309,55
44	Kecamatan Sungai Pinang	1.567.592.180,07
45	Kecamatan Gambut	4.957.188.493,48
46	Kecamatan Telaga Bauntung	1.632.372.939,23
47	Kecamatan Astambul	770.871.000,00
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	100.578.796,00
TOTAL		1.199.334.535.324,35

**Rincian Saldo Akhir Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan per-SKPD
Tahun Anggaran 2023**

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Saldo Akhir
1	Dinas Pendidikan	5.981.447.715,14
2	Dinas Kesehatan	7.720.871.254,82
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	6.751.586.487,10
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	1.811.033.250.169,55
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	100.376.780.009,51
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.986.449.530,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	27.998.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.683.945.478,30
12	UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah _ BLUD Intan Hijau	676.157.000,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00
15	Dinas Perhubungan	1.776.491.500,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	15.000.000,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	34.944.000,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.745.357.698,00
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00
21	Dinas Pertanian	4.885.406.854,00
22	Sekretariat Daerah	347.779.500,00
23	Sekretariat DPRD	0,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	0,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	0,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00
27	Inspektorat Daerah	0,00
28	Kecamatan Sambung Makmur	0,00
29	Kecamatan Pengaron	17.650.000,00
30	Kecamatan Tatah Makmur	0,00
31	Kecamatan Martapura Timur	0,00
32	Kecamatan Paramasan	167.472.300,00
33	Kecamatan Kertak Hanyar	2.347.899.134,00
34	Kecamatan Aluh-Aluh	0,00
35	Kecamatan Martapura	6.358.288.458,00
36	Kecamatan Martapura Barat	0,00
37	Kecamatan Simpang Empat	0,00
38	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	0,00
39	Kecamatan Beruntung Baru	0,00
40	Kecamatan Karang Intan	0,00
41	Kecamatan Aranio	9.932.205,00
42	Kecamatan Mataraman	0,00
43	Kecamatan Sungai Tabuk	725.450.000,00
44	Kecamatan Sungai Pinang	0,00
45	Kecamatan Gambut	2.526.793.000,00
46	Kecamatan Telaga Bauntung	0,00
47	Kecamatan Astambul	0,00
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	14.993.000,00
TOTAL		1.979.211.943.293,42

**Rincian Saldo Akhir Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya per-SKPD
Tahun Anggaran 2023**

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Saldo Akhir
1	Dinas Pendidikan	69.344.007.003,56
2	Dinas Kesehatan	79.850.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	12.664.725,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	6.300.827.960,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	2.085.200.981,87
6	Satuan Polisi Pamong Praja	247.880.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.950.000,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	77.263.920,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	51.154.700,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.496.900,00
12	UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah _ BLUD Intan Hijau	34.960.000,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	15.963.800,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.590.000,00
15	Dinas Perhubungan	270.698.800,00
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	0,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	172.900.000,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	105.990.000,00
19	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	296.935.875,00
20	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.692.550.990,00
21	Dinas Pertanian	170.230.600,00
22	Sekretariat Daerah	343.568.000,00
23	Sekretariat DPRD	315.461.632,44
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	44.503.350,00
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	720.284.200,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	82.157.775,00
27	Inspektorat Daerah	10.600.000,00
28	Kecamatan Sambung Makmur	0,00
29	Kecamatan Pengaron	5.000.000,00
30	Kecamatan Tatah Makmur	0,00
31	Kecamatan Martapura Timur	0,00
32	Kecamatan Paramasan	0,00
33	Kecamatan Kertak Hanyar	22.747.000,00
34	Kecamatan Aluh-Aluh	0,00
35	Kecamatan Martapura	101.069.500,00
36	Kecamatan Martapura Barat	0,00
37	Kecamatan Simpang Empat	0,00
38	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	0,00
39	Kecamatan Beruntung Baru	0,00
40	Kecamatan Karang Intan	0,00
41	Kecamatan Aranio	0,00
42	Kecamatan Mataraman	66.369.750,00
43	Kecamatan Sungai Tabuk	22.736.100,00
44	Kecamatan Sungai Pinang	0,00
45	Kecamatan Gambut	0,00
46	Kecamatan Telaga Bauntung	0,00
47	Kecamatan Astambul	0,00
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	870.000,00
TOTAL		82.704.483.562,87

**Rincian Utang Belanja
Tahun Anggaran 2023**

(Dalam Rupiah)

No.	SKPD	Jasa Tenaga Kesehatan	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Tagihan Telepon	Tagihan Air	Tagihan Listrik	Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Paket/Pengiriman	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Total
1	Dinas Pendidikan	-	-	-	2.848.000,00	15.547.618,00	-	-	140.840.700,00	159.236.318,00
2	Dinas Kesehatan	-	-	44.357,00	4.121.500,00	14.530.455,00	-	-	-	18.696.312,00
3	Instalasi Farmasi Kabupaten	-	-	-	291.500,00	9.854.507,00	-	-	-	10.146.007,00
4	Puskesmas Karang Intan 2	18.918.534,00	-	-	-	2.032.756,00	804.200,00	-	-	21.755.490,00
5	Puskesmas Kertak Hanyar	105.476.810,00	-	-	514.048,00	2.826.229,00	1.636.590,00	-	-	110.453.677,00
6	Puskesmas Mataraman	-	5.365.319,00	-	197.100,00	1.339.617,00	463.150,00	-	-	7.365.186,00
7	Puskesmas Sungai Tabuk 2	-	-	-	-	1.717.430,00	-	-	-	1.717.430,00
8	Puskesmas Pengaron	38.379.632,53	-	-	1.130.200,00	2.279.662,00	-	-	-	41.789.494,53
9	Laboratorium Kesehatan Daerah	-	-	30.250,00	1.062.000,00	8.376.137,00	-	-	-	9.468.387,00
10	Puskesmas Beruntung Baru	-	-	-	32.500,00	792.354,00	-	-	-	824.854,00
11	Puskesmas Martapura Timur	-	-	-	548.200,00	1.231.784,00	641.260,00	-	-	2.421.244,00
12	Puskesmas Karang Intan 1	-	-	-	122.500,00	1.603.894,00	-	-	-	1.726.394,00
13	Puskesmas Martapura Barat	-	-	-	535.500,00	3.054.212,00	-	-	-	3.589.712,00
14	Puskesmas Martapura 1	98.127.702,00	-	-	22.000,00	4.634.321,00	-	-	-	102.784.023,00
15	Puskesmas Sambung Makmur	-	-	-	446.900,00	1.875.840,00	806.900,00	-	-	3.129.640,00
16	Puskesmas Aranio	-	-	-	-	1.505.039,00	-	-	-	1.505.039,00
17	Puskesmas Tatah Makmur	-	-	-	216.600,00	2.640.700,00	-	-	-	2.857.300,00
18	Puskesmas Sungai Tabuk 1	-	-	-	992.030,00	2.582.782,00	825.850,00	-	-	4.400.662,00
19	Puskesmas Sungai Pinang	9.431.732,00	-	-	88.100,00	212.390,00	-	-	-	9.732.222,00
20	Puskesmas Aluh Aluh	716.429,00	-	-	12.500,00	-	-	-	-	728.929,00
21	Puskesmas Cintapuri Darussalam	-	-	-	-	1.898.400,00	-	-	-	1.898.400,00
22	Puskesmas Telaga Bauntung	-	-	-	-	928.900,00	-	-	-	928.900,00
23	Puskesmas Gambut	-	-	-	735.400,00	4.312.801,00	982.800,00	-	-	6.031.001,00
24	Puskesmas Simpang Empat 1	-	-	-	125.000,00	1.292.636,00	376.850,00	-	-	1.794.486,00
25	Puskesmas Paramasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Puskesmas Simpang Empat 2	17.956.961,00	-	-	242.198,00	1.596.410,00	541.158,00	-	-	20.336.727,00
27	Puskesmas Martapura 2	-	-	-	35.600,00	613.500,00	-	-	-	649.100,00
28	Puskesmas Astambul	-	-	-	393.000,00	3.702.600,00	641.250,00	-	-	4.736.850,00
29	Puskesmas Sungai Tabuk 3	6.206.274,00	-	-	375.000,00	-	-	-	-	6.581.274,00
30	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	SKPD	Jasa Tenaga Kesehatan	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Tagihan Telepon	Tagihan Air	Tagihan Listrik	Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Paket/Pengiriman	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Total
31	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	-	-	-	2.084.000,00	-	-	-	-	2.084.000,00
32	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	-	-	-	490.600,00	9.845.981,00	-	-	-	10.336.581,00
33	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	2.061.000,00	-	-	-	-	2.061.000,00
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	113.000,00	-	8.241.725,00	-	-	-	8.354.725,00
35	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	-	-	-	1.244.500,00	202.750,00	-	-	-	1.447.250,00
36	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	1.377.500,00	4.882.113,00	-	-	-	6.259.613,00
37	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	-	-	68.391,00	-	3.707.576,00	-	-	-	3.775.967,00
38	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	-	-	-	521.500,00	11.106.442,00	-	-	-	11.627.942,00
39	UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah _ BLUD Intan Hijau	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	487.300,00	669.000,00	7.852.682,00	-	-	-	9.008.982,00
41	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	-	-	-	1.051.000,00	6.498.400,00	-	-	-	7.549.400,00
42	Dinas Perhubungan	-	-	-	791.000,00	7.146.965,00	-	-	-	7.937.965,00
43	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian	-	-	-	676.000,00	15.168.910,00	-	175.000,00	-	16.019.910,00
44	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	-	-	1.072.050,00	2.341.500,00	16.779.005,00	4.382.189,00	-	-	24.574.744,00
45	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	201.975,00	495.000,00	8.740.950,00	1.178.550,00	-	-	10.616.475,00
46	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	-	352.650,00	5.116.891,00	10.066.814,00	-	-	-	15.536.355,00
47	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	-	-	236.600,00	631.000,00	6.212.783,00	1.136.900,00	-	-	8.217.283,00
48	Dinas Pertanian	-	-	-	1.262.500,00	10.258.959,00	686.741,00	-	-	12.208.200,00
49	Sekretariat Daerah	-	-	24.981.026,00	11.176.962,00	69.006.004,00	-	-	-	105.163.992,00
50	Sekretariat DPRD	-	-	1.497.845,00	1.959.000,00	23.619.222,00	-	-	-	27.076.067,00
51	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan	-	-	68.714,00	2.177.500,00	11.225.198,00	-	-	-	13.471.412,00
52	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	-	-	1.038.130,00	3.239.500,00	26.582.139,00	-	-	-	30.859.769,00
53	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-	-	-	66.000,00	21.365.645,00	-	-	-	21.431.645,00
54	Inspektorat Daerah	-	-	818.350,00	625.000,00	5.716.373,00	-	-	-	7.159.723,00
55	Kecamatan Sambung Makmur	-	-	-	291.500,00	-	-	-	-	291.500,00
56	Kecamatan Pengaron	-	-	-	365.000,00	-	-	-	-	365.000,00
57	Kecamatan Tatah Makmur	-	-	-	211.000,00	665.536,00	-	-	-	876.536,00
58	Kecamatan Martapura Timur	-	-	-	384.000,00	1.333.168,00	-	-	-	1.717.168,00
59	Kecamatan Paramasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Kecamatan Kertak Hanyar	-	-	-	354.500,00	1.117.600,00	-	-	-	1.472.100,00
61	Kelurahan Kertak Hanyar I	-	-	115.000,00	18.000,00	489.178,00	-	-	-	622.178,00

No.	SKPD	Jasa Tenaga Kesehatan	Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Tagihan Telepon	Tagihan Air	Tagihan Listrik	Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Paket/Pengiriman	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Total
62	Kelurahan Mandar Sari	-	-	-	33.000,00	281.510,00	-	-	-	314.510,00
63	Kelurahan Manarap Lama	-	-	-	154.500,00	605.234,00	-	-	-	759.734,00
64	Kecamatan Aluh-Aluh	-	-	-	-	989.519,00	-	-	-	989.519,00
65	Kecamatan Martapura	-	-	-	522.000,00	2.169.094,00	-	-	-	2.691.094,00
66	Kelurahan Sekumpul	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Kelurahan Sungai Paring	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	Kelurahan Tanjung Rema Darat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	Kelurahan Jawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Kelurahan Murung Keraton	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Kelurahan Pasayangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Kelurahan Keraton	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Kecamatan Martapura Barat	-	-	-	384.000,00	699.816,00	-	-	-	1.083.816,00
74	Kecamatan Simpang Empat	-	-	-	618.500,00	409.392,00	-	-	-	1.027.892,00
75	Kecamatan Cinta Puri Darussalam	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	Kecamatan Beruntung Baru	-	-	-	34.000,00	-	-	-	-	34.000,00
77	Kecamatan Karang Intan	-	-	-	729.000,00	854.319,00	-	-	-	1.583.319,00
78	Kecamatan Aranio	-	-	-	-	428.152,00	-	-	-	428.152,00
79	Kecamatan Mataraman	-	-	-	-	881.679,00	-	-	-	881.679,00
80	Kecamatan Sungai Tabuk	-	-	-	807.000,00	277.926,00	-	-	-	1.084.926,00
81	Kelurahan Sungai Lulut	-	-	-	130.764,00	853.207,00	-	-	-	983.971,00
82	Kecamatan Sungai Pinang	-	-	-	416.000,00	505.866,00	-	-	-	921.866,00
83	Kecamatan Gambut	-	-	-	211.500,00	452.919,00	-	-	-	664.419,00
84	Kelurahan Gambut Barat	-	-	457.600,00	107.500,00	486.842,00	-	-	-	1.051.942,00
85	Kelurahan Gambut	-	-	468.700,00	59.500,00	359.678,00	-	-	-	887.878,00
86	Kecamatan Telaga Bauntung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Kecamatan Astambul	-	-	-	118.000,00	56.289,00	-	-	-	174.289,00
88	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		295.214.074,53	5.365.319,00	32.051.938,00	61.093.593,00	391.126.534,00	15.104.388,00	175.000,00	140.840.700,00	940.971.546,53